

BAPPELITBANGDA

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)

2025



BANDUNG BARAT





BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah, rencana kerja pemerintah daerah merupakan upaya meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas diperlukan rencana kerja Pemerintah Daerah untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan panduan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah diperlukan pengaturan mengenai rencana kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025.

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran perencanaan pembangunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai pedoman:
 - a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2025 terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah

pada tanggal 9 Juli 2024

PJ. BUPATI BANDUNG BARAT,



MADE ZAKIR

Ditetapkan di Ngamprah

Pada tanggal 9 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,



R. ERISKA HENDRAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 14

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD Kabupaten Bandung Barat 2025 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026. Selanjutnya, dokumen RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini, kami ucapkan terima kasih.

Bandung Barat, 9 Juli 2024
Pi. BUPATI BANDUNG BARAT,
ADE ZAKIR



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-9
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-11
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-12
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	II-14
2.1.1.4 Aspek Demografi.....	II-17
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-20
2.1.2.1 Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB.....	II-20
2.1.2.2 Inflasi.....	II-26
2.1.2.3 Kemiskinan.....	II-26
2.1.2.4 Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio).....	II-31
2.1.2.5 Ketenagakerjaan.....	II-33
2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia.....	II-35
2.1.2.7 Pembangunan dan Pemberdayaan Gender.....	II-48
2.1.2.8 Seni Budaya dan Olahraga.....	II-49
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-52
2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar.....	II-53
2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar.....	II-71
2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan.....	II-90
2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah.....	II-96
2.1.3.5 Unsur Penunjang dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah.....	II-97
2.1.3.6 Unsur Pemerintahan Umum.....	II-98
2.1.4 Aspek Daya Saing.....	II-99
2.1.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II-100

	2.1.4.2	Daya Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-103
	2.1.4.3	Daya Saing Iklim Investasi.....	II-106
	2.1.4.4	Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-108
2.2		Evaluasi Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Pelaksanaan Program RKPD.....	II-112
2.2.1		Capaian Kinerja Makro Pembangunan.....	II-113
2.2.2		Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	II-115
2.2.3		Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2023.....	II-119
	2.2.3.1	Urusan Pendidikan.....	II-121
	2.2.3.2	Urusan Kesehatan.....	II-122
	2.2.3.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-123
	2.2.3.4	Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.....	II-126
	2.2.3.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II-127
	2.2.3.6	Urusan Sosial.....	II-130
	2.2.3.7	Urusan Tenaga Kerja.....	II-131
	2.2.3.8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak....	II-133
	2.2.3.9	Urusan Pangan.....	II-134
	2.2.3.10	Urusan Pertanahan.....	II-136
	2.2.3.11	Urusan Lingkungan Hidup.....	II-137
	2.2.3.12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil....	II-140
	2.2.3.13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-141
	2.2.3.14	Urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana..	II-143
	2.2.3.15	Urusan Perhubungan.....	II-145
	2.2.3.16	Urusan Komunikasi dan Informatika.....	II-146
	2.2.3.17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.....	II-147
	2.2.3.18	Urusan Penanaman Modal.....	II-149
	2.2.3.19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	II-150
	2.2.3.20	Urusan Statistik.....	II-152
	2.2.3.21	Urusan Persandian.....	II-153
	2.2.3.22	Urusan Kebudayaan.....	II-154
	2.2.3.23	Urusan Perpustakaan.....	II-155
	2.2.3.24	Urusan Kearsipan.....	II-156
	2.2.3.25	Urusan Kelautan dan Perikanan.....	II-157
	2.2.3.26	Urusan Pariwisata.....	II-158
	2.2.3.27	Urusan Pertanian.....	II-160
	2.2.3.28	Urusan Perdagangan.....	II-163
	2.2.3.29	Urusan Perindustrian.....	II-165
	2.2.3.30	Urusan Transmigrasi.....	II-166
	2.2.3.31	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	II-167
	2.2.3.32	Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-169

2.2.3.33	UrusanPengawasan Urusan Pemerintahan.....	II-176
2.2.3.34	Unsur Pemerintahan Umum.....	II-177
2.2.4	Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja.....	II-179
2.2.5	Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Develpoment Goals (SDGs).....	II-186
2.2.6	Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	II-194
2.2.6.1	SPM Bidang Pendidikan.....	II-198
2.2.6.2	SPM Bidang Kesehatan.....	II-200
2.2.6.3	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-204
2.2.6.4	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman..	II-206
2.2.6.5	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II-208
2.2.6.6	SPM Bidang Sosial.....	II-211
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-214
2.3.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-214
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah..	II-220
2.3.2.1	Permasalahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	II-220
2.3.2.2	Permasalahan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	II-224
2.3.2.3	Permasalahan Urusan Pilihan.....	II-231
2.3.2.4	Permasalahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	II-234
2.3.2.5	Permasalahan Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	II-235
2.3.2.6	Permasalahan Fungsi Lainnya.....	II-235
2.4	Inovasi Pembangunan Daerah.....	II-236
2.4.1	Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah.....	II-236
2.4.2	Inovasi Pelayanan Publik.....	II-240
2.4.3	Inovasi Daerah Lainnya.....	II-259

BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1	Kondisi Ekonomi Kabupaten Bandung Barat.....	III-2
3.1.1.1	Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung Barat.....	III-3
3.1.1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat.....	III-7
3.1.1.3	Inflasi.....	III-11
3.1.1.4	Ketenagakerjaan.....	III-15
3.1.1.5	Tingkat Kemiskinan.....	III-18
3.1.1.6	Gini Rasio.....	III-20
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	III-21
3.1.2.1	Tantangan Ekonomi Nasional.....	III-21

3.1.2.2	Tantangan dan Prospek Ekonomi Jawa Barat.....	III-22
3.1.2.3	Tantangan dan Prospek Ekonomi Kabupaten Bandung Barat.....	III-28
3.1.3	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi.....	III-32
3.1.3.1	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional.....	III-32
3.1.3.2	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat.....	III-33
3.1.3.3	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat.....	III-35
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-36
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan.....	III-37
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-40
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-42
3.3	Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah.....	III-43

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV-1

4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-2
4.1.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	IV-2
4.1.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.....	IV-9
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat.....	IV-11
4.1.4	Keselarasan antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat dan Nasional Tahun 2025.....	IV-14
4.1.5	Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat dengan Provinsi Jawa Barat.....	IV-16
4.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2025.....	IV-24
4.2.1	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	IV-24
4.2.2	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat.....	IV-31
4.2.3	Prioritas dan Program Pembangunan Kabupaten Bandung Barat.....	IV-32
4.2.4	Keterkaitan antara Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Kabupaten Bandung Barat.....	IV-35
4.2.5	Keterkaitan antara Program Prioritas Provinsi Jawa Barat dan Program Prioritas Kabupaten Bandung Barat.....	IV-45
4.2.6	Keterkaitan Program Prioritas Tahun 2025 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs).....	IV-57
4.2.7	Pelayanan Standar Pelayanan Minimal.....	IV-60
4.3	Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD.....	IV-61

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V-1

5.1	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.....	V-1
5.2	Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.....	V-11
5.3	Program Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.....	V-12

5.4	Rencana Program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	V-12

BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1

BAB VII	PENUTUP.....	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Bandung Barat.....	II-2
Tabel 2.2	Kondisi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Menurut Ketinggian.....	II-5
Tabel 2.3	Kondisi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Menurut Jenis Tanah.....	II-6
Tabel 2.4	Kondisi Geologi Kandungan Pengendapan Batuan.....	II-6
Tabel 2.5	Potensi Sumber Mata Air di Kabupaten Bandung Barat.....	II-9
Tabel 2.6	Kondisi Curah Hujan Wilayah Kabupaten Bandung Barat.....	II-10
Tabel 2.7	Guna Lahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.....	II-12
Tabel 2.8	Kerangka Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-13
Tabel 2.9	Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran dan Banjir.....	II-15
Tabel 2.10	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana.....	II-16
Tabel 2.11	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023.....	II-18
Tabel 2.12	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 Kabupaten Bandung Barat.....	II-20
Tabel 2.13	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 (persen)..	II-21
Tabel 2.14	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 Kabupaten Bandung Barat.....	II-22
Tabel 2.15	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 (persen).	II-23
Tabel 2.16	Target dan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2022.....	II-24
Tabel 2.17	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2021-2023 (persen).....	II-25
Tabel 2.18	Inflasi <i>Y to Y</i> Kota di Jawa Barat Tahun 2023.....	II-26
Tabel 2.19	Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023.....	II-27
Tabel 2.20	Target dan Capaian Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2022.....	II-28
Tabel 2.21	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Persen).....	II-28
Tabel 2.22	Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023...	II-30
Tabel 2.23	Data Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Data P3KE di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023.....	II-31

Tabel 2.24	Target dan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 – 2023.....	II-34
Tabel 2.25	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Jawa Barat 2019-2023 (Persen).....	II-35
Tabel 2.26	Tabel 2.26 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-36
Tabel 2.27	Target dan Capaian IPM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2022.....	II-37
Tabel 2.28	Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2023.....	II-38
Tabel 2.29	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023 (Tahun).....	II-43
Tabel 2.30	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2023.....	II-44
Tabel 2.31	Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Tahun).....	II-46
Tabel 2.32	Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2029-2023 (Rp.000/kapita/tahun).....	II-48
Tabel 2.33	Potensi Keragaman Budaya Kabupaten Bandung Barat 2019 – 2023.....	II-50
Tabel 2.34	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kabupaten Bandung Barat 2021 – 2023.....	II-51
Tabel 2.35	Indikator Kinerja Keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat 2019 – 2023.....	II-51
Tabel 2.36	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-53
Tabel 2.37	Kondisi Ruang Kelas SD di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-55
Tabel 2.38	Kondisi Ruang Kelas SMP di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023.....	II-55
Tabel 2.39	Data Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-56
Tabel 2.40	Kondisi Status Gizi Balita Berdasarkan Indikator BB/U Tahun 2019 – 2023.....	II-57
Tabel 2.41	Prevalensi Stunting berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dan berdasarkan Bulan Penimbangan Balita (e-PPGBM) di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-57
Tabel 2.42	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan dan Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023.....	II-58
Tabel 2.43	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat 2019 – 2023.....	II-58
Tabel 2.44	Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-59
Tabel 2.45	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Bandung	

	Barat Tahun 2019 - 2023.....	II-59
Tabel 2.46	Panjang dan Ruas Jalan di Kabupaten Bandung Barat.....	II-60
Tabel 2.47	Capaian Indikator Kinerja Urusan PUTR di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-64
Tabel 2.48	Jumlah Kawasan Kumuh di Kab. Bandung Barat 2019-2023.....	II-66
Tabel 2.49	Realisasi Rehab/Perbaikan Rutilahu Tahun 2019 – 2023.....	II-67
Tabel 2.50	Tabel Rumah Tangga menurut Kecamatan dan Sumber Air Minum.....	II-67
Tabel 2.51	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-68
Tabel 2.52	Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-69
Tabel 2.53	Data Kondisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bandung Barat tahun 2023.....	II-70
Tabel 2.54	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-71
Tabel 2.55	Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-72
Tabel 2.56	Capaian IDG dan IPG di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023.....	II-73
Tabel 2.57	Data Kejadian Kekerasan terhadap Anak, Perempuan dan KDRT di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023.....	II-73
Tabel 2.58	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023...	II-74
Tabel 2.59	Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Pangan Tahun 2019 2023.....	II-75
Tabel 2.60	Desa Dan Penduduk Sangat Rawan Pangan, Rawan Pangan Dan Tahan Pangan di kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-75
Tabel 2.61	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-76
Tabel 2.62	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-76
Tabel 2.63	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-77
Tabel 2.64	Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2023.....	II-78
Tabel 2.65	Capaian Indikator Kinerja Urusan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-79
Tabel 2.66	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019– 2023.....	II-80
Tabel 2.67	Fertilitas dan Mortalitas Kabupaten Bandung Barat Hasil Long Form SP Tahun 2020.....	II-81

Tabel 2.68	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023...	II-81
Tabel 2.69	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-82
Tabel 2.70	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-83
Tabel 2.71	Jumlah dan Kondisi Koperasi Tahun 2019 – 2023.....	II-84
Tabel 2.72	Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-84
Tabel 2.73	Jumlah dan Kondisi Koperasi Tahun 2019 – 2023.....	II-85
Tabel 2.74	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-85
Tabel 2.75	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-86
Tabel 2.76	Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-87
Tabel 2.77	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-88
Tabel 2.78	Indikator Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-89
Tabel 2.79	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-89
Tabel 2.80	Data Produksi Ikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023.....	II-90
Tabel 2.81	Produksi Komoditas Perikanan Unggulan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023.....	II-90
Tabel 2.82	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-91
Tabel 2.83	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-91
Tabel 2.84	Realisasi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023.....	II-92
Tabel 2.85	Capaian Indikator Kinerja Sub Urusan Pertanian Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-93
Tabel 2.86	Realisasi Komoditas Peternakan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-93
Tabel 2.87	Capaian Indikator Kinerja Sub Urusan Peternakan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-93
Tabel 2.88	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-94
Tabel 2.89	Capaian Indikator Kinerja Urusan Industri di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-95
Tabel 2.90	Capaian Indikator Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintah	

	Daerah Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-96
Tabel 2.91	Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-97
Tabel 2.92	Capaian Capaian Indikator Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-99
Tabel 2.93	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-101
Tabel 2.94	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-102
Tabel 2.95	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-102
Tabel 2.96	Data Kondisi Jalan di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-103
Tabel 2.97	Data Jumlah Angkutan Barang di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-104
Tabel 2.98	Aksebilitas Kendaraan Umum di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-104
Tabel 2.99	Data Infrastruktur Fasilitas Kegiatan Ekonomi di Kab. Bandung Barat Tahun 2019-2023.....	II-106
Tabel 2.100	Persentase Jumlah Izin yang Terbit Sesuai Sop di Kab. Bandung Barat Tahun 2023.....	II-107
Tabel 2.101	Rasio Ketergantungan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023..	II-108
Tabel 2.102	Kondisi ASN Kabupaten Bandung Barat Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019 – 2023.....	II-110
Tabel 2.103	Target dan Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023.....	II-113
Tabel 2.104	Tujuan, Sasaran dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023.....	II-116
Tabel 2.105	Jumlah Program yang dilaksanakan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023.....	II-119
Tabel 2.106	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	II-120
Tabel 2.107	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pendidikan..	II-121
Tabel 2.108	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Pendidikan Tahun 2023.....	II-121
Tabel 2.109	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Kesehatan...	II-122
Tabel 2.110	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan Tahun 2023.....	II-123
Tabel 2.111	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-124
Tabel 2.112	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023.....	II-125
Tabel 2.113	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....	II-126

Tabel 2.114	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023.....	II-127
Tabel 2.115	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II-128
Tabel 2.116	Capaian Indikator Kinerja Program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023.....	II-128
Tabel 2.117	Capaian Indikator Kinerja Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023.....	II-129
Tabel 2.118	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023.....	II-129
Tabel 2.119	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Sosial.....	II-130
Tabel 2.120	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Sosial Tahun 2023.....	II-130
Tabel 2.121	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Tenaga Kerja.....	II-131
Tabel 2.122	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023...	II-132
Tabel 2.123	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-133
Tabel 2.124	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2023.....	II-134
Tabel 2.125	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pangan.....	II-135
Tabel 2.126	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023.....	II-135
Tabel 2.127	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pertanian..	II-136
Tabel 2.128	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan Tahun 2023.....	II-137
Tabel 2.129	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Lingkungan Hidup.....	II-138
Tabel 2.130	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023.....	II-139
Tabel 2.131	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-140
Tabel 2.132	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	II-141
Tabel 2.133	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-142
Tabel 2.134	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023.....	II-142
Tabel 2.135	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-143
Tabel 2.136	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Pengendalian Penduduk	

	Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023.....	II-144
Tabel 2.137	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Perhubungan.....	II-145
Tabel 2.138	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan Tahun 2023...	II-145
Tabel 2.139	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Komunikasi dan Informatika.....	II-146
Tabel 2.140	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023.....	II-147
Tabel 2.141	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-147
Tabel 2.142	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023.....	II-148
Tabel 2.143	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Penanaman Modal.....	II-149
Tabel 2.144	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023.....	II-150
Tabel 2.145	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	II-151
Tabel 2.146	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023.....	II-151
Tabel 2.147	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Statistik.....	II-152
Tabel 2.148	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Urusan Statistik Tahun 2023.....	II-152
Tabel 2.149	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Persandian.	II-153
Tabel 2.150	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Urusan Persandian Tahun 2023.....	II-153
Tabel 2.151	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Kebudayaan.....	II-154
Tabel 2.152	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023.....	II-154
Tabel 2.153	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Perpustakaan.....	II-155
Tabel 2.154	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023.....	II-156
Tabel 2.155	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Kearsipan.....	II-156
Tabel 2.156	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023.....	II-157
Tabel 2.157	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Kelautan dan Perikanan.....	II-157

Tabel 2.158	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023.....	II-158
Tabel 2.159	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pariwisata...	II-159
Tabel 2.160	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata urusan Pariwisata Tahun 2023.....	II-159
Tabel 2.161	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pertanian....	II-160
Tabel 2.162	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023.....	II-161
Tabel 2.163	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pertanian....	II-162
Tabel 2.164	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023.....	II-163
Tabel 2.165	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Perdagangan.....	II-164
Tabel 2.166	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023.....	II-164
Tabel 2.167	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Perindustrian.....	II-165
Tabel 2.168	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Urusan Industri Tahun 2023.....	II-166
Tabel 2.169	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Transmigrasi.....	II-166
Tabel 2.170	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan Transmigrasi Tahun 2023.....	II-167
Tabel 2.171	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	II-167
Tabel 2.172	Capaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Daerah Tahun 2023.....	II-168
Tabel 2.173	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	II-169
Tabel 2.174	Capaian Indikator Kinerja Program Sekretariat DPRD Tahun 2023.....	II-169
Tabel 2.175	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-170
Tabel 2.176	Capaian Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023.....	II-170
Tabel 2.177	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-171
Tabel 2.178	Capaian Indikator Kinerja Program Badan Keuangan dan Aset dan Daerah Tahun 2023.....	II-171
Tabel 2.179	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-172
Tabel 2.180	Capaian Indikator Kinerja Program Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023.....	II-172

Tabel 2.181	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-173
Tabel 2.182	Capaian Indikator Kinerja Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023.....	II-173
Tabel 2.183	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-174
Tabel 2.184	Capaian Indikator Kinerja Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023.....	II-174
Tabel 2.185	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-175
Tabel 2.186	Capaian Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023.....	II-175
Tabel 2.187	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	II-176
Tabel 2.188	Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Daerah Tahun 2023.....	II-176
Tabel 2.189	Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Pemerintahan Umum.....	II-177
Tabel 2.190	Capaian Indikator Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.....	II-178
Tabel 2.191	Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung Barat Tahun 2023.....	II-179
Tabel 2.192	Hasil Proyeksi Pencapaian SDGs Kabupaten Bandung Barat s.d Tahun 2030 Berdasarkan Scorecard.....	II-188
Tabel 2.193	Daftar Indikator Terpilih (Data, Target, dan Scorecard indikator) untuk Tiap Tujuan SDGs di Kabupaten Bandung Barat.....	II-188
Tabel 2.194	Jenis SPM Tahun Anggaran 2023.....	II-197
Tabel 2.195	Target dan Realisasi Kinerja SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023.....	II-198
Tabel 2.196	Permasalahan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023.....	II-200
Tabel 2.197	Target dan Realisasi Kinerja SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023.....	II-201
Tabel 2.198	Permasalahan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023.....	II-203
Tabel 2.199	Target dan Realisasi Kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023.....	II-205
Tabel 2.200	Permasalahan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023.....	II-206
Tabel 2.201	Target dan Realisasi Kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023.....	II-206
Tabel 2.202	Permasalahan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023.....	II-207
Tabel 2.203	Target dan Realisasi Kinerja SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2023.....	II-208

Tabel 2.204	Permasalahan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2023.....	II-209
Tabel 2.205	Target dan Realisasi Kinerja SPM Bidang Sosial Tahun 2023.....	II-212
Tabel 2.206	Permasalahan SPM Bidang Sosial Tahun 2023.....	II-212
Tabel 2.207	Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023.....	II-237
Tabel 2.208	Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023.....	II-240
Tabel 2.209	Inovasi Lainnya Kabupaten bandung Barat Tahun 2023.....	II-259
Tabel 3.1	Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 (persen)..	III-4
Tabel 3.2	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	III-6
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 (persen).....	III-8
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2019 - 2023 (persen).....	III-9
Tabel 3.5	Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tujuh Kota di Jawa Barat Desember 2023.....	III-12
Tabel 3.6	Perkembangan IHK dan Inflasi Tahun 2023.....	III-12
Tabel 3.7	IHK Des Tahun 2022, IHK Des Tahun 2023 dan Inflasi Tahun 2023 Menurut Kelompok Pengeluaran.....	III-13
Tabel 3.8	Perkembangan IHK dan Inflasi s.d April Tahun 2024.....	III-14
Tabel 3.9	IHK dan Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran April Tahun 2024.....	III-14
Tabel 3.10	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023.....	III-16
Tabel 3.11	Karakteristik Penduduk Bekerja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023.....	III-17
Tabel 3.12	Karakteristik Penduduk Bekerja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023.....	III-18
Tabel 3.13	Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	III-18
Tabel 3.14	Data Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Data P3KE di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023.....	III-20
Tabel 3.15	Realisasi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan Target Tahun 2024-2025.....	III-15
Tabel 3.16	Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2024-2025 (Persen)	III-26
Tabel 3.17	Proyeksi Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Tahun 2024-2025.....	III-27
Tabel 3.18	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025.....	III-28

Tabel 3.19	Capaian dan Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023-2025.....	III-30
Tabel 3.20	Capaian dan Proyeksi Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 - 2025 (persen).....	III-31
Tabel 3.21	Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025.....	III-39
Tabel 3.22	Belanja Daerah Tahun 2024 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025.....	III-41
Tabel 3.23	Pembiayaan Daerah tahun 2024 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025.....	III-42
Tabel 4.1	Perumusan Konsep Dalam Rangka Penentuan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026.....	IV-11
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat.....	IV-13
Tabel 4.3	Keselarasn Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat dengan Agenda Nasional Tahun 2025.....	IV-14
Tabel 4.4	Keselarasn Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat.....	IV-17
Tabel 4.5	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.....	IV-19
Tabel 4.6	Prioritas Provinsi Jawa Barat dan Rincian Program Prioritas.....	IV-32
Tabel 4.7	Arah Kebijakan dan Program Prioritas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.....	IV-33
Tabel 4.8	Kesesuaian Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.....	IV-36
Tabel 4.9	Kesesuaian Program Prioritas Provinsi Jawa Barat dan Program Prioritas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.....	IV-45
Tabel 4.10	Keterkaitan Program Prioritas Tahun 2025 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs).....	IV-57
Tabel 4.11	Pelayanan Standar Pelayanan Minimal.....	IV-60
Tabel 4.12	Uraian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung Barat.....	IV-63
Tabel 5.1	Sinkronisasi Program Pembangunan Kabupaten Bandung Barat terhadap Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.....	V-1
Tabel 5.2	Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Kompetitif Tahun 2024 untuk RKPD Provinsi Tahun 2025 (Hasil Coaching) Provinsi Jawa Barat.....	V-11
Tabel 5.3	Proyek Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.....	V-12
Tabel 5.4	Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pagu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.....	V-12
Tabel 6.1	Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 – 2025.....	VI-1

Tabel 6.2	Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023-2025.....	VI-2
Tabel 6.3	Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023-2025.....	VI-3
Tabel 6.4	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.....	VI-4
Tabel 6.5	Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Outcome Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2024.....	VI-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Proses Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.....	I-3
Gambar 1.2	Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.....	I-4
Gambar 1.3	Hubungan Dokumen RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Terhadap Dokumen Lainnya.....	I-10
Gambar 2.1	Peta Batas Administrasi Kabupaten Bandung Barat.....	II-3
Gambar 2.2	Peta Batas Wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya.....	II-4
Gambar 2.3	Peta Ketinggian Kabupaten Bandung Barat.....	II-5
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Bandung Barat.....	II-7
Gambar 2.5	Peta Sumber Daya Air Kabupaten Bandung Barat.....	II-8
Gambar 2.6	Peta Curah Hujan Kabupaten Bandung Barat.....	II-11
Gambar 2.7	Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bandung Barat.....	II-16
Gambar 2.8	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-18
Gambar 2.9	Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020.....	II-19
Gambar 2.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Dibandingkan Target Daerah Dan Capaian Provinsi Jawa Barat serta Nasional.....	II-24
Gambar 2.11	Presentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 – 2023.....	II-28
Gambar 2.12	Grafik Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-32
Gambar 2.13	Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 - 2023.....	II-32
Gambar 2.14	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat 2019-2023.	II-33
Gambar 2.15	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 – 2023.....	II-34
Gambar 2.16	Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-38
Gambar 2.17	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019-2023.....	II-40

Gambar 2.18	APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-41
Gambar 2.19	APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-42
Gambar 2.20	APS Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-42
Gambar 2.21	Umur Harapan Hidup Saat Lahir di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-45
Gambar 2.22	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019-2023.....	II-47
Gambar 2.23	Capaian Indeks Pemberdayaan dan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.....	II-49
Gambar 2.24	Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	II-100
Gambar 2.25	Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023.....	II-105
Gambar 2.26	Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023.....	II-109
Gambar 2.27	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Bandung Barat 2019 – 2023.....	II-111
Gambar 2.28	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan 2017-2023 (persen).....	II-111
Gambar 2.29	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bandung Barat, 2023.....	II-112
Gambar 2.30	Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 – 2023.....	II-237
Gambar 3.1	Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Prov. Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023.....	III-11
Gambar 3.2	Grafik Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023.....	III-19
Gambar 3.3	Grafik Capaian Gini Rasio Kabupaten Bandung Barat, Prov. Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023.....	III-21
Gambar 4.1	Target Sasaran Visi Indonesia Emas Menuju 2045.....	IV-3
Gambar 4.2	Upaya Transformatif Super Prioritas (<i>Game Changers</i>).....	IV-4
Gambar 4.3	Tema dan Penekanan RKP Tahun 2025.....	IV-6
Gambar 4.4	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	IV-7
Gambar 4.5	Agenda Pembangunan RKP Tahun 2025.....	IV-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 yang disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 merupakan dokumen yang berpedoman kepada dokumen RPD yang bersifat teknokratis tanpa adanya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih tetapi berpedoman pada tujuan dan sasaran berdasarkan RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah dituangkan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan tahun 2024 memiliki fokus pada program-program pembangunan periode sebelumnya yang masih perlu dilanjutkan.

Secara umum, dokumen RKPD tahun 2025 mempunyai nilai-nilai penting dimana diantaranya ialah:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian tujuan dan sasaran RPD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD; dan

5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 ini mengusung Tema: **“Peningkatan Ekonomi dan Pemenuhan Pelayanan Dasar Melalui Pengembangan SDM dan Peningkatan Infrastruktur”**. Dokumen RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Target Pencapaian Kinerja serta Pendanaannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada beberapa aspek di bawah ini:

1. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026;
2. Hasil Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2023;
3. RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029;
4. Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025; dan
5. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 disusun melalui tahap penyelarasan dengan berbagai kebijakan Pembangunan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam RKP Tahun 2025 serta kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026, baik yang bersifat *Common Goals* Provinsi Jawa Barat maupun kebijakan tematik kewilayahan, serta disesuaikan dengan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Sejalan dengan prosesnya, penyusunan RKPD disusun dengan menggunakan lima pendekatan perencanaan pembangunan yaitu meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, kemudian pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD. Selanjutnya pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa RKPD disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh lapisan masyarakat, mengarah pada percepatan pembangunan, dan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Adapun pendekatan politik dilaksanakan dengan menuangkan

program dan kegiatan pada tahun berkenaan yang merupakan terjemahan dari visi misi kepala daerah dan melibatkan DPRD dalam pembahasan penyusunan RKPD.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mengharuskan seluruh kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menggunakan sistem yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut yang ditunjang dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 dilakukan melalui arus proses yang disajikan pada gambar dibawah ini:

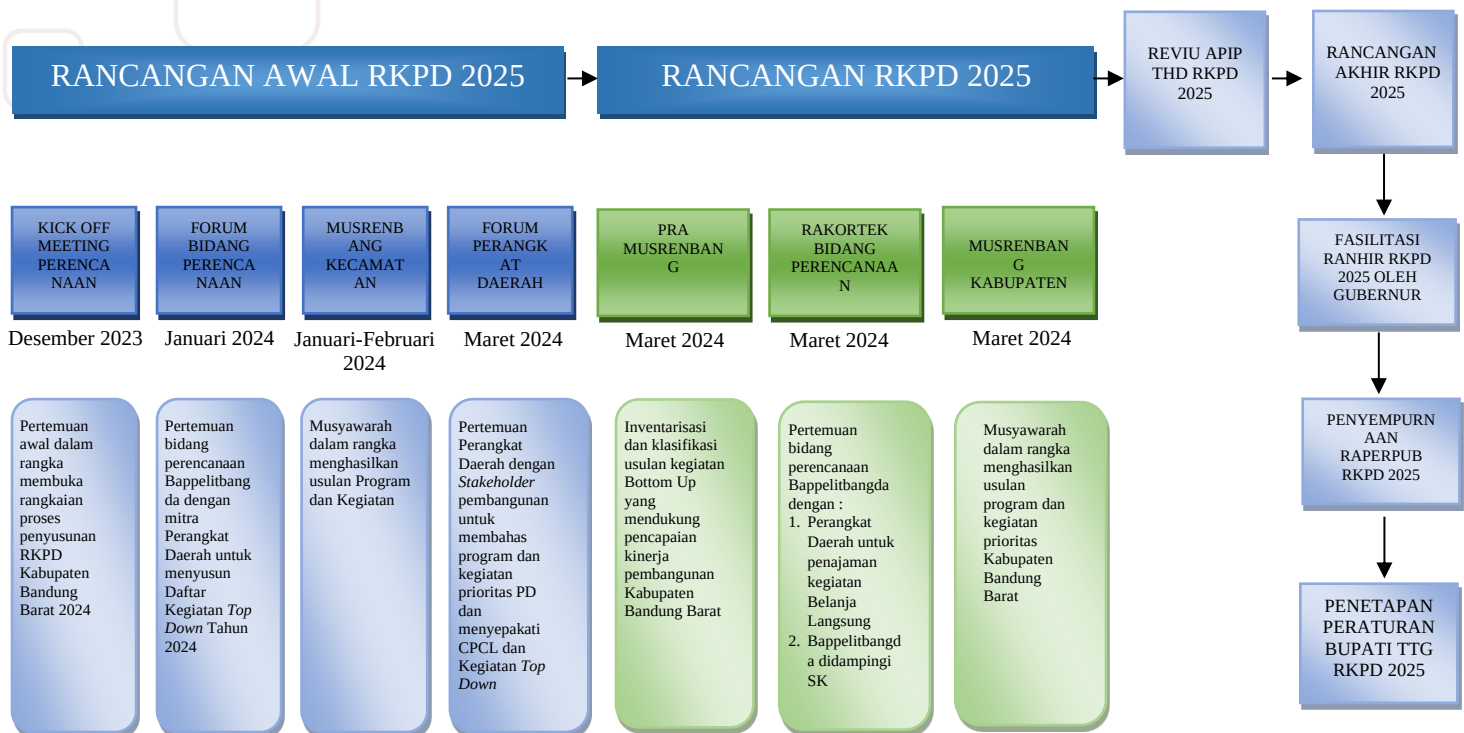
Gambar 1.1 Alur Proses Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, diolah

Selanjutnya penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 dilakukan melalui 4 (empat) tahapan kegiatan yaitu penyiapan rancangan awal RKPD, penyiapan Rancangan RKPD, musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan akhir RKPD, sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, diolah

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 
- 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Nomor 5871);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah mengganti Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- 
- 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 187);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 20. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

- 
- 
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 25. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
 33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;

- 
- 
34. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan DOB;
 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang sebagaimana Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembar Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 – 2025 (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2009);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 sampai dengan 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 No 2 seri E, tambahan lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 14);

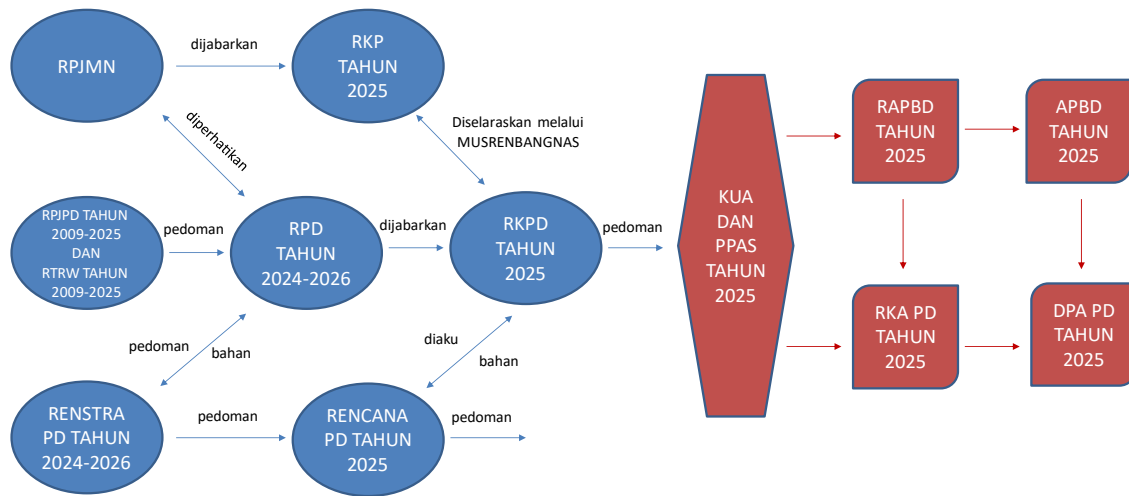
- 
43. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 7).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Lebih lanjut berdasarkan jangka waktu, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yakni 20 (dua puluh) tahun, perencanaan pembangunan jangka menengah yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun.

Adapun berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan tahun 2022. Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 1.3 Hubungan Dokumen RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Terhadap Dokumen Lainnya



PERENCANAAN

PENGANGGARAN

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, diolah

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada tahun transisi ini terdiri dari RPJPD, RPD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan di masa transisi ini dalam bentuk RPD. RPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan di masa transisi ini selama 3 (tiga) tahun menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana yang tercantum dalam RPD.

Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan strategi 5 (lima) tahunan perangkat daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian pembangunan selama 1 (satu) tahun dan selaras dengan RPD.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana yang tercantum dalam RPD. Selanjutnya RPD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu



tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. RKPD juga diselaraskan dengan RKP yang diperoleh dari forum Musrenbang Nasional. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024- 2026, dengan tujuan:

- 1) Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ada dalam RPD Kabupaten Bandung Barat 2024-2026 dalam upaya mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- 2) Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas melalui musrenbang;
- 3) Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun Rencana Kerja PD (Renja PD) Tahun 2025 agar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- 4) Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan antara RKPD Kabupaten Barat Tahun 2025 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Kabupaten Barat Tahun 2025 terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan gambaran umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD s.d Tahun 2023

Menjelaskan evaluasi ketercapaian indikator makro pembangunan, pencapaian tujuan, sasaran dan kinerja program (*outcome*) serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Tahun 2023, evaluasi penerapan SPM dan program yang mendukung SDG's

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menjelaskan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

2.4. Inovasi Pembangunan Daerah



Memberikan gambaran penerapan inovasi pembangunan daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan kondisi dan capaian pembangunan ekonomi tahun 2023 dan prospek ekonomi tahun 2023 serta tantangan dan proyeksi pembangunan ekonomi tahun 2025

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2025 serta pendanaan pembangunan lainnya

3.3. Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Menjelaskan sumber - sumber pendanaan pembangunan non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 sebagai penjabaran RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Menjelaskan prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat, pokok pokok pikiran DPRD dan keterkaitannya dengan prioritas dan program pembangunan Kabupaten Bandung Barat, isu strategis, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan yang mendukung SPM dan SDG'S

4.3. Implementasi Inovasi Pembangunan

Menjelaskan penerapan inovasi yang sesuai dengan tema RKP Tahun 2025 dan mendukung prioritas Pembangunan tahun 2025

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan



tahun rencana (RKPD) dan target kinerja yang direncanakan dalam RPD tahun 2024-2026.

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menjelaskan indikator keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII : PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Tahun 2025

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Ngamprah. Sejak ditetapkan setelah 16 tahun sampai dengan sekarang Kabupaten Bandung Barat mengalami banyak perkembangan dan kemajuan pembangunan, sebagai Kabupaten yang memiliki posisi strategis di wilayah Bandung Raya, Kabupaten Bandung Barat berperan penting dalam kemajuan pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

Gambaran umum kondisi daerah mendeskripsikan tentang apa, bagaimana, dan sejauhmana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini serta mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan pencapaian keberhasilan pembangunan daerah serta menjadi bahan kebijakan dalam merencanakan pembangunan kedepan.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi dan Demografi, untuk melihat gambaran dan kondisi Kabupaten Bandung Barat berdasarkan geografis yang mencakup: karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana serta aspek demografi yang memberikan deskripsi ukuran, struktur dan distribusi penduduk di Kabupaten Bandung Barat.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Berdasarkan Karakteristik Lokasi dan Wilayah, secara Astronomis Kabupaten Bandung Barat terletak pada $06^{\circ} 3,73'$ - $07^{\circ} 1,031'$ Lintang Selatan dan $107^{\circ} 1,10'$ - $107^{\circ} 4,40'$ Bujur Timur dengan Luas wilayah sebesar 1.284,67 Km² atau 128.467 Ha, yang secara administratif terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 165 Desa, dengan rincian luas wilayah menurut administratif kecamatan adalah sebagai berikut:

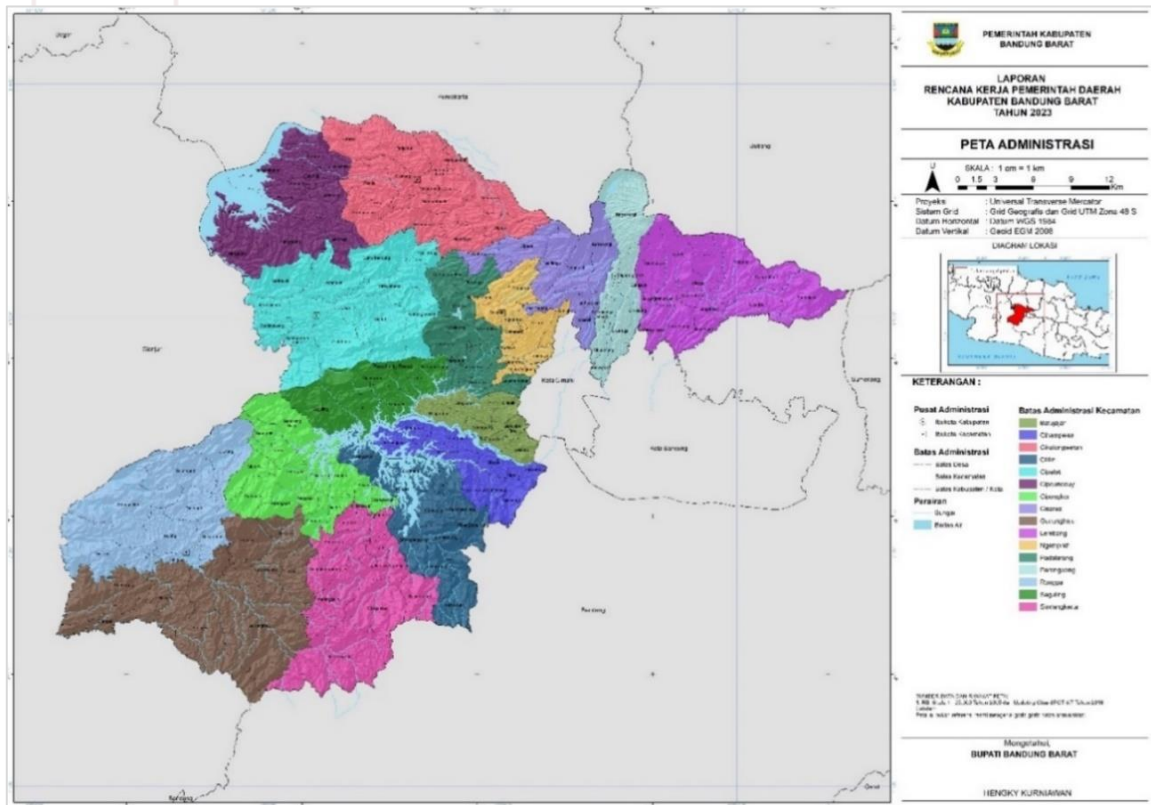
Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Bandung Barat

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa
1	Rongga	112,64	8
2	Gununghalu	155,47	9
3	Sindangkerta	106,30	11
4	Cililin	77,83	11
5	Cihampelas	47,04	10
6	Cipongkor	80,16	14
7	Batujajar	31,11	7
8	Saguling	51,58	6
9	Cipatat	125,98	12
10	Padalarang	51,63	10
11	Ngamprah	35,65	11
12	Parongpong	45,02	7
13	Lembang	98,22	16
14	Cisarua	55,63	8
15	Cikalongwetan	110,94	13
16	Cipeundeuy	102,19	12
	Kab. Bandung Barat	1.287,41	165

Sumber: Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

Dari tabel diatas, Kecamatan Gununghalu merupakan wilayah terluas di Kabupaten Bandung Barat yaitu 155,08 Km² dan berturut-turut kecamatan dengan luas wilayah di atas 100 Km², yaitu Cipatat, Rongga, Cikalongwetan, Sindangkerta dan Cipeundeuy. Sisanya memiliki luas wilayah di bawah 100 Km² dan Kecamatan Batujajar merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terendah yaitu 31,06 Km². Sedangkan jumlah desa terbanyak ada di kecamatan Lembang sebanyak 16 Desa dan Kecamatan Saguling merupakan Kecamatan dengan jumlah Desa paling sedikit yaitu 6 Desa. Adapun batas wilayah per kecamatan di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Bandung Barat



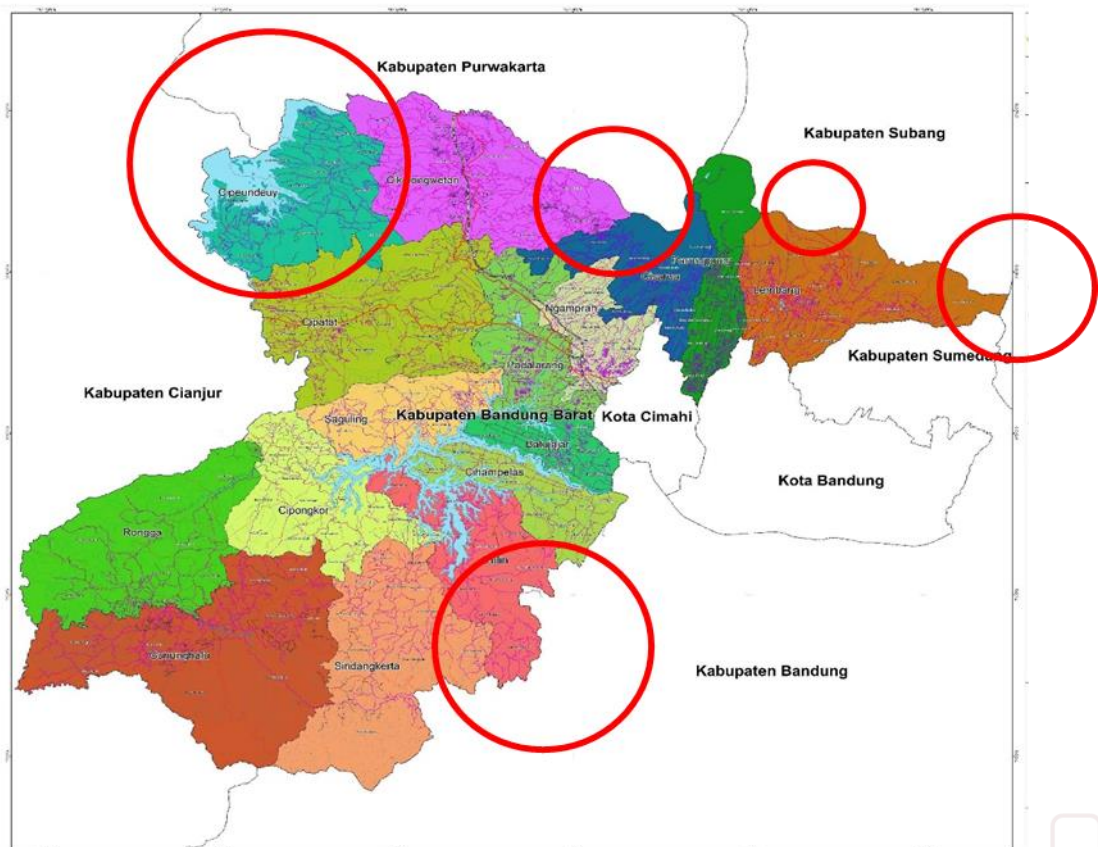
Sumber: Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

Adapun Batas wilayah Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Permendagri No. 97 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 18 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 75 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat dan Permendagri No. 76 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat, dengan rincian sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kab. Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta.

Berikut peta batas wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan Kab/Kota Sekitarnya dan peta posisi strategis Kabupaten Bandung Barat Bagian yang merupakan bagian dari KSN Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung di Wilayah Jawa Barat.

Gambar 2.2 Peta Batas Wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya



Sumber: Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

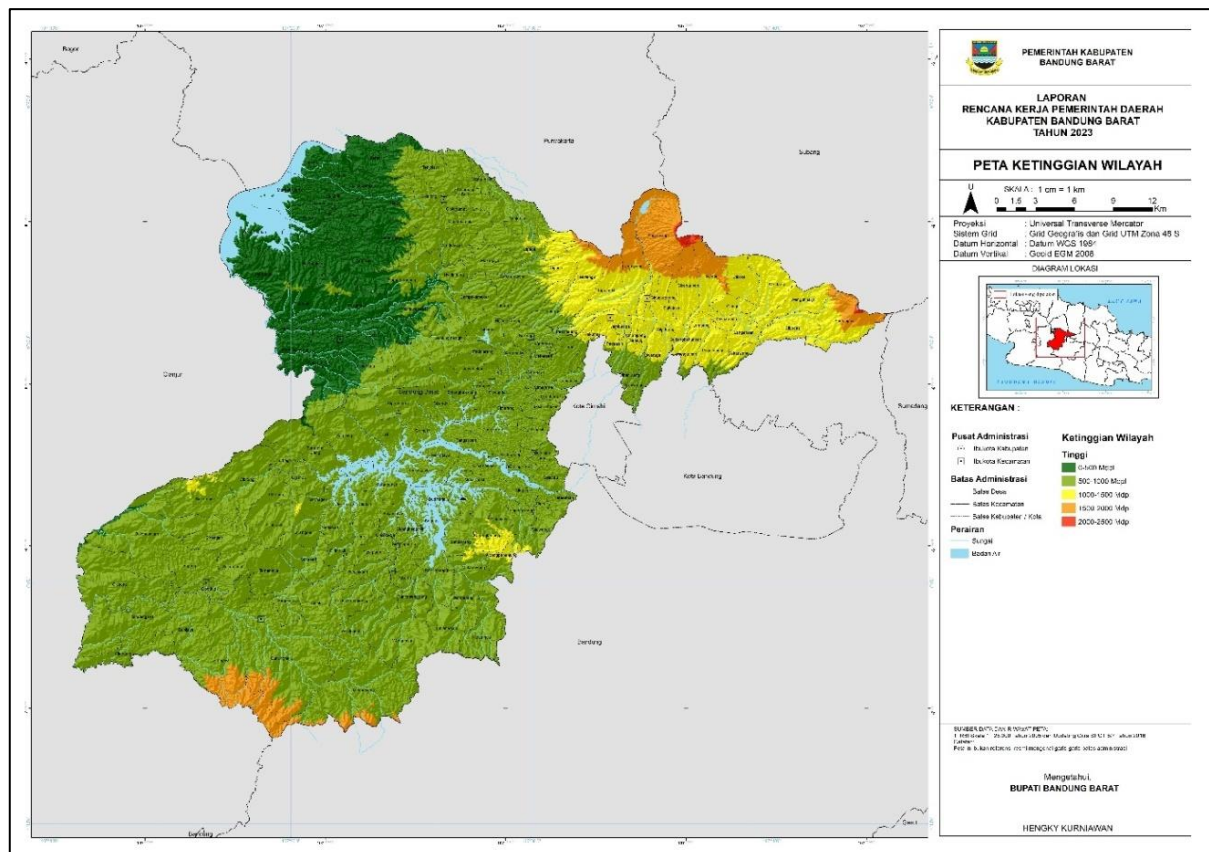
Secara Topografi Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal, wilayah yang sangat terjal terdapat di kecamatan Gununghalu seluas 13.480 Ha. Sedangkan kemiringan lereng datar yaitu 0-8% terdapat pada Kecamatan Batujajar. Sisanya berada pada kemiringan 8-15%. Berdasarkan kemiringan lereng dan beda tinggi serta kenampakan di lapangan morfologi Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan morfologi, yaitu morfologi pedataran, landai, perbukitan dan morfologi pegunungan. Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat berkisar sekitar 0-2500 mdpl, seperti pada tabel dan gambar peta ketinggian berikut:

Tabel 2.2 Kondisi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Menurut Ketinggian

No.	Ketinggian	Luas (ha)
1	0-500 m	20.461
2	500-1000 m	68.786
3	1000-1500 m	32.487
4	1500-2000 m	6.732
5	2000-2500 m	20.461

Sumber: Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

Gambar 2.3 Peta Ketinggian Kabupaten Bandung Barat



Sumber: Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

Kawasan lahan terbesar pada elevasi ketinggian 500-1000 mdpl yaitu 68.786 Ha atau 66% dari total luas keseluruhan. Luas kawasan dengan elevasi dibawah 500 mdpl seluas 20.461 Ha atau 14%, kawasan dibawah 500 mdpl ini terdapat Waduk Saguling dan Cirata. Sedangkan kawasan dengan elevasi antara 500-1000 mdpl, merupakan wilayah yang perlu mendapat perhatian untuk pengembangan pertanian karena pada kawasan elevasi ini menentukan temperatur, kelembaban, penyinaran matahari, yang apabila dikaitkan dengan jenis tanah dan curah hujan, akan menentukan jenis tanaman apa yang paling tepat untuk mendukung pengembangan agroindustri.

Selain itu di wilayah Kabupaten Bandung Barat terdapat kawasan sekitar 5% yang berada pada elevasi 1500-2000 mdpl dan 14% yang berada pada elevasi antara 2000-2500 mdpl. Struktur, karakteristik dan potensi kandungan secara Geologi Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.3 Kondisi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Menurut Jenis Tanah

No.	Jenis Tanah	Luasan (Ha)
1	Kompleks Regosol Kelabu dan Litosol	2,729
2	Andosol Coklat	8,548
3	Asosiasi Andosol Coklat dan Regosol Coklat	13,442
4	Kompleks Mediteran Coklat Kemerahan dan Litosol	3,162
5	Latosol Coklat	17,572
6	Latosol Coklat Kemerahan	34
7	Latosol Coklat Tua Kemerahan	11,089
8	Aluvial Coklat Kekelabuan	7,757
9	Kompleks Latosol Merah dan Latosol Coklat Kemerahan	17,524
10	Podsolik Kuning	950
11	Kompleks Podsolik Merah Kekuningan, Podsolik Kuning dan Regosol	37,170
12	Asosiasi Aluvial Kelabu Dan Aluvial Coklat Kekelabuan	1,740
13	Asosiasi Glei Humus Rendah dan Aluvial Kelabu	6,748

Sumber: Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

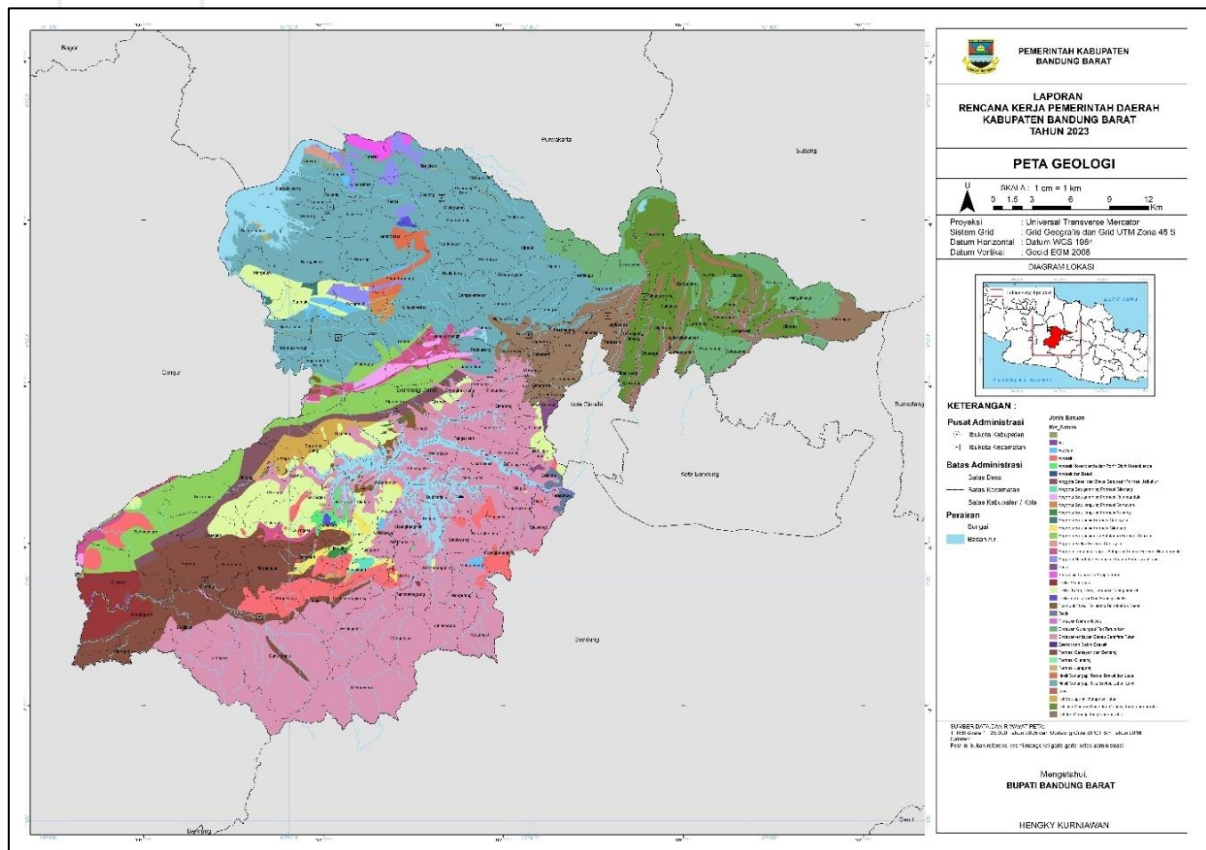
Jenis tanah yang paling luas di Kabupaten Bandung Barat adalah Kompleks Podsolik Merah Kekuningan, Podsolik Kuning dan Regosol sebesar 37,170 Ha, sedangkan luasan terkecil adalah jenis tanah latosol coklat kemerahan sebesar 34 Ha. Bila ditinjau dari potensi kandungan asal pengendapan batuan, Kabupaten Bandung Barat terbagi menjadi beberapa wilayah yaitu Littoral, Littoral Reef, Neritic, Plutonism Sub-Volcanic, Terrestrial Alluvium, Terrestrial Fluvial, Terrestrial Lacustrine, Transition, dan Volcanism Subaerial, dengan gambaran secara geologi dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.4 Kondisi Geologi Kandungan Pengendapan Batuan

NO.	JENIS GEOLOGI	LUASAN (HA)
1	<i>Littoral</i>	4.550
2	<i>Littoral Reef</i>	866
3	<i>Neritic</i>	13.060
4	<i>Plutonism Sub-Volcanic</i>	4.215
5	<i>Terrestrial Alluvium</i>	560
6	<i>Terrestrial Fluvial</i>	39.373
7	<i>Terrestrial Lacustrine</i>	7
8	<i>Transition</i>	414
9	<i>Volcanism Subaerial</i>	59.984
10	<i>Unknown</i>	4.956

Sumber: Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Bandung Barat



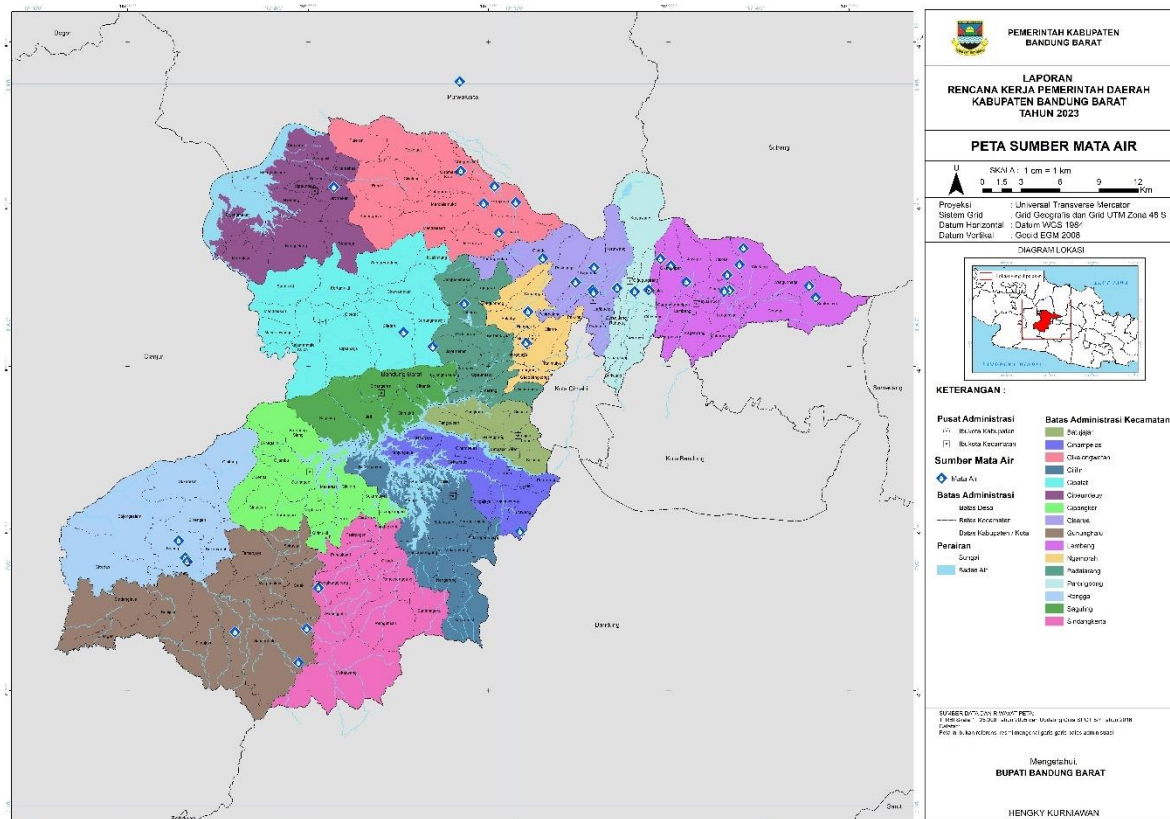
Sumber: Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

Selanjutnya batuan sedimen pada daerah ini menempati 18,21 % luas wilayah KBB. Batuan sedimen yang tersebar pada wilayah ini cukup beraneka ragam mulai dari Breksi, Batulempung, Batupasir, Batugamping sampai Napal. Endapan sedimen kuartar hanya memiliki luas 636 Ha yang didominasi oleh endapan sungai dan danau.

Batuan Terobosan berupa Andesit Basalt, Shoshonitik dan juga batuan ultrabasa tersingkap pada daerah ini dengan persebaran hampir merata di setiap kecamatan. Namun batuan ini hanya menempati sekitar 3,28 %. Batuan ini juga pada bernilai ekonomis menjadi bahan galian industri yang cukup banyak tersebar di Kecamatan Sukasari dan sekitarnya. Selain itu batugamping dan tuff juga memiliki nilai ekonomis untuk menjadi bahan baku semen atau menjadi keramik.

Secara hidrologi, sumber daya air merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, kondisi ketersediaan sumber daya air di wilayah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari sumber daya air permukaan dan air tanah, berupa sumber mata air, sungai, danau, rawa, embung.

Gambar 2.5 Peta Sumber Daya Air Kabupaten Bandung Barat



Sumber: Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

Kabupaten Bandung Barat memiliki kurang lebih 90 sungai, dengan sungai utama adalah Sungai Citarum, Sungai Cimahi, Sungai Cibeureum, Sungai Citarum Hulu, dan Sungai Cikarial, yang melewati Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihampelas, dan Kecamatan Batujajar. Sungai-sungai ini termasuk ke dalam Sub DAS Cikapundung (Lembang, Cisarua, Parongpong) dan Sub DAS Citarum (Cililin, Ngamprah, Batujajar, Padalarang) dengan total panjang adalah 3.941,68 Km.

Sumber daya air permukaan lainnya di Kabupaten Bandung Barat berupa 2 (dua) Danau/Situ Alam dan 2 Waduk/Danau Buatan. Danau/Situ Alam terdiri dari Situ Lembang dan Situ Ciburuy serta Waduk Saguling dan Cirata, dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Situ Ciburuy terdapat di Kecamatan Padalarang digunakan untuk irigasi dengan kapasitas penyimpanan sekitar 4 juta m³. Situ Lembang digunakan untuk irigasi dan terletak di bagian hulu DAS Cimahi, kapasitasnya sebesar 3,7 m³ dengan daerah tangkapan situ tersebut diperkirakan 6,3 km³.
- 2) Waduk Saguling terletak di sungai Citarum yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu di Kecamatan Cililin, Batujajar, dan Cipongkor. Waduk tersebut digunakan untuk PLTA, irigasi dan penyediaan air minum. Kapasitas waduk direncanakan 1.000 juta m³.

- 3) Waduk Cirata terletak kearah hilir dari Waduk Saguling yang lokasinya berada di Kecamatan Cipeundeuy, volume direncanakan sekitar 2.000 juta m³, dengan ketinggian mukaair + 220 m/dpl.

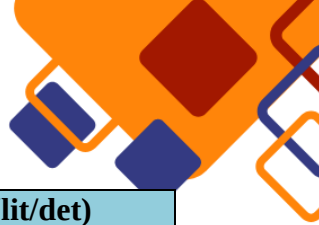
Dalam aspek Hidrogeologi, berdasarkan studi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, sumber air bawah tanah di Wilayah Kabupaten Bandung Barat dibagi ke dalam beberapa zona:

- 1) Zona kritis untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m³ perbulan, dengan penyebaran berada di Kecamatan Batujajar.
- 2) Zona rawan untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit maksimum 100 m³ per bulan. Zona rawan untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan Batujajar.
- 3) Daerah aman pengambilan air tanah, pengambilan baru diperbolehkan dengan debit 170 m³ per hari dengan sumur terbatas. Daerah aman untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan Cikalong wetan, Padalarang, Ngamprah, dan Parongpong.
- 4) Daerah resapan, tidak dikembangkan bagi peruntukan kecuali untuk air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m³ per bulan. Daerah resapan ini meliputi Kecamatan Lembang dan Cisarua.
- 5) Zona bukan cekungan air tanah, produktivitas aquifer rendah sehingga kurang layak dikembangkan, kecuali aquifer dangkal di daerah lembah untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m³/bulan per sumur. Zona bukan cekungan air tanah penyebarannya di Kecamatan: Cipeundeuy, Cipatat, Cipongkor, Cililin, Sindangkerta, Gununghalu dan Rongga.

Potensi Mata air di Kabupaten Bandung Barat yaitu sebanyak 223 lokasi, yang tersebar di 12 Kecamatan, dengan debit air sebesar 1-130 liter/detik seperti terlihat pada table berikut:

Tabel 2.5 Potensi Sumber Mata Air di Kabupaten Bandung Barat

No.	Kecamatan	Jumlah Mata Air	Kisaran Debit (lit/det) saat musim hujan
1.	Lembang	119	1 - 40
2.	Parongpong	26	1,5 - 100
3.	Cisarua	62	1- 60
4.	Ngamprah	46	1 - 130



No.	Kecamatan	Jumlah Mata Air	Kisaran Debit (lit/det) saat musim hujan
5.	Cikalongwetan	73	1 - 50
6.	Padalarang	13	1 - 15
7.	Cipatat	28	1,5 - 11
8.	Cililin	39	1 - 13
9.	Batujajar	29	0,5 - 3
10	Gununghalu	15	1 - 75
11.	Sindangkerta	32	1 - 8
12.	Cipongkor	24	0,8 - 12
13.	Cipendeuy	44	1 - 10
14.	Rongga	116	0,5 - 50
15.	Cihampelas	50	2 - 13

Sumber: Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

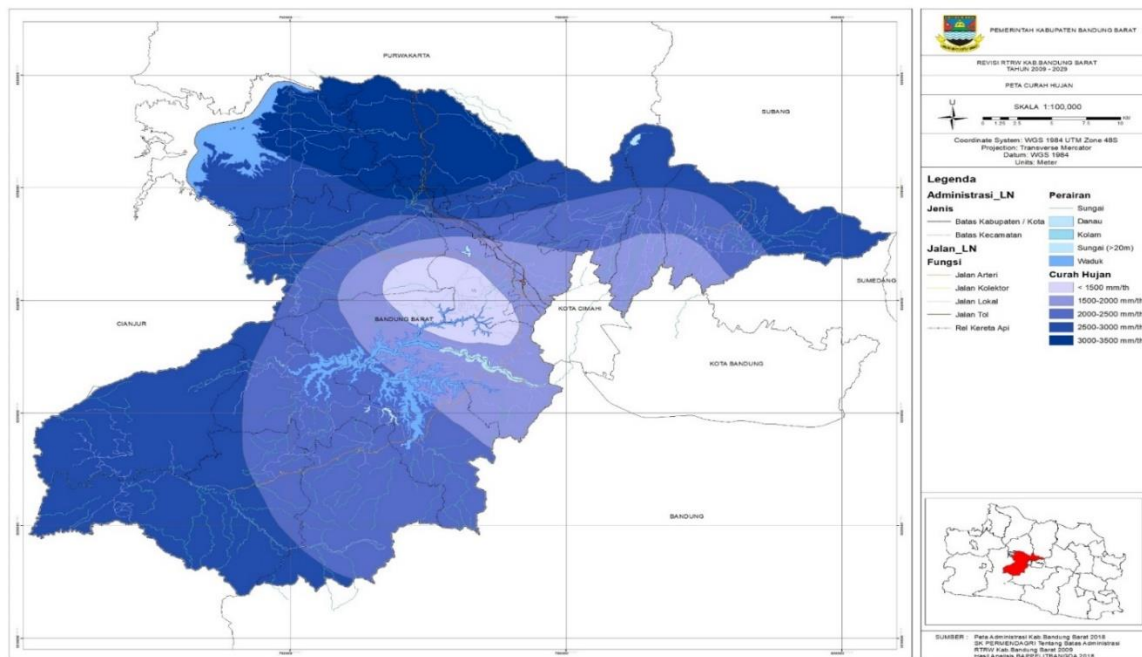
Secara Klimatologi, Wilayah Kabupaten Bandung Barat dikaruniai keberuntungan karena selalu disinggahi awan pembawa hujan dan ditempati penampungan air yang sangat besar yaitu waduk Saguling dan Cirata dengan curah hujan rata-rata pertahun adalah kurang lebih pada 1.500 – 3.500 mm/tahun, dengan gambaran dan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6 Kondisi Curah Hujan Wilayah Kabupaten Bandung Barat

NO.	CURAH HUJAN	LUASAN (ha)
1	< 1500 mm/th	5,481
2	1.500 - 2.000 mm/th	19,489
3	2.000 - 2.500 mm/th	39,947
4	2.500 - 3.000 mm/th	48,993
5	3.000 - 3.500 mm/th	14,857

Sumber: Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

Gambar 2.6 Peta Curah Hujan Kabupaten Bandung Barat



Sumber: Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

Ada dua kecamatan yang memiliki curah hujan kurang dari 1.500 yaitu Kecamatan Batujajar dan Padalarang. Sedangkan untuk curah hujan 1.500 - 2.000 mm/tahun adalah Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Ngamprah, Padalarang Dan Parongpong. Selanjutnya wilayah yang memiliki curah hujan 2.000 – 2.500 adalah sebagian Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah, Cipatat, Cipongkor, dan Sindangkerta. Untuk curah hujan 2500-3000 mm/th terdapat pada wilayah Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Cipatat, Rongga, Gunung Halu, Dan Sindangkerta. Terakhir wilayah yang memiliki curah hujan tertinggi adalah Kecamatan Cikalong Wetan Dan Cipeundeuy. Berikut tabel curah hujan menurut luasan.

Penggunaan lahan merupakan suatu cara atau metode bagaimana pemanfaatan ruang di suatu wilayah yang akan digunakan berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang tersedia. Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu: berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Jika dilihat dari fungsi guna lahan yang ada Kabupaten Bandung Barat, didominasi oleh fungsi budidaya non-pertanian sebesar 104.257.97 ha atau hampir 50% dari luasan total wilayah Kabupaten Bandung Barat. Disusul oleh luasan fungsi budidaya pertanian sebesar 37,5%. kabupaten Bandung Barat memiliki luasan fungsi kawasan lindung yang terbilang kecil, hanya 9% dari total wilayah yaitu 19.171 ha.

Tabel 2.7 Guna Lahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

No	Jenis Tanah	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Kawasan Lindung		
	Kawasan Lindung	19.171,04	14,65%
	Jumlah	19.171,04	14,65%
2a	Kawasan Budidaya Pertanian		
	Kebun Campur	8.758,76	6,70%
	Perkebunan	9.562,95	7,31%
	Sawah	16.309,44	12,47%
	Sawah Tadah Hujan	19.342,69	14,79%
	Tegal/Ladang	24.472,31	18,71%
	Jumlah	78.446,15	59,96%
2b	Kawasan Budidaya Non-Pertanian		
	Industri	2.270,73	1,74%
	Institusi	251,94	0,19%
	Jalan	2.000,00	1,53%
	Jalan Kereta Api	52,76	0,04%
	Pasar / Pertokoan	776,79	0,59%
	Permukiman	20.260,16	15,49%
	Lapangan	50,02	0,04%
	Taman	35,11	0,03%
	Tambang	114,31	0,09%
	Jumlah	25.811,82	19,73%
	Total Kawasan Budidaya	104.257,97	79,69%
3	Lainnya		
	Tanah Kosong	3.702,29	2,83%
	Rumput	3.689,94	2,82%
	Jumlah	7.392,23	5,65%
	Total Kabupaten	130.821,24	100,00%

Sumber: Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti pertambahan jumlah penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kegiatan ekonomi, perkembangan atau perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan masyarakat di dalamnya. Pusat pertumbuhan merupakan wilayah dengan pertumbuhan yang lebih pesat jika dibandingkan wilayah lain di sekitarnya dan menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi. Pusat pertumbuhan berfungsi sebagai pusat pembangunan yang mempengaruhi perkembangan wilayah di sekitarnya sehingga membantu pemerataan pembangunan.

Pusat pertumbuhan memiliki hubungan fungsional dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Tentunya banyak banget faktor yang mempengaruhi terbentuknya sebuah pusat pertumbuhan di suatu wilayah, di antaranya karena faktor geografis, ekonomi, sosial dan fasilitas penunjang berupa jalan raya, jaringan internet, komunikasi, bahan bakar, jaringan listrik, rumah sakit, keamanan, dan sarana kebersihan.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Kabupaten Bandung Barat memiliki beragam potensi sumber daya baik kondisi geografi, wilayah dan kondisi lingkungannya untuk dikembangkan, dengan memperhatikan daya dukung/kemampuan satuan lahan untuk selanjutnya dianalisis dengan kerangka pemikiran mengenai potensi pengembangan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan aspek-aspek fisik wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Kerangka Potensi Pengembangan Wilayah

No	Aspek Fisik Wilayah		Kerangka Pengembangan Wilayah
1	Geografi	▪ Menjadi pintu masuk ke Metropolitan Bandung ▪ Dilalui jaringan transportasi primer ▪ Belum diminati investor	▪ Memanfaatkan lokasi wilayah yang strategis ▪ Memperluas kawasan lindung untuk melindungi badan air dan kawasan rawan bencana longsor ▪ Melindungi kawasan pertanian lahan basah ▪ Mengembangkan kegiatan dan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan
2	Topografi	Didominasi lahan dengan kemiringan terhal dan elevasi sama atau lebih dari 750 mdpl (batas elevasi Kawasan Bandung Utara)	
3	Hidrologi	▪ Memiliki dan dilalui banyak sungai, danau, dan waduk ▪ Terdapat potensi banjir dan sekaligus kekeringan	
4	Iklim	Didominasi wilayah dengan curah hujan sedang dan tinggi	
5	Penggunaan Lahan	Didominasi dengan kawasan budidaya non pertanian (terbangun). Kawasan budidaya pertanian lebih kecil, dan hanya 9% merupakan kawasan lindung.	
6	Kawasan Rawan Bencana	Rawan Longsor, dan terdapat potensi kekeringan dan banjir lokal	

Sumber: Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044



Pengembangan kawasan hutan produksi dan pertanian tanaman pangan, hortikultura perkebunan diarahkan pada topografi yang cukup tinggi, pengembangan tersebut diarahkan di Kecamatan Lembang, Parompong, dan Cisarua, beberapa pertanian juga diarahkan pada daerah Cipatat dan Gununghalu. Pengembangan tersebut juga dapat dilihat melalui kelas kemampuan lahan A atau B yang dapat digunakan untuk kawasan pertanian. Pengembangan kawasan industri diarahkan pada kelerengn landai, atau morfologi datar.

Pengembangan kawasan industri banyak di arahkan di beberapa daerah di Kecamatan Ngamprah, Padalarang, Batujajar dan sekitarnya. Pengembangan kawasan Industri dapat diarahkan pada kelas kemampuan lahan C atau D pada dasarnya berlokasi pada morfologi landai. Pengembangan kawasan permukiman diarahkan pada topografi rendah, atau morfologi datar yang tersebar di Kabupaten Bandung Barat. Kawasan Permukiman dapat diarahkan pada kelas kemampuan lahan D dan E karena memiliki potensi pengembangan tinggi. Kawasan dengan potensi pengembangan tinggi memiliki topografi sangat rendah dan sedang, dan morfologi landai, dengan minimnya kawasan rawan bencana alam, juga memiliki kelas drainase sedang hingga tinggi, yang memungkinkan untuk pengembangn perkotaan.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Perubahan iklim dapat mempengaruhi aspek kebencanaan, diantaranya terkait dengan bencana kekeringan yang dapat melanda di Kabupaten Bandung Barat. Kondisi bentang alam Kabupaten Bandung Barat yang merupakan dataran tinggi dan berbentuk cekungan menjadi muara bagi anak-anak sungai. Hal ini mengakibatkan Kabupaten Bandung Barat rentan terhadap bencana alam baik berupa banjir, longsor, erosi, dan bencana lainnya.

Cara untuk mengidentifikasi kapasitas wilayah dalam menghadapi kerawanan bencana, salah satunya dapat diketahui melalui tingkat indeks jasa lingkungan/ekosistem dalam pencegahan dan perlindungan terhadap bencana. Jenis jasa ekosistem ini merupakan infrastruktur dari alam yang bertujuan untuk melindungi dan mencegah kejadian bencana, diantaranya: jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir dan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana.

Jasa lingkungan/ekosistem pengaturan tata air dan banjir di Kabupaten Bandung Barat didominasi Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi. Kedua kelas ini meliputi 50% luas wilayah Kabupaten Bandung, dengan rincian sebagai berikut:

- Kategori Sangat Tinggi dengan luas 35.107 Ha atau 27% sebagian besar di Kecamatan Cipatat, selanjutnya Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cikalongwetan, dan Cipeundeuy.

- Kategori Tinggi sebagian besar 29.904 Ha atau 23% Sebagian besar berada di Kecamatan Gununghalu, selanjutnya Kecamatan Cisarua, Cipongkor, dan Kecamatan Cipeundeuy.
- Kategori Sedang merupakan Sebagian besar seluas 40.292 Ha atau 31% yang berada di Kecamatan Rongga, Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Saguling, Kecamatan Cihampelas.
- Kategori Rendah dengan luas 2.342 Ha atau 2 % menyebar sebagian kecil di beberapa kecamatan.
- Kategori Sangat Rendah dengan luas 23.551 Ha atau dengan persentase 18% tersebar di sebagian besar Kecamatan Cipatat, Gununghalu dan Kecamatan Lembang. Pada kategori sangat rendah memiliki dampak terhadap gangguan tata aliran dan banjir.

Tabel 2.9 Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran dan Banjir

No	Indikator	Luas Ha	%	Kecamatan
1.	Sangat Rendah	23.551	18	Sebagian besar Cipatat, Gununghalu, Lembang
2.	Rendah	2.342	2	Menyebar sebagian kecil di beberapa Kecamatan
3.	Sedang	40.292	31	Bagian besar Rongga, Gununghalu, Saguling, Cihampelas
4.	Tinggi	29.904	23	Sebagian besar Gunung Halu, berikut Cisarua, Cipongkor, Cipeundeuy
5.	Sangat Tinggi	35.107	27	Sebagian besar Cipatat, Selanjutnya Cihampelas Cikalongwetan, Cipeundeuy
Total		131.195	100	

Sumber: Pengolahan Peta Tahun 2020, D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem, 3EJ – KLHK

Indikator jasa lingkungan/ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana dapat memberikan kita perlindungan dan pencegahan dari kejadian bencana baik bencana erosi, longsor, pergerakan tanah dan kebakaran lahan. Jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana di Kabupaten Bandung Barat, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

- Kategori Sangat Tinggi (ST) seluas 21% atau 27.000 Ha berada disebagian besar Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Cihampelas.
- Kategori Tinggi (T) seluas 15% atau 2.3478 Ha berada di sebagian besar di Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipeundeuy, dan Kecamatan Lembang.

- Kategori Sedang seluas 45.710 Ha atau 35% berada di sebagian besar Kecamatan Gununghalu, Rongga, selanjutnya Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Saguling.
- Kategori Lahan kelas Rendah seluas 14.171 Ha atau 11% yang sebagian kecil menyebar di beberapa kecamatan.
- Kategori kelas Sangat Rendah seluas 20.835 Ha sebesar 16% sebagian besar di Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipokongkor, Kecamatan Cipeundeuy.

Gabungan Kelas Sangat Tinggi dan Kelas Tinggi mencapai 39% jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan dari kejadian bencana alam. Dengan kondisi demikian menunjukkan bahwa kemampuan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana di Kabupaten Bandung Barat relatif rendah.

Tabel 2.10 Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana

No	Indikator	Luas Ha	%	Kecamatan
1	Sangat Rendah	20.835	16	Sebagian besar Cipatat, Cipokongkor, Cipeundeuy
2	Rendah	14.171	11	menyebar sebagian kecil
3	Sedang	45.710	35	Bagian besar Gununghalu, Rongga, selanjutnya Cipongkor, Saguling
4	Tinggi	23.478	18	Sebagian besar Cikalongwetan, Cisarua, Cipatat, Cipeundeuy, Lembang
5	Sangat Tinggi	27.000	21	Sebagian besar Cipatat dan Cihampelas
Total		131.195	100	

Sumber: Pengolahan Peta Tahun 2020, D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem, 3EJ – KLHK

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat, peristiwa bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari bencana banjir, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, pergerakan tanah, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan serta angin puting beliung. Peristiwa bencana alam di Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kejadian gempa bumi, tanah longsor dan pergerakan tanah.

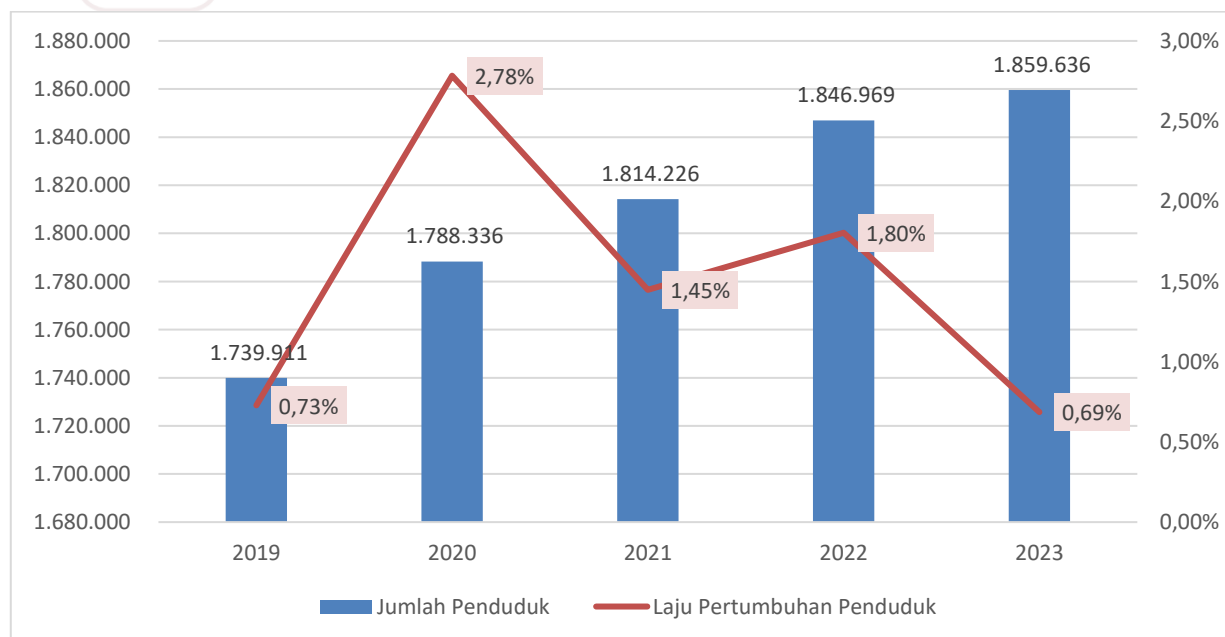
Kawasan rawan bencana longsor dan pergerakan tanah secara umum menyebar di bagian utara dan selatan Kabupaten Bandung Barat, yaitu terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, Cikalongwetan, Cipatat, Batujajar, Cililin, Rongga, Gununghalu dan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua, dengan sebaran kawasan rawan bencana seperti terlihat pada gambar peta berikut:



2.1.1.4 Aspek Demografi

Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.859.636 jiwa dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah penduduk laki-laki sebesar 948.045 jiwa (50,98 persen) dan penduduk perempuan sebesar 911.591 jiwa (49,02 persen) dengan sex ratio sebesar 104,00 yang berarti setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.040 laki-laki. Jumlah penduduk, komposisi penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 secara rinci menurut kecamatan adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.8 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2019 – 2023**



Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2019-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah.

**Tabel 2.11 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023**

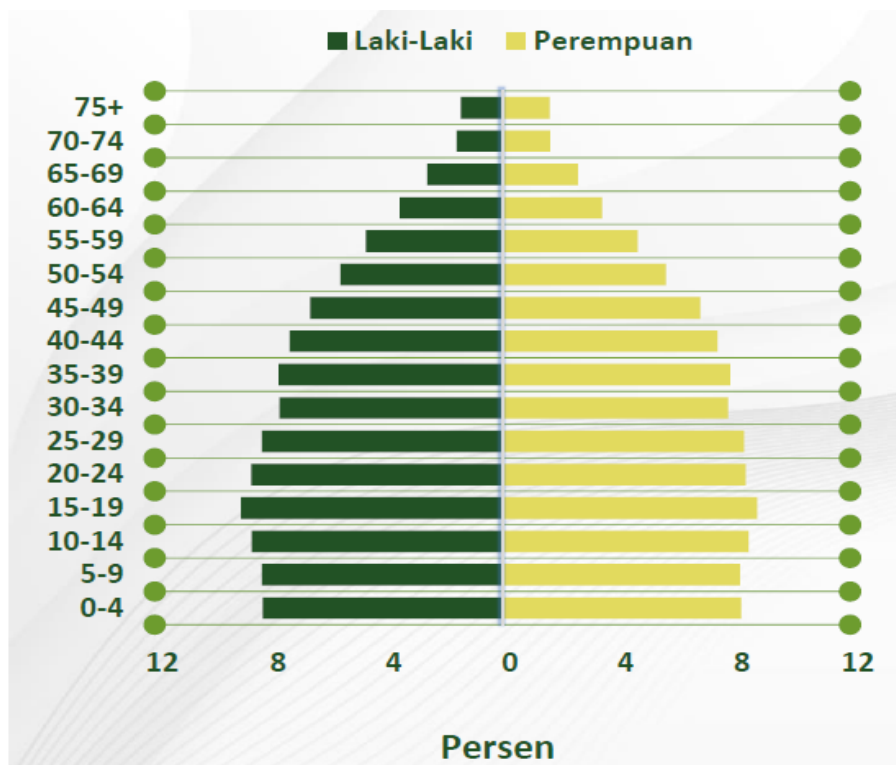
No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
		Perempuan	Laki-Laki			
1	Rongga	30.495	32.474	62.969	112,64	559
2	Gununghalu	39.745	42.014	81.759	155,47	526
3	Sindangkerta	37.750	38.887	76.637	106,30	721
4	Cililin	48.399	50.997	99.396	77,83	1.277
5	Cihampelas	69.124	72.395	141.519	47,04	3.008
6	Cipongkor	51.321	53.594	104.915	80,16	1.309
7	Batujajar	56.024	57.593	113.617	31,11	3.652
8	Saguling	17.490	18.144	35.634	51,58	691
9	Cipatat	71.326	74.222	145.548	125,98	1.155
10	Padalarang	92.294	95.416	187.710	51,63	3.636
11	Ngamprah	90.165	93.129	183.294	35,65	5.141
12	Parongpong	57.467	59.213	116.680	45,02	2.592
13	Lembang	99.696	103.536	203.232	98,22	2.069
14	Cisarua	40.438	41.862	82.300	55,63	1.479
15	Cikalongwetan	65.185	67.896	133.081	110,94	1.200
16	Cipeundeuy	44.672	46.673	91.345	102,19	894
Kab. Bandung Barat		911.591	948.045	1.859.636	1.287,41	1.445

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, BPS, 2023

Pada tahun 2023 kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat adalah 1.445 jiwa per Km2 dengan wilayah terpadat berada di Kecamatan Ngamprah dengan kepadatan 5.141 jiwa per Km2 dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Gununghalu dengan kepadatan 526 jiwa per Km2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 adalah sebesar 1,43% dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Cihampelas sebesar 2,38% sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Lembang sebanyak 1,02%.

Komposisi penduduk yang digambarkan oleh Piramida Kabupaten Bandung Barat pada Gambar 2.28 memperlihatkan tingkat fertilitas yang menurun di periode 10 tahun terakhir. Ini dapat terjadi karena kesadaran dari masyarakat mengenai keluarga kecil sejahtera disamping berjalannya program pemerintah dalam pengendalian jumlah penduduk dari sisi kelahiran.

Gambar 2.9 Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat
Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020



Sumber : BPS, Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (diolah)

Terlihat dari bentuk piramida penduduk diatas, persentase penduduk Kab. Bandung Barat pada kelompok umur di bawah 15 tahun terhitung di bawah 30 persen. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa penduduk Kabupaten Bandung Barat tergolong struktur penduduk tua, yang artinya perbandingan penduduk usia produktif lebih besar dari yang tidak produktif.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari beberapa focus, yaitu focus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial serta fokus seni budaya dan olahraga. Capaian kinerja pembangunan aspek kesejahteraan masyarakat yang mewakili gambaran kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat dengan dukungan data beberapa tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

2.1.2.1.1 Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu menggunakan pendekatan produksi/sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya/pengeluaran.

PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksi barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada periode perhitungan/tahun berjalan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha bertujuan untuk melihat struktur ekonomi, besarnya peranan berbagai lapangan usaha dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Pada periode tahun 2019-2023, PDRB ADHB Kabupaten Bandung Barat terus meningkat, yakni sebesar 47.180,08 miliar Rupiah (2019); 46.478,90 miliar Rupiah (2020); 48.764,31 miliar Rupiah (2021); 51.921,29 miliar Rupiah (2022) dan 56.945,18 miliar Rupiah (2023), seperti terlihat di tabel berikut

Tabel 2.12 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 Kabupaten Bandung Barat

No	Sektor	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.362,86	6.173,59	6.140,22	6.812,50	7.247,21
2	Pertambangan dan Penggalian	476,90	476,31	506,84	517,68	535,90
3	Industri Pengolahan	18.816,07	18.744,16	20.188,77	22.012,92	23.440,63
4	Listrik dan Gas	390,49	375,83	418,08	441,35	463,10
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	17,78	19,68	21,60	23,85	24,50
6	Konstruksi	3.613,70	3.421,28	3.683,20	3.878,19	4.184,36
7	Perdagangan besar dan eceran	6.404,98	5.991,72	6.188,06	6.535,27	7.060,70
8	Transportasi dan pergudangan	2.503,97	2.436,30	2.511,57	2.905,25	3.409,12
9	Penyediaan akomodasi dan	2.436,39	2.401,86	2.417,65	2.783,85	3.063,80

	makan minum					
10	Informasi dan komunikasi	786,49	999,36	1.069,96	1.120,75	1.191,52
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	414,20	418,93	455,56	490,38	516,24
12	Real Estate	853,13	855,11	939,98	1.016,14	1.096,94
13	Jasa Perusahaan	212,59	192,79	218,83	253,49	283,21
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib	1.365,49	1.269,76	1.242,43	1.201,45	1.247,80
15	Jasa Pendidikan	1.742,81	1.942,60	1.983,84	2.078,60	2.248,48
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	259,85	258,02	274,36	290,83	316,87
17	Jasa lainnya	522,36	501,60	503,35	558,78	614,81
PDRB ADHB		47.180,08	46.478,90	48.764,31	52.921,29	56.945,18

Sumber : PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023, BPS.

Selama lima tahun terakhir (2019-2022) struktur perekonomian Bandung Barat didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini dapat dilihat dari distribusi peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.13 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 (persen)

No	Sektor	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,49	13,28	12,59	12,87	12,73
2	Pertambangan dan Penggalian	1,01	1,02	1,04	0,98	0,94
3	Industri Pengolahan	39,88	40,33	41,40	41,60	41,66
4	Listrik dan Gas	0,83	0,81	0,86	0,83	0,81
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
6	Konstruksi	7,66	7,36	7,55	7,33	7,35
7	Perdagangan besar dan eceran	13,58	12,89	12,69	12,35	12,40
8	Transportasi dan pergudangan	5,31	5,24	5,15	5,49	5,99
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,16	5,17	4,96	5,26	5,38
10	Informasi dan komunikasi	1,67	2,15	2,19	2,12	2,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,88	0,90	0,93	0,93	0,91
12	Real Estate	1,81	1,84	1,93	1,92	1,93
13	Jasa Perusahaan	0,45	0,41	0,45	0,48	0,50
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan 2social wajib	2,89	2,73	2,55	2,27	2,19
15	Jasa Pendidikan	3,69	4,18	4,07	3,93	3,95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	0,55	0,56	0,56	0,55	0,56

No	Sektor	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
17	Jasa lainnya	1,11	1,08	1,03	1,06	1,08
PDRB ADHB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023, BPS.

PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksi barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar. PDRB Atas Dasar Harga Konstan terus meningkat dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2019 nilai PDRB ADHK sebesar 31.398,35 milyar tetapi akibat adanya pandemi covid-19 di awal tahun 2020, angka PDRB ADHK mengalami penurunan menjadi 30.640,41 miliar rupiah pada tahun 2020. Tetapi pada tahun 2021, 2022, 2023 secara nominal PDRB ADHK Kabupaten Bandung Barat menunjukkan peningkatan menjadi 31.701,79 milyar pada tahun 2021, 33.393,29 milyar pada tahun 2022 dan 35.062,19 milyar pada tahun 2023, perkembangannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel gambar dan tabel berikut:

Tabel 2.14 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 Kabupaten Bandung Barat

No	Sektor	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.734,13	3.711,11	3.672,82	3.823,82	3.884,46
2	Pertambangan dan Penggalian	329,67	322,49	342,68	342,29	344,65
3	Industri Pengolahan	12.826,82	12.516,78	13.126,08	13.970,00	14.710,29
4	Listrik dan Gas	237,13	229,82	254,96	266,93	273,12
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	11,50	12,68	13,89	14,95	15,28
6	Konstruksi	2.349,05	2.214,82	2.378,25	2.419,98	2.528,35
7	Perdagangan besar dan eceran	4.382,11	4.024,97	4.142,79	4.305,72	4.479,13
8	Transportasi dan pergudangan	1.605,32	1.544,01	1.561,04	1.716,34	1.894,38
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.645,77	1.568,89	1.553,41	1.709,15	1.866,42
10	Informasi dan komunikasi	799,67	1.015,82	1.094,91	1.155,96	1.228,47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	259,49	263,15	277,91	274,48	284,16
12	Real Estate	615,11	616,38	677,19	731,75	777,36
13	Jasa Perusahaan	154,16	135,50	146,31	161,89	173,66
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib	764,96	706,20	688,15	666,91	683,00
15	Jasa Pendidikan	1.165,30	1.241,42	1.241,87	1.272,15	1.322,48
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	172,96	172,47	182,98	192,58	203,64
17	Jasa lainnya	345,21	343,91	346,54	368,39	393,35
PDRB ADHK		31.398,35	30.640,41	31.701,79	33.393,29	35.062,19

Sumber : PDRB Kabupaten Bandung Barat menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023, BPS.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah, hal ini berguna untuk mengetahui apakah suatu wilayah tersebut mengalami peningkatan secara terus menerus atau sebaliknya yaitu mengalami penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pada tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan terakhir tahun 2023 pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,00 persen. Laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 (persen)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,24	-0,62	-1,03	4,11	1,59
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,29	-2,18	6,26	-0,11	0,69
C	Industri Pengolahan	6,26	-2,42	4,87	6,43	5,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,17	-3,08	10,94	4,70	2,32
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,94	10,21	9,58	7,61	2,23
F	Konstruksi/Construction	7,38	-5,71	7,38	1,75	4,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,84	-8,15	2,93	3,93	4,03
H	Transportasi dan Pergudangan	4,43	-3,82	1,10	9,95	10,37
I	Penyediaan Akomodasi & Mamin	6,33	-4,67	-0,99	10,03	9,20
J	Informasi dan Komunikasi	8,39	27,03	7,79	5,58	6,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,44	1,41	5,61	-1,24	3,53
L	Real Estate	8,58	0,21	9,86	8,06	6,23
M,N	Jasa Perusahaan	7,58	-12,11	7,98	10,65	7,27
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,03	-7,68	-2,56	-3,09	2,41
P	Jasa Pendidikan	4,76	6,53	0,04	2,44	3,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,55	-0,28	6,09	5,25	5,74
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,45	-0,38	0,76	6,30	6,78
Produk Domestik Regional Bruto		5,05	-2,41	3,46	5,34	5,00

Sumber : PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023, BPS.

Pada tahun 2023, Kabupaten Bandung Barat mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 persen. Hal ini terlihat dari peningkatan aktivitas produksi di semua lapangan usaha dengan percepatan pertumbuhan ekonomi terbesar terdapat pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 10,37 persen dan percepatan pertumbuhan ekonomi paling kecil ada pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 0,69 persen.

Tabel 2.16 dan Gambar 2.10 memperlihatkan capaian kinerja pembangunan sektor ekonomi selama 3 (tiga) tahun terakhir dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 – 2023 serta perbandingannya dengan capaian nasional dan Provinsi Jawa Barat:

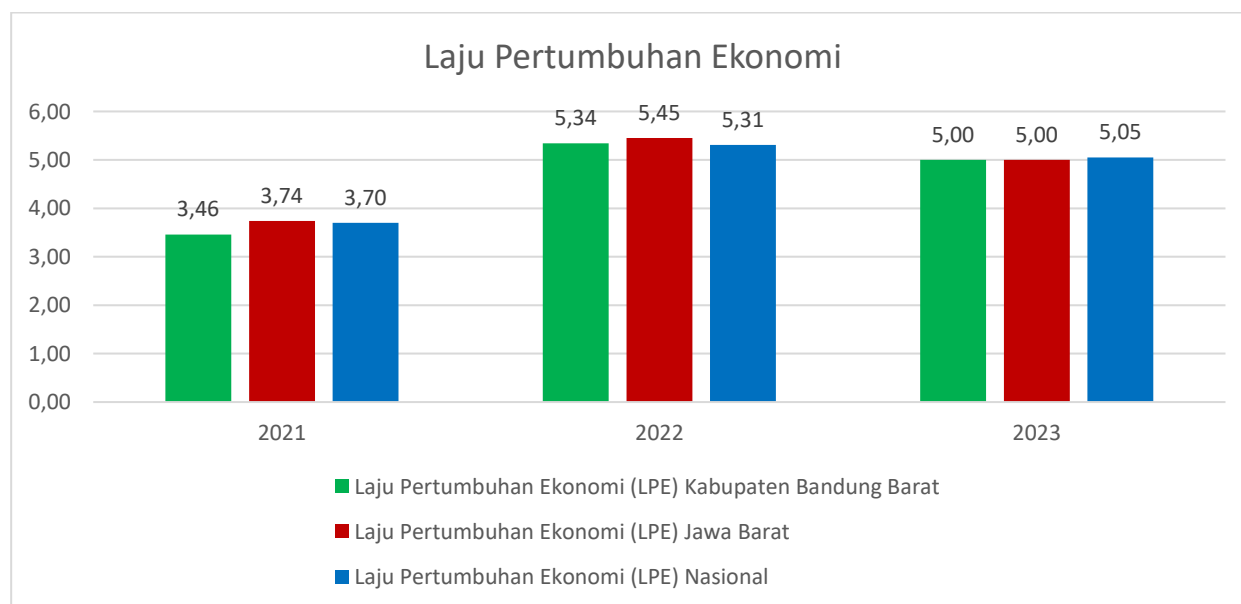
**Tabel 2.16 Target dan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2022**

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Satuan	Target dan Capaian Tahun		
		2021	2022	2023
Target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,17*	4,64*	4,88*
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		3,46	5,34	5,00

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2024.

* Target berdasarkan Perubahan RPJMD 2018-2023

Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Dibandingkan Target Daerah Dan Capaian Provinsi Jawa Barat serta Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat diolah Bappelitbangda, 2024

Dalam konstelasi regional Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menunjukkan arah pemulihan ekonomi dialami oleh semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Pertumbuhan ekonomi 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan semua kabupaten/kota mengalami pertumbuhan positif rata-rata sebesar 5 persen.

Pertumbuhan tertinggi dialami oleh Kabupaten Indramayu sebesar 9,76 persen sementara pertumbuhan ekonomi terendah dialami oleh Kota Banjar sebesar 4,63 persen sedangkan Kabupaten Bandung Barat dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,00 persen, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2021-2023 (persen)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
Bogor	3,55	5,25	5.19
Sukabumi	3,75	5,12	5.17
Cianjur	3,48	5,04	5.16
Bandung	3,56	5,35	4.97
Garut	3,58	5,08	4.94
Tasikmalaya	3,43	4,70	4.69
Ciamis	3,66	5,02	4.99
Kuningan	3,56	5,53	5.25
Cirebon	2,47	4,09	4.85
Majalengka	4,75	6,63	6.15
Sumedang	3,17	5,03	5.01
Indramayu	0,58	2,88	9.76
Subang	2,40	4,21	4.64
Purwakarta	3,42	5,24	4.97
Karawang	5,85	6,31	5.40
Bekasi	3,65	5,30	5.32
Bandung Barat	3,46	5,34	5.00
Pangandaran	3,67	5,03	5.26
Kota Bogor	3,76	5,65	5.10
Kota Sukabumi	3,71	5,35	5.12
Kota Bandung	3,76	5,41	5.07
Kota Cirebon	3,04	5,10	5.01
Kota Bekasi	3,22	4,96	5.43
Kota Depok	3,76	5,24	5.05
Kota Cimahi	4,19	5,92	5.19
Kota Tasikmalaya	3,57	5,01	5.96
Kota Banjar	3,46	4,19	4.63
Jawa Barat	3,74	5,45	5.00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

2.1.2.2 Inflasi

Secara teoritis, laju inflasi berperan dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tergolong rendah akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif (meskipun pertumbuhan tersebut dapat saja bersifat menurun). Apabila sisi permintaan di dalam perekonomian lebih kuat dibandingkan dengan sisi penawarannya, maka secara teoritis penurunan laju inflasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, demikian sebaliknya.

Kabupaten Bandung Barat bukan termasuk Kabupaten/Kota yang dihitung nilai inflasinya. Bagi kabupaten yang tidak dihitung maka ada kota rujukan inflasi, dimana kota inflasi tersebut memiliki karakteristik ekonomi yang tidak jauh berbeda dan atau memiliki kedekatan secara geografis.

Berikut ditampilkan inflasi Kota Bandung, dengan pertimbangan secara geografis Kota Bandung merupakan kota yang menjadi acuan perhitungan inflasi Kabupaten Bandung Barat, serta sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat berbelanja dan memiliki pola konsumsi yang mengarah ke Kota Bandung. Perkembangan inflasi tahunan 7 Kota di Jawa Barat, termasuk inflasi Kota Bandung selama 5 tahun terakhir sebagai rujukan inflasi di Kabupaten Bandung Barat:

Tabel 2.18 Inflasi Y to Y Kota di Jawa Barat Tahun 2023

Kota	2019	2020	2021	2022	2023*
Kota Bogor	3,02	2,18	1,93	5,82	3,36
Kota Sukabumi	2,33	1,84	1,71	5,45	2,72
Kota Bandung	2,78	1,75	1,65	7,45	0,63
Kota Cirebon	2,00	1,16	1,81	4,86	3,22
Kota Bekasi	4,28	2,81	1,61	5,37	3,14
Kota Depok	3,29	1,78	1,81	6,06	2,49
Kota Tasikmalaya	1,72	1,61	1,17	6,65	2,84
Jawa Barat	3,21	2,18	1,69	6,04	2,48

Sumber: Indikator Statistik Terkini Prov. Jabar, BPS Prov. Jabar, Des 2023

2.1.2.3 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya, yang antara lain mencakup Kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, sehingga tidak mampu mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur

dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yaitu sebesar 2,5 dolar AS PPP per kapita per hari.

Bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, sehingga diperlukan langkah penanggulangan kemiskinan di Kab. Bandung Barat yang didukung oleh data yang akurat, strategi dan arah kebijakan yang tepat sasaran. Kemiskinan sebagai indikator yang dihasilkan dari perbedaan pengeluaran/pendapatan masyarakat, suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin ketika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Perkembangan tingkat kemiskinan, penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 - 2023 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2.19 Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023

Persentase Penduduk Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	
		(rupiah/kapita/bulan)	Miskin (persen)
2019	341.307	159,03	9,38
2020	362.212	179,46	10,49
2021	374.470	190,77	11,30
2022	393.956	183,70	10,82
2023	426.355	179,43	10,52

Sumber : KBBDA, 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah.

Dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2019 –2023, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp.85.048,- dari Rp.341.307,- per kapita per bulan pada Tahun 2019 menjadi Rp.426.355,- per kapita per bulan pada Tahun 2023. Pada Tabel berikut, memperlihatkan angka target dan capaian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.

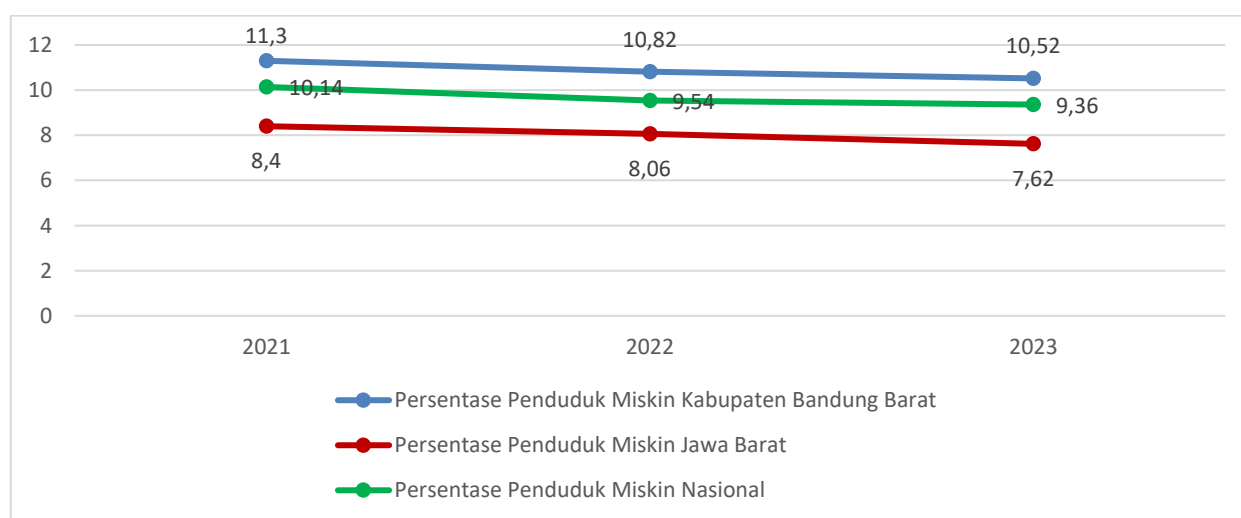
**Tabel 2.20 Target dan Capaian Presentase Penduduk Miskin
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2022**

Presentase Penduduk Miskin	Satuan	Target dan Capaian Tahun		
		2021	2022	2023
Target Presentase Penduduk Miskin	Persen	11,11	11,02	10,75
Capaian Presentase Penduduk Miskin		11,30	10,82	10,52

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2024. Target berdasarkan Perubahan RPJMD 2018-2023

Perkembangan tingkat kemiskinan Kab. Bandung Barat pada periode tahun 2021-2023 dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional ditunjukkan pada Gambar 2.14. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat masih relatif tinggi tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

**Gambar 2.11 Presentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Barat dan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 - 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat diolah Bappelitbanda, 2024

Bila dilihat dari skala nasional, kemiskinan Kab. Bandung Barat masih di atas nasional dan dalam skala regional tingkat kemiskinan Kab. Bandung Barat masih tinggi yaitu berada pada peringkat 22 dari 27 Kab/Kota di Jabar

**Tabel 2.21 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2019-2023 (Persen)**

Peringkat	Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Depok	2.07	2.45	2.58	2.53	2.38
2	Kota Bandung	3.38	3.99	4.37	4.25	3.96
3	Kota Bekasi	3.81	4.38	4.74	4.43	4.10



Peringkat	Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	2022	2023
4	Kota Cimahi	4.39	5.11	5.35	5.11	4.66
5	Bekasi	4.01	4.82	5.21	5.01	4.93
6	Kota Banjar	5.50	6.09	7.11	6.73	6.14
7	Bandung	5.94	6.91	7.15	6.80	6.40
8	Kota Bogor	5.77	6.68	7.24	7.10	6.67
9	Sukabumi	6.22	7.09	7.70	7.34	7.01
10	Ciamis	6.65	7.62	7.97	7.72	7.42
11	Bogor	6.66	7.69	8.13	7.73	7.27
12	Kota Sukabumi	6.67	7.70	8.25	8.02	7.50
13	Karawang	7.39	8.26	8.95	8.44	7.87
14	Purwakarta	7.48	8.27	8.83	8.70	8.46
15	Pangandaran	7.71	8.99	9.65	9.32	8.98
16	Kota Cirebon	8.41	9.52	10.03	9.82	9.16
18	Sumedang	9.05	10.26	10.71	10.14	9.36
17	Subang	8.12	9.31	10.03	9.75	9.52
19	Garut	8.98	9.98	10.65	10.42	9.77
20	Cianjur	9.15	10.36	11.18	10.55	10.22
21	Tasikmalaya	9.12	10.34	11.15	10.73	10.28
22	Bandung Barat	9.38	10.49	11.30	10.82	10.52
23	Cirebon	9.94	11.24	12.30	12.01	11.20
24	Majalengka	10.06	11.43	12.33	11.94	11.21
25	Kota Tasikmalaya	11.60	12.97	13.13	12.72	11.53
26	Kuningan	11.41	12.82	13.10	12.76	12.12
27	Indramayu	11.11	12.70	13.04	12.77	12.13
Provinsi Jawa Barat		6.91	7.88	8.40	8.06	7.62
Nasional		9.22	10.19	9.71	9.57	9.36

Sumber : Data Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2019-2023, diolah.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1), semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahannya (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran

penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2.22 Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2019	1,54	0,33
2020	1,40	0,25
2021	1,62	0,32
2022	1,56	0,31
2023	1,54	0,34

Sumber : KBBDA, 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, yaitu setara dengan USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) yang oleh Bank Dunia dihitung dengan membandingkan berbagai komoditas antar negara. Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, maka perlu disajikan data kemiskinan ekstrem. Berdasarkan Kepmen Menko Bidang PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 bahwa Kab. Bandung Barat merupakan salah satu prioritas lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem dari 212 Kab/Kota.

Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Bandung Barat terus mengalami penurunan dari 2,91 persen tahun 2020 meningkat menjadi 1,82 persen pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.23 Data Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Data P3KE di Kab/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023**

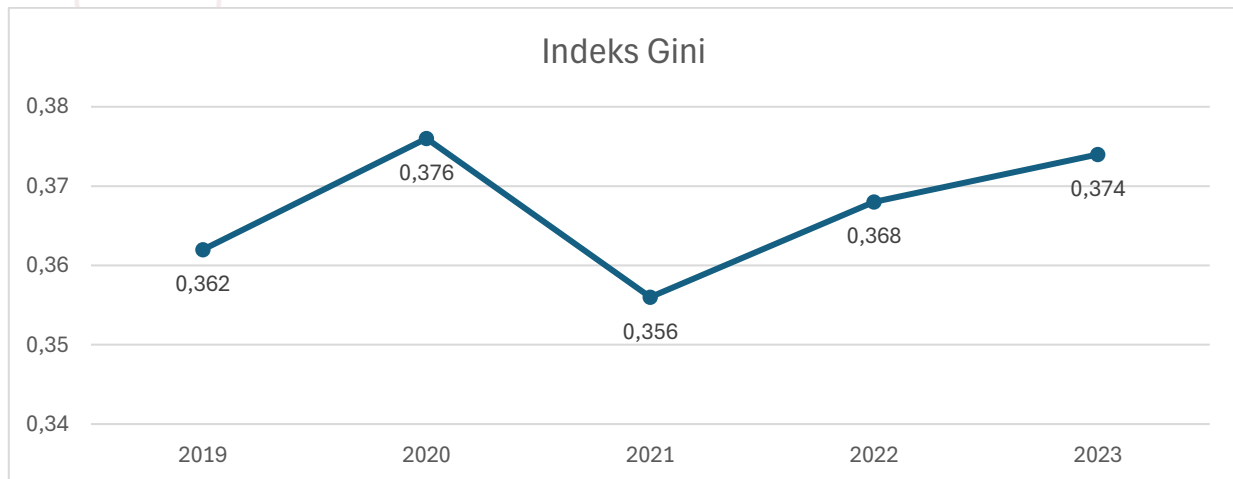
No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem				Persen Penduduk Miskin Ekstrem			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Bogor	63,497	107,250	146,120	47,220	1.17	1.77	2.38	0.76
2	Sukabumi	30,525	24,610	19,900	24,050	1.12	0.98	0.78	0.94
3	Cianjur	94,891	57,040	36,160	11,890	3.83	2.45	1.55	0.51
4	Bandung	89,145	66,960	56,430	46,810	2.46	1.78	1.48	1.22
5	Garut	50,937	30,320	82,170	9,550	1.97	1.15	3.10	0.36
6	Tasikmalaya	23,315	28,240	15,740	27,120	1.25	1.57	0.87	1.49
7	Ciamis	20,280	5,510	17,900	1,320	1.65	0.45	1.47	0.11
8	Kuningan	73,564	24,030	31,890	15,700	6.30	2.20	2.90	1.42
9	Cirebon	74,930	64,440	81,890	36,640	3.30	2.92	3.70	1.65
10	Majalengka	39,164	43,840	24,130	10,640	3.00	3.58	1.96	0.86
11	Sumedang	57,510	31,710	36,820	6,370	4.99	2.69	3.11	0.53
12	Indramayu	110,433	75,820	53,050	38,550	6.02	4.32	3.01	2.18
13	Subang	59,825	57,510	35,440	34,610	3.75	3.63	2.23	2.16
14	Purwakarta	29,437	18,580	16,930	10,190	2.95	1.95	1.76	1.06
15	Karawang	110,003	28,220	64,020	17,890	4.51	1.20	2.70	0.75
16	Bekasi	71,288	56,000	25,820	19,820	2.29	1.44	0.64	0.48
17	Bandung Barat	52,041	28,250	33,590	15,040	2.91	1.67	1.98	0.88
18	Pangandaran	17,413	5,610	5,930	2,650	4.11	1.38	1.46	0.65
19	Kota Bogor	28,789	13,590	14,450	4,930	2.76	1.23	1.30	0.44
20	Kota Sukabumi	10,875	9,980	4,490	2,540	3.14	3.03	1.35	0.76
21	Kota Bandung	41,795	24,790	25,370	9,140	1.71	0.96	0.98	0.35
22	Kota Cirebon	17,732	13,060	5,320	1,090	5.32	4.10	1.66	0.34
23	Kota Bekasi	31,796	33,250	61,750	-	1.25	1.09	1.99	-
24	Kota Depok	50,380	9,440	17,570	-	2.45	0.38	0.69	-
25	Kota Cimahi	11,027	8,340	2,630	2,980	1.94	1.37	0.43	0.49
26	Kota Tasikmalaya	30,365	27,170	23,880	6,590	4.24	3.99	3.49	0.96
27	Kota Banjar	2,894	2,080	2,490	80	1.44	1.10	1.32	0.04
Provinsi Jawa Barat		1,293,850	895,640	941,860	403,380	2.68	1.79	1.86	0.79
Nasional						4.00	2.14	1.74	1.12

Sumber : Data P3KE, Kemenko PMK, 2024.

2.1.1.1 Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Indikator pertama yang digunakan untuk mendapatkan gambaran ketimpangan pendapatan suatu wilayah yaitu gini rasio. Secara umum perkembangan nilai Gini Ratio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023 berfluktuatif namun cenderung selalu berada pada level ketimpangan rendah ($<0,4$) seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.12 Grafik Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023

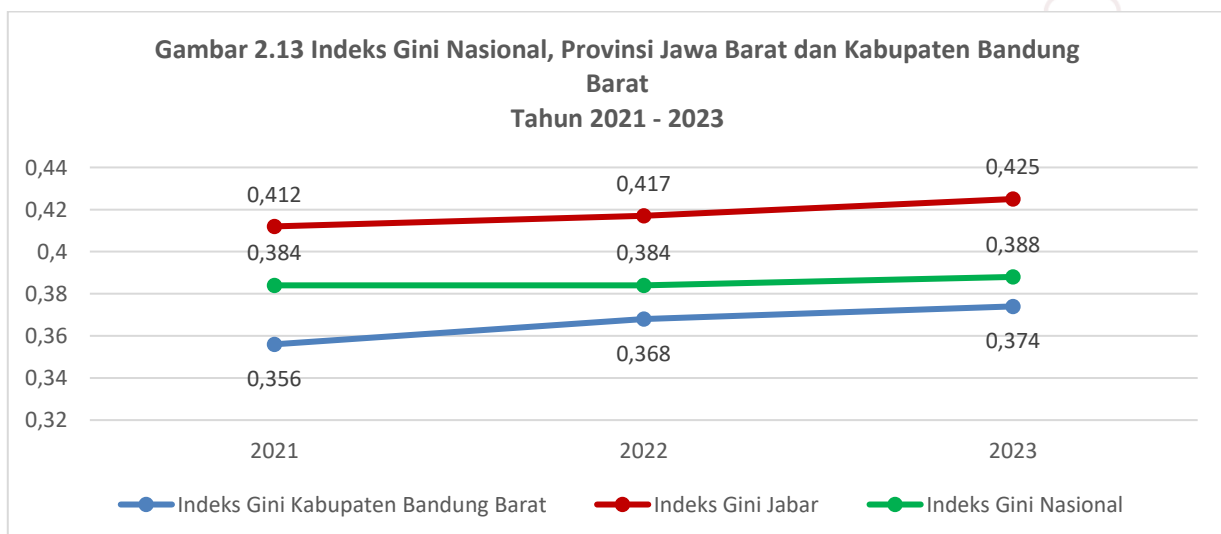


Sumber: KBBDA, 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Selama lima tahun terakhir cpaian gini rasio Kab. Bandung Barat cenderung meningkat, pada tahun 2018 mencapai gini rasio tertinggi yaitu sebesar 0,394 pada tahun 2019 turun menjadi 0,362 atau turun sebesar 0,032 poin. Tetapi Pada tahun 2020 gini rasio meningkat sebesar 0,014 menjadi 0,376 poin, tetapi melalui program bantuan sosial dan pemulihan ekonomi yang cukup efektif di tahun 2021 indeks gini kembali turun menjadi 0,356 tetapi naik kembali di tahun 2022 menjadi 0,368 poin dan 0.374 point di tahun 2023.

Bila dilihat dari skala regional Jawa Barat dan Nasional selama 3 (tiga) tahun terakhir, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bandung Barat masih di bawah Jawa Barat dan Nasional, seperti terlihat pada grafik berikut:

Gambar 2.13 Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 - 2023



Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

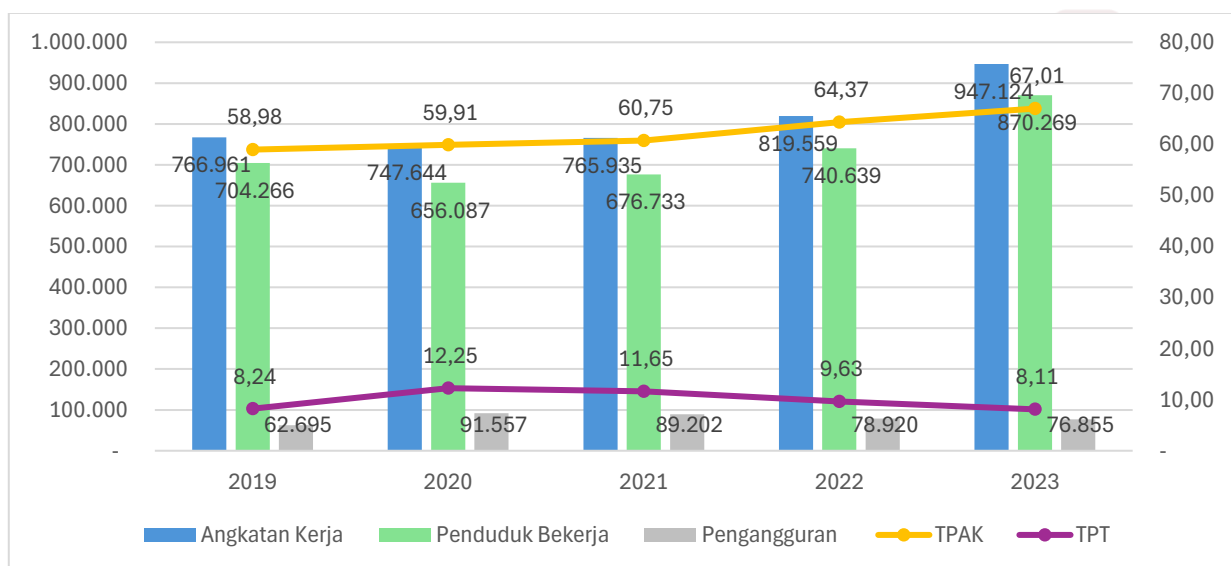
Nilai indeks pada grafik tersebut, menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan wilayah Kabupaten Bandung Barat termasuk kategori dengan ketimpangan rendah karena nilainya masih di bawah 0,4. Tetapi Pemerintah Daerah harus bertindak cepat walaupun masih kategori rendah namun jaraknya cukup dekat dengan kategori sedang.

2.1.2.5 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan tidak dapat terlepas dari pertumbuhan ekonomi, tumbuhnya ekonomi diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Penduduk angkatan kerja yang terdiri dari komposisi penduduk bekerja dan mencari pekerjaan pada dasarnya merupakan bagian dari penduduk yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan perekonomian di suatu wilayah. Indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat dilihat berdasarkan jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat pengangguran Terbuka (TPT).

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik jika pertumbuhan angkatan kerja yang terserap/terakomodasi oleh lapangan kerja dapat mengimbangi pengangguran yang terjadi. Dari gambar berikut, selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja, dari 767 ribu pada tahun 2019 menjadi 947 ribu pada tahun 2023, dengan penjelasan kondisi ketenagakerjaan selama tahun 2019- 2023 dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 2.14 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat 2019-2023



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Tahun 2019-2023, diolah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Barat dari 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan dari 8,24% menjadi 12,25%. Pada Tahun 2021 s.d 2023 di Kabupaten Bandung Barat tingkat penganggur terbuka (TPT) kembali menurun seiring berangsur-angsurnya pergerakan manusia karena pandemi mulai mereda, TPT pada tahun 2021 sebesar 11,65 persen, tahun 2022 sebesar 9,63 persen dan tahun 2023 turun kembali menjadi 8,11 persen. Pada Tabel dan Gambar berikut, memperlihatkan capaian kinerja ketenagakerjaan selama 3 tahun terakhir serta perbandingannya dengan capaian nasional dan Provinsi Jawa Barat:

Tabel 2.24 Target dan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 - 2023

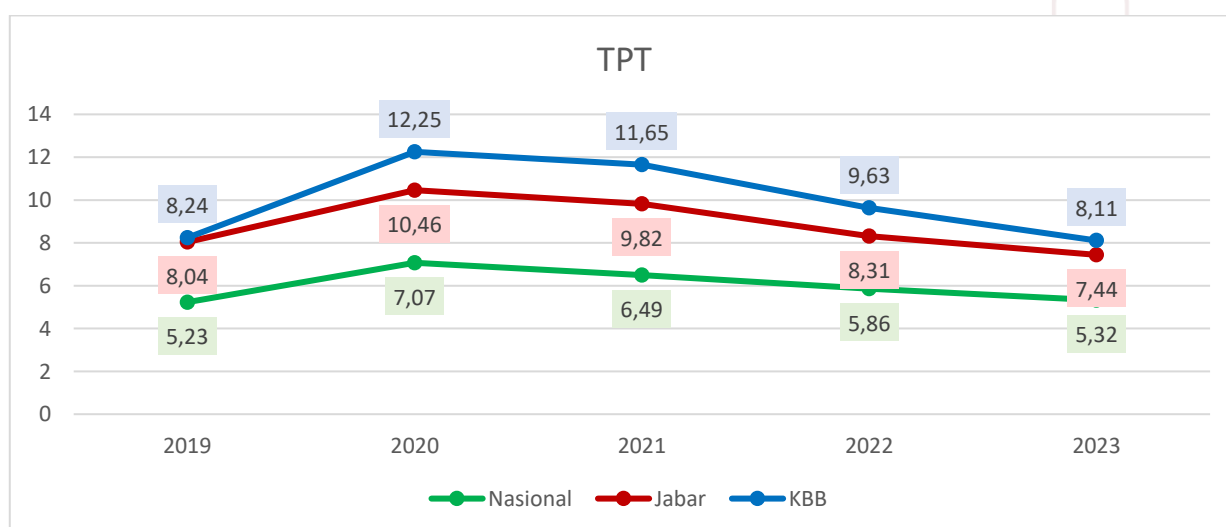
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Satuan	Target dan Capaian Tahun		
		2021	2022	2023
Target (TPT)	Persen	11,61*	11,31*	10,95*
Capaian TPT)		11,65	9,63	8,11

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2022.

*Target berdasarkan Perubahan RPJMD 2018-2023

Walaupun tingkat pengangguran pada tahun 2022 dan 2023 telah menyentuh satu digit, tetapi kondisi tingkat pengangguran di Kab. Bandung Barat masih tinggi bila dibandingkan dengan capaian TPT Jawa Barat dan nasional. Kondisi ini menandakan laju pertumbuhan angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat lebih cepat dibanding pertumbuhan lapangan kerja, sehingga angkatan kerja yang tersedia tidak seluruhnya terserap pasar kerja, untuk lebih jelasnya digambarkan berikut:

Gambar 2.15 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 – 2023



Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Pada skala regional Jawa Barat, sampai dengan tahun 2023 rata-rata Kab/Kota di Jawa Barat mampu menekan angka pengangguran sampai dengan 1 (satu) digit salah satunya Kab. Bandung Barat dengan capaian TPT sebesar 8,11 persen.

**Tabel 2.25 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
Di Jawa Barat 2019-2023 (Persen)**

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bogor	9.11	14.29	12.22	10.64	8.47
2	Sukabumi	8.05	9.60	9.51	7.77	7.32
3	Cianjur	9.81	11.05	9.32	8.41	7.71
4	Bandung	5.51	8.58	8.32	6.98	6.52
5	Garut	7.35	8.96	8.68	7.60	7.33
6	Tasikmalaya	6.31	7.12	6.16	4.17	3.89
7	Ciamis	5.16	5.66	5.06	3.75	3.52
8	Kuningan	9.68	11.22	11.68	9.81	9.49
9	Cirebon	10.35	11.52	10.38	8.11	7.65
10	Majalengka	4.37	5.84	5.71	4.16	4.12
11	Sumedang	7.70	9.89	9.18	7.72	6.94
12	Indramayu	8.35	9.21	8.30	6.49	6.46
13	Subang	8.68	9.48	9.77	7.77	7.65
14	Purwakarta	9.73	11.07	10.70	8.75	7.72
15	Karawang	9.68	11.52	11.83	9.87	8.95
16	Bekasi	9.00	11.54	10.09	10.31	8.87
17	Bandung Barat	8.24	12.25	11.65	9.63	8.11
18	Pangandaran	4.52	5.08	3.25	1.56	1.52
19	Kota Bogor	9.16	12.68	11.79	10.78	9.39
20	Kota Sukabumi	8.49	12.17	10.78	8.83	8.53
21	Kota Bandung	8.18	11.19	11.46	9.55	8.83
22	Kota Cirebon	9.04	10.97	10.53	8.42	7.66
23	Kota Bekasi	8.30	10.68	10.88	8.81	7.90
24	Kota Depok	6.12	9.87	9.76	7.82	6.97
25	Kota Cimahi	8.09	13.30	13.07	10.77	10.52
26	Kota Tasikmalaya	6.78	7.99	7.66	6.62	6.55
27	Kota Banjar	6.16	6.73	6.09	5.53	5.43
Provinsi Jawa Barat		8.04	10.46	9.82	8.31	7.44

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan utama pembangunan manusia adalah untuk memastikan bahwa manusia dapat memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki. Hal ini tentunya dapat terwujud apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif.

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu daerah. Capaian pembangunan manusia di Kab. Bandung Barat tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.26 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2019 - 2023**

No	Komponen	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,18	72,34	72,52	72,79	73,10
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,86	11,87	11,88	11,89	11,91
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,18	8,19	8,20	8,22	8,23
4.	Pengeluaran Perkapita (ribu Rupiah)	8.684	8.455	8.546	9.044	9.392
IPM		68,27	68,81	69,03	69,82	70,33

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah.

Berdasarkan tabel di atas, IPM Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 sebesar 73,10. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan.

Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Berdasarkan data pada tahun 2023, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 73,10 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 73,10 tahun. Dari sisi pendidikan, penduduk Bandung Barat yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 8,23 tahun masa sekolah atau berada di kelas VIII.

Selain itu, rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diperkirakan dapat mengenyam pendidikan hingga 11,91 tahun atau setara dengan Kelas XI atau sampai SMA kelas 2. Pada aspek ekonomi, pengeluaran per kapita sudah mencapai 9,392 juta rupiah per kapita per

tahun. Bila dilihat berdasarkan target yang telah ditetapkan, realisasi capai IPM 3 (tiga) tahun terakhir telah melebihi target, untuk lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.27 Target dan Capaian IPM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2022

Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Satuan	Target dan Capaian Tahun		
		2021	2022	2023
Target IPM	Poin	68,51*	68,57*	68,66*
Capaian IPM		69,03	69,82	70,33

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2023.

* Target berdasarkan Perubahan RPJMD 2018-2023

Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia juga menjadi salah satu indikator untuk melihat kemajuan pembangunan manusia. Berubahnya status pembangunan manusia dapat dijadikan indikator dalam membaca perkembangan pembangunan manusia. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia berdasarkan IPM menjadi 4 kelompok dengan kriteria sebagai berikut.

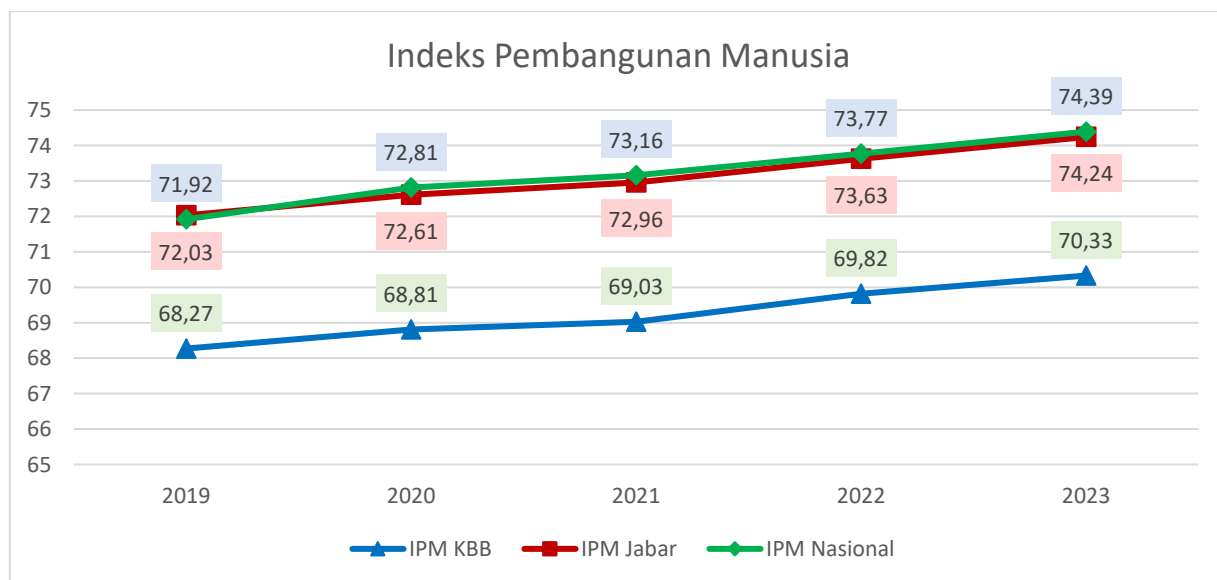
- Sangat Tinggi : $IPM \geq 80$
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- Rendah : $IPM < 60$

Bila mengacu pada klasifikasi pembagian status IPM di atas, maka IPM Kabupaten Bandung Barat selama 3 tahun terakhir termasuk dalam kategori “Kelompok sedang”, yakni kelompok daerah dengan nilai IPM berkisar antara 60 hingga 70 dan telah mencapai “kelompok Tinggi” di tahun 2023. Adapun capaian masing-masing komponen IPM cukup bervariasi. Masih dalam periode waktu yang sama, status indeks kesehatan termasuk dalam kategori “Kelompok Tinggi” (dengan capaian antara 70-80), status indeks pendidikan dan indeks daya beli masih dalam kategori “Kelompok Sedang” (dengan capaian antara 60-70). Ketiga komponen IPM secara simultan meningkatkan pencapaian IPM setiap tahun.

Hal ini mengindikasikan terjadinya perbaikan kualitas pembangunan manusia dari sisi kesehatan, pendidikan dan hidup layak penduduk beberapa tahun terakhir. Namun hal tersebut belum berarti bahwa kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat sudah cukup menggembirakan. Hal yang paling harus diperhatikan adalah tingkat pendidikan yang masih tergolong sedang. Posisi IPM Kabupaten Bandung Barat masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional, namun secara tren sama sama menunjukkan peningkatan yang konsisten

dalam lima tahun terakhir dengan capaian pada tahun 2023 sudah masuk dalam kategori IPM tinggi.

Gambar 2.16 Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat diolah Bappelitbanda, 2024

Dalam konstelasi regional Jawa Barat capaian IPM Kab/Kota menunjukkan adanya disparitas pembangunan sumber daya manusia, seperti terlihat pada tabel berikut. Perbedaan level pertumbuhan menunjukkan kinerja pembangunan manusia dalam kurun Tahun 2021- 2023, semakin cepat laju pertumbuhannya semakin cepat pula peningkatan IPM-nya.

Tabel 2.28 Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Jawa Barat Barat Tahun 2023

Kab/Kota	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran per Kapita	IPM
Bogor	71.92	12.64	8.37	11 153,00	71.78
Sukabumi	71.83	12.38	7.33	9 482,00	68.49
Cianjur	70.79	12.03	7.22	8 626,00	66.55
Bandung	74.27	12.73	9.10	11 018,00	73.74
Garut	72.07	12.16	7.84	8 685,00	68.11
Tasikmalaya	70.19	12.63	7.96	8 562,00	67.76
Ciamis	72.57	14.29	8.09	9 750,00	72.05
Kuningan	74.29	12.26	7.89	10 011,00	70.72
Cirebon	72.76	12.41	7.64	11 128,00	70.95
Majalengka	71.05	12.26	7.52	10 340,00	69.13
Sumedang	73.19	13.01	8.73	11 136,00	73.18
Indramayu	72.46	12.29	6.94	10 580,00	69.25
Subang	73.24	11.91	7.45	11 537,00	70.70
Purwakarta	71.74	12.18	8.13	12 619,00	72.09



Karawang	72.90	12.20	8.04	12 392,00	72.35
Bekasi	74.30	13.17	9.57	12 123,00	75.76
Bandung Barat	73.10	11.91	8.23	9 392,00	69.61
Pangandaran	72.17	12.30	8.04	9 406,00	69.38
Kota Bogor	74.45	13.45	10.64	12 656,00	77.85
Kota Sukabumi	73.11	13.60	10.37	11 799,00	76.32
Kota Bandung	75.04	14.24	11.06	18 236,00	83.04
Kota Cirebon	73.08	13.16	10.37	12 506,00	76.46
Kota Bekasi	75.79	14.12	11.66	16 479,00	83.03
Kota Depok	75.23	13.96	11.58	16 279,00	82.38
Kota Cimahi	74.80	13.84	11.39	12 883,00	79.46
Kota Tasikmalaya	72.92	13.49	9.54	11 063,00	74.47
Kota Banjar	71.80	13.27	8.79	11 356,00	73.08
Provinsi Jawa Barat	73.80	12.68	8.83	11 695,00	73.74

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

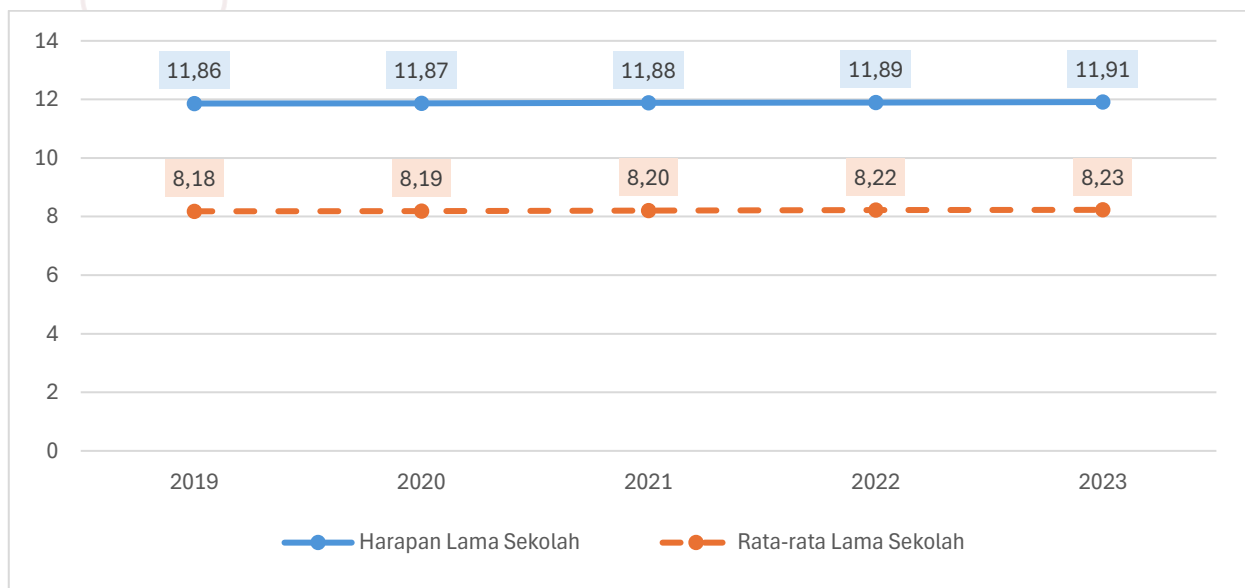
1. Pendidikan

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan dibentuk dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas.

Selama Periode 2019 hingga 2023, pengetahuan masyarakat Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren meningkat. Hal ini sejalan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang menunjukkan peningkatan. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah cenderung tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan harapan lama sekolah.

Hal ini wajar karena rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator keluaran pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (stock) dan penambahan (flow) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Gambar 2.17 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019-2023



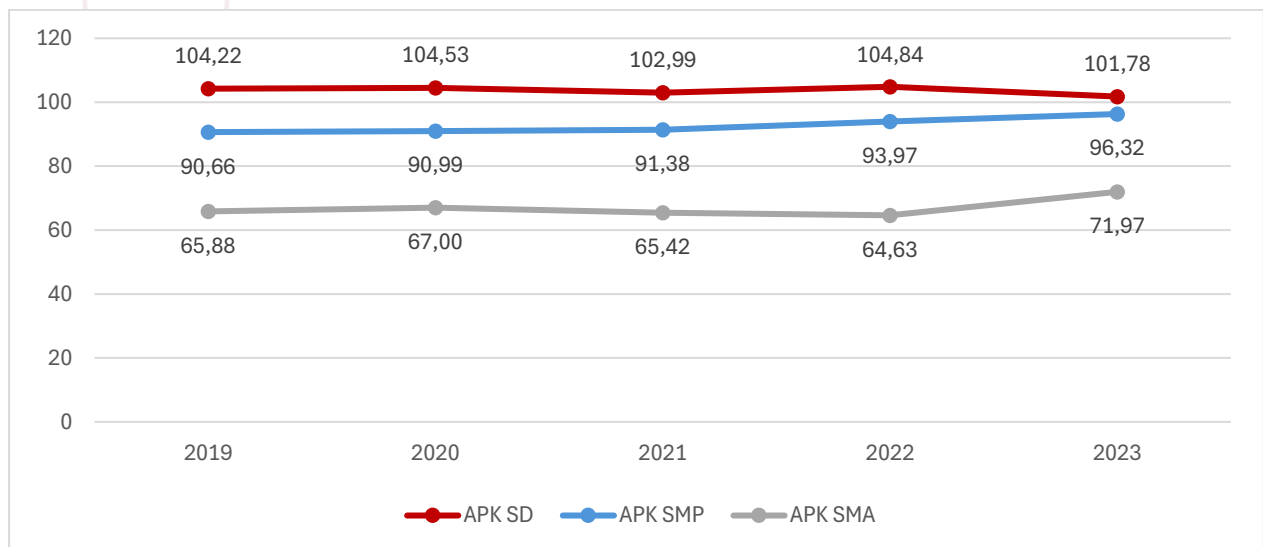
Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2019 hingga 2023. Secara rata-rata, harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 0,01 persen per tahun selama tahun 2019-2023. Sementara itu, rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 0,01 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama. Walau HLS dan RLS menunjukkan peningkatan tetapi peningkatannya lambat, sehingga sektor pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah, biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Gambar 2.18 APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 - 2023

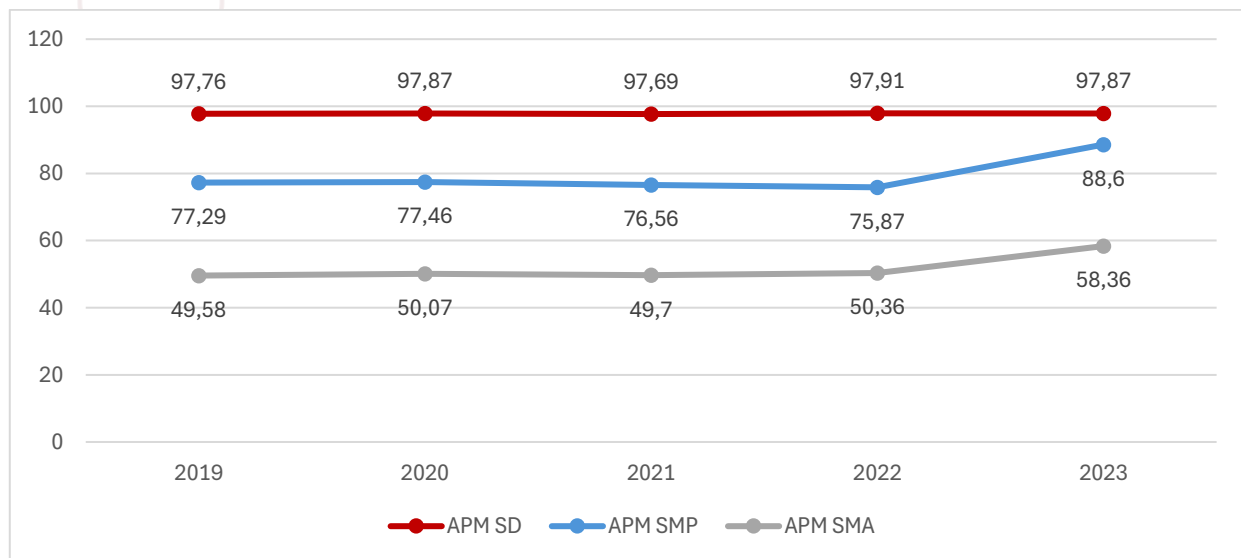


Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023, diolah

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen, hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia di atas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Pada Gambar 2.18 terlihat bahwa APK SD di Kabupaten Bandung Barat lebih dari 100 persen. Artinya terdapat siswa, baik lebih muda maupun lebih tua, yang berusia di luar batasan usia sekolah dasar (kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Hal ini dimungkinkan banyak masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat menyekolahkan anaknya ke Sekolah Dasar pada usia 5-6 tahun, disisi lain di daerah pedesaan masih banyak anak yang usianya di atas 12 tahun, tetapi masih duduk dibangku SD.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM yang mendekati nilai 100 menunjukkan bahwa hampir semua penduduk bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya. APM SD di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 adalah sebesar 97,87 persen, artinya 97,87 persen penduduk usia sekolah SD bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya.

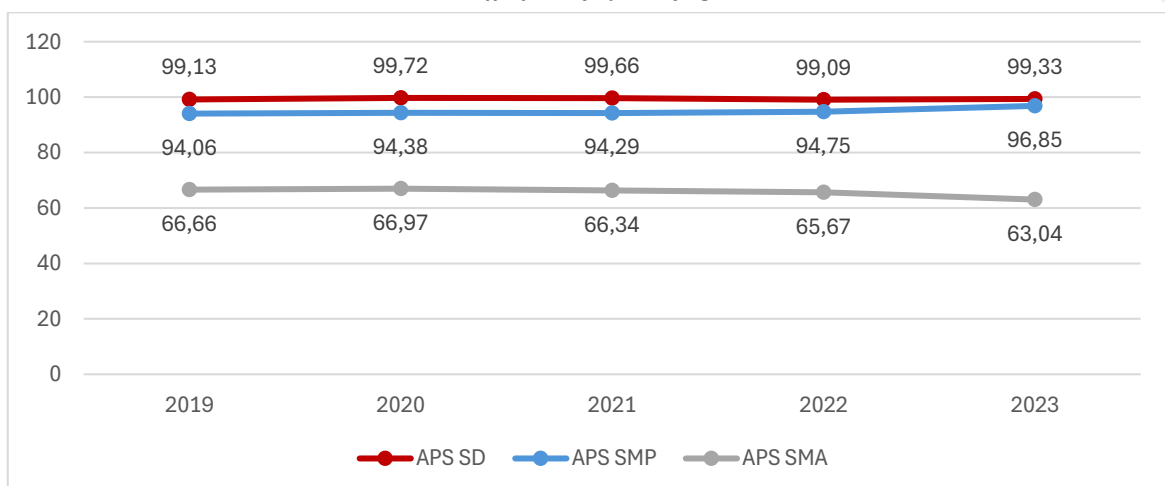
Gambar 2.19 APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023, diolah

Besarnya persentase APM SD ini masih berhubungan dengan gencarnya program wajib belajar yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat. APM SD penduduk laki-laki tampaknya lebih tinggi dibandingkan dengan APM SD penduduk perempuan. Angka Partisipasi Sekolah atau APS merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 % dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah.

Gambar 2.20 APS Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 - 2023



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023, diolah

Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal seperti Paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTS dan Paket C setara SMA/MA. Gambar 2.14 memperlihatkan APS penduduk Kabupaten Bandung Barat, dimana pada semua jenjang pendidikan tidak menunjukkan perbedaan yang besar antara angka partisipasi sekolah antara penduduk laki-laki dan perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa, tidak ada perlakuan yang berbeda dalam menyekolahkan anak baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan.

Harapan Lama Sekolah merupakan indikator proses pembangunan yang menggambarkan ukuran keberhasilan program pendidikan dalam jangka pendek. Dalam konstelasi regional Jawa Barat, HLS Kabupaten Bandung Barat termasuk rendah dibanding Kab/Kota lainnya di Jawa Barat. Hal ini memberikan gambaran bahwa jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 (tujuh) tahun untuk menempuh pendidikan Kab/Kota lain lebih lama dibandingkan di Kab. Bandung Barat.

Tabel 2.29 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023 (Tahun)

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bogor	12,47	12,48	12,49	12,50	12,64
2	Sukabumi	12,22	12,23	12,24	12,25	12,38
3	Cianjur	11,98	11,99	12,00	12,01	12,03
4	Bandung	12,68	12,69	12,70	12,71	12,73
5	Garut	11,82	11,91	12,03	12,15	12,16
6	Tasikmalaya	12,52	12,53	12,54	12,59	12,63
7	Ciamis	13,78	14,06	14,20	14,28	14,29
8	Kuningan	12,10	12,22	12,23	12,24	12,26
9	Cirebon	12,24	12,25	12,27	12,28	12,41
10	Majalengka	12,21	12,22	12,23	12,24	12,26
11	Sumedang	12,69	12,97	12,98	12,99	13,01
12	Indramayu	12,24	12,25	12,26	12,27	12,29
13	Subang	11,69	11,70	11,71	11,78	11,91
14	Purwakarta	12,10	12,11	12,12	12,13	12,18
15	Karawang	12,08	12,09	12,10	12,19	12,20
16	Bekasi	13,08	13,09	13,10	13,11	13,17
17	Bandung Barat	11,86	11,87	11,88	11,89	11,91
18	Pangandaran	12,06	12,07	12,08	12,11	12,30
19	Kota Bogor	13,40	13,41	13,42	13,43	13,45
20	Kota Sukabumi	13,46	13,47	13,58	13,59	13,60
21	Kota Bandung	14,19	14,20	14,21	14,23	14,24
22	Kota Cirebon	13,11	13,12	13,13	13,14	13,16
23	Kota Bekasi	13,99	14,00	14,10	14,11	14,12
24	Kota Depok	13,91	13,92	13,93	13,94	13,96

25	Kota Cimahi	13,79	13,80	13,81	13,82	13,84
26	Kota Tasikmalaya	13,44	13,45	13,46	13,47	13,49
27	Kota Banjar	13,22	13,23	13,24	13,25	13,27
	Provinsi Jawa Barat	12,48	12,50	12,61	12,62	12,68

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Sedangkan RLS menggambarkan indikator output pembangunan dalam jangka panjang, capaian RLS Kab. Bandung Barat 2019-2023 pada kisaran 8,18 - 8,23 tahun, bila dilihat pada skala regional Jawa Barat termasuk pada capaian RLS yang tinggi dibanding Kab/Kota lain di Jawa Barat.

Tabel 2.30 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bogor	8,29	8,30	8,31	8,34	8,37
2	Sukabumi	7,02	7,07	7,10	7,11	7,33
3	Cianjur	6,97	7,18	7,19	7,20	7,22
4	Bandung	8,79	8,96	9,07	9,08	9,10
5	Garut	7,51	7,52	7,53	7,83	7,84
6	Tasikmalaya	7,17	7,35	7,48	7,73	7,96
7	Ciamis	7,69	7,70	7,90	8,00	8,09
8	Kuningan	7,38	7,57	7,80	7,88	7,89
9	Cirebon	6,71	6,92	7,10	7,40	7,64
10	Majalengka	7,09	7,27	7,31	7,49	7,52
11	Sumedang	8,27	8,51	8,52	8,72	8,73
12	Indramayu	5,99	6,30	6,52	6,83	6,94
13	Subang	6,85	7,10	7,11	7,20	7,45
14	Purwakarta	7,92	8,09	8,10	8,11	8,13
15	Karawang	7,65	7,77	7,78	7,96	8,04
16	Bekasi	8,84	9,12	9,30	9,53	9,57
17	Bandung Barat	8,18	8,19	8,20	8,22	8,23
18	Pangandaran	7,67	7,74	7,85	8,03	8,04
19	Kota Bogor	10,32	10,33	10,53	10,63	10,64
20	Kota Sukabumi	9,58	9,59	9,81	10,14	10,37
21	Kota Bandung	10,74	10,75	10,99	11,00	11,06
22	Kota Cirebon	9,90	9,91	10,12	10,33	10,37
23	Kota Bekasi	11,10	11,16	11,31	11,44	11,66
24	Kota Depok	11,00	11,28	11,46	11,47	11,58
25	Kota Cimahi	10,95	10,96	11,08	11,21	11,39
26	Kota Tasikmalaya	9,13	9,33	9,52	9,53	9,54
27	Kota Banjar	8,62	8,63	8,77	8,78	8,79
	Provinsi Jawa Barat	8,37	8,55	8,61	8,78	8,83

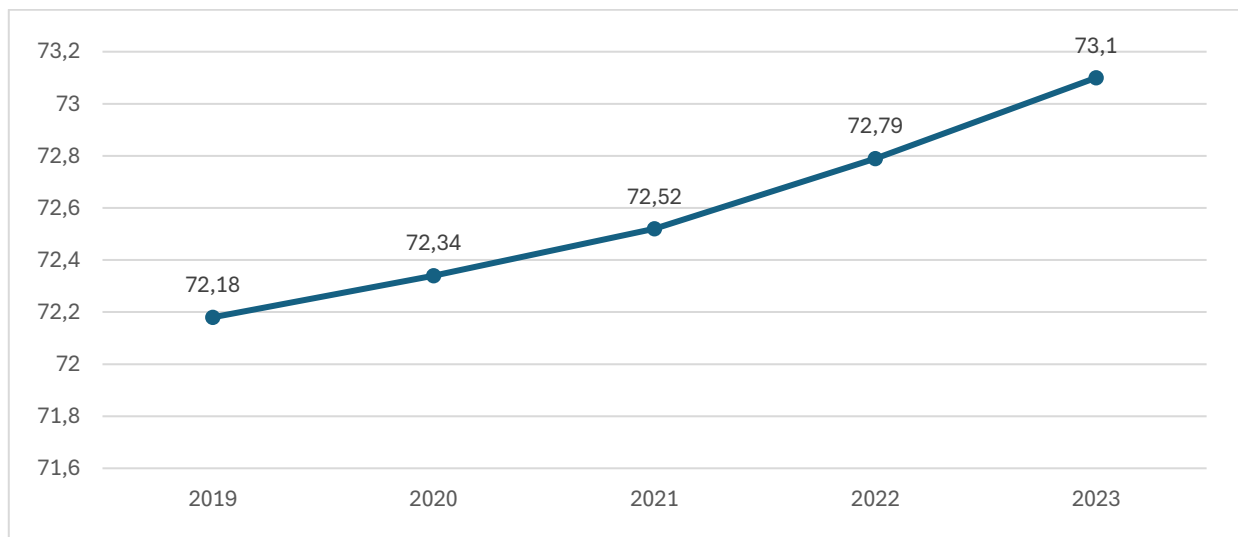
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

2. Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat yang baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan maka perlu diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Umur harapan hidup saat lahir yang diwakili dimensi umur panjang dan hidup sehat secara konsisten terus meningkat dari tahun ke tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. Secara tidak langsung, hal ini mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

Gambar 2.21 Umur Harapan Hidup Saat Lahir di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023



Sumber : Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Indikator umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan. Umur harapan hidup saat lahir Kabupaten Bandung Barat terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, usia harapan hidup meningkat dari 72,18 pada tahun 2019 menjadi 73,10 pada tahun 2023.

Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar. Secara tidak langsung, hal ini merupakan cerminan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat. Banyak hal dapat mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat, diantaranya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta kepedulian

masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat turut berperan dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.

Dalam skala regional Jawa Barat, perkembangan UHH di kabupaten/kota selama lima (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Selain semua kabupaten/kota mengalami peningkatan, disparitas antara daerah dengan capaian UHH tertinggi dengan yang terendah semakin mengecil, dalam hal ini capaian UHH Kabupaten Bandung Barat bila dibandingkan dengan Kab/Kota lain di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.31 Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2019-2023 (Tahun)**

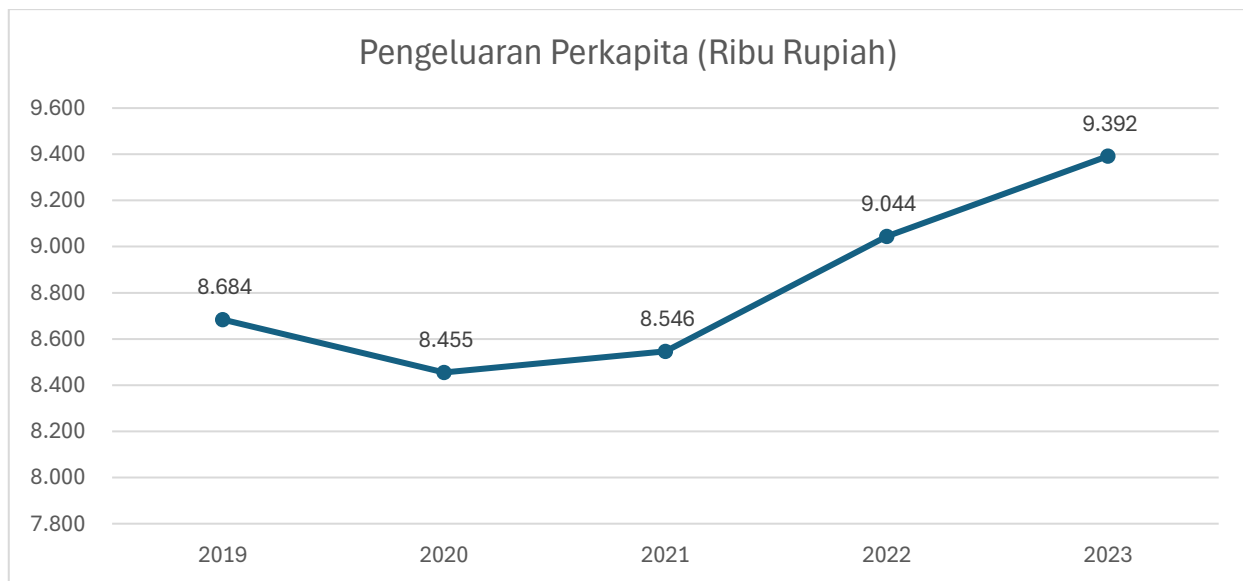
No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bogor	71.01	71,17	71,36	71,65	71.92
2	Sukabumi	70.73	70,97	71,21	71,54	71.83
3	Cianjur	69.91	70,13	70,32	70,58	70.79
4	Bandung	73.40	73,53	73,72	74,01	74.27
5	Garut	71.22	71,41	71,59	71,85	72.07
6	Tasikmalaya	69.21	69,47	69,67	69,95	70.19
7	Ciamis	71.57	71,83	72,02	72,30	72.57
8	Kuningan	73.35	73,59	73,78	74,03	74.29
9	Cirebon	71.82	71,99	72,18	72,47	72.76
10	Majalengka	69.97	70,27	70,46	70,76	71.05
11	Sumedang	72.29	72,43	72,62	72,91	73.19
12	Indramayu	71.37	71,63	71,84	72,15	72.46
13	Subang	72.13	72,35	72,58	72,92	73.24
14	Purwakarta	70.80	70,99	71,18	71,47	71.74
15	Karawang	71.98	72,15	72,33	72,62	72.90
16	Bekasi	73.56	73,68	73,81	74,04	74.30
17	Bandung Barat	72.18	72,34	72,52	72,79	73.10
18	Pangandaran	71.12	71,40	71,60	71,89	72.17
19	Kota Bogor	73.41	73,61	73,82	74,13	74.45
20	Kota Sukabumi	72.26	72,42	72,58	72,85	73.11
21	Kota Bandung	74.14	74,28	74,46	74,75	75.04
22	Kota Cirebon	72.13	72,26	72,44	72,74	73.08
23	Kota Bekasi	74.89	75,01	75,19	75,48	75.79
24	Kota Depok	74.31	74,44	74,62	74,92	75.23
25	Kota Cimahi	73.89	74,03	74,21	74,50	74.80
26	Kota Tasikmalaya	71.93	72,15	72,36	72,63	72.92
27	Kota Banjar	70.79	70,99	71,19	71,49	71.80
	Provinsi Jawa Barat	72.85	73,04	73,23	73,52	73.80

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

3. Daya Beli

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Bandung Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020, perkembangannya seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.22 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019-2023



Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita Kabupaten Bandung Barat menurun menjadi sebesar Rp.8.455.000,- atau mengalami kontraksi sebesar 0,28% dibandingkan tahun 2019. Hal ini merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020. Namun dengan mulai menurunnya kasus Covid-19 pada tahun 2021 sehingga keadaan perekonomian mulai membaik, pengeluaran per kapita Kabupaten Bandung Barat terus meningkat menjadi sebesar Rp.9.392.000,- atau naik sebesar 8,15% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2019.

Pada skala regional Jawa Barat (terlihat pada tabel 2.32), pengeluaran per kapita merupakan komponen IPM yang terdampak cukup parah akibat pandemi COVID-19. Semua kabupaten/kota di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan nilai pengeluaran per kapita pada tahun 2020. Tetapi di tahun 2021, 2022 dan 2023 seiring dengan kondisi perekonomian yang mulai menunjukkan pemulihan, seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami peningkatan nilai pengeluaran per kapita dibandingkan tahun sebelumnya termasuk di Kabupaten Bandung Barat dengan capaian di tahun 2022 sebesar Rp.9.044.000,- dan terus meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar Rp 9.392.000,-

Tabel 2.32 Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2023
(Rp.000/kapita/tahun)

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bogor	10.683	10.317	10.410	10.860	11.153
2	Sukabumi	8.973	8.823	8.850	9.210	9.482
3	Cianjur	8.290	7.980	8.052	8.244	8.626
4	Bandung	10.502	10.201	10.307	10.588	11.018
5	Garut	8.099	7.876	7.961	8.227	8.685
6	Tasikmalaya	8.092	7.852	7.829	8.177	8.562
7	Ciamis	9.557	9.288	9.259	9.428	9.750
8	Kuningan	9.673	9.459	9.409	9.620	10.011
9	Cirebon	10.670	10.342	10.368	10.791	11.128
10	Majalengka	9.822	9.521	9.591	9.950	10.340
11	Sumedang	10.406	10.217	10.262	10.776	11.136
12	Indramayu	10.090	8.959	9.810	10.166	10.580
13	Subang	11.012	10.790	10.854	11.294	11.537
14	Purwakarta	11.819	11.614	11.669	12.193	12.619
15	Karawang	11.856	11.315	11.522	11.927	12.392
16	Bekasi	11.610	11.241	11.341	11.757	12.123
17	Bandung Barat	8.684	8.455	8.546	9.044	9.392
18	Pangandaran	9.423	9.084	9.065	9.389	9.406
19	Kota Bogor	11.825	11.564	11.716	12.058	12.656
20	Kota Sukabumi	11.204	10.999	10.942	11.229	11.799
21	Kota Bandung	17.254	16.887	16.996	17.639	18.236
22	Kota Cirebon	11.930	11.800	11.810	12.087	12.506
23	Kota Bekasi	16.157	15.776	15.903	16.239	16.479
24	Kota Depok	15.696	15.281	15.420	15.926	16.279
25	Kota Cimahi	12.448	12.025	12.019	12.500	12.883
26	Kota Tasikmalaya	10.414	10.263	10.213	10.578	11.063
27	Kota Banjar	10.705	10.535	10.476	10.967	11.356
	Provinsi Jawa Barat	11.152	10.845	10.934	11.277	11.695

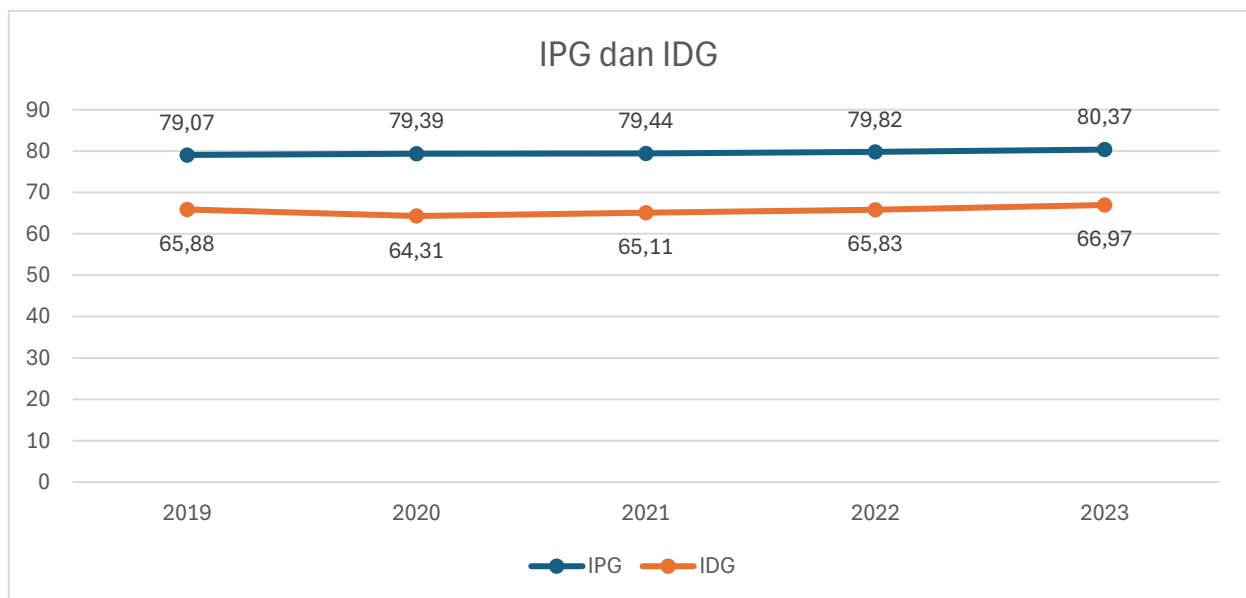
Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

2.1.2.7 Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Pada tahun 2023 nilai IDG Kabupaten Bandung Barat sebesar 66,97 poin angka ini meningkat dari kondisi tahun 2019 yang masih berada pada angka 65,88 poin artinya terjadi peningkatan aktivitas perempuan dalam ekonomi dan politik dalam lima tahun terakhir sebesar 1,09 poin. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2023 nilai IPG Kabupaten Bandung Barat sebesar 80,37 poin, angka ini meningkat sebesar 1,30 poin dari tahun 2019 dengan capaian 79,07 poin. Berikut capaian pembangunan gender dan pemberdayaan gender di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.

Gambar 2.23 Capaian Indeks Pemberdayaan dan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024, diolah

Selama periode lima tahun terakhir, capaian IPG Kabupaten Bandung Barat mengalami tren yang positif. Pada tahun 2023 nilai IPG Kabupaten Bandung Barat sebesar 80,37 poin, angka ini meningkat sebesar 1,30 poin dari tahun 2019 dengan capaian 79,07 poin. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan pada aspek pembangunan gender di Kabupaten Bandung Barat.

2.1.2.8 Seni Budaya dan Olahraga

Tolok ukur kinerja pemerintah dalam aspek kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah keberhasilan pelestarian seni budaya dan peningkatan prestasi olahraga. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan dalam rangka pemajuan dan pelestarian nilai dan objek budaya lokal.

Upaya dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan terhadap objek pemajuan kebudayaan, yang meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus. Data potensi keragaman seni dan budaya di Kabupaten Bandung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33 Potensi Keragaman Budaya Kabupaten Bandung Barat 2019 - 2023

No	Seni Budaya	Jumlah Tahun					Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Seni Karawitan	50	50	50	48	51	Degung, Karawitan, Aneka Seni Sunda, Domyak, Karinding
2	Seni Teater	1	3	3	3	3	Lawak, Drama
3	Seni Pedalangan	6	6	6	8	9	Wayang Golek, Wayang Piling
4	Seni Lukis	-	-	6	1	1	-
5	Seni Pertunjukan	40	56	58	121	124	Calung, Qosidah, Singa Depok, Tagonian, Terbangun, Calung, Kacapi, Kuda Lumping, Orkes Melayu, Reog, Kaulinan Barudak
6	Seni Tari	83	88	88	120	369	Jaipong, Pencak Silat
7	Kontemporer	8	8	8	1	1	Elektone, Organ Tunggal, Campur Sari
8	Seni Rupa		-	-	1	1	Wayang
9	Seni Sastra		1	1	0	0	-
10	Adat Budaya	36	40	55	55	40	Ritual, Upacara tradisional/adat, Cerita Rakyat, Permainan Rakyat
Jumlah		224	252	275	358	599	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2024

Jumlah Nilai budaya lokal dan objek pemajuan budaya yang di lestarikan di Kabupaten Bandung Barat semakin meningkat tiap tahunnya melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan pada tahun 2019 terdapat 224 keragaman budaya yang dilestarikan meningkat s.d tahun 2023 menjadi 599 keragaman budaya.

Ruang lingkup olahraga tidak hanya menyangkut olahraga prestasi tetapi juga olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Artinya, bahwa parameter keberhasilan pembangunan olahraga bukan hanya dilihat dari segi prestasi yang diraih oleh suatu negara atau daerah, akan tetapi parameter keberhasilan pembangunan olahraga dapat dilihat dari segi pencapaian 4 aspek pembangunan keolahragaan atau Indeks Pembangunan Olahraga (IPO). IPO merupakan indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga didasari oleh empat dimensi dasar yaitu ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, sumber daya manusia (SDM) yang

terlibat dalam keolahragaan, serta partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan berolahraga secara langsung maupun tidak langsung dalam memperoleh derajat kebugaran jasmani pada masyarakat. Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Kabupaten Bandung Barat terus meningkat, pada tahun 2021 sebesar 0,41 dan tahun 2022 sebesar 0,42 meningkat kembali di tahun 2023 sebesar 0,44 tetapi capaian masih pada kategori rendah.

Tabel 2.34 Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kabupaten Bandung Barat 2021 - 2023

Jenis Indeks	2021	2022	2023
Indeks ruang terbuka	0.59	0.58	0.66
Indeks SDM keolahragaan	0.33	0.33	0.29
Indeks partisipasi masyarakat	0.30	0.34	0.37
IPO	0.41	0.42	0.44

Sumber: Dispora Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

Prestasi olahraga di Kabupaten Bandung Barat didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana olahraga, pelaku olahraga yang terlibat dan klub/perkumpulan olahraga sebagai wadah untuk berlatihnya atlet dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga. Untuk lebih jelasnya, capaian indikator penyelenggaraan urusan olahraga di Kabupaten Bandung Barat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.35 Indikator Kinerja Keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat 2019 - 2023

Uraian	Tahun					Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Klub/ Perkumpulan olahraga	404	411	428	431	442	Olahraga Prestasi, Olahraga Pelajar, Olahraga Rekreasi, Olahraga Disabilitas
Jumlah Atlet	1.678	1.984	2.475	2.542	2.744	
Jumlah Pelatih	487	545	572	616	703	
Jumlah Atlet Berprestasi	41	0	38	471	791	PORDA 2018, PON 2021, SEAGAMES 2019, POPWILDA 2019, KEJURNAS 2019, Porprov 2022, Peparda 2022
Jumlah Sarana dan Prasaran olahraga	1.527	2.562	2.667	2.712	2.956	Tersebar di 16 Kecamatan dengan status Milik Pribadi, Milik Desa, Milik Swasta, Milik Pemda, Milik Yayasan, Milik Sekolah Swasta, Milik Sekolah Negeri & Milik BUMN

Sumber Data : Dispora Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024



Potensi pelaku olahraga Atlet dan Pelatih dari olahraga prestasi, olahraga pelajar, olahraga rekreasi dan olahraga disabilitas di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan peningkatan dari sisi kuantitas selama kurun waktu 5 tahun dari 2019 - 2023 dengan jumlah atlet di tahun 2019 sebanyak 1.678 orang atlet meningkat sebesar 38,85 persen menjadi 2.744 atlet di tahun 2023. Hal tersebut merupakan keberhasilan pembinaan atlet di Kabupaten Bandung Barat dengan melibatkan 703 pelatih sampai dengan tahun 2023.

Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat baik berupa gedung dan lapang olahraga sebagai pusat aktivitas atlet dan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas olahraga pada tahun 2023 terdapat 2.956 lokasi sarana dan prasarana olahraga, artinya proporsi ketersediaan sarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat per 1.000 penduduk dari total penduduk tahun 2023 sebanyak 1.859.636 jiwa adalah sebesar 0,16 persen atau setiap 1 lokasi prasarana olahraga digunakan oleh 629 orang.

Bila dilihat dari prestasi olahraga, keikutsertaan atlet-atlet Kab. Bandung Barat pada event POPDA XIII Bogor tahun 2018 dengan raihan 40 emas, 52 perak dan 111 perunggu berada pada peringkat 6 se Jawa Barat dan event PEPARDA V Bogor tahun 2018 dengan raihan prestasi 11 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Pada tahun 2019, 7 atlet Kab. Bandung Barat memperoleh raihan medali 11 emas, 3 perak dan 1 perunggu.

Pada tahun 2021 melalui event PON XX Papua Kab. Bandung Barat mengirimkan 48 atlet untuk mewakili Kontingen Jawa Barat dengan raihan prestasi medali 18 emas, 12 perak dan 7 perunggu, berkontribusi untuk mengantarkan kontingen Jawa Barat menjadi juara umum PON XX Papua. Terakhir pada tahun 2022, Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu tuan rumah Porprov XIV Jabar tahun 2022 dengan raihan prestasi memperoleh 49 emas, 72 perak dan 104 perunggu berada pada peringkat 8 se-Jawa Barat dan event PEPARDA VI Bekasi tahun 2022 dengan raihan prestasi 18 emas, 25 perak dan 32 perunggu berada pada peringkat 8 se-Jawa Barat.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat, baik pada urusan wajib (pelayanan dasar dan non pelayanan dasar), urusan pilihan dan urusan fungsi penunjang.

2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

Aspek pelayanan umum focus urusan wajib pelayanan dasar yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, dan sosial:

2.1.3.1.1 Pendidikan

Aspek penyelenggaraan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Kab/Kota, diantaranya: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

Analisis kinerja atas layanan urusan pendidikan dilakukan terhadap indikator: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah. Perkembangan capaian indikator aspek pelayanan umum bidang pendidikan pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.36 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023**

INDIKATOR PENDIDIKAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Jumlah SD/MI Thd penduduk usia SD/MI	1 : 208,12	1 : 204,94	1 : 204,14	1 : 217,52	1 : 286,98
Rasio Jml SMP/MTs Thd Penduduk Usia SMP/MTs	1 : 272,35	1 : 274,75	1 : 269	1 : 291,43	1:441,71
Rasio Guru SD/MI Thd Murid	1 : 23,01	1 : 19,61	1 : 18,86	1 : 22,13	1:25,68
Rasio Guru SMP/MTs Thd Penduduk Usia SMP/MTs			1 : 13,60	1 : 17,24	1:21,17
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8.14	8.19	8.20	8.22	8.23
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	100,20	102,77	102,99	104,84	101.78
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS	102,98	100,07	91,38	93,97	96.32
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	97,74	92,93	97,69	97,91	97.87
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	79,65	80,44	76.56	75.87	88.60
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	96,46	93,39	99,66	99,09	99.32
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS	81,44	91,1	94,29	94,75	96.85
Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	0,09	0,14	0,0004	0,0012	
Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTS	0,09	0,16	0,0035	0,057	
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,97	99,64	99,00	99,50	
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS	99,73	99,50	98,95	99,43	
Angka Melanjutkan (AM) ke SMP/Mts	96,72	96,16	95,20	89,26	
Angka Melanjutkan (AM) ke SMA/MA	77,52	78,71	83,77	116,966	

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat 2024



APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen, hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia di atas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Angka Partisipasi Murni atau APM merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, APM digunakan mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM SD di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 adalah sebesar 97,87 persen, artinya 97,87 persen penduduk usia sekolah SD bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya. Besarnya persentase APM SD ini masih berhubungan dengan gencarnya program wajib belajar yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat.

Angka Partisipasi Sekolah atau APS digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100% dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100%, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah, APS SD di Kabupaten Bandung Barat lebih besar dibanding dengan APS SMP.

Angka Kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah, angka kelulusan murid SD di Kabupaten Bandung Barat sebesar 99,50 persen ini lebih besar bila dibanding dengan angka kelulusan murid SMP sebesar 99,43.

Indikator lain yang juga relevan menggambarkan kondisi pelayanan bidang pendidikan adalah rasio guru dan murid. Perbandingan jumlah murid dan guru sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bandung Barat berada pada kisaran 21-25 murid/guru. Ruang Kelas sekolah sebagai infrastruktur penunjang pelayanan pendidikan pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat memperlihatkan peningkatan baik dilihat dari jumlah ruang kelas maupun kondisi ruang kelas dengan kondisi baik. Ruang Kelas SD dengan kondisi baik di tahun 2022 sebanyak 3.341 ruang kelas dari total 4.891 ruang kelas, dan ruang kelas SMP

dengan kondisi baik di tahun 2022 sebanyak 1.278 ruang kelas dari total 1.342 ruang kelas SMP, untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37 Kondisi Ruang Kelas SD di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023

Tahun	Kondisi Ruang Kelas				Jumlah Ruang Kelas SDN
	Baik	Ringan	Sedang	Berat	
2019	550	3.121	-	809	4.480
2020	177	3.937	-	555	4.669
2021	4.350	532	-	-	4.882
2022	3.341	1.550	-	0	4.891
2023	3.015	1.889	-	0	4.904

Sumber: Profil Pendidikan Kab. Bandung Barat, 2024

Tabel 2.38 Kondisi Ruang Kelas SMP di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023

Tahun	Kondisi Ruang Kelas				Jumlah Ruang Kelas SMPN
	Baik	Ringan	Sedang	Berat	
2019	674	521	-	32	1.227
2020	580	524	-	70	1.174
2021	1.268	62	-	-	1.330
2022	1.278	64	-	-	1.342
2023	634	713	-	-	1.347

Sumber: Profil Pendidikan Kab. Bandung Barat 2024

2.1.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Kualitas kesehatan yang dimiliki seseorang menggambarkan kualitas manusianya. Pemerintah kabupaten Bandung Barat terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan kesehatan. Keberhasilan program- program pembangunan di bidang kesehatan dapat diukur dari indikator Umur Harapan Hidup, Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kematian Ibu per 100.000 ibu melahirkan serta rasio ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Indikator umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan.

Secara tidak langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat tergantung terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB, hal ini relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita. AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir.

Tabel 2.39 Data Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 – 2023

NO	INDIKATOR	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Angka Kematian Bayi	$138/29828 = 9,1/1000 \text{ KH}$	$129/30841 = 4,18/1000 \text{ KH}$	$106/26454 = 4,0/1000 \text{ KH}$	$51/31160 = 1,6/1000 \text{ KH}$	$6/29620 = 0,2/1000 \text{ KH}$
2	Angka Kematian Ibu	$43/32718 = 145/1000 \text{ KH}$	$38/32383 = 117/1000 \text{ KH}$	$47/29895 = 157/1000 \text{ KH}$	$21/32718 = 64/10000 \text{ KH}$	$18/29620 = 60/10000 \text{ KH}$

Sumber: Dinas Kesehatan, Kab. Bandung Barat, 2024

AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Bandung Barat semakin menurun dari tahun 2019 sebesar 9,1 / 1.000 KH, menjadi 0,2/1.000 KH di tahun 2023, hal ini menunjukkan semakin baiknya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui pelaksanaan fasilitasi layanan dan advokasi kesehatan ibu hamil, pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan dan layanan dan penanganan komplikasi neonatal dini dan layanan neonatal Esensial. Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energy dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis.

Cara perhitungan underweight adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U), dengan kondisi status gizi balita di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.40 Kondisi Status Gizi Balita Berdasarkan Indikator BB/U Tahun 2019 – 2023

No	STATUS GIZI	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Gizi Sangat Kurang	0,36%	1,34%	0,99%	0,49%	0,29%
2.	Gizi Kurang	4,99%	6,27%	5,54%	4,12%	5,99%
3.	Gizi Baik	91,23%	87,1%	88,44%	85,72%	83,90%
4.	Gizi Lebih	3,41%	5,28%	5,03%	9,68%	9.82%

Sumber Data: Hasil BPB Dinas Kesehatan, 2024

Kondisi status gizi balita sangat kurang (Gizi Buruk) di Kabupaten Bandung Barat cenderung menurun dari tahun 2019 sebesar 0,36 persen dan pada tahun 2023 menjadi 0,29 persen atau <1%.

Kondisi gizi balita erat kaitannya dengan stunting yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting, sebagaimana diamatkan pada Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Kondisi capaian percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bandung Barat walaupun terus mengalami penurunan tetapi masih relative tinggi s.d dengan tahun 2023 Prevalensi Stunting berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah sebesar 25,10% dengan rincian capaian prevelansi stunting dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.41 Prevalensi Stunting berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI)
dan berdasarkan Bulan Penimbangan Balita (e-PPGBM)
Di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 – 2023**

No	JENIS IMUNISASI	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Prevalensi Stunting berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI)	30,80	-	29,60	27,30	25,10

Sumber: Dinas Kesehatan, Kab. Bandung Barat, 2024

Salah satu faktor rendahnya pencapaian angka harapan hidup adalah tingkat kematian bayi, dan salah satu tingginya angka kematian bayi adalah penolong saat persalinan. Pada golongan pengeluaran atas, semua ibu telah melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh

tenaga kesehatan. Golongan pengeluaran menengah, ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 97,20%. Hal yang masih mengkhawatirkan adalah golongan pengeluaran bawah ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan adalah sebanyak 80,59% dan yang ditolong tenaga kesehatan sebanyak 86,82%.

Tabel 2.42 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan dan Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Karakteristik	Melahirkan di Fasilitas Kesehatan	Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
Kelompok Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	80.59	86.82
40 Persen Tengah	97.20	97.20
20 Persen Teratas	100.00	100.00
Pendidikan Tertinggi		
SD ke bawah	63.19	73.42
SMP ke atas	92.64	95.03
Kabupaten Bandung Barat	87.60	91.33

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, diolah

Sejak diluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional mulai Januari 2014, keikutsertaan masyarakat cukup banyak dan tentu memiliki kegunaan yang sangat berarti, terutama untuk golongan menengah bawah. Pada kelompok pengeluaran terbawah 21,71% telah menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan, sementara untuk golongan menengah sebanyak 27,95%. Pada golongan pengeluaran atas penggunaannya 30,80% dan selebihnya menggunakan dana mandiri. Dalam memenuhi jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan bantuan keuangan berupa pemberian bantuan iuran kepada peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum tercakup oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional serta menganggarkan jaminan Kesehatan masyarakat melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda dan JKN serta Jampersal melalui APBD Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 2.43 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat 2019 - 2023

Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda KBB	66.174	48.847	54.018	56.502	52.438
Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN	627.429	675.249	558.139	713.690	735.278
Penerima Bantuan Jampersal	3.076	1.749	860	0	0
Jumlah	696.679	725.845	613.017	770.192	787.716

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, 2024

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan merupakan hal yang sangat penting, terutama ketersediaan sarana kesehatan di setiap desa seperti adanya Puskesmas, Posyandu dan Klinik dan fasilitas layanan kesehatan lainnya, yang dapat membantu akses pelayanan masyarakat dengan jarak tempuh yang relatif lebih dekat. Gambaran kondisi layanan bidang kesehatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tersedia. Fasilitas kesehatan tersebut mulai dari Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik dan Posyandu. Fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi Standar pada tahun 2019 sebesar 75 persen, pada tahun 2020 meningkat menjadi 79 persen, pada tahun 2021 menjadi 78,89 persen dan tahun 2022 sebesar 88,86 persen. Jumlah fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44 Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023

Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan	Jumlah / tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Sakit	8	8	9	9	9
Puskesmas	32	32	32	32	32
Pustu	57	38	38	45	45
Poliklinik	110	67	75	71	71
Posyandu	1.485	1.780	1.780	2.330	2.340
Dokter	149	146	286	266	192
Tenaga Medis	1.295	1.325	2.194	2.228	1.457

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, 2024

Secara keseluruhan capaian indikator urusan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 - 2022, dengan tingkat capaian berfluktuasi adanya peningkatan dan penurunan baik berdasarkan cakupan layanan kesehatan maupun berdasarkan jumlah ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.45 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Bayi	9,1/1.000 KH	4,18/1.000 KH	4,0/1.000 KH	1,6/1.000 KH	0,2/1.000 KH
Angka Kematian Ibu	145/1.000 KH	117/1.000 KH	157/1.000 KH	64/1.000 KH	60/1.000 KH
Status Gizi Sangat Kurang	0,36%	1,34%	0,99%	0,49%	0,29%
Cakupan imunisasi	93,6%	86,4%	82,8%	84%	83,32
Cakupan pelayanan kesehatan Ibu	-	95%	99%	99%	99%
Cakupan anak balita yang mendapat pelayanan kesehatan	-	56%	65%	67%	
Cakupan melahirkan di fasilitas kesehatan	-	87,60	88,48	89,59	89,61

Cakupan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan	-	91,33	90,08	99,55	99,55
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	696.679	725.845	613.017	770.192	787.716
Fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi Standar	75%	97%	99,56%	88,86%	90,00%
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,005	0,004	0,005	0,005	
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu	0,11	0,8	0,8	0,8	
Rasio posyandu per satuan balita	10,21	12,07	11,70	11,77	
Cakupan Puskesmas	2%	2%	2%	2%	
Cakupan Puskesmas Pembantu	34,55	23,03	23,03	23,21	
Rasio dokter per satuan penduduk	0,09	0,08	0,16	0,14	
Rasio tenaga medis	0,74	0,74	1,21	1,20	
Presentase Desa Siaga Aktif	-	44%	51%	56%	55%

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, 2023 diolah

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Data kondisi jalan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan SK Bupati Bandung Barat No: 188.45/Kep.219-DPUPR/2018 dengan total panjang jalan Kabupaten sepanjang 525,57 Km (s.d tahun 2022) sebanyak 108 ruas jalan dan pada tahun 2023 telah ditetapkan SK Bupati Bandung Barat No: 188.45/Kep.302-DPUPR/2023 dengan total panjang jalan Kabupaten sepanjang 648,06 Km sebanyak 152 ruas jalan, terdapat peningkatan panjang jalan Kabupaten sepanjang 122,49 Km dan peningkatan 44 ruas jalan.

Adapun kondisi jalan baik di Kabupaten Bandung Barat selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan dengan proporsi panjang jalan kondisi baik pada tahun 2019 sebesar 65,19 persen menjadi 70,91 persen di tahun 2022 dan kondisi jalan baik dengan mengacu pada SK jalan yang baru dengan penambahan sebanak 44 ruas jalan, kondisi jalan baik baru mencapai 46,23 persen.

Tabel 2.46 Panjang dan Ruas Jalan di Kabupaten Bandung Barat

No	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG JALAN (Km)
1	Jl. Selacau - Cililin	Cililin	8.100
2	Jl. Cililin - Sindangkerta	Cililin, Sd.Kerta	10.500
3	Jl. Sindangkerta - Celak	Sindangkerta	9.800
4	Jl. Celak - Gununghalu	Gununghalu	8.700
5	Jl. Gununghalu - Bunijaya	Gununghalu	5.200
6	Jl. Bunijaya-Cilangari	Gununghalu	9.800
7	Jl. Cilangari-Cisokan	Gununghalu	5.100
8	Jl. Rancapanggung-Cijenuk	Cililin	9.400
9	Jl. Cijenuk-Sarinagen	Cipongkor	3.800

10	Jl. Sarinagen-Baranangsiang	Cipongkor	6.300
11	Jl. Baranangsiang-Saguling	Cipongkor	1.000
12	Jl. Cangkorah-Bts.Leuwigajah	Batujajar	1.050
13	Jl. Sesko AU - Lembang	Lembang	0.850
14	Jl. Kayu Ambon - Jl. Kiwi Lembang	Lembang	1.750
15	Jl. Rahayu - Lembang	Lembang	0.300
16	Jl. Pegadaian - Lembang	Lembang	0.250
17	Jl. Sukajadi - Lembang	Lembang	0.250
18	Jl. Murhadi - Lembang	Lembang	0.350
19	Jl. Citalaksana - Lembang	Lembang	0.150
20	Jl. Sendik BRI - Lembang	Lembang	0.250
21	Jl. Panorama Puskesmas - Lembang	Lembang	0.250
22	Jl. Sukajaya - Lembang	Lembang	0.170
23	Jl. Gunungsari - Lembang	Lembang	0.350
24	Jl. Bhayangkara - Lembang	Lembang	0.550
25	Jl. Mutiara Utama (Lembang)	Lembang	0.300
26	Jl. Bunijaya-Rongga (Ds. Bojong)	Rongga	1.100
27	Jl. Rongga - Cipari	Rongga	17.500
28	Jl. Purabaya - Rancabali	Padalarang	1.260
29	Jl. Purabaya - Jati (Batujajar)	Padalarang	13.100
30	Jl. Batujajar (Jati) - Saguling	Saguling	3.670
31	Jl. Purabaya - Gantungan	Padalarang	2.250
32	Jl. Cipeundeuy-Cipicung	Cipeundeuy	4.950
33	Jl. Ciawitali-Salakuning	Cikalongwetan	7.500
34	Jl. Sp.Tagog Apu-Salakuning	Padalarang	7.100
35	Jl. Salakuning-Ps.Calung (Ds.Cipada)	Cikalongwetan	7.400
36	Jl. Cisomang-Cipada	Cikalongwetan	6.500
37	Cisarua - Ps. Calung (Ds. Cipada)	Cisarua	7.500
38	Jl. Kb.Kalapa-Ps.Calung	Ngamprah	9.100
39	Jl. H.Gofur-Pakuhaji	Ngamprah	6.600
40	Jl. Cihanjuang-Parongpong	Parongpong	7.300
41	Jl. Cihanjuang-Batas Gegerkalong	Parongpong	2.750
42	Jl. Bts. Cimahi Pasantren-Sariwangi	Parongpong	1.400
43	Jl. Cikole-Cikarumbi	Lembang	2.700
44	Jl. Sersan Bajuri	Parongpong	5.700
45	Jl. Maribaya-Patrol	Lembang	7.600
46	Jl. Gununghalu-Datarpuspa	Gununghalu	13.400
47	Jl. Rancapanggung -Puncakmulya/Bts.Kutawaringin	Cililin	4.500
48	Jl. Cipatik-Nyalindung	Cihampelas	8.900
49	Jl. Tj. Wangi - Kidangpananjung - Muka Payung	Cihampelas	9.700
50	Jl. Cihampelas-Tanjung Jaya	Cihampelas	9.200

51	Jl. Cipatik - Leuwi Sapi	Cihampelas	2.500
52	Jl. Batujajar-Pangauban-Girimukti	Batujajar	7.300
53	Jl. Batujajar-SMP Batujajar	Batujajar	1.300
54	Jl. Cangkorah-Giri Asih	Batujajar	3.000
55	Jl. Pasirucing - Margaluyu	Cipeundeuy	7.900
56	Jl. Kertamukti - Sarimukti	Cipatat	6.700
57	Jl. Citatah-Nyalindung	Cipatat	9.100
58	Jl. Nanggaleng - Sirnaraja	Cipeundeuy	13.500
59	Jl. Cipeundeuy-Ciroyom	Cipeundeuy	5.800
60	Jl. Sukahaji - Margalaksana	Cipeundeuy	6.000
61	Jl. Mekarsari-Cilame	Ngamprah	2.050
62	Jl. Cimanggu (Cimeta) - Pasirlangu	Ngamprah	5.150
63	Jl. Bunisari-Cikandang	Ngamprah	2.230
64	Jl. Jambudipa - Citeureup	Cisarua	5.350
65	Jl. Cihideung-Ciwaruga	Parongpong	7.900
66	Jl. Lembang-Genteng	Lembang	1.500
67	Jl. Maribaya-Puncak Eurad	Lembang	6.100
68	Jl. Pasirbuluh-TPA	Lembang	0.300
69	Jl. Cikaramat-Lembang	Lembang	3.400
70	Jl. Kehutanan - Lembang	Lembang	0.300
71	Jl. SMP - Lembang	Lembang	0.300
72	Jl. Barlak - Lembang	Lembang	0.750
73	Jl. Puncrut (Bts.Kota Bandung)-Pagerwangi-Cijeruk	Lembang	4.530
74	Jl. Langensari-Medu-Dago	Lembang	5.200
75	Jl. Langensari-Simpangwaas-KPR ITB	Lembang	5.400
76	Jl. Cilumber - Cikole	Lembang	2.800
77	Jl. Ciririp-Bangsaya-Buninagara (Bts. Ciwidey)	Cililin	9.700
78	Jl. Cikadu - Rancasenggang	Sindangkerta	3.850
79	Jl. Rancasenggang - Wangunsari	Sindangkerta	7.100
80	Jl. Sindangkerta - Weninggalih	Sindangkerta	14.000
81	Jl. Cijenuk-Pasirpogor/Puncaksari	Cipongkor	5.400
82	Jl. Celak - Sodong	Gununghalu	6.100
83	Jl. Cisarongge - Sodong	Cipongkor	4.900
84	Jl. Gununghalu - Tamanjaya	Gununghalu	7.900
85	Jl. Rongga-Cicadas	Rongga	7.400
86	Jl. Rongga-Bojongsalam (Bts. Cianjur)	Rongga	9.000
87	Jl. Psr.Badak-Cimarel (Bts. Cianjur)	Rongga	3.500
88	Jl. Selacau - Lagadar	Batujajar	2.400
89	Jl. Cililin - Sukatani	Cililin	1.600
90	Jl. Sumur Bandung (Cililin)	Cililin	0.400
91	Jl. Terminal Cililin	Cililin	0.220

92	Jl. Citunjung-Haurngambang	Batujajar	1.850
93	Jl. Sindangkerta (Sindangkerta)	Sindangkerta	0.900
94	Jl. Citapen-Ciraden	Cihampelas	3.000
95	Jl. Cihampelas-Sayuran	Cihampelas	2.100
96	Jl. Cipatik-Citapen	Cihampelas	1.850
97	Jl. Rancasenggang - Babakan (Rawabogo)	Sindangkerta	5.000
98	Jl. Rajamandala-Cipanas	Cipatat	5.400
99	Jl. Cipeundeuy - Cimerang-Cikandang	Padalarang	4.850
100	Jl. Kadudamping-Padayungan-Cikadongdong-Ciharas	Cikalongwetan	9.750
101	Jl. Cipeundeuy-Cisauheun-Sirnagalih	Cipeundeuy	4.550
102	Jl. Kanangasari-Mandalamukti	Cikalongwetan	4.100
103	Jl. Ciharashas-Cisauheun	Cipeundeuy	1.250
104	Jl. Boscha Wangunsari	Lembang	5.800
105	Jl. Mamaadiwarta - Lembang	Lembang	0.400
106	Jl. Sukamantri - Lembang	Lembang	0.270
107	Jl. Warungawi-Pasir haur (Bojongkoneng)	Ngamprah	6.300
108	Jl. Samsat - Sumur Bor - Cijamil	Ngamprah	4.940
109	Jl. Cisauheun-Cisalak		1.950
110	Jl. Sirnagalih (Kp. Baru) - Ciroyom		2.250
111	Jl. H. Gofur - Bts Cimahi (Somawinata)		2.200
112	Jl. H. Gofur - Bts Cimahi (Dirawinata)		1.300
113	Jl. Sadangmekar - Cipada		3.300
114	Jl. Margaluyu - Sarimukti		4.044
115	Jl. Rancapanggung - Cikadu		2.700
116	Jl. Rancapanggung - Ugrem		2.020
117	Jl. Taman Jaya - Cibenda		7.500
118	Jl. H. Gofur - Cibatu		1.100
119	Jl. Sukamaju - Cibatu		0.400
120	Jl. Datar Puspa Mekarwangi – Bts Kab. Bandung		5.400
121	Jl. Nanggerang - Karyamukti		7.840
122	Jl. Cikamirung-Parigi-Maroko		3.500
123	Jl. Padaasih – Bts Cimahi		1.300
124	Jl. Buniwangi – SMP2 - Langensari		0.500
125	Jl. Cikidang-Langensari		3.000
126	Jl. Cicadas – Curug Malela		2.200
127	Jl. Cikakak - Leuwinutug		1.400
128	Jl. Batujajar – taman Makam Pahlawan		0.700
129	Jl. Ciburuy – Cikamuning (Cikamuning-Langkob)		2.700
130	Jl. SPN - Kertawangi		1.400
131	Jl. Cimanggu - Pasirlangu		10.200
132	Jl. Ngamprah - Cijamil		3.000

133	Jl. Cidadap Manah – Kepuh – Sudimampir (Kepuh)		2.200
134	Jl. Barujak - Boscha		0.750
135	Jl. Tipar		1.900
136	Jl. Gedong Lima		0.800
137	Jl. Taman Jaya – Karang Sari - Sarinagen		5.900
138	Jl. Sodong – Girimukti - Cijenuk		6.950
139	Jl. Wangunjaya – Parakankadu (Bts Purwakarta)		0.800
140	Jl. Cijamil - Cibuntu		3.517
141	Jl. Jampudipa – Mekarwangi (Bts Cimahi)		2.000
142	Jl. Cililin - Budiharja		3.500
143	Jl. Sindangkerta - Pasirlame		1.737
144	Jl. Kubang Pintu		1.493
145	Jl. Cibeug - Sukamanah - Bojong		3.452
146	Jl. Malaka - Cijenuk		1.547
147	Jl. Cikalong- Rende - Ciharashas		7.500
148	Jl. Jatimekar - Sirnaraja		5.139
149	Jl. Tugu Nanas - Cipada		3.800
150	Jl. Cipeuleum - Ciminyak		0.331
151	Jl. Pasircalong - Gemblok		2.500
152	Jl. Kotabaru Parahyangan Segmen 1		5.000
	TOTAL PANJANG JALAN		648.060

Sumber: Dinas PUPR, 2024

Capaian Indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019-2023 diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.47 Capaian Indikator Kinerja Urusan PUTR
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023**

Indikator	Capaian Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Total Panjang jalan kabupaten (Km)	525,57	525,57	525,57	525,57	648,060
Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	342,615	318,617	332,375	372,682	299,594
Presentase jalan kabupaten dlm kondisi baik	65,19	60,62	63,24	70,91	71,69
Rasio panjang jalan dengan jml penduduk	0,00030	0,00029	0,00029	0,00028	0,00035
Jumlah jaringan Irigasi	435	435	435	435	449
Potensi area sawah yang terairi (ha)	34.245	36.232	36.232	36.312	33.456
Presentase irigasi Kab. dalam kondisi baik %	68,81	69,82	69,26	69,48	65,00
Rasio jaringan irigasi	1,27	1,20	1,20		
Persentase tersedianya akses air minum yang memadai	62,75	65,50	66,90	65,50	68,50
Persentase cakupan pelayanan air limbah domestik	30	30	61,50	61,18	61,48
Presentase bangunan publik yang memadai	44	50	99,48	50	-
Implementasi dokumen perencanaan pembangunan di kawasan pusat pertumbuhan	6	3	13	19	4
Persentase pembangunan di wilayah desa	0	30	96	100	100

Sumber: Dinas PUTR, diolah Bappalitbangda, 2024



Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat tidak serta merta menambah kondisi panjang jalan, sehingga rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk semakin menurun. Sedangkan kondisi kemandapan jalan dengan kondisi baik terus diupayakan oleh Pemda Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 sebesar 65,19 persen jalan dengan kondisi baik, sampai dengan tahun 2022 kondisi jalan baik meningkat kembali menjadi 70,91 persen tetapi pada tahun 2023 seiring dengan bertambahnya ruas jalan yang menjadi kewenangan Kab. Bandung Barat berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat No: 188.45/Kep.302-DPUKPR/2023 dengan presentase kondisi dalam kondisi baik adalah sebesar 71,69%.

Sama halnya dengan infrastruktur jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 68,81 persen di tahun 2019 menjadi 65,00 persen di tahun 2023, dengan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Bandung Barat sampai dengan tahun 2022 sebanyak 435 Daerah Irigasi dan bertambah menjadi 449 Daerah Irigasi di Tahun 2023 dengan cakupan potensi area sawah yang terairi adalah 33.456 ha. Infrastruktur yang terkait dengan penyediaan air minum merupakan salah satu infrastruktur pelayanan dasar yang terus dibangun. Cakupan pelayanan air minum terus meningkat, dimana terjadi kenaikan pada tahun 2019 sebesar 62,75 persen, meningkat menjadi 68,50 persen di tahun 2023.

2.1.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bandung Barat dapat diukur berdasarkan indikator: penataan wilayah kawasan kumuh, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi wilayah perkotaan, tidak terkecuali di Kabupaten Bandung Barat. Jumlah lokasi lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bandung Barat, semakin berkurang, yang semula di tahun 2019 berjumlah 89 lokasi pada tahun 2023 berkurang menjadi 32 lokasi. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan penataan wilayah kumuh yang menjadi kewenangan Kab/Kota di bawah luasan 10 ha, dimana capaian tahun 2019 terealisasi di 20 lokasi dan pada tahun 2020 terealisasi di 8 lokasi sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini tidak dilaksanakan dan pada tahun 2022 dan 2023 terealisasi di 29 lokasi, jumlah kawasan kumuh tersebar di beberapa kecamatan, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.48 Jumlah Kawasan Kumuh di Kab. Bandung Barat 2019-2023

No	Kecamatan	Jumlah Kawasan Kumuh				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rongga	4	4	-		
2	Gununghalu	6	6	-		
3	Sindangkerta	6	6	-		
4	Cililin	8	8	1	5	5
5	Cihampelas	6	6	-	1	1
6	Cipongkor	8	8	-		
7	Batujajar	6	6	-		
8	Saguling	3	3	-		
9	Cipatat	3	3	-		
10	Padalarang	4	66	3	9	9
11	Ngamprah	6	14	3	6	
12	Parongpong	5	5	-	8	8
13	Lembang	5	22	2	9	9
14	Cisarua	8	8	-		
15	Cikalongwetan	8	8	-		
16	Cipeundeuy	3	3	-		
Jumlah		89	176	8	38	32

Sumber: Satu Data Dinas Kimrum, diolah Bappelitbangda, 2024

Kebutuhan akan tempat tinggal terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk, dengan kondisi eksisting tahun 2023 sebanyak 82.692 unit rumah diperkirakan pada tahun 2025 ketika jumlah penduduk mencapai 1.907.820 jiwa, kebutuhan rumah tinggal mencapai 381.565 unit. Perlu adanya respon akan peningkatan kebutuhan tempat tinggal dengan pelaksanaan program yang memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan perumahan. Pemenuhan kebutuhan rumah juga merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah kekurangan perumahan (backlog) dan pertumbuhan kawasan kumuh serta harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas dasar yang sehat dan produktif dari aspek kebutuhan air bersih, sanitasi, sistem drainase dan pengelolaan persampahan.

Pemenuhan kebutuhan rumah/tempat tinggal bagi keluarga tidak mampu, Pemkab Bandung Barat melalui program rehab rumah dan pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) s.d dengan tahun 2023 telah terealisasi pada tabel 2.49. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk, ketersediaan sumber air bersih di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren positif dengan cakupan 89 persen rumah tangga di kabupaten Bandung Barat telah menggunakan sumber air bersih untuk mencukupi kebutuhannya. Pengguna Air Bersih dan Air minum Layak di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 tersebar di seluruh kecamatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49 Realisasi Rehab/Perbaikan Rutilahu Tahun 2019 - 2023

No	Kecamatan	Rehab/Perbaikan Rutilahu				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rongga	20	110	20	44	37
2	Gununghalu	125	30	120	18	151
3	Sindangkerta	141	100	132	253	305
4	Cililin	47	70	173	102	136
5	Cihampelas	57	30	98	60	95
6	Cipongkor	94	30	81	124	252
7	Batujajar	28	30	61	73	68
8	Saguling	2	10		32	5
9	Cipatat	2	20	91	103	102
10	Padalarang	128	40	227	176	119
11	Ngamprah	81	37	30	50	47
12	Parongpong	16	30	158	9	56
13	Lembang	21	34	209	84	81
14	Cisarua	146	110	153	51	10
15	Cikalongwetan	41	30	90	63	81
16	Cipeundeuy	191	30	103	143	46
Jumlah		1.140	741	1.746	1.385	1.591

Sumber: Satu Data Dinas Kimrum, diolah Bappelitbangda, 2024

Tabel 2.50 Tabel Rumah Tangga menurut Kecamatan dan Sumber Air Minum

No	Kecamatan	Air dalam kemasan & Ledeng	Pompa	Sumur terlindung	Mata air terlindung	Tidak bersih	Jumlah
1	Rongga	342	1.254	4.218	3.876	8.550	18.240
2	Gununghalu	1.040	780	8.320	2.470	10.790	23.400
3	Sindangkerta	535	1.712	3.852	1.819	11.235	19.153
4	Cililin	4.796	5.559	7.412	3.270	2.943	23.980
5	Cihampelas	8.700	8.265	13.920	435	580	31.900
6	Cipongkor	1.036	5.476	16.724	1.480	4.884	29.600
7	Batujajar	16.080	4.920	3.600	135	465	25.200
8	Saguling	6.656	960	1.728	192	64	9.600
9	Cipatat	19.872	2.940	9.555	5.733	120	38.220
10	Padalarang	25.604	8.477	10.726	6.055	1.038	51.900
11	Ngamprah	27.664	9.646	4.186	8.008	3.276	52.780
12	Parongpong	6.840	8.664	3.496	12.160	2.128	33.288
13	Lembang	19.729	724	12.308	26.245	543	59.549
14	Cisarua	2.415	231	115	18.170	919	21.850
15	Cikalongwetan	4.455	945	12.015	15.120	2.565	35.100
16	Cipeundeuy	125	2.000	16.875	3.000	3000	25.000
Kab. Bandung Barat		145.889	62.553	129.050	108.168	53.100	498.760

Sumber Data : Dokumen Analisis Data Makro Sosial, Bappelitbangda 2024, diolah.

Berikut realisasi capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman sampai dengan tahun 2023:

Tabel 2.51 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Jumlah areal penataan wilayah kumuh di bawah 10 Ha	%	20	8	0	33,25	0
Jumlah Peningkatan PSU perumahan formal	Jumlah perumahan	5	1	0	12	40
Persentase Penyediaan hunian layak bagi masyarakat	%	39,55	71,62	0	0	100

Sumber: Dinas Kimrum, diolah Bappelitbangda, 2024

2.1.3.1.5 Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Selama kurun waktu tahun 2019 -2023 di Kabupaten Bandung Barat telah terjadi beberapa jenis gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan Perda K3 dalam rangka perlindungan masyarakat berupa: penegakan tipiring terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan, penertiban PKL, penertiban warung remang-remang/PSK, penertiban IMB, penertiban gepeng/anak jalanan dan penertiban reklame tidak berijin.

Berdasarkan Basis Data Pembangunan 3 (tiga) tahun terakhir (2021-2023), jumlah kejahatan yang dilaporkan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan angka yang cenderung turun. Pada tahun 2022 jumlah kejahatan yang dilaporkan mencapai 446 kasus, sementara itu pada tahun 2023 berkurang menjadi 320 kasus dengan jenis kejahatan yang paling banyak adalah pencurian, perampokan dan penganiayaan. Sedangkan jumlah kejadian demonstrasi/unjuk rasa di Kabupaten Bandung Barat, disebabkan karena adanya beberapa isu-isu seperti isu-isu pengupahan, pelaksanaan outsourcing, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan BBM, dan sebagainya dengan angka kejadian pada tahun 2022 sebanyak 6 kejadian dan menurun di tahun 2023 menjadi 5 kejadian demonstrasi/unjuk rasa.

Dalam melaksanakan perlindungan kepada masyarakat terkait penanganan bencana, di Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2023 tercatat sebanyak 236 kasus kejadian bencana, kejadian tanah longsor dan pergerakan tanah dengan intensitas terbanyak yaitu 124 kasus, diikuti kejadian angin puting beliung sebanyak 69 kasus, kejadian kebakaran dengan 36 kasus dan banjir bandang sebanyak 6 kasus. Bencana tersebut mengakibatkan 4 orang korban jiwa, 18 orang korban luka dan mengakibatkan sekitar 551 kerusakan bangunan.

Dalam hal perlindungan terhadap bencana kebakaran, berdasarkan Permen PU RI Nomor 20/ PRT/M/2009 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. Manajemen penanggulangan kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK.

Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di WMK. dari target < 30 menit, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, hydran, dan peran serta masyarakat/satwankar.

Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Bandung Barat semakin meningkat dari tahun 2019 sebesar 44 persen menjadi 79,69 persen di tahun 2023 waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran semakin baik untuk meminimalisir korban jiwa maupun korban materi. Berikut capaian indikator urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Tabel 2.52 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
%e Penegakan Perda % Perkada	%	78	58,47	97,91	100	100
Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	%	44	73	77	77	79,69
Meningkatnya Nilai Ketahanan Daerah (IKD)	Kategori Indeks	N/A	N/A	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Dinas BPBD dan Satpol PP, diolah Bappelitbangda, 2024

2.1.3.1.6 Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat korban bencana. Permasalahan PPKS terbanyak di Kabupaten Bandung Barat yaitu penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, gelandangan/tuna sosial dan pengemis.

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial terhadap masyarakat miskin atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dilaksanakan melalui bentuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Untuk melihat jumlah dan peran aktif pemerintah dalam upaya penanganan PPKS disajikan pada di Kabupaten Bandung Barat tahun 2023, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53 Data Kondisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bandung Barat tahun 2023

No	Kecamatan	PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)		
		Anak Terlantar	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Gelandangan /pemulung
1	Rongga	155	9	1
2	Gunung Halu	278	2	
3	Sindangkerta	417	12	
4	Cililin	435	2	2
5	Cihampelas	542	12	
6	Cipongkor	175	3	1
7	Batujajar	295	47	3
8	Saguling	230	1	
9	Cipatat	-	5	2
10	Padalarang	87	60	1
11	Ngamprah	-	29	4
12	Parongpong	173	2	
13	Lembang	373	5	1
14	Cisarua	432	44	4
15	CikalongWetan	-	42	3
16	Cipeundeuy	70	13	1
JUMLAH		3,662	288	23

Sumber: Satu Data Dinas Sosial, diolah Bappelitbangda, 2024

Pada tahun 2019 persentase angka PPKS yang tertangani sebesar 52,15 persen, s.d tahun 2023 realisasi capaian cenderung menurun pada tahun 2023 sebesar 48,86 persen. Untuk mengatasi masalah PPKS tersebut, di Kabupaten Bandung Barat dengan memberdayakan organisasi/lembaga sosial yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 495 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebanyak 84 Lembaga, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Penyuluh Sosial, juga terdapat 54 sarana rehabilitasi sosial yaitu Panti Sosial Asuhan Anak sebesar 42 unit, Panti Jompo sebanyak 9 unit dan Panti Sosial Penyandang cacat sebanyak 3 unit.

Adapun rekapitulasi capaian indikator penyelenggaraan urusan sosial Kabupaten Bandung Barat, tersaji pada tabel berikut dimana capaian 2019 dan 2020 yang tidak ada realisasinya (N/A) mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD dan presentase tertanganinya warganegara migran sudah tidak lagi menjadi kewenangan Dinas tetapi pada Disnaker.

**Tabel 2.54 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial
di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	47,31	51,93	71	72	72
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan program rehabilitasi di Luar Panti Sosial	%	N/A	N/A	38	16,2	5
Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	N/A	N/A	36	5,34	11
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	%	100	100	0	100	100
Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional Yang Mendapatkan Pemeliharaan	%	N/A	N/A	100	100	100
Persentase tertanganinya warganegara migran korban tindak kekerasan	%	N/A	N/A	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial, diolah Bappelitbangda, 2024

2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Aspek pelayanan umum focus urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari 18 (delapan belas) urusan, yaitu:

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Hal-hal yang menyangkut ketenagakerjaan seperti Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Angka Pengangguran merupakan data dan informasi mengenai ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pembangunan dan pemecahan masalah urusan tenaga kerja.

Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik jika pertumbuhan angkatan kerja yang terserap/terakomodasi oleh lapangan kerja dapat mengimbangi pengangguran yang terjadi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Barat semakin menurun dari 2019 sebesar 8,17% menjadi 8,11% pada tahun 2023.

Untuk melihat kontribusi serta dinamika tenaga kerja dan pencari kerja dalam pasar kerja, para pembuat kebijakan dapat mencermati indikator ketenagakerjaan, di antaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan dari tahun 2019 – 2023, terjadi peningkatan TPAK sebesar 8,03 persen di tahun 2023 menjadi 67,01 dibanding tahun 2019 dengan capaian 58,98

Indikator besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan menunjukkan adanya kenaikan yang didukung oleh adanya pelaksanaan Job Fair, pada tahun 2021 indikator besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan sebesar 60% menjadi 84,18% di tahun 2023. Berikut capaian indikator penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 - 2023.

**Tabel 2.55 Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Jumlah Angkatan Kerja	orang	741 ribu	748 ribu	766 ribu	819 ribu	947 ribu
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	%	62,09	59,91	60,75	64,37	67,01
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,17	12,25	11,65	9,63	8,11
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	40	20	42,86	60	31,48
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	N/A	N/A	100	116,67	65,41
Besaran pencari kerja yang ditempatkan	%	100	N/A	60	68	84,18
Persentase terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diolah Bappelitbangda, 2024

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kesadaran mengenai peran perempuan diwujudkan dalam program- program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dapat menjadi indikator untuk mengetahui peran aktif perempuan

serta bisa juga diukur melalui Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Secara empiris, terjadi disparitas antara angkata kerja laki-laki dengan perempuan. TPAK laki-laki selalu selalu lebih besar dari TPAK perempuan. Kondisi ini dinilai wajar karena norma-norma yang berlaku di masyarakat mengarahkan laki-laki untuk berperan sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Capaian TPAK perempuan tahun 2023 cenderung meningkat dimana TPAK perempuan tahun 2022 sebesar 59,91 meningkat menjadi 60,75 di tahun 2023.

Pada tahun 2023 nilai IDG Kabupaten Bandung Barat sebesar 66,97 poin angka ini meningkat dari kondisi tahun 2019 yang masih berada pada angka 65,88 poin artinya terjadi peningkatan aktivitas perempuan dalam ekonomi dan politik dalam lima tahun terakhir sebesar 1,09 poin. Selama periode lima tahun terakhir, capaian IPG Kabupaten Bandung Barat mengalami tren yang positif. Pada tahun 2023 nilai IPG Kabupaten Bandung Barat sebesar 80,37 poin, angka ini meningkat sebesar 1,30 poin dari tahun 2019 dengan capaian 79,07 poin. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan pada aspek pembangunan gender di Kabupaten Bandung Barat. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Berikut capaian pembangunan gender dan pemberdayaan gender di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023.

**Tabel 2.56 Capaian IDG dan IPG
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender	79.07	79.39	79.44	79.82	80.37
Indeks Pemberdayaan Gender	65.88	64.31	65.11	65.83	66.97

Sumber: DP2KBP3A, diolah Bappelitbangda, 2024

Sedangkan untuk pembangunan di bidang anak dapat diukur melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melalui indikator penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan, dengan capaian realisasi sebagai berikut:

**Tabel 2.57 Data Kejadian Kekerasan terhadap Anak, Perempuan dan KDRT
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Penyelesaian
Kekerasan Terhadap Anak	8	21	16	30	36	100%
Kekerasan terhadap Perempuan	6	1	5	10	17	100%
Kekerasan dalam rumah tangga	1	0	3	3	13	100%

Sumber: DP2KBP3A, diolah Bappelitbangda, 2024

Dalam rangka kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan serta kekerasan dalam rumah tangga, dari tahun ke tahun kasusnya cenderung meningkat dari tahun 2019 s.d tahun 2023, walaupun kasus kejadian dapat diselesaikan semua atau 100%. Kedepannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat desa dan kabupaten perlu lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mau melaporkan jika terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan dapat dengan cepat ditangani dan pelaku tindak kekerasan dapat segera diproses untuk menimbulkan efek jera. Untuk lebih jelasnya capaian indikator penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disajikan pada tabel berikut, dengan catatan capaian 2019 dan 2020 yang tidak tersisi merupakan indikator lama sebelum dilakukan Perubahan pada RPJMD.

Tabel 2.58 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Kabupaten/Kota Layak Anak	Predikat	Non Katagori	Pratama	Madya	Non Kategori	Non Kategori
Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan	%	82	82	82,5	84	85
Persentase Keluarga yang memiliki kesadaran dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	%	N/A	N/A	39	39	42
Persentase Data dan profil gender dan anak Hasil analisis	%	N/A	N/A	85	87	87
Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	%	100	100	100	100	100
Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	%	N/A	N/A	67	100	100
% penanganan korban kekerasan terhadap anak	%	100	100	100	100	100

Sumber: DP2KBP3A, diolah Bappelitbangda, 2024

2.1.3.2.3 Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Bandung Barat. Skor PPH adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Secara umum, ada 9 (sembilan) kelompok pangan dalam PPH yaitu: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah. Skor PPH Kab. Bandung Barat Barat pada tahun 2022 adalah 76,8 poin dan meningkat di tahun 2023 menjadi 92,9 Kelompok padi-padian terutama beras

(25,0) dan sayuran serta buah (28,4) masih mendominasi konsumsi masyarakat Kab. Bandung Barat. Capaian pola pangan harapan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.59 Pola Pangan Harapan (PPH)
Tingkat Konsumsi Pangan Tahun 2019 - 2023**

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Tahun 2019	Skor PPH Tahun 2020	Skor PPH Tahun 2021	Skor PPH Tahun 2022	Skor PPH Tahun 2023
1.	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	1,2	1,4	1,8	1,7	1,9
3.	Pangan Hewani	21,2	19,7	21,8	20,3	24,0
4.	Minyak dan Lemak	5,0	5	5,0	5,0	5,0
5.	Buah/biji berminyak	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
6.	Kacang-kacangan	7,5	6,8	5,3	4,8	7,2
7.	Gula	1,7	1,1	1,2	1,1	1,3
8.	Sayuran dan buah	23,0	20,2	18,7	18,8	28,4
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-
Jumlah		84,6	79,3	79,1	76,8	92,9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

Dengan telah ditetapkan Perda pada tahun 2023 tentang cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, realisasi capaian indikator cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 sebesar 10 ton dan Cadangan Pangan Masyarakat Kab. Bandung Barat sebesar 22 Ton.

Dalam rangka penanganan daerah rawan pangan, berdasarkan Analisis FSVA di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 masih terdapat 2 desa yang teridentifikasi daerah sangat rawan pangan sampai dengan tahun 2023 sudah tidak terdapat desa yang mengalami daerah sangat rawan pangan, tetapi masih terdapat 43 desa yang rentan rawan pangan.

**Tabel 2.60 Desa Dan Penduduk Sangat Rawan Pangan, Rawan Pangan Dan Tahan Pangan
di kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Desa dan Penduduk Sangat Rawan Pangan						
1	Jumlah Desa	2 Desa	0	1 Desa	1 Desa	-
2	Persentase Penduduk Sangat Rawan Pangan	1,21%	0%	0,6%	0,6%	0%
Desa dan Penduduk Rentan Rawan Pangan						
1	Jumlah Desa	49 Desa	37 Desa	84 Desa	45 Desa	43 Desa

2	Persentase Penduduk Rawan Pangan	30,9%	22,40%	50,30%	27,28%	24,6%
Desa dan Penduduk Tahan Pangan						
1	Jumlah Desa	114 Desa	128 Desa	81 Desa	120 Desa	122 Desa
2	Persentase Penduduk Tahan Pangan	60,1%	77,6%	49,09%	72,72%	76,25%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

Capaian indikator penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Bandung Barat sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.61 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Jumlah sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	sertifikat	38	48	5	4	13
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	0	0	0	10	10
Ketersediaan informasi pasokan dan akses pangan	Laporan	N/A	N/A	12	12	12
Skore Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Point	88,73	83,03	66,78	83,14	77,30
Penurunan Jumlah desa rawan pangan	Desa	9	2	0	0	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, diolah Bappelitbangda, 2024

2.1.3.2.4 Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanian di Kabupaten Bandung Barat, dalam perubahan RPJMD mengalami penyesuaian indikator dan target, dengan capaian indikator pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian
di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Jumlah dokumen penetapan daftar masyarakat penerima	dokumen	N/A	N/A	0	0	0
Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kosong	dokumen	N/A	N/A	100	0	100
Terkoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan penatagunaan tanah dan konsolidasi tanah	Kegiatan	N/A	N/A	100	0	100
Jumlah rekomendasi pengelolaan izin lokasi	rekomen	N/A	N/A	0	0	100
Tersedia data subjek, Objek redistribusi tanah dan terkoordinasikan, tersinkronisasikan untuk aset	dokumen	N/A	N/A	0	0	100

akses reforma agraria						
Penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan	%	60	20	66,60	33,33	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, diolah Bappelitbangda, 2024

Persentase penyelesaian sengketa/konflik tanah yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 sebanyak 6 lokasi di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah dan Kp. Cikamuning Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang dan pada tahun 2023 dengan capaian 100%.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup di daerah dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan dokumen RPPLH bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Berikut capaian indikator urusan lingkungan hidup tahun 2019 – 2023:

Tabel 2.63 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Indeks Kualitas lingkungan Hidup	Indeks	47	47,05	50,27	63,03	55,79
Tonase sampah terangkut ke TPA	Ton	53.537	58.891	62.386	55.667	50,514
Persentase titik sampling air yang status mutunya baik	%	29,4	40	0	6	0
Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen pendukung perencanaan LH	%	N/A	N/A	60	80	100
Bertambahnya usaha dan atau kegiatan yang mengelola limbah LB3 sesuai peraturan pada tahun ke - n	Industri	N/A	N/A	30	26	12
Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH dibagi jumlah usaha yang dilakukan pemeriksaan pada tahun ke-n	%	N/A	N/A	100	88,24	100
Meningkatnya gerakan peduli sungai / situ / air tanah	lokasi	N/A	N/A	2	1	1

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH pada tahun ke-n	sekolah	N/A	N/A	20	15	30
RTH taman yang terawat	Lokasi	22	23	0	26	31

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah Bappelitbangda, 2024

Indikator urusan lingkungan hidup cenderung mengalami penurunan, indeks kualitas lingkungan hidup sampai dengan tahun 2023 capaian sebesar 55,79 poin ini menunjukkan penurunan dibanding tahun 2022 sebesar 63,03%. Sedangkan dalam rangka penanganan sampah di Kabupaten Bandung Barat kapasitas sampah yang terangkut ke TPA capaiannya menurun pada tahun 2022 sebanyak 55.667 ton menurun menjadi 50.514 ton di tahun 2023, hal tersebut untuk menjadi perhatian Pemkab Bandung Barat (DLH) dalam memberikan pelayanan pengelolaan sampah di tahun 2025.

Dalam menghadapi proyeksi pertumbuhan penduduk, perencanaan infrastruktur persampahan menjadi sangat penting. Timbulan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan gambaran buruk terhadap wajah suatu kawasan, selain itu juga dapat menurunkan kualitas lingkungan, mengurangi kenyamanan, dan dapat menjadi media penularan penyakit. Permasalahan sampah seharusnya dapat dikelola dengan baik dengan melibatkan lintas sektor, karena permasalahan sampah melibatkan dari hulu sampai hilir, dari masyarakat hingga ke pemerintah yang bertanggung jawab. Berikut realisasi capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat:

Tabel 2.64 Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2023

No	Area Pelayanan	Jumlah Lokasi	Volume Sampah yang dihasilkan		Kapasitas Total Daya Angkut Pelayanan Persampahan	
			Kapasitas Harian	Kapasitas	Kapasitas Harian	Kapasitas
			M ³ /Hari	Ton/Tahun	M ³ /Hari	Ton/Tahun
1	Permukiman	272	2122.11	271,100	395.41	50,513.60
2	Pasar	12				
3	Jalan	5				
4	Daerah Komersil (Hotel, Restoran dll)	18				
5	Institusi (Kantor Pemerintah/ Puskesmas/Rumah Sakit)	14				
6	Industri	20				
7	Lainnya	0				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah Bappelitbangda, 2024.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib yang sangat terkait langsung dengan pelayanan publik yang menjadi tugas utama pemerintahan. Kepemilikan dokumen kependudukan dan dokumen catatan sipil sangat penting terutama pada kalangan tertentu yang mewajibkan dokumen-dokumen tersebut sebagai syarat program. Capaian realisasi administrasi kependudukan cenderung terus mengalami peningkatan, pada tahun 2019 persentase penduduk memiliki KTP elektronik sebesar 90 persen meningkat menjadi 98,7 persen di tahun 2023, begitu juga dengan indikator lain presentase penduduk ber-akta kelahiran, persentase anak yang memiliki KIA. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, anak yang telah mempunyai KIA.

Peningkatan indikator kependudukan yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte kematian menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas diri/administrasi kependudukan.

Tabel 2.65 Capaian Indikator Kinerja Urusan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Persentase kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga	%	79	57	40	84	99,7
Persentase Penduduk Memiliki KTP-El	%	90	99	98	98	98,7
Persentase Anak Ber KIA	%	14	18,1	30	24	25,8
persentase penduduk ber Akta kelahiran	%	32	32,5	32	39	39,9
persentase penerbitan Akta kematian	%	28	46	30	100	100
Persentase penduduk ber akta kelahiran 0-18 tahun	%	N/A	N/A	96	89	90,29
Persentase Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan	%	15	26,66	36	57	57
Profil Kependudukan yang terselesaikan	Dok.	N/A	N/A	0	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah Bappelitbangda, 2024

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat pedesaan, di Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari 165 desa, 2.416 RW dan 9.009 RT yang tersebar di 16 kecamatan, berikut capaian indikator urusan pemberdayaan masyarakat desa tahun 2019-2023:

Tabel 2.66 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019– 2023

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Persentase Desa Mandiri	%	-	-	24	37,58	47,88
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	49,7	60,4	82,34	91,82	100
Persentase Desa Cepat Berkembang	%	-	-	0	0	1,82
Jumlah Desa Persiapan	Desa	-	-	0	0	0
Jumlah Kerjasama Desa yg Terfasilitasi	Desa	-	-	0	21	20

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, diolah Bappelitbangda, 2024

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

Peningkatan desa dengan status desa mandiri di Kab. Bandung Barat pada tahun 2019 terdapat 40 Desa Mandiri atau 24 persen dan meningkat di tahun 2023 menjadi 47,88 persen atau sebanyak 79 Desa, kriteria desa lainnya sampai dengan tahun 2023 terdapat 3 desa dengan status desa berkembang dan 83 desa dengan status desa maju.

Hal yang tak boleh dilupakan dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah pergerakan ekonomi desa, melalui lembaga ekonomi pedesaan atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pasar desa dan usaha ekonomi desa yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, dengan rincian sebanyak 165 unit BUMDes, 66 pasar desa dan 468 unit usaha ekonomi desa.

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil (SP2020), jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun terakhir terus bertambah setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 sebesar 1,43% dengan kepadatan penduduk sebesar 1.445 jiwa per Km². Komposisi penduduk Kab. Bandung Barat memperlihatkan tingkat fertilitas yang menurun di periode 10 tahun terakhir, hal ini dapat terjadi karena kesadaran dari masyarakat mengenai keluarga kecil sejahtera disamping berjalannya program pemerintah dalam pengendalian jumlah penduduk dari sisi kelahiran. Data hasil long form sensus penduduk Kab. Bandung Barat yang dilaksanakan oleh BPS, Fertilitas Kabupaten Bandung Barat menurun dalam sepuluh tahun terakhir. Sensus Penduduk 2010 mencatat angka TFR sebesar 2,31 yang berarti seorang perempuan melahirkan sekitar 2-3 anak selama masa reproduksinya. Sementara

Long Form SP2020 mencatat TFR sebesar 2,24 yang berarti hanya sekitar 2 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya. Penurunan fertilitas mengakibatkan proporsi anak-anak dalam populasi ikut menurun. Kondisi ini dapat mengakibatkan rasio ketergantungan menjadi lebih rendah dan menciptakan bonus demografi.

Pada tahun 2022, tepat satu dekade bonus demografi Indonesia, tercatat TFR sebesar 2,24. Berdasarkan hasil Long Form SP2020 tercatat Angka Kematian Kasar yang terhitung adalah sebesar 4,82. Artinya, terdapat 4 sampai dengan 5 kematian untuk tiap 1.000 penduduk di Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan selama periode satu dekade bonus demografi yang dialami Indonesia, Angka Kematian Bayi (AKB) cenderung menurun dari 27 per 1000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2010 menjadi 14 per 1000 kelahiran hidup pada Long Form SP2020. Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatnya kualitas hidup wanita Bandung Barat membuat anak yang baru lahir semakin mampu bertahan hidup.

**Tabel 2.67 Fertilitas dan Mortalitas Kabupaten Bandung Barat
Hasil Long Form SP Tahun 2020**

No	Indikator	Satuan	2020
1	2	3	4
Aspek Kelahiran (Fertilitas)			
1	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Angka	2,24
Aspek Kematian (Mortalitas)			
1	<i>Infant Mortality Rate (IMR)</i>	Angka	14,13

Sumber : Hasil Long Form SP 2020, BPS

Secara umum, berikut capaian indikator penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2019 – 2023:

Tabel 2.68 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	0	0	0	0	0
Persentase penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	%			5,11	6,78	8,46
Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/ Kelurahan	%	65	70	70	75	80

Persentase pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang di evaluasi	%	100	100	100	100	100
Persentase KB Aktif	%	73,4	79,86	73,85	72,71	76,29
Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%			22,08	21,48	20,28
Persentase UNMETNEED	%			14,33	15,23	8,18
Cakupan kelompok kegiatan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Sejahtera dan Cakupan Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	%	50	45	40	50	60

Sumber: DP2KBP3A, diolah Bappelitbangda,2023

2.1.3.2.9 Perhubungan

Kabupaten Bandung Barat berada pada posisi yang sangat strategis, sehingga memerlukan pengeloaan pada urusan perhubungan yang baik. Untuk mendukung akseibilitas barang dan orang di dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat, didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang menjadi urusan perhubungan diantaranya sarana angkutan darat, ASDP, terminal, dermaga. Secara umum indikator urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Jumlah penumpang yang menggunakan prasarana transportasi darat	Penumpang	1.280.542	598.435	746.618	577.299	463.774
Jumlah Angkutan yang berkeselamatan	unit	18.623	16.067	16.391	600	612
Jumlah ruas jalan yang berkeselamatan	ruas	17	9	11	9	11
Jumlah Pelayanan angkutan darat yang beroperasi wilayah Kabupaten Bandung Barat	trayek	17	9	12	19	19
Jumlah angkutan sungai danau dan penyeberangan yang terkelola	unit	244	196	165	154	165
Jumlah penumpang yang menggunakan prasarana transportasi ASDP	Penumpang	7.890	6.858	90.819	13.460	82.723

Sumber: Dinas Perhubungan, diolah Bappelitbangda,2024

Indikator jumlah penumpang yang menggunakan transportasi darat dan transportasi ASDP terjadi penurunan yang signifikan semenjak adanya pembatasan pergerakan orang pada tahun 2020 dan akibat adanya aplikasi kendaraan umum online. Terkait indikator sarana transportasi darat berupa jumlah trayek dan kendaraan angkutan umum serta jumlah ASDP menunjukkan indikator yang semakin menurun. Layanan angkutan darat yang beroperasi pada tahun 2019 sebanyak 17 trayek menjadi 11 tahun 2022 bertambah lagi menjadi 19 trayek. Begitupun dengan jumlah ASDP yang terkelola tahun 2019 sebanyak 244 unit dan terus turun menjadi hanya 154 unit di tahun 2022.

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Kinerja pembangunan terkait dengan urusan komunikasi dan informatika dapat ditinjau dari presentase aplikasi TIK pemerintahan yang dimanfaatkan dan persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta penerapan SPBE.

Tabel 2.70 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Indeks SPBE	point	2,41	2,71	2,85	2,65	3,32
Persentase Aplikasi Teknologi Informasi Pemerintahan Yang Termanfaatkan	%	40	40	99,22	100	64,51
Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	41,76	39,27	100	97,62	73,18

Sumber: Dinas Kominfo dan Statistik diolah Bappeditbangda, 2024

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien menunjukkan peningkatan dimana tahun 2019 dengan capaian indeks SPBE sebesar 2,41 poin terus meningkat s.d tahun 2023 menjadi 3,32 poin

Media informasi dan komunikasi publik berupa: website milik pemerintah daerah yang berfungsi sebagai media penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat maupun melalui pemanfaatan media sosial diantaranya facebook, twitter, instagram dan youtube berperan dalam meningkatkan layanan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Bandung Barat dengan capaian terus meningkat dari tahun 2019 sebesar 41,76% menjadi 73,18% di tahun 2023 yang didukung oleh digitalisasi diberbagai sector serta dukungan aplikasi teknologi informasi pemerintahan dengan capaian sebesar 64,51.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi menjadi ujung tombak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, pada tahun 2019 jumlah koperasi di Kabupaten Bandung sebanyak 667 unit dimana 60,1 persennya merupakan koperasi aktif dan meningkat di tahun 2023 menjadi 779 unit dengan jumlah koperasi aktif sebesar 66,90 persen. Berdasarkan kondisi tingkat kesehatan koperasi terjadi peningkatan koperasi sehat sebesar 4,55 persen di tahun 2023 bila dibanding tahun 2022 yang hanya sebesar 20 persen.

Tabel 2.71 Jumlah dan Kondisi Koperasi Tahun 2019 – 2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Koperasi	667	692	722	758	779
Koperasi Aktif	60,1%	61,6%	64,3%	66%	66,90
Koperasi Sehat	145	285	495	727	735

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2024.

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Berikut kinerja pembangunan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama periode Tahun 2019-2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.72 Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Pertumbuhan Koperasi Sehat	%		22	22	20	24,55
Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	26	11	24	22	17
Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%	21	21	21	21	4
Persentase Peserta Diklat Perkoperasian	%	10	-	10	7	23
Jumlah kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Keg	5	3	5	5	4
Jumlah Pertumbuhan Pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha Mikro	Pelaku usaha	557	-	213	716	838
Pertumbuhan pengembangan pelaku usaha mikro	Pelaku usaha	200	50	171	221	215

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM diolah Bappelitbangda, 2024.

Bila dilihat dari pertumbuhan usaha kecil dan menengah sebagai penopang perekonomian masyarakat, dari tahun 2019 s.d 2023 untuk pelaku UKM yang diberdayakan mengalami peningkatan dari 557 pelaku usaha menjadi 838 pelaku usaha tetapi pengembangan pelaku usaha UKM walaupun mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2023 tetapi pertumbuhannya kecil hanya 7,5% dalam kurun waktu lima tahun:

Tabel 2.73 Jumlah dan Kondisi Koperasi Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	UMKM
1	2019	11,603	577	53	12,233
2	2020	14,287	577	53	14,917
3	2021	54,533	53	0	54,586
4	2022	55,617	0	0	55,617
5	2023	58,216	0	0	58,216

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2024

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Capaian indikator penanaman modal mengalami kenaikan yang signifikan, diantaranya jumlah investasi PMDN pada tahun 2019 sebesar Rp.41 Milyar meningkat menjadi Rp.2.730 Milyar pada tahun 2023 dan Jumlah penerbitan perijinan daritahun 2019 sebanyak 2.308 menjadi 4.027 penerbitan perijinan.

Hal ini didukung dengan semakin membaiknya waktu proses pelayanan perijinan sesuai SOP yang awalnya tahun 2019 sebesar 88 persen menjadi 90,49 persen di tahun 2023serta presentase peningkatan promosi kerjasama investasi dengan realisasi 50%. Berikut indikator urusan Penanaman Modal:

Tabel 2.74 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Nilai Investasi PMDN	Milyar	41	174	192,6	704	2.730
Persentase dokumen yang ditindaklanjuti	%	87	68	0	33,33	0
Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi	%	19,73	14,19	33	16,67	50
Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	unit	-	-	268	622	1.520
Jumlah penerbitan perijinan	%	2.308	1.878	2.344	3.248	4.027
Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai SOP	%	88	68	72.5	82.79	90.49

Sumber: DPMPSTP diolah Bappelitbangda, 2024

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Ruang lingkup olahraga tidak hanya menyangkut olahraga prestasi tetapi juga olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Artinya, bahwa parameter keberhasilan pembangunan olahraga bukan hanya dilihat dari segi prestasi yang diraih oleh suatu negara atau daerah, akan tetapi parameter keberhasilan pembangunan olahraga dapat dilihat dari segi pencapaian 4 aspek pembangunan keolahragaan atau Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), yaitu: ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam keolahragaan, serta partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan berolahraga secara langsung maupun tidak langsung dalam memperoleh derajat kebugaran jasmani pada masyarakat. Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Kabupaten Bandung Barat terus meningkat, pada tahun 2021 sebesar 0,41 dan tahun 2022 sebesar 0,42 meningkat kembali di tahun 2023 sebesar 0,44 tetapi capaian masih pada kategori rendah.

Sedangkan peran serta pemuda dalam pembangunan diukur melalui capaian kapasitas layanan kepemudaan dengan capaian di tahun 2023 sebesar 7,83 persen dan presentase pemuda yang aktif di organisasi kepramukaan capaian 2023 sebesar 2,86 persen. Berikut indikator urusan Kepemudaan dan Olahraga, tersaji pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.75 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Indeks Pembangunan Olahraga	point	-	-	0,41	0,42	0,44
Jumlah ketersediaan ruang terbuka dan sarana olahraga	unit	1.527	2.562	2.712	2.667	2.957
Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi	org	41	-	33	569	160
Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga	point	14,56	19,98	33	35	35
Presentase Kapasitas Layanan Kepemudaan	%	-	-	9,20	7,83	10,24
Presentase peningkatan pemuda yang aktif pada organisasi kepramukaan	%	-	-	1,5	2,86	3,21

Sumber: Dispora diolah Bappelitbangda,2024.

Walaupun IPO mengalami peningkatan tetapi dari indikator angka partisipasi dan tingkat kebugaran masih pada katagori rendah, dan peran serta pemuda dalam pembangunan pelayanan kepemudaan pada sector kewirausahaan pemuda masih mendominasi tetapi pelayanan kepemimpinan pemuda dan pemuda kader masih kurang.

2.1.3.2.14 Statistik

Dalam rangka pelaksanaan urusan statistik di Kabupaten Bandung Barat dengan indikator, presentase penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Bandung Barat yang telah dikelola dan dipublikasikan capaian tahun 2019 sebesar 70 persen meningkat di tahun 2022 menjadi 99,05 persen. Peningkatan capaian penyelenggaraan statistik sektoral tidak terlepas dari efektifitasnya Forum satu data Bandung Barat melalui peran Pembina data, wali data dan produsen data dalam mengumpulkan, menyediakan dan mempublikasikan data statistik sektoral dalam rangka berbagi pakai data untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan serta dengan ditetapkannya Perbup Nomor 19 tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Bandung Barat.

Publikasi data melalui Portal data Kabupaten Bandung Barat yang dikelola oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bandung Barat, dengan tautan: <https://opendata.bandungbaratkab.go.id> sampai dengan tahun 2023, statistik data pada portal data telah tersedia sebanyak 2.275 Dataset dan 35 Organisasi.

**Tabel 2.76 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB Kabupaten	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Presentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	70	74,5	99,22	99,05	98,84

Sumber: Dinas Kominfo dan Statistik, diolah Bappelitbangda, 2024.

2.1.3.2.15 Persandian

Urusan persandian di Kabupaten Bandung Barat dititikberatkan pada pengamanan informasi Pemerintah Daerah dengan indikator persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 97,22 dan menurun pada tahun 2023 menjadi 82,00 persen. Dilihat dari pencapaiannya dan begitu pentingnya pengamanan aplikasi terutama keamanan data pribadi dan pengamanan informasi dari berita hoax, perlu didukung dengan adanya kerjasama antara Pemkab Bandung Barat dan BSSN tentang penyelenggaraan keamanan informasi, serta Pelatihan/Pendidikan bagi aparatur dalam pengelolaan sertifikat elektronik dan keamanan informasi terutama terkait literasi digital.

2.1.3.2.16 Kebudayaan

Pemetaan potensi budaya di Kabupaten Bandung Barat tertuang pada Data Potensi Adat Budaya berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat No. 188.45/Kep.196-Disparbud/2019 Perihal Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Pada dokumen tersebut tercatat ada 40 jenis adat budaya baik berupa budaya tradisi/ritual, cerita rakyat, upacara tradisional, permainan rakyat dan jenis lainnya. Capaian pelestarian nilai budaya local Kabupaten Bandung Barat dari 40 jenis adat budaya sampai dengan tahun 2023 baru terealisasi 10 jenis.

Dalam rangka pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya dari total potensi di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 173 objek, capaiannya semakin meningkat tahun 2019 sebanyak 10 objek telah dilestarikan dan tahun 2023 meningkat menjadi 30 objek benda, situs dan kawasan cagar budaya telah dilestarikan.

Tabel 2.77 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Objek	10	4	8	20	30
Jumlah Nilai budaya lokal dan objek pemajuan budaya yang di lestarikan	Budaya	5	1	2	1	1
Jumlah Persiapan dan perencanaan Kebudayaan dan kesenian yang berjalan dengan baik	Kegiatan	2	1	1	10	0

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diolah Bappelitbangda, 2024.

2.1.3.2.17 Perpustakaan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, dilaksanakan melalui pelayanan perpustakaan, penyediaan buku perpustakaan daerah, perpustakaan desa, perpustakaan keliling maupun dalam bentuk taman bacaan masyarakat. Capaian indikator kinerja urusan perpustakaan selama periode Tahun 2019-2023 rata-rata realisasi menunjukkan capaian yang positif, Koleksi buku perpustakaan daerah semakin banyak pada tahun 2019 tersedia 61.959 buku dengan 14.738 judul meningkat di tahun 2023 menjadi 72.793 buku dengan 18.510 judul buku.

Sedangkan nilai kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan dengan capaian berpredikat “B”. Indikator capaian penyelenggaraan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.78 Indikator Penyelenggaraan Perpustakaan
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023**

Indikator	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Daerah	61.959 Explr 14.738 Judul	62.206 Explr 14.826 Judul	65.826 Explr 15.188 Judul	70.980 Explr 17.877 Judul	72.793 Explr 18.510 Judul
Jumlah koleksi E-Book	-	-	1.869 Explr 1.014 Judul	5.139 Explr 2.107 Judul	5.145 Explr 2.080 Judul
Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan Daerah	7.152 orang	7.809 orang	5.331 orang	10.936 org	68.528 org
Jumlah Perpustakaan Desa	70	70	71	71	66
Jumlah Taman Bacaan Masyarakat	12	12	12	12	50
Jumlah Kendaraan Perpustakaan Keliling	5	5	5	5	5
Layanan Kunjungan Perpustakaan Keliling	24 titik	15 titik	-	18 titik	34 titik
Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan	N/A	N/A	Predikat B	Predikat B	Predikat B

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, diolah Bappelitbangda, 2024.

2.1.3.2.18 Kearsipan

Capaian kinerja pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 20 persen menjadi 39 persen di tahun 2023, tetapi masih perlu dilakukan pembinaan terhadap pengelola arsip di Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelamatan arsip, capaian mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 20 persen menjadi sebesar 66 persen ditahun 2023.

**Tabel 2.79 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023**

Indikator	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Jumlah arsip yang sudah dilakukan penyelamatan	20	30	31	46	66
Persentase Arsip PD yang sudah di Kelola secara baku	20	25	19	34	39
Jumlah rumusan kebijakan perizinan kearsipan	-	-	0	1	0

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, diolah Bappelitbangda, 2024

2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan

Aspek pelayanan umum focus urusan pilihan pada tahun 2019-2023 terdiri dari 6 (enam) urusan.

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Produksi komoditas perikanan unggulan di Kabupaten Bandung Barat mengalami progres peningkatan berkisar antara 42 ribu – 47 ribu ton/tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.80 Data Produksi Ikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023

Produksi Ikan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Ikan (Ton)	44.905	42.327	44.161	46.760	49.123

Sumber Data : Dinas Perikanan & Peternakan, Kab. Bandung Barat, 2024

Adapun jenis produk komoditas unggulan Kabupaten Bandung Barat diantaranya: Ikan Mas, Nila, Patin, Lele dan Gurame dengan komoditas terbesar adalah jenis komoditas ikan patin dan ikan mas, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81 Produksi Komoditas Perikanan Unggulan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023

No	Komoditas Ikan	Produksi Ikan Tahun 2019	Produksi Ikan Tahun 2020	Produksi Ikan Tahun 2021	Produksi Ikan Tahun 2022	Produksi Ikan Tahun 2023
1	Ikan Mas	8.224,78	15.763,99	14.097,74	14.063,87	15.531,21
2	Ikan Nila	12.825,22	18.450,00	21.627,23	21.054,44	23.715,90
3	Ikan Patin	4.580,44	5.849,56	6.077,52	6.204,65	6.444,31
4	Ikan Lele	16.506,45	1.917,19	1.981,37	-	2.772,30
5	Ikan Gurame	2.748,26	345,98	377,57	41,36	659,03
Jumlah		44.905,15	42.326,72	44.161,43	41.364,32	49.122,75

Sumber: Dinas Perikanan dan Perikanan, diolah Bappelitbangda, 2023

Adapun capaian indikator urusan kelautan dan perikanan tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.82 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Persentase Penyebaran Benih Unggul	Persen	-	-	11	15,1	12,9
Jumlah RTP	RTP	2.254	2.689	4.872	5.030	3.019
Pengawasan Sumber Daya Perikanan	SDP	-	-	2	2	2
Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Kelompok	78	80	83	86	86

Sumber: Dinas Perikanan dan Perikanan, diolah Bappelitbangda, 2024

2.1.3.3.2 Pariwisata

Berdasarkan data potensi pariwisata, sampai dengan tahun 2023 terdapat 158 objek wisata di Kab. Bandung Barat dimana 2 diantaranya dikelola oleh Pemda yaitu: Situ Ciburuy, Gua Pawon dan Curug Malela dan sisinya 156 objek wisata dikelola oleh swasta. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kab. Bandung Barat pada tahun 2023 dengan realisasi sebanyak 4.829.886 orang mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan dibanding tahun 2022 sebanyak 5.045.679 orang. Sektor pariwisata sebagai penyumbang PAD, dalam rangka meningkatkan PAD dari sektor pariwisata perlu peningkatan upaya yang dilakukan oleh Pemkab Bandung Barat melalui promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif pendukung pariwisata serta peningkatan fasilitas pendukung pariwisata, dengan capaian indikator kepariwisataan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.83 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata
di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	6.333.889	4.088.811	4.497.692	5.045.679	4.829.886
Jumlah Objek Wisata yang dikelola Pemda	Objek	3	3	3	2	2
Jumlah Obyek Wisata yang dikelola pihak swasta	Objek	122	143	155	155	156
Hotel/Penginapan/Vila	Unit	89	89	90	95	95
Jumlah Tamu yang Menginap	Orang	901.690	134.350	147.785	607.390	401.353
Restoran, Rumah Makan, Café	Unit	134	135	141	142	143
Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif (Ekraf)	Jumlah	200	350	1.494	615	-

Jumlah pelaku usaha industri kreatif, penggerak pariwisata dan budaya yg meningkat kompetensi	Pelaku Usaha	30	70	75	105	225
Jumlah Perluasan sub sektor ekonomi kreatif	Sub Sektor	9	10	1	0	3
Persentase destinasi pariwisata yang memenuhi standar	%	20	23,31	35,29	55,56	53,33
Persentase kegiatan promosi pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif yang efektif	%	100	100	100	77	42,85

Sumber: Dinas Perikanan dan Perikanan, diolah Bappelitbangda, 2024

2.1.3.3.3 Pertanian

Urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan. Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Bandung Barat didominasi oleh 6 (lima) kategori lapangan usaha salah satunya adalah sektor pertanian yang berkontribusi terhadap PDRB sebesar 12,73 persen pada tahun 2023 turun dari kontribusi tahun 2022 sebesar 12,87 persen atau mengalami pelambatan sebesar -0,14 persen.

Pada sub sector pertanian tanaman pangan, Tanaman padi sebagai komoditas pangan utama bila dilihat dari produksinya mengalami penurunan untuk padi sawah di tahun 2023 menjadi 258.451 ton dibanding tahun 2022 dengan capaian 297.093 ton, tetapi untuk produktifitas padi ladang pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 2.162 ton dibanding tahun 2022 sebesar 1.635 ton, dengan lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 2.84 Realisasi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023

No	Tanaman Pangan	Luas Tanam (Ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi Sawah	45.754	46.291	42.217	44.735	39.229
2	Padi Ladang	1.451	858	1.035	415	56
No	Tanaman Pangan	Luas Panen (Ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi Sawah	48.023	46.247	43.199	45.807	39.754
2	Padi Ladang	3.558	1.186	1.055	416	551
No	Tanaman Pangan	Produksi (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi Sawah	304.365	299.139	279.990	297.093	258.451
2	Padi Ladang	14.271	4.654	3.355	1.635	2.162

Sumber Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

Nilai tukar petani yang merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib) menunjukkan tren meningkat dimana NTP tahun 2022 sebesar 109,10 meningkat menjadi 113,86 di tahun 2023. Capaian indikator urusan sub sector pertanian tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.85 Capaian Indikator Kinerja Sub Urusan Pertanian
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Pertumbuhan sektor pertanian	%	1,24	-0,62	-1,30	4,11	1,59
Jumlah Produksi Komoditas Pertanian (Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan)		405.560	387.939	444.368	457.816	425.446
Nilai Tukar Petani	point	109,10	101,42	108,34	109	113,86
Jumlah Ahli Pertanian Berkualitas	orang	83	83	83	89	100
Jumlah penyuluh pertanian yang melaksanakan Diklat Teknis	orang	19	45	25	17	45

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, diolah Bappelitbangda, 2024

Sedangkan realisasi capaian sub sector peternakan, untuk produktifitas hasil peternakan seperti daging, susu dan telur, dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan di dalam daerah juga sebagian dijual ke daerah lain, dengan jumlah potensi komoditas hasil peternakan dan dengan capaian sub sector peternakan dapat dilihat pada tabel berikut:adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.86 Realisasi Komoditas Peternakan di Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2019 – 2023**

Komoditas	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Daging Sapi	2.487.000 kg/Tahun	5.667.360 kg/Tahun	5.488.866 kg/Tahun	5.512.777 Kg/Tahun	6.868.437 Kg/ Tahun
Daging Ayam	22.343.000 kg/Tahun	16.926.150 kg/Tahun	16.888.469 kg/Tahun	16.893.290 Kg/Tahun	17.570.618 Kg/Tahun
Susu	79.950.000 Liter/Tahun	95.099.514 Liter/Tahun	94.443.188 Liter/Tahun	57.992.138 Liter/tahun	67.012.252 Liter/tahun
Telur Ayam	665.250 Kg/Tahun	5.749.109 kg/Tahun	5.733.099 kg/Tahun	5.734.991 Kg/Tahun	5.738.910 Kg/Tahun
Telur Bebek	997.000 Kg/Tahun	2.217.302 kg/Tahun	2.216.806 kg/Tahun	2.217.070 Kg/Tahun	2.220.679 Kg/Tahun

Sumber Data : Dinas Perikanan & Peternakan, Kab. Bandung Barat, 2024

**Tabel 2.87 Capaian Indikator Kinerja Sub Urusan Peternakan
Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023**

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Persentase Kenaikan Produksi Peternakan	%	N/A	N/A	4,1	-32	15
Produksi Daging	Kg	25.003	24.769	24.548	7.418	24.434
Produksi Telur	Kg	1.665	1.405	1.966	659	2.220
Produksi Susu	liter	79.950	84.210	97.088	57.992	67.012

Persentase Penyebaran Bibit Unggul	Persen	5	7	10	9,7	12,9
Persentase kelahiran Ternak	Persen	72,3	74	75	94	80
Jumlah Kelompok Yang menerapkan teknologi peternakan	Kelompok	7	12	14	23	15
Persentase Pengembangan Prasarana Peternakan	Persen	-	-	-	20	20
Cakupan pelayanan kesehatan hewan	Persen	-	-	63	77,3	80
Prevalensi Brucellosis (%)	Persen	-	-	2	2,2	3
Persentase Kasus Wabah Zoonosis yang tertanggulangi	Persen	-	-	78	100	100
Tefasilitasinya Penerbitan izin usaha peternakan	Persen	-	-	100	100	100
Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Ternak / Tahun	Klpok	10	12	10	10	15

Sumber: Dinas Perikanan & Peternakan, Kab. Bandung Barat, 2024

2.1.3.3.4 Perdagangan

Peranan distribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Bandung Barat pada tahun 2019-2023 salah satunya adalah sektor perdagangan, dengan kontribusi sebesar 12,40 pada tahun 2023 meningkat bila dibanding kontribusi tahun 2022 sebesar 12,35 atau bila dilihat dari pertumbuhannya sector perdagangan di tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,03 persen dari total PDRB. Pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 1,53% untuk pengembangan usaha produk ekspor unggulan dan penurunan pada indikator standarisasi perlindungan konsumen dari capaian tahun 2022 sebesar 40 persen menjadi 26,31 di tahun 2023. Tetapi sector perdagangan tetap optimis dalam meningkatkan perekonomian hal ini terlihat dari pertumbuhan pelaku usaha sector perdagangan menjadi 4.370 di tahun 2023 atau meningkat bila dibandingkan dengan capaian 2022 sebesar 4.268.

Berikut capaian indikator kinerja urusan perdagangan, tahun 2019 - 2023 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.88 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Pertumbuhan sector perdagangan	%	13,58	12,89	12,69	12,35	12,40
Persentase peningkatan standarisasi dan perlindungan konsumen	%	38	19	29	40	26,31
Persentase Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	%	45	0	0	50	48,47
Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan	%	4.112	1.960	3,880	4,268	4,370
Prosentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan	%	32	20	30	33	31,79

Jumlah Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten Kota	Keg	6	0	2	7	3
Jumlah Monitoring Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Keg	150	70	120	150	90

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diolah Bappelitbangda, 2024

2.1.3.3.5 Perindustrian

Perindustrian merupakan sektor yang berperan penting bagi pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, terlebih pada jenis agroindustri. Diketahui bahwa pertumbuhan industri (baik industri kecil, sedang dan besar), terus mengalami peningkatan. Sektor industri khususnya pengolahan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Peranan distribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Bandung Barat dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami tren meningkat tiap tahunnya pada tahun 2019 dengan kontribusi sebesar 39,96 persen terus meningkat sampai dengan tahun 2023 berkontribusi sebesar 41,66 persen atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,30 persen.

Terdapat kondisi terjadi penurunan dalam pengembangan IKM dari realisasi tahun 2022 sebesar 405 turun menjadi 26,75% ditahun 2023, tetapi perijinan IKM dan industry yang terintegrasi ke dalam SINAS mengalami tren meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Berikut indikator urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.89 Capaian Indikator Kinerja Urusan Industri di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Pertumbuhan sector industry pengolahan	%	6,26	-2,42	4,87	6,43	5,30
Prersentase Pengembangan IKM	%	27,05	20,67	28	40	26,75
Pertumbuhan industri yang berizin	%	1.907	1.705	2.132	2.240	2.350
Pertumbuhan Industri yang terintegrasi ke dalam SINAS	%	255	255	260	300	313

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diolah Bappelitbangda, 2024

2.1.3.3.6 Transmigrasi

Pelaksanaan urusan transmigrasi melalui program transmigrasi regional. Program tersebut ditunjang oleh kegiatan monitoring dan penempatan transmigrasi. Monitoring tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk melihat kondisi daerah yang akan dijadikan sebagai daerah penempatan transmigrasi. Hal tersebut dikarenakan sudah semakin berkurangnya tanah yang akan dibuka untuk penempatan transmigrasi. Tetapi pada tahun 2021 indikator urusan transmigrasi

berubah menjadi presentase transmigran mandiri dengan capaian sebesar nol persen hal ini karena baru pada tahap sosialisasi kepada 54 orang calon transmigran dan s.d tahun 2023 telah terdaftar 25 orang calon transmigrasi.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

Unsur pendukung urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung capaian reformasi birokrasi dan Sekretariat DPRD, dalam rangka fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Bandung Barat dengan capaian indikator selalu patuh tepat waktu dengan capaian tiap tahun sebesar 100 persen. Salah satu indikator peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah bidang perekonomian pembangunan adalah melalui pengukuran level kematangan/maturitas PBJ. Indikator ini menggambarkan tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Capaian indikator tingkat kematangan UKPBJ Kabupaten Bandung Barat sampai dengan tahun 2023 berada pada Level 2 (Repeatable) UKPBJ, dengan capaian indikator terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.90 Capaian Indikator Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Indeks Kepuasan Masyarakat	point		80,29	80,75	82,39	82,65
Persentase data dan informasi bid. Perekonomian yang di gunakan sebagai policy brief	%			85	80	85
Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan policy brief	%	0	30	90	75	100
Center of excelent pengadaan barang jasa	%	100	100	100	100	100
Persentase Laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	%	100	100	100	90	100
Persentase Perda yang ditetapkan	%	60	60	90	85	100
Persentase Data dan Informasi Bidang Sosial yang digunakan sebagai Policy Brief	%			85	80	100
Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	point			82,35	83,25	81,98

Sumber: Sumber: Setda dan Sekretariat DPRD, diolah Bappelitbangda, 2024

Sedangkan bila dilihat dari capain kinerja Sekretariat DPRD bahwa Persentase Perda yang ditetapkan s.d tahun 2023 menjelang tahun terakhir masa bakti DPRD dengan capaian penetapan Perda adalah sebesar 100 persen. Tetapi indikator dalam rangka fasilitasi dukungan terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang diukur dengan Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD mengalami penurunan dari tahun 2022 dengan capaian 83,25 persen menjadi 81,98 di tahun 2023

2.1.3.5 Unsur Penunjang dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah

Unsur penunjang urusan Pemerintah Daerah mencakup urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan serta unsur pengawasan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda, BKPSDM, BKAD, Bapenda, Inspektorat Daerah dan seluruh secretariat di Perangkat Daerah. Ddilaksanakan dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung capaian reformasi birokrasi serta dalam rangka mendukung sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan, dengan capaian indikator terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91 Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Indeks Reformasi Birokrasi	poin	56,79 CC	57,60 CC	57,81 CC	60,97 B	72,27 BB
Nilai SAKIP	poin	66 B	67,04 B	67,55 B	68,03 B	68,59 B
Nilai Komponen Sakip Perencanaan Kinerja	poin	23,90	24,45	24,58	24,75	24,80
Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja	poin	15,79	15,60	15,86	15,94	16,09
Indeks Merit	skore	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3
Opini BPK	opini	WTP	WDP	WTP	WTP	
Persentase peningkatan pendapatan daerah	%		7,36	13,41	32,12	10,8
Persentase peningkatan pengelolaan aset daerah	%		80,78	77	111,16	64
Presentase Aparatur yang mendapatkan Pembinaan Kepegawaian	%	119,05	65	79,34	61,70	78,61
Persentase Aparatur yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	%	102,28	42,77	70	75	75
Persentase diseminasi hasil kelitbangan	%		100	100	100	100
Persentase Rekomendasi Temuan BPK RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda, BKAD, Bappenda, BKPSDM, 2024



Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Nilai IRB Kab. Bandung Barat pada tahun 2019 masuk pada kategori CC (CUKUP) dengan nilai 56,79 sampai dengan tahun 2023 Nilai IRB Kab. Bandung Barat meningkat pada katagori BB dengan nilai sebesar 72,27.

Capaian indikator SAKIP Kabupaten Bandung Barat pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun masih pada katagori “B” tetapi secara nilai mutu pada Tahun 2019 sebesar 66,00 terus mengalami kenaikan s.d tahun 2023 menjadi sebesar 68,59. Dari sisi perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang menjadi kewenangan bappelitbangda capaian komponen SAKIP masih pada katagori sedang, pada tahun 2024 dan 2025 merupakan tahun perencanaan dimana Bappelitbangda harus menyusun dokumen perencanaan secara simultan yaitu RPJPD 2025-2045, RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2025 dan 2026.

Capaian indikator urusan keuangan terkait pengelolaan keuangan dapat dikatakan telah lebih baik dengan capaian opini BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2019 dan 2021 dengan opini WTP, sedangkan untuk tahun 2023 belum keluar hasilnya.

Sedangkan bila dilihat dari indikator persentase peningkatan pendapatan daerah Kab. Bandung Barat meningkat menjadi 13,41 persen di tahun 2021 dibanding tahun 2020 sebesar 7,36 persen dan melonjak naik di tahun 2022 menjadi 32,12 persen tetapi kembali turun di tahun 2023 menjadi 10,8 persen. Indeks Sistem Merit ASN merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yaitu ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Capaian indeks sistem merit ASN di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2019 – 2023 telah baik dengan capaian katagori 3. Untuk capaian presentase aparatur yang mendapatkan pembinaan kepegawaian dan persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi mengalami kenaikan dari tahun 2022 menjadi 78,61 persen dan 75 persen di tahun 2023. untuk capaian realisasi indikator yang telah mencapai target 100 persen diantaranya Persentase Rekomendasi Temuan BPK RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dan indikator Persentase diseminasi hasil kelitbang.

2.1.3.6 Unsur Pemerintahan Umum

Unsur pemerintahan umum di Kabupaten bandung Barat dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan capaian secara umum kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan umum menunjukkan kinerja yang baik, walaupun masih terdapat beberapa

indikator yang mengalami penurunan dpaian di tahun 2023, diantaranya Persentase penyelesaian jumlah potensi konflik social, Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tetapi terkait indeks kerukunan umat beragama mengalami peningkatan dengan capaian di tahun 2023 adalah sebesar 87,10 poin, dengan rincian capaian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.92 Capaian Capaian Indikator Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 – 2023

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Indeks Kerukunan Umat Beragama	point			51,20	83,59	87,10
Persentase penyelesaian jumlah potensi konflik sosial	%	98	100	96,42	84,86	81,17
Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	98,41	100	51,88	83,18	80,17
Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%			42,86	100	99,97
Persentase Ormas/LSM yang tercatat di Badan Kesbangpol kab. Bandung Barat	%			70	100	100
Tingkat pemahaman politik di masyarakat	%	30	50	60	52,18	77,46

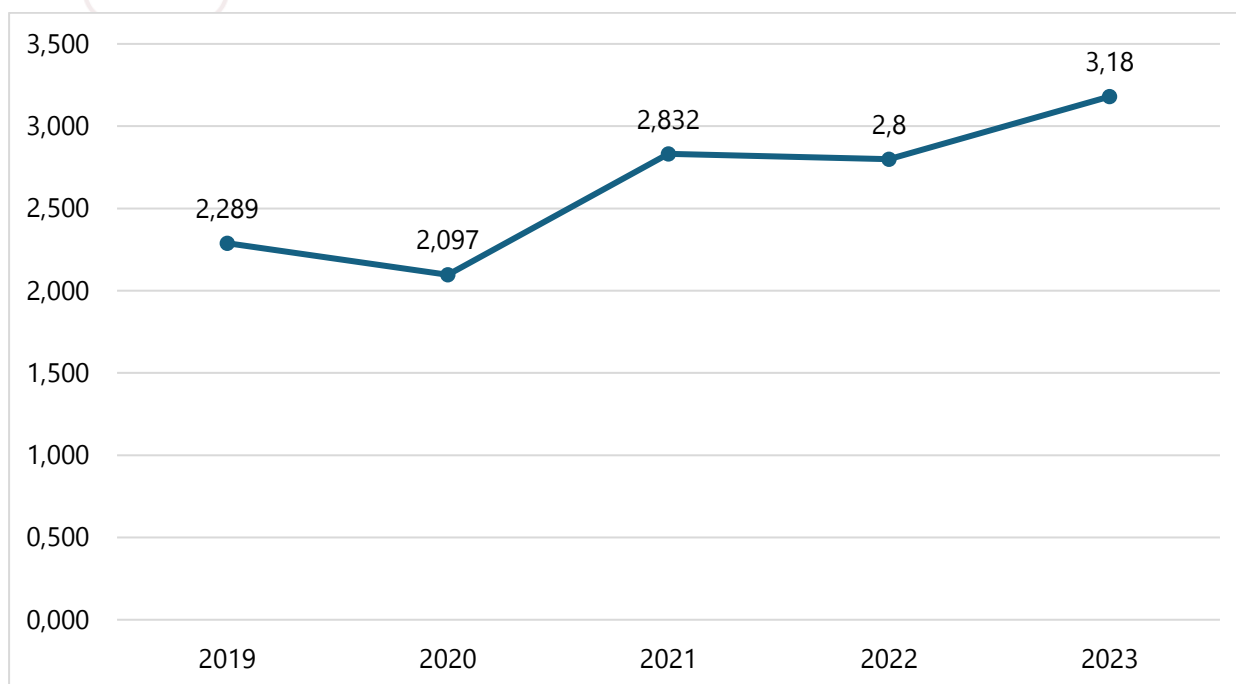
Sumber: Badan Kesbangpol, diolah Bappelitbangda, 2024

2.1.4 Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dilakukan oleh Kemenristek BRIN, bahwa Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 masuk pada kategori Daya Saing “Tinggi” dengan nilai indeks sebesar 2,289 dan sampai dengan tahun 2023 dengan capaian IDSD sebesar 3,180.

**Gambar 2.24 Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2019 – 2023**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024, diolah

2.1.4.1 Daya Saing Ekonomi daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi. Kondisi daya saing daerah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan kemampuan ekonomi daerah diantaranya berdasarkan indikator komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Rangka (PK-RT), pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita pangan dan non pangan.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Bandung Barat, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Bandung Barat maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2019-2023 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu

pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**Tabel 2. 93 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	31.000,87	31.260,37	32.262,77	35.587,57	38.762,46
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	19.946,78	19.770,88	20.033,77	20.909,97	21.921,28
Proporsi terhadap PDRB (%)	65,71	67,26	66,16	67,24	68,07
Rata-rata konsumsi per Kapita (Ribu)					
a. ADHB (Ribu Rp)	18.535,29	17.546,36	17.840,31	19.400,82	20.844,06
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	11.926,10	11.097,34	11.078,05	11.399,86	11.787,92
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi RT	5,13	-0,88	1,33	4,37	4,84
b. Perkapita	5,83	-6,95	-0,17	2,90	3,40

Sumber : Publikasi PDRB KBB Menurut Pengeluaran 2019-2023, BPS 2024

Selama periode 2019-2023 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB fluktuatif, terjadi penurunan pada periode tahun 2020-2021, kemudian mengalami peningkatan kembali pada periode 2021-2023 proporsi tersebut yaitu 65,71 persen (2019); 67,18 persen (2020); 66,09 persen (2021); 67,24 persen (2022) dan 67,18 (2023).

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara rata-rata, konsumsi per kapita dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2019, setiap penduduk di Kabupaten Bandung Barat menghabiskan dana sekitar 15.788 ribu Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 18.588 ribu Rupiah (2020); 19.085 ribu Rupiah (2021); 20.946 ribu Rupiah (2022) dan 17.763 ribu Rupiah (2023). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per kapita mengalami fluktuatif pada kisaran -1,42 s.d 5,83 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 5,83 persen. Peningkatan dan penurunan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.94 Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
a. Makanan, Minuman, Rokok	52,74	54,23	54,73	55,49	55,75
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,74	3,55	3,50	3,33	3,24
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	14,83	14,64	14,26	13,92	13,87
d. Kesehatan, Pendidikan, rekreasi dan Budaya	3,41	3,51	3,54	3,39	3,31
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	17,20	16,14	16,15	16,23	16,25
f. Hotel dan Restoran	3,99	3,81	3,76	3,71	3,73
g. Lainnya	4,09	4,11	4,06	3,93	3,86
Total Konsumsi	100	100	100	100	100

Sumber: Publikasi PDRB KBB Menurut Pengeluaran 2019-2023, BPS 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa selama periode 2019-2023, pengeluaran rumah tangga didominasi oleh konsumsi pada kelompok makanan, minuman dan rokok yang berkisar antara 52,74 sampai dengan 55,49 persen. Pengeluaran konsumsi non pangan untuk transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 16,14 sampai dengan 17,20 persen, disusul kemudian oleh pengeluaran pada kelompok perumahan perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga yang berkisar antara 13,92 sampai dengan 14,83 persen.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

**Tabel 2.95 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023**

PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
- ADHB	28,21	26,09	26,97	28,85	30,62
- ADHK	18,77	17,20	17,53	18,21	18,85
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	4,42	-8,38	1,93	3,85	3,56

Sumber : Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

2.1.4.2 Daya Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Untuk meningkatkan Daya Saing Daerah, dibutuhkan kelancaran pendistribusian arus barang, mobilitas penumpang serta kemudahan akses terhadap prasarana transportasi lainnya. Pelayanan transportasi yang efektif dan efisien melalui pemaduan jaringan pelayanan dan juga prasarana, diharapkan menjadi daya tarik yang kuat bagi masuknya investasi. Sarana infrastruktur aksesibilitas/transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi berperan penting sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Data kondisi jalan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan SK Bupati Bandung Barat No: 188.45/Kep.219-DPUPR/2018 dengan total panjang jalan Kabupaten sepanjang 525,57 Km (s.d tahun 2022) sebanyak 108 ruas jalan dan pada tahun 2023 telah ditetapkan SK Bupati Bandung Barat No: 188.45/Kep.302-DPUPR/2023 dengan total panjang jalan Kabupaten sepanjang 648,06 Km sebanyak 152 ruas jalan, terdapat peningkatan panjang jalan Kabupaten sepanjang 122,49 Km dan peningkatan 44 ruas jalan.

Adapun kondisi jalan baik di Kabupaten Bandung Barat selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan dengan proporsi panjang jalan kondisi baik pada tahun 2019 sebesar 65,19 persen menjadi 70,91 persen di tahun 2022 dan kondisi jalan baik dengan mengacu pada SK jalan yang baru dengan penambahan sebanak 44 ruas jalan, kondisi jalan baik baru mencapai 46,23 persen.

Tabel 2.96 Data Kondisi Jalan di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 - 2023

Kondisi Jalan	PANJANG JALAN (Km)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Baik	342.615	318.617	332.375	372.682	299.594
Sedang	37.765	88.695	57.340	61.738	73.082
Rusak Ringan	86.44	2.175	49.645	53.453	91.893
Rusak Berat	58.75	116.083	86.210	37.697	183.491
Total Panjang Jalan	525.57	525.57	525.57	525.57	648.06

Sumber : Dinas PUPR, Kab. Bandung Barat, 2024

Untuk mengetahui tingkat ketersediaan jalan yang dapat memberikan akses tiap kendaraan, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan data, panjang jalan di Kabupaten Bandung Barat sepanjang 525,57 km dengan jumlah rata-rata harian angkutan darat yang melintas berdasarkan data dari Dinas Perhubungan yaitu sebanyak 62.683 kendaraan/hari sehingga rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah sebesar 119,27 artinya per 1 km jalan melayani/dilalui oleh 119 kendaraan.

Jumlah sarana angkutan umum dan angkutan barang serta layanan kendaraan umum berpenumpang di Kabupaten Bandung Barat sebagai sarana aksesibilitas penunjang, pendorong dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.97 Data Jumlah Angkutan Barang di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 - 2023

No	Kecamatan	Jumlah Unit Angkutan Barang				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cililin	418	416	0	0	0
2	Cihampelas	444	444	444	4	4
3	Sindangkerta	146	46	0	0	0
4	Gununghalu	119	120	120	0	0
5	Rongga	70	70	70	32	32
6	Cipongkor	209	209	209	0	0
7	Batujajar	849	849	447	446	446
8	Lembang	3.186	3.184	3.184	3	3
9	Parongpong	849	1.213	1.213	112	112
10	Cisarua	760	757	757	973	975
11	Ngamprah	1.423	1.425	1.425	435	437
12	Padalarang	3.556	3.557	3.557	48	47
13	Cipatat	209	771	771	48	48
14	Cipeundeuy	579	579	577	42	41
15	Saguling	93	94	94	16	15
16	Cikalongwetan	604	605	605	92	90
JUMLAH		13.514	14.337	13.473	2.251	2.250

Sumber : Dishub, Kab. Bandung Barat, 2024

Tabel 2.98 Aksesibilitas Kendaraan Umum di Kab. Bandung Barat Tahun 2019 – 2023

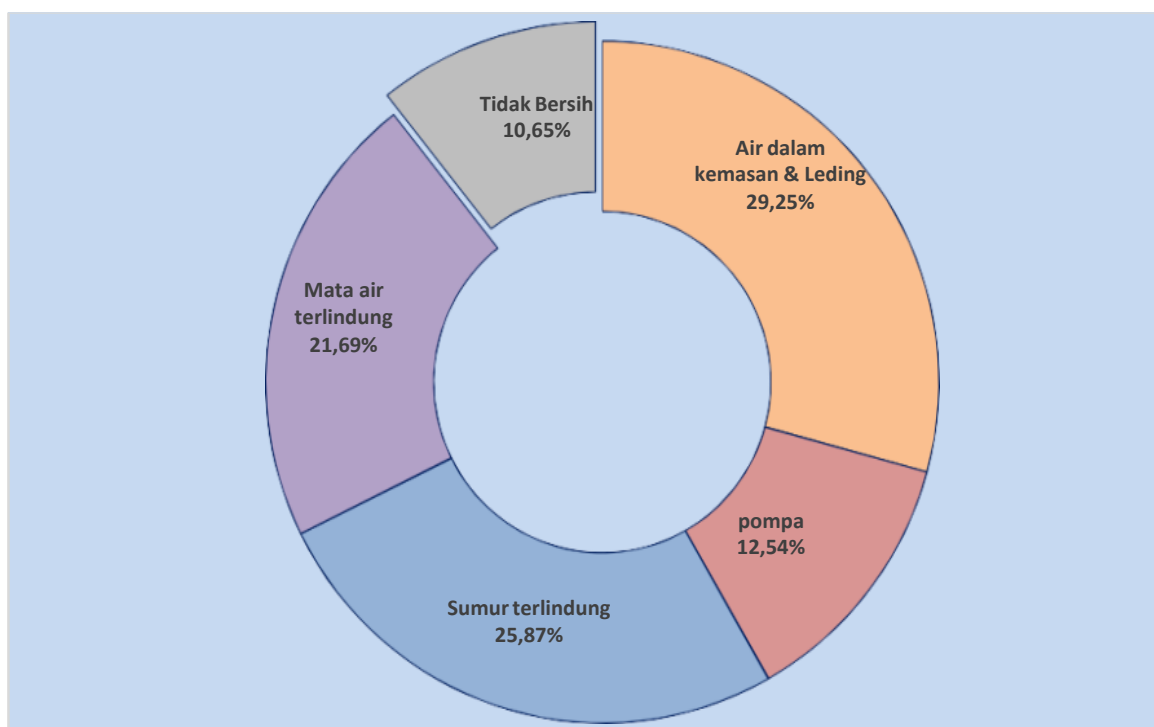
Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Angkutan Umum	956	614	965	600	459
Jumlah Penumpang yang melalui Terminal	697.445	746.618	777.966	577.299	463.774

Sumber : Dishub, Kab. Bandung Barat, 2024

Aksesibilitas pergerakan manusia dan barang sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi daerah didukung oleh ketersediaan angkutan umum dan angkutan barang, dengan kondisi layanan angkutan barang tahun 2019 sebanyak 13.514 unit terus mengalami penurunan s.d tahun 2023 menjadi 2.250 unit. Begitu pun dengan pergerakan manusia yang dilayani oleh angkutan umum pada tahun 2019 sebanyak 697.445 penumpang terus semakin turun di tahun 2023 menjadi 463.774 penumpang. Hal ini terjadi karena terdapat penurunan jumlah armada layanan angkutan umum berkurang menjadi 459 unit di tahun 2023 dan juga hal ini pun terdampak adanya angkutan umum berbasis online.

Sedangkan untuk fasilitas infrastruktur air bersih, persentase rumah tangga yang mengonsumsi air minum bersih di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 telah mencapai lebih dari 89,35 persen. Proporsi pemakaian air minum menurut sumbernya dalam penggunaan air bersih di Kabupaten Bandung Barat, bahwa penggunaan sumber air minum dari air ledeng/air kemasan sebesar 29,25 persen diikuti oleh sumur terlindung sebesar 25,87 persen masih mendominasi terkait pemenuhan kebutuhan sumber air minum masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah bahwa masih terdapat masyarakat yang memanfaatkan sumber air minum tidak bersih sebesar 10,65 persen.

Gambar 2.25 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2023

Indikator lain dari aspek daya saing daerah adalah ketersediaan energi terutama penggunaan listrik sebagai sumber penerangan. Sebanyak 43 desa (26,06%) sebagian besar jalannya telah diterangi listrik. Ada 95 desa (57,58%) yang sebagian kecil jalannya telah diberi penerangan dan sebanyak 27 desa (16,36%) belum memiliki penerangan jalan. Diantara 138 desa yang memiliki penerangan jalan sebanyak 96 Desa (69,57%) menggunakan listrik yang diusahakan pemerintah dan sisanya sebanyak 42 desa (30,43%) listriknya non pemerintah. Aspek daya saing daerah fokus terhadap kondisi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi diantaranya ketersediaan pasar, restoran, rumah/warung makan, hotel/penginapan, Bank/BPR di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Basis Data Pembangunan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.99 Data Infrastruktur Fasilitas Kegiatan Ekonomi di
Kab. Bandung Barat Tahun 2019-2023**

Jenis Infrastruktur	2019	2020	2021	2022	2023
Pasar Tradisional/Modern	388	306	309	309	303
Restoran, Rumah/WarungMakan, Cafe	1.738	1.436	1.606	1.748	1.881
Hotel/Penginapan	159	117	162	167	297
Bank/BPR	98	90	95	95	95
Penerangan Jalan	4.627	4.972	5.044	5.164	5.580

Sumber : Basis Data Pembangunan, BPS/Diskominfotik, 2024

2.1.4.3 Daya Saing Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti indeks rasa aman, angka kriminalitas, jumlah demonstrasi dan pelayanan perijinan.

Stabilitas keamanan menjadi salah satu aspek penting dalam berinvestasi. Daerah dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang lebih baik akan memiliki daya saing iklim investasi yang lebih tinggi. Hal ini karena faktor keamanan menjadi prasyarat bagi dunia usaha dan masyarakat pada umumnya untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial. Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi.

Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang aspek daya saing dengan mengabaikan aspek keamanan. Investor tidak akan mungkin menanamkan investasinya apabila diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman dari lingkungan maupun ancaman terjadinya bencana.

Berdasarkan Basis Data Pembangunan 2 (dua) tahun terakhir (2022-2023), jumlah kejahatan yang dilaporkan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan angka yang cenderung turun. Pada tahun 2022 jumlah kejahatan yang dilaporkan mencapai 446 kasus, sementara itu pada tahun 2023 berkurang menjadi 320 kasus dengan jenis kejahatan yang paling banyak adalah pencurian, perampokan dan penganiayaan. Sedangkan jumlah kejadian demonstrasi/unjuk rasa di Kabupaten Bandung Barat, disebabkan karena adanya beberapa isu-isu seperti isu-isu pengupahan, pelaksanaan outsourcing, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan BBM, dan sebagainya dengan angka kejadian pada tahun 2022 sebanyak 6 kejadian dan menurun di tahun 2023 menjadi 5 kejadian demonstrasi/unjuk rasa.

Perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kepastian sistem dan prosedur perijinan yang meliputi persyaratan, waktu dan biaya serta transparansi dan akuntabilitas proses perijinan merupakan komponen penting dalam

pelayanan perijinan. Pelayanan perijinan yang berbasis digital terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi pemohon, meningkatkan efisiensi dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan.

**Tabel 2.100 Persentase Jumlah Izin yang Terbit Sesuai Sop
di Kab. Bandung Barat Tahun 2023**

No	Izin	SOP (Hari)	Jumlah Izin Terbit Tidak Sesuai SOP	Jumlah Izin Terbit Sesuai SOP	Jumlah Izin Terbit	% SOP
1	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)	28	0	547	547	100,00
2	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)	28	0	62	62	100,00
3	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG NON-BERUSAHA	30	85	87	172	50,58
4	IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR (SD & SMP)	12	20	14	34	41,18
5	IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR FORMAL	44	0	34	34	100,00
6	IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL (KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK, PUSAT BELAJAR MASYARAKAT, LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN)	24	43	64	107	59,81
7	IZIN PRAKTIK DOKTER (MANDIRI & FASKES)	11	7	475	482	98,55
8	IZIN PRAKTIK PERAWAT	11	3	404	407	99,26
9	IZIN PRAKTIK BIDAN (MANDIRI & FASKES)	11	4	328	332	98,80
10	IZIN PRAKTIK APOTEKER	11	3	161	164	98,17
11	IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	11	0	156	156	100,00
12	IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS	11	1	5	6	83,33
13	IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA	11	0	1	1	100,00
14	IZIN KERJA RADIOGRAFER	11	1	19	20	95,00
15	IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN	11	0	9	9	100,00
16	SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL	11	2	10	12	83,33
17	IZIN PRAKTIK REKAM MEDIS	11	0	74	74	100,00
18	IZIN PRAKTIK ANALIS/AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	11	0	79	79	100,00
19	IZIN PRAKTIK GIZI	11	1	42	43	97,67
20	IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (MANDIRI & FASKES)	11	0	26	26	100,00
21	IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN	11	0	26	26	100,00
22	SURAT KETERANGAN TIDAK BERPRAKTIK DI KBB	11	2	745	747	99,73
23	PENCABUTAN SURAT IZIN PRAKTIK	11	0	201	201	100,00
24	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (PERMANEN & INSIDENTIL)	14	109	46	155	29,68
25	TANDA DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL	7	18	8	26	30,77
26	IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL	8	0	0	0	0,00
27	IZIN TRAYEK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	10	84	19	103	18,45
28	IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN	11	0	1	1	100,00
29	IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN	11	0	0	0	0,00
30	IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PELAYANAN INSEMINATOR KESEHATAN HEWAN	11	0	0	0	0,00
31	IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN	11	0	0	0	0,00
32	IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN TEKNIK REPRODUKSI	11	0	0	0	0,00
33	PENCABUTAN SURAT IZIN APOTEK	11	0	1	1	100,00
TOTAL			383	3644	4027	90,49

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Bandung Barat, 2024

Indikator Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Pada tahun 2020 sampai dengan saat ini, dengan adanya aplikasi perijinan online, lamanya pengurusan perizinan bisa diperpendek, dengan ketentuan

semua persyaratan perizinan terpenuhi. Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor.

Capaian investasi di Kab. Bandung Barat terus mengalami kenaikan dari jumlah investasi PMDN pada tahun 2019 sebesar Rp.572 Milyar di tahun 2022 menjadi Rp.704 Milyar dan tahun 2023 naik signifikan menjadi Rp.2.730 Milyar. Capaian indikator yang mengalami penurunan kinerja, diantaranya persentase peningkatan promosi dan kerja sama investasi dari semula tahun 2019 sebesar 19,73 persen menjadi 16,67 persen di tahun 2023, sedangkan persentase waktu proses pelayanan perijinan sesuai SOP semakin membaik awalnya 2020 sebesar 68% menjadi 72,5% di tahun 2021 dan naik kembali di tahun 2022 menjadi 82,79% serta 2023 menjadi 90,49%. Hal ini dengan adanya dukungan aplikasi perijinan online

2.1.4.4 Daya Saing Sumber Daya Manusia

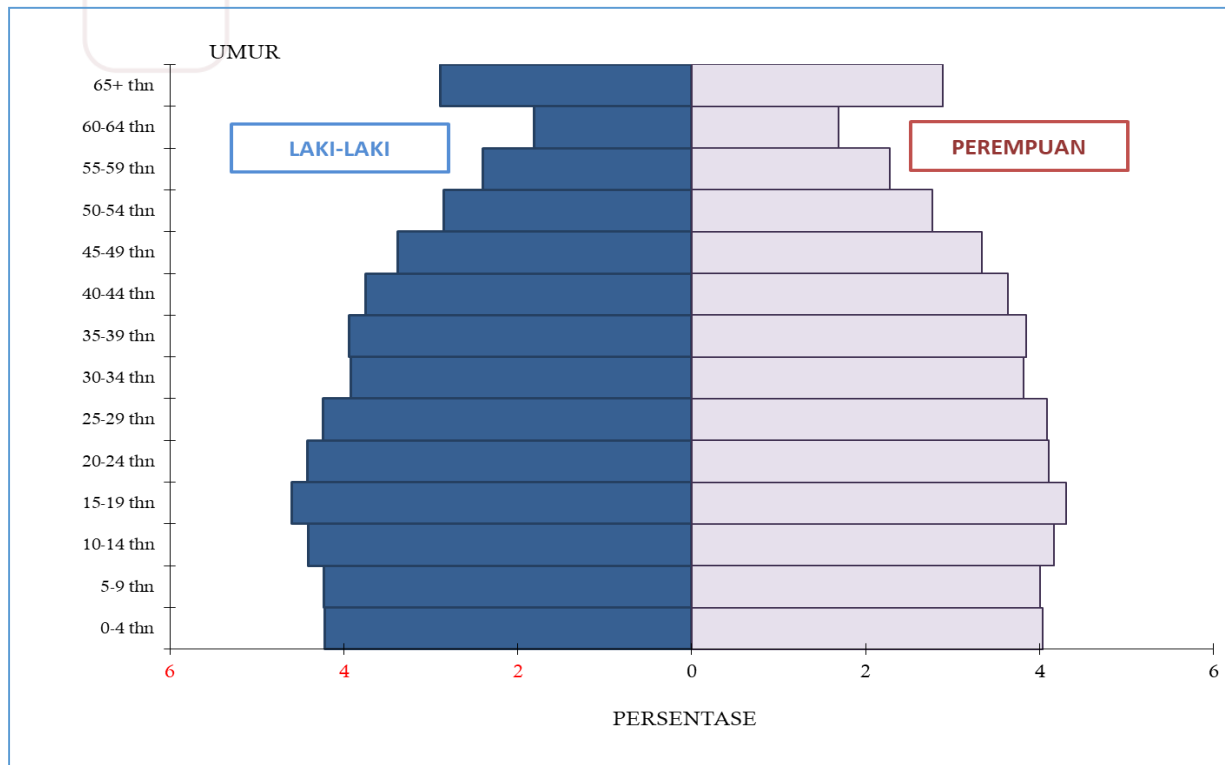
Analisis kinerja sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan, kondisi PNS menurut pendidikan yang ditamatkan dan kualitas tenaga kerja berdasarkan penduduk usia produktif. Komposisi penduduk Kabupaten Bandung Barat menurut kelompok umur salah satunya digunakan untuk menghitung rasio ketergantungan, yang dilihat berdasarkan tabel serta digambarkan oleh Piramida penduduk Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

Tabel 2.101 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023

Penduduk Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia < 15 Tahun	470.912	452.602	461.949	450.086	449.623
Penduduk Usia > 64 Tahun	87.151	103.373	104.824	118.923	120.583
Penduduk (< 15 Tahun dan > 64 Tahun)	558.063	555.975	566.733	569.009	570.206
Penduduk Usia Produktif (15-64)	1.181.848	1.232.361	1.250.977	1.277.960	1.289.430
Jumlah	1.739.911	1.788.336	1.817.770	1.846.969	1.859.636
Rasio Ketergantungan	47,22	45,11	45,31	44,59	44,22

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2023

Gambar 2.26 Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023



Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Tahun 2023, diolah

Terlihat dari bentuk piramida penduduk Kabupaten Bandung Barat, persentase penduduk Kabupaten Bandung Barat pada kelompok umur di bawah 15 tahun terhitung di bawah 30 persen. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa penduduk Kabupaten Bandung Barat tergolong struktur penduduk tua, yang artinya perbandingan penduduk usia produktif lebih besar dari yang tidak produktif. Angka beban ketergantungan (Dependency Ratio) penduduk, yang merupakan perbandingan antara penduduk yang belum/tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Dependency Ratio Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 menunjukkan capaian sebesar 44.59. Angka ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Bandung Barat harus menanggung 45 orang penduduk usia tidak produktif.

Bila dilihat dari daya saing SDM berdasarkan kondisi ASN di Kabupaten Bandung Barat menurut pendidikan yang ditamatkan mayoritas berpendidikan terakhir S-1. Hal ini bermakna pegawai di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara umum telah memiliki: kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain kognitif, kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media, kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah.

Namun demikian dalam perspektif ke depan perlu terus ditingkatkan kualitas pendidikan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada jenjang S-2 dan S-3 untuk menghasilkan pegawai-pegawai yang ahli dalam penyelesaian persoalan-persoalan pembangunan yang terus berkembang dan bersifat multidimensi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.102 Kondisi ASN Kabupaten Bandung Barat Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019 – 2023

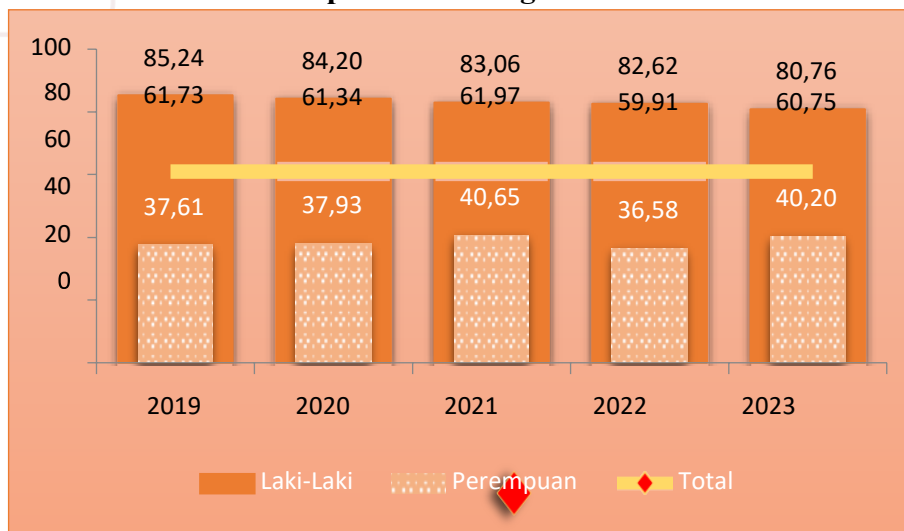
Tingkat Pendidikan	2019			2020			2021			2022			2023		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Sampai dengan SD	52	-	52	39	2	41	38	0	38	21	0	21	21	0	21
SMP/Sederajat	85	7	92	56	3	59	50	2	52	37	3	40	20	3	23
SMA/Sederajat	379	236	615	472	159	631	402	114	516	286	55	341	249	51	300
Diploma I, II/Akta I, II	32	14	46				119	124	243						
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	196	487	683	84	456	540	128	505	633	100	486	586	94	486	580
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	2397	4057	6454	2967	3119	6086	2451	3304	5755	2412	3139	5551	2252	2803	5055
Jumlah/Total	3141	4801	7942	3618	3739	7357	3188	4049	7237	2856	3683	6539	2636	3343	5979

Sumber : BKPSDM, 2024.

Untuk melihat kontribusi serta dinamika tenaga kerja dan pencari kerja dalam pasar kerja, para pembuat kebijakan dapat mencermati indikator ketenagakerjaan, di antaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan dari tahun 2019 – 2023, terjadi peningkatan TPAK sebesar 8,03 persen di tahun 2023 menjadi 67,01 dibanding tahun 2019 dengan capaian 58,98. Secara empiris, selalu terdapat perbedaan jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bandung Barat, terjadi disparitas antara angkata kerja laki-laki dengan perempuan. TPAK laki-laki selalu selalu lebih besar dari TPAK perempuan. Kondisi ini dinilai wajar karena norma-norma yang berlaku di masyarakat mengarahkan laki-laki untuk berperan sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga. TPAK laki-laki pada tahun 2021 sebesar 80,76 persen jauh lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang hanya 40,20 persen.

Tetapi ada hal menarik dalam capaian TPAK pada tahun 2021 dibanding kondisi tahun 2020 dimana TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,86 persen, sementara TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 3,62 persen hal ini mungkin disebabkan karena proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal lebih tinggi.

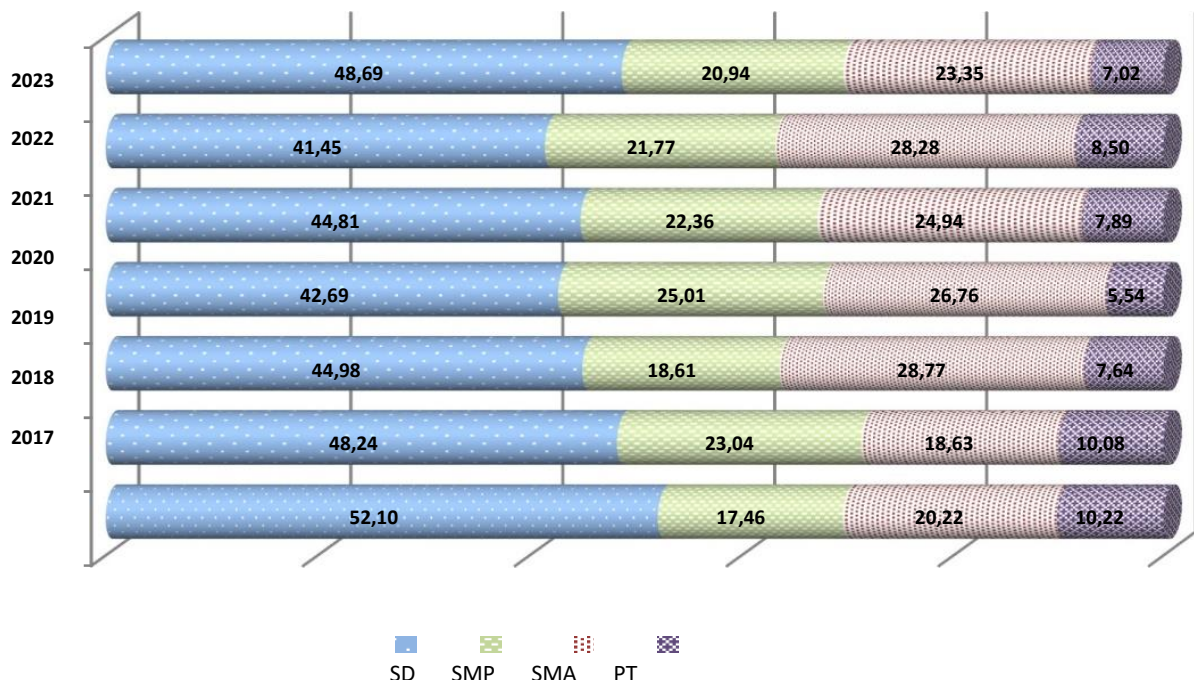
Gambar 2.27 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Bandung Barat 2019 – 2023



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Tahun 2019-2023

Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat, pada Tahun 2019-2023 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 48,69 persen, SMP sebanyak 20,94 persen, dan SMA sebanyak 23,35 persen. Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 7,02 persen.

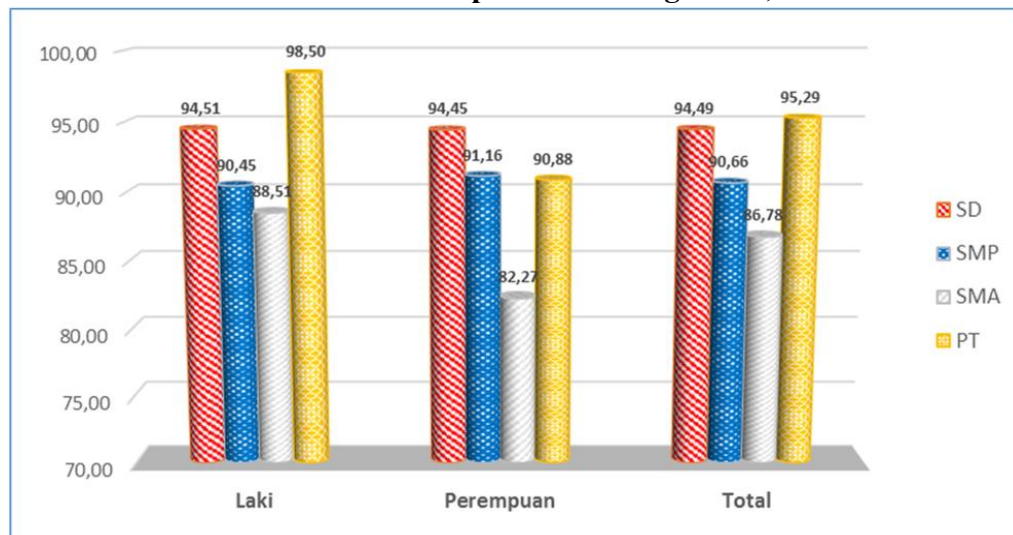
Gambar 2.28 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan 2017-2023 (persen)



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2023

Pada tahun 2023 penyerapan tenaga kerja untuk tingkat SD ke bawah dan perguruan tinggi (PT) relatif lebih besar. Penyerapan tenaga kerja pada jenjang Perguruan tinggi sebesar 95,29 persen sementara untuk penduduk yang pendidikan tertingginya sekolah dasar sebesar 94,49 persen. Penyerapan penduduk dalam dunia kerja untuk pendidikan SMP dan SMU relatif lebih kecil yaitu sebesar 90,66 dan 86,78 persen.

Gambar 2.29 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bandung Barat, 2023



Sumber: Analisis Data Ketenagakerjaan, BPS/Diskomifotik, 2023

2.2 Evaluasi Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Pelaksanaan Program RKPD

Kondisi masa depan yang tidak menentu dan disertai keterbatasan sumber daya yang dimiliki membuat pemerintah daerah harus melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang baik. Proses perencanaan dan penganggaran yang baik juga berpengaruh terhadap upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran mulai dari RPJMD, RKPD, PPAS dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu siklus yang mempunyai hubungan sangat erat, berkelanjutan dan realistis sehingga proses perencanaan dan penganggaran merupakan suatu tahapan yang sangat krusial karena melibatkan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Keterkaitan dokumen antara yang satu dengan lainnya menjadi penting karena untuk mengukur sejauhmana kesesuaian perencanaan sejak menetapkan visi pembangunan 5 tahun yang tertuang dalam RPJMD hingga penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya.

Permasalahan yang kemudian dihadapi adalah sejauhmana konsistensi dalam memperhatikan keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran dalam setiap tahapannya. Konsistensi menjadi penting mengingat bahwa dalam penganggaran harus berlandaskan pada basis perencanaan yang kuat karena konsistensi akan menghindari terputusnya mata rantai (missing link) RKPD dengan produk penganggarannya.

Secara sederhana konsistensi yang dimaksud disini adalah bagaimana mewujudkan suatu kondisi tata kelola dan politik pemerintahan dalam aspek perencanaan dan penganggaran, dengan maksud bahwa yang direncanakan adalah yang dianggarkan dan yang dianggarkan adalah yang direncanakan. Hal tersebut memberikan arti pentingnya perencanaan atau dokumen perencanaan daerah sebagai dasar penganggaran dalam mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran, walaupun masih diperlukan batasan-batasan wajar toleransi untuk mencapai konsistensi. Batasan-batasan wajar apabila ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat maupun adanya bencana atau kejadian genting yang harus dianggarkan oleh daerah tanpa ada di dokumen perencanaan.

2.2.1 Capaian Kinerja Makro Pembangunan

Capaian indikator kinerja makro sebagai tolak ukur pembangunan perlu di evaluasi secara periodik dalam rangka untuk mengetahui keberhasilan kinerja sekaligus sebagai bahan masukan bagi perencanaan periode selanjutnya, berikut capaian indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Bandung Barat dengan target sebagaimana telah ditetapkan pada RPJMD dan Perubahan RPJMD Kab. Bandung Barat tahun 2019-2023:

**Tabel 2.103 Target dan Capaian Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023**

Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Target dan Capaian Indikator Makro Pembangunan (Perubahan RPJMD 2018 - 2023)									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IPM	Poin	68,07	68,27	68,80	68,81	68,51	69,03	68,57	69,82	68,66	70,33
Tingkat Miskin	Persen	10,81	9,38	10,46	10,49	10,60	11,30	11,02	10,82	10,75	10,52
TPT	Persen	8,78	8,24	8,52	12,25	8,85	11,65	11,31	9,63	10,95	8,11
LPE	Persen	5,92	5,05	6,04	-2,41	6,11	3,46	4,67	5,34	4,88	5,00
Indeks Gini	Point	0,400	0,362	0,390	0,376	0,330	0,356	0,347	0,368	0,343	0,374
Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	24,27	28,209	26,39	26,088	28,69	26,965	27,89	28,852	29,00	30,622

Sumber : Perubahan RPJMD KBB 2018-2023, Bappelitbangda 2023, diolah

*Target Baru Hasil Perhitungan Proyeksi Pada Perubahan RPJMD 2018-2023



Berdasarkan tabel tersebut diatas, capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Bandung Barat, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja indikator makro pembangunan pada akhir periode perencanaan tahun 2022 dan 2023 hampir semua telah mencapai target kecuali capaian indikator indeks gini, tetapi walaupun telah melampaui target masih terdapat beberapa capaian kinerja makro tahun 2023 yang mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi dan capaian Gini rasio.
- b. Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2023 telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 5 persen dari target sebesar 4,88 persen. Tetapi realisasi LPE tahun 2023 mengalami pelambatan sebesar 0,34 bila dibanding dengan realisasi tahun 2022. Capaian LPE KBB tahun 2023 = Provinsi Jawa Barat yang berada di angka 5,00 persen pada tahun 2023.
- c. Capaian tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 10,52 persen dari target 10,75 persen. Bila dilihat dari pencapaian tahun 2022 keberhasilan penanggulangan kemiskinan tahun 2023 turun sebesar 0,30 persen. Tetapi penurunan angka kemiskinan ini masih terbilang tinggi masih berada pada skala 2 digit bila dibandingkan dengan capaian Jawa Barat sebesar 7,62 persen bahkan di Kab/Kota di Jawa Barat angka kemiskinan Kab. Bandung Barat masih berada pada peringkat 22 dari 27 Kab/Kota. Hal ini merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah di tahun berikutnya.
- d. Capaian kinerja penanggulangan ketenagakerjaan terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami tren menurun dan telah mencapai target dengan capaian di tahun 2023 sebesar 8,11 persen melebihi dari target sebesar 10,95. Tetapi capaian ini masih di bawah capaian TPT nasional sebesar 5,32 persen dan capaian TPT Jabar sebesar 7,44 persen.
- e. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kabupaten Bandung Barat. Dilihat dari trennya, IPM mengalami kenaikan selama periode 2019 sampai 2023 yakni dari 67,46 menjadi 70,33. Pencapaian IPM Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun terakhir termasuk dalam kategori “Kelompok sedang”, yakni kelompok daerah dengan nilai IPM berkisar antara 60 hingga 70, capaian ini masih dibawah IPM Jabar sebesar 74,24 bahkan bila dibandingkan dengan capaian IPM Kab/Kota di Jawa Barat capaian IPM Kab. Bandung Barat berada di peringkat 20 dari 27 Kab/Kota.

- 
- 
- f. Secara umum perkembangan nilai Gini Ratio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2022 berfluktuatif namun cenderung selalu berada pada level ketimpangan rendah ($<0,4$). Pada tahun 2023 gini rasio dengan capaian tertinggi yaitu sebesar 0,374 poin bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Tetapi capaian ini masih dibawah capaian indeks Gini Jabar sebesar 0,425. Namun capaian indeks gini di tahun 2023 walaupun masih kategori rendah, Pemerintah Daerah harus bertindak cepat karena jaraknya cukup dekat dengan kategori sedang.
 - g. Perkembangan capaian PDRB per kapita di Kab. Bandung Barat menunjukkan trend meningkat dan selalu mencapai target kecuali capaian di tahun 2020 dan 2021, dengan capaian di tahun 2023 sebesar 30,622 juta rupiah meningkat sebesar 6,86 persen bila dibanding capaian tahun 2022. Secara rata-rata, capaian PDRB per kapita Kabupaten Bandung Barat selama 3 (tiga) tahun terakhir masih di bawah atau lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 49,08 juta rupiah, bahkan bila dibandingkan dengan capaian Kab/kota di Jabar, capaian PDRB per Kapita Kabupaten Bandung Barat yang berada di interval PDRB per Kapita masih di bawah 30 juta. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya, di satu sisi, dihadapkan pada tantangan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, sementara di sisi lain diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah output dari setiap sektor ekonomi.
 - h. Capaian beberapa indikator makro diatas menunjukkan bahwa pembangunan Kab. Bandung Barat masih perlu memberikan perhatian yang besar terkait masalah ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pembangunan manusia sektor pendidikan serta stabilitas ekonomi dengan menggali potensi unggulan. Berbagai lapangan usaha diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada sehingga masyarakat dapat memiliki penghasilan dan penghidupan yang layak. Pengendalian tingkat pengangguran dan kemiskinan serta ketimpangan pendapatan diharapkan dapat mendorong pembangunan manusia yang diindikasikan dengan peningkatan IPM Kab. Bandung Barat.

2.2.2 Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan penjabaran dari misi RPJMD. Setiap tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator dan target per tahun untuk mengukur kinerja pembangunan. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, target dan realisasi serta tingkat capaian dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2019 -2023 disajikan berikut:

**Tabel 2.104 Tujuan, Sasaran dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan Sasaran
Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023**

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target dan Capaian Kinerja Sebelum Perubahan				Target dan Capaian Kinerja Setelah Perubahan					
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Misi 1 : Meningkatkan Cakupan Dan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan Dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Luas Lainnya Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas													
Tujuan 1.1 Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat													
IKT 1.1a Indeks Pendidikan (HLS)	Indeks	11,83	11,95	11,86	12,11	11,87	12,27	11,88	12,44	11,89	12,62	11,91	
IKT 1.1b Indeks Pendidikan (RLS)	Indeks	7,97	7,89	8,18	8,02	8,19	8,14	8,20	8,26	8,22	8,38	8,23	
Sasaran 1.1.1 Meningkatnya kualitas layanan pendidikan													
IKS 1.1.1.a Indeks Pendidikan (HLS)	Indeks	11,83	11,95	11,86	12,11	11,87	12,27	11,88	12,44	11,89	12,62	11,91	
IKS 1.1.1.b Indeks Pendidikan (RLS)	Indeks	7,97	7,89	8,18	8,02	8,19	8,14	8,20	8,26	8,22	8,38	8,23	
Sasaran 1.1.2 Meningkatkan minat budaya baca													
IKS 1.1.2.a Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Jumlah	17.000	18.000	15.600	21.600	12.428	25.200	5.331	28.800	10.936	32.400	68.528	
Tujuan 1.2 Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat													
IKT 1.2 Indeks Kesehatan (Umur Harapan Hidup - UHH)	Indeks	72,03	71,98	72,18	72,01	72,34	72,04	72,52	72,08	72,79	72,13	73,10	
Sasaran 1.2.1 Meningkatnya kualitas layanan kesehatan													
IKS 1.2.1.a Indeks Kesehatan (Umur Harapan Hidup - UHH)	Indeks	72,03	71,98	72,18	72,01	72,34	72,04	72,52	72,08	72,79	72,13	73,10	
Sasaran 1.2.1 Meningkatnya kualitas layanan kesehatan													
IKS 1.2.1.b Rata-rata jumlah anak dalam keluarga**	Angka	2,36	2,36	2,39	2,35	2,39							
IKS 1.2.1.b Total Fertility Rate*	%						2,44	2,43	2,43	2,24	2,42	2,12	
Tujuan 1.3 Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Non Dasar Lainnya													
IKT 1.3 Indeks Kebahagiaan	Indeks	N/A	70-71		70-71		70 -71		71 -73,5		73,6 - 76		
Sasaran 1.3.1 Mewujudkan ketahanan pangan													
IKS 1.3.1.a Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	81.4	83.7	83	86	76.8	81	79,1	82	76,8	82,5	92,9	
Sasaran 1.3.2 Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan													
IKS 1.3.2.a Persentase partisipasi masyarakat terhadap aktivitas kebudayaan daerah**	%	27	27	10	27	25,8	30	25	32	6	32	29,26	
IKS 1.3.2.a Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan*	%						30	25	32	6	32	29,26	
Sasaran 1.3.3 Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat													
IKS 1.3.3.a Persentase Penegakan Perda dan Perkada*	%	N/A	0,3	0,76	0,4	N/A							
IKS 1.3.3.a Persentase Penegakan Perda dan Perkada*	%						100	97,91	100	100	100	100	
IKS 1.3.3.b Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks						75	54	77	67,53	80	79,69	
Sasaran 1.3.4 Meningkatkan sinergi dan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana													
IKS 1.3.4.a Indeks Resiko Bencana Indonesia**	Kategori Indeks	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	0,46 Sedang	0,51 Sedang	0,47 Sedang	0,47 Sedang	0,48 Sedang	0,48 Sedang	
IKS 1.3.4.a Indeks Ketahanan Daerah (IKD)*								0,46 Sedang	0,51 Sedang	0,47 Sedang	0,47 Sedang	0,48 Sedang	0,48 Sedang
Sasaran 1.3.5 Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat													
IKS 1.3.5.a Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	47.31	49.73	51.93	50.94	52.10	52,15	52,15	53,36	47,56	54,57	48,86	
IKS 1.3.5.b Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skala	N/A	68.6 - 69	75	69.1 – 69.5	58	69,6 - 70	81,20	70,1 – 70,5	83,59	70,6 - 71	92,49	
IKS 1.3.5.c Indeks Demokrasi**	Indeks	N/A	68,79-70,78	79	70,79-71,78	69.09	71,79 – 72,78	34	72,79-73,78	52,18	73,79-74,78	74,81	
IKS 1.3.5.c Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat*	Skala						71,79 – 72,78	34	72,79-73,78	52,18	73,79-74,78	74,81	

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target dan Capaian Kinerja Sebelum Perubahan				Target dan Capaian Kinerja Setelah Perubahan					
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tujuan 1.4 Pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak													
IKT 1.4 Indeks Pembangunan Gender	Indeks		79,18	79,34	79,07	79,64	79,39	79,34	79,44	79,39	79,82	79,44	80,37
Sasaran 1.4.1 Meningkatnya pemberdayaan desa dan lembaga masyarakat													
IKS 1.4.1.a Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%		40	50	64,66	60	73,51	82,34	83,24	91,17	91,82	100	100
IKS 1.4.1.b Kontribusi BumDes terhadap PADes**	%		40	48	52	56	45						
IKS 1.4.1.b Persentase Desa Mandiri*	Jumlah							21	24	24	37,58	27	47,88
Sasaran 1.4.2 Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat													
IKS 1.4.2.a Persentase Pemuda yang memiliki kecakapan hidup**	%		N/A	29	22,03	46,75	10						
IKS 1.4.2.a Presentase Layanan Kepemudaan*	%							7,41	9,20	7,83	7,83	10,30%	10,29%
IKS 1.4.2.b IKS Indeks Pembangunan Olahraga*	Indeks							0,299 - 0,799 (sedang)	0,41	0,299 - 0,799 (sedang)	0,42	0,299 - 0,799 (sedang)	0,44
Sasaran 1.4.3 Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak													
IKS 1.4.3.a Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks		53,98	54,03	65,88	54,13	64,31	63,5	65,11	64,31	65,83	65,11	66,97
IKS 1.4.3.b Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks		79,18	79,34	79,07	79,64	79,39	79,34	79,44	79,39	79,82	79,44	80,37
IKS 1.4.3.c Kabupaten/Kota Layak Anak*	Predikat							Pratama	Non Katagori	Pratama	Non Katagori	Madya	Non Katagori
Misi 2: Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing													
Tujuan 2.1 Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan													
IKT 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	%		5,85	5,96	5,05	6,04	-2,41	4,17	3,46	4,64	5,34	4,88	5,00
Sasaran 2.1.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan													
IKS 2.1.1.a Pertumbuhan Sektor Pertanian	%		7,05	7,2	8,82	7,34	-2,1	7,50	-1,30	7,65	4,11	7,81	1,59
IKS 2.1.1.b Persentase Kenaikan Produksi Peternakan*	%							4	4,1	4	-32	4	15%
IKS 2.1.1.c Persentase Kenaikan Produksi Budidaya Perikanan*	%							5	4,33	5	5,8	5	5,04
IKS 2.1.1.d Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%		7,63	7,79	6,26	7,95	-2,42	8,11	4,88	8,28	6,43	8,45	5,30
IKS 2.1.1.e Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%		9,83	10,03	3,84	10,24	-8,15	10,45	2,93	10,67	3,93	10,89	4,03
IKS 2.1.1.f Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang		7000000	7000000	6531026	7500000	4088811	2.000.000	4.497.692	2.125.000	5.045.679	2.125.000	4.829.886
IKS 2.1.1.g Pertumbuhan PAD sektor pariwisata** pariwisata*	%		10	10	17,26	10	-42,7	10%	3,91%	10%	4,13%	10%	
IKS 2.1.1.g Persentasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata*	%							10%	3,91%	10%	4,13%	10%	
Sasaran 2.1.2 Meningkatkan investasi PMDN													
IKS 2.1.2.a Nilai Investasi PMDN	Milyar		325	325	547,69	330	335,67	500 Milyar	192,6 Milyar	550 Milyar	704 Milyar	600 Milyar	2.731 Milyar
IKS 2.1.2.b Jumlah Investor PMDN*	Jumlah							190	268	195	68	200	134
Sasaran 2.1.3 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada													
IKS 2.1.3.a Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	%		9,19	9,06	8,17	8,95	12,25	11,61	11,65	11,31	9,63	10,95	8,11
IKS 2.1.3.a Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)*	%		62,75	64,95	62,09	67,16	59,91	69,36	60,75	71,57	64,37	73,77	67,01
IKS 2.1.3.b Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial	%							100	100	100	100	100	100
Sasaran 2.1.4 Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif													
IKS 2.1.4.a Pertumbuhan Koperasi Sehat	%		45	52,1	47	53,8	40,9	22	22	25	20	28	24,55
IKS 2.1.4.b Peningkatan Skala Usaha Mikro**	%		N/A	20	20	45	45						
IKS 2.1.4.b Penumbuhan Wirausaha Baru*	Pelaku Usaha							100	100	125	149	150	152

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target dan Capaian Kinerja Sebelum Perubahan				Target dan Capaian Kinerja Setelah Perubahan					
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi													
Tujuan 3.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi dan sosial													
IKT 3.1 Indeks Kesulitan Geografis	Indeks	40.06	38.53	31,57	36.98	27.65	35,41	27,59	33,82	26,78	32,22		
Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di perdesaan, melalui berbagai alternatif skema pembiayaan													
IKS 3.1.1.a Indeks Kesulitan Geografis	Skala	40.06	38.53	31,57	36.98	27.65	35,41	27,59	33,82	26,78	32,22		
Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial													
IKS 3.1.2.a Persentase penduduk yang terlayani oleh sistem prasarana sosial	%	52.58	58.42	37.35	60.17	39.75	61,92	54,00	63,67	59,00	65,42	57,09	
Tujuan 3.2 Meningkatkan kualitas lingkungan													
IKT 3.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	N/A	50.46	47.14	50.66	47.07	47,10	50,27	47,15	63,03	47,20	55,79	
Sasaran 3.2.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup													
IKS 3.2.1.a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	N/A	50.46	47.14	50.66	47.07	47,10	50,27	47,15	63,03	47,20	55,79	
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi													
Tujuan 4.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik													
IKT. 4.1 Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	54,24 CC	CC	56,79 CC	B	57,60 CC	BB	57,81 CC	BB	60,97 B	A	72,27 BB	
Sasaran 4.1.1 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien													
IKS 4.1.1.a Indeks Merit	Indeks	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 2	Kategori 3	Kategori III (baik)	Kategori III (baik)	Kategori III (baik)	Kategori III (baik)	Kategori IV (sangat baik)	Kategori III (baik)	
IKS 4.1.1.b Nilai SAKIP	Nilai Mutu	65,72 B	B	66 B	BB	67,04 B	BB	67,55 B	BB	68,03 B	A	68,59 B	
IKS 4.1.1.c Opini BPK	Skor	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
IKS 4.1.1.d Indeks SPBE	Skala	2.61	2.71	2.41	2.81	3.17	2,71	2,85	2,81	2,65	3,00	3,32	
Tujuan 4.2 Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas													
IKT 4.2 Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76.23	77.23	76.29	78.23	80.29	79,23	80,75	80,23	82,39	81,23	82,65	
Sasaran 4.2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik													
IKS 4.2.1.a Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76.23	77.23	76.29	78.23	80.29	79,23	80,75	80,23	82,39	81,23	82,65	

Sumber : Perubahan RPJMD KBB 2018-2023, Bappelitbangda, 2023, diolah

* Indikator baru pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

**Indikator sebelum perubahan RPJMD 2018-2023

2.2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2023

Pada RKPD Perubahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Program yang direncanakan sebanyak 243 program, lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah program dalam APBD Perubahan Tahun 2023 yang melaksanakan 242 program dengan persentase tingkat Penjabaran Konsistensi Program RKPD Perubahan Ke Dalam APBD Perubahan sebesar 99,58%. Pada tabel di bawah ini menunjukkan sebanyak 242 program telah dilaksanakan oleh 47 perangkat daerah sampai dengan Triwulan IV tahun 2023:

Tabel 2.105 Jumlah Program yang dilaksanakan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program APBD Tahun 2023	Jumlah Program yang Dilaksanakan s/d Tri IV Tahun 2023	
			Program	%
1	Dinas Pendidikan	4	4	100
2	Dinas Kesehatan	5	5	100
3	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	12	12	100
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	10	10	100
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	100
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	100
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	2	100
8	Dinas Sosial	6	6	100
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5	5	100
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A	9	9	100
11	Dinas Lingkungan Hidup	9	9	100
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	4	100
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	100
14	Dinas Perhubungan	3	3	100
15	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	5	5	100
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7	7	100
17	Dinas Penanaman Modal PTSP	5	5	100
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	4	100
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3	3	100
20	Dinas Perikanan dan Peternakan	11	11	100
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7	7	100
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7	7	100
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9	9	100
24	Sekretariat Daerah	3	3	100
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2	2	100
26	Kecamatan Ngamprah	5	5	100
27	Kecamatan Cipatat	5	5	100
28	Kecamatan Batujajar	5	5	100

29	Kecamatan Padalarang	5	5	100
30	Kecamatan Sindangkerta	5	5	100
31	Kecamatan Cipongkor	5	5	100
32	Kecamatan Gununghalu	5	5	100
33	Kecamatan Rongga	5	5	100
34	Kecamatan Cililin	5	5	100
35	Kecamatan Cikalong Wetan	5	5	100
36	Kecamatan Cipeundeuy	5	5	100
37	Kecamatan Parongpong	5	5	100
38	Kecamatan Cisarua	5	5	100
39	Kecamatan Lembang	5	5	100
40	Kecamatan Cihampelas	4	4	100
41	Kecamatan Saguling	6	6	100
42	Inspektorat Daerah	3	3	100
43	Bappelitbangda	4	4	100
44	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	100
45	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	3	3	100
46	Badan Pendapatan Daerah	2	2	100
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	100
	TOTAL	242	242	100

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, Februari 2024, diolah

Metode Analisis dalam evaluasi RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 secara umum menggunakan metode rapid assesment yang menilai capaian realisasi terhadap target/menilai realisasi berdasarkan tren/menilai rata-rata realisasi, dengan menggunakan kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Skala penilaian peringkat kerja sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.106 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai RealisasiKinerja (Tahunan)	Kriteria PenilaianRealisasi Kinerja
1	91 % ≤ Nilai ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ Nilai ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ Nilai ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ Nilai ≤ 65 %	Rendah
5	Nilai ≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017

2.2.3.1 Urusan Pendidikan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2023, urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang melaksanakan 3 program, 7 kegiatan dan 61 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.427.264.827.099,- . Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.107 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Urusan Pendidikan**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01	Pendidikan				
1	Program Pengelolaan Pendidikan	64,45	R	40,82	SR
2	Program Pengembangan Kurikulum	75	S	53,99	R
3	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	100	ST	95,01	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	79,82	T	40,98	SR

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan pendidikan adalah sebesar 79,82% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 40,98% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat rendah. Selanjutnya urusan pendidikan dalam dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Tahun 2023 melaksanakan 3 program, 7 kegiatan dan 61 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 460.248.232.889,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Pendidikan Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.108 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Pendidikan Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
Sasaran 1.1.1 Meningkatnya kualitas layanan pendidikan				
Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	%	63	72,68
	APK SD	%	101	101,78
	APK SMP	%	98	96,32
	APM SD	%	93	97,87
	APM SMP	%	98	88,60
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	96	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA	%	85	

	Jumlah Lembaga PKBM, Kursus, dan Pelatihan yang berizin	%	11	48
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pemenuhan kurikulum	%	100	100%
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	%	96	-
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perizinan satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Nonformal	%	100	-
Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	%	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat Indikator Program yang tidak tercapai, yaitu APK SMP, Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Persentase pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perizinan satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Nonformal

2.2.3.2 Urusan Kesehatan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2023, urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang melaksanakan 4 program, 14 kegiatan dan 50 Sub Kegiatan dengan dengan pagu indikatif sebesar Rp.115.600.825.629,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.109 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Kesehatan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02	Kesehatan				
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	79,48	T	100,02	ST
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	ST	85,05	T
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100	S	100,65	ST
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100	ST	100,53	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	94,87	ST	99,85	ST

Sumber: Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2023)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan kesehatan adalah sebesar 94,87% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 99,85% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Selanjutnya urusan kesehatan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Tahun 2023 melaksanakan 4 program, 14 kegiatan dan 54 Sub Kegiatan dengan dengan pagu anggaran sebesar Rp.152.236.189.812,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Kesehatan Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.110 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Kesehatan Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
Sasaran 1.2.1 Meningkatnya kualitas layanan kesehatan				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100	86
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	80	80
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	90	90
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Aktif	%	55	55

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui masih terdapat 1 (satu) Indikator Program pada Tahun 2023 yang tidak tercapai yaitu Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

2.2.3.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) perubahan Tahun 2023 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan 11 program, 17 kegiatan dan 48 Sub Kegiatan pagu indikatif sebesar Rp. 318.456.062.577,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.111 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	65	R	19,27	SR
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100	ST	24,80	SR
3	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	0	SR	66,67	S
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100	ST	100,71	ST
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	100	ST	93,82	ST
6	Program Pengembangan Permukiman	100	ST	36,32	SR
7	Program Penataan Bangunan Gedung	0	SR	37,87	SR
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	0	SR	0	SR
9	Program Penyelenggaraan Jalan	80	T	78,05	T
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	0	SR	23,99	SR
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	100	ST	54,58	R
	Rata-Rata Capaian Urusan	58,64	R	58,84	R

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2023)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penatan ruang sebesar 58,64% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja rendah, sementara untuk capaian keuangan sebesar 58,84% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja rendah. Selanjutnya Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 melaksanakan 11 program, 17 kegiatan dan 48 Sub Kegiatan pagu anggaran sebesar Rp. 227.530.935.850,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.112 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di perdesaan, melalui berbagai alternatif skema pembiayaan				
Program penyelenggaraan jalan	Persentase panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	%	76,32	80
Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial				
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase tersedianya akses air minum yang memadai	%	68,50	100
Program penataan bangunan gedung	Bangunan publik yang memadai	%	50	25
Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase areal daerah irigasi dalam kondisi baik	%	66,43	65
program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Panjang drainase permukiman yang terbangun	km	69	2
Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Jumlah prasarana persampahan yang dibangun	unit	2	0
Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi di kabupaten bandung barat	%	100	0
program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase cakupan pelayanan air limbah domestik	%	61,48	66
Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	%	100	0
program penyelenggaraan penataan ruang	Implementasi dokumen perencanaan pembangunan di kawasan pusat pertumbuhan	dokumen	4	4
program pengembangan permukiman	persentase pembangunan di wilayah desa	%	100	27

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 masih terdapat Indikator Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tidak mencapai target, yaitu Bangunan publik yang memadai, Jumlah prasarana persampahan yang dibangun, Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Persentase areal daerah irigasi dalam kondisi baik dan Persentase pembangunan di wilayah desa.

2.2.3.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) perubahan Tahun 2023, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan 4 program, 7 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 13.446.092.825,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.113 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1	Program Pengembangan Perumahan	158	ST	100,45	ST
2	Program Kawasan Permukiman	102,75	ST	87,50	T
3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	50	SR	67,48	S
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	100	ST	86,56	T
	Rata-Rata Capaian Urusan	102,69	ST	77,74	T

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar 102,69% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 77,74% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi.

Selanjutnya Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 melaksanakan 4 program, 7 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.568.050.273,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.114 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial				
Program kawasan permukiman	Jumlah areal penataan wilayah kumuh di bawah 10 Ha	Unit	100%	0%
Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Jumlah areal pencegahan kumuh diluar kawasan kumuh yang ditangani	Unit	100%	0%
Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Jumlah Peningkatan PSU perumahan formal	Jumlah Perumahan	100%	40%
Program pengembangan perumahan	Persentase Penyediaan hunian layak bagi masyarakat	%	100	100
Program Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah badan hukum perencana PSU perumahan dan pengembang perumahan yang tersertifikasi, terqualifikasi,terklasifikasi dan teregistrasi	Jumlah	100	0

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat indikator program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tidak tercapai yaitu Jumlah areal penataan wilayah kumuh di bawah 10 Ha, Jumlah areal pencegahan kumuh diluar kawasan kumuh yang ditangani, dan Jumlah badan hukum perencana PSU perumahan dan pengembang perumahan yang tersertifikasi, terqualifikasi,terklasifikasi dan teregistrasi

2.2.3.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2023 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 3 Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan 1 program, 3 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.542.589.840,-, Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan 1 program, 4 kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.874.015.300,- dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang melaksanakan 1 program, 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.4.893.688.250,-.

Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76,47	T	94,70	ST
2	Program Penanggulangan Bencana	104,62	ST	84,62	T
3	Program Pencegahan ,Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	98,65	ST	78,77	T
	Rata-Rata Capaian Urusan	93,24	ST	86,03	T

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2023)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar 76,47% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 94,70% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 melaksanakan 1 program, 2 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.056.165.320,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.116 Capaian Indikator Kinerja Program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
Sasaran 1.3.3 Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat				
Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target Indikator Program Satuan Polisi Pamong Praja telah tercapai.

Dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 melaksanakan 1 program, 2 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.060.754.627,- (Tiga Milyar Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah). Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.117 Capaian Indikator Kinerja Program
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
Sasaran 1.3.4 Meningkatkan sinergi dan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana				
Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Nilai Ketahanan Daerah (IKD)	Kategori Indeks	Sedang	Sedang

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target Indikator Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah tercapai.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 melaksanakan 1 program, 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.231.676.295,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.118 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 1.3.3.b Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan				
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	%	80	79,69

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target Indikator Program Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan telah tercapai.

2.2.3.6 Urusan Sosial

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang melaksanakan 5 program, 5 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.764.428.000,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.119 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Sosial

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.06	Sosial				
1	Program Pemberdayaan Sosial	2,42	SR	46,08	SR
2	Program Rehabilitasi Sosial	55,87	R	78,32	T
3	Program Perlindungan & Jaminan Sosial	26,82	SR	88,31	T
4	Program Penanganan Bencana	5	SR	90,54	T
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	0	SR	100	SR
	Rata-Rata Capaian Urusan	18,02	SR	68,45	S

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Sosial adalah sebesar 18,02% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Rendah, sementara untuk capaian keuangan sebesar 68,45% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sedang. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Sosial Tahun 2023 melaksanakan 5 program, 6 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.764.428.000,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Sosial Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.120 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Sosial Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 1.3.5.a Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	72	72
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	%	42	5

	Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan program rehabilitasi di Luar Panti Sosial			
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	38	11
Program Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	%	100	100
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Yang Mendapatkan Pemeliharaan	%	100	100
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase tertanganinya warganegara migran korban tindak kekerasan	%	100	0

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 Indikator Program urusan sosial yang tidak tercapai, yaitu Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan program rehabilitasi di Luar Panti Sosial, Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dan Persentase tertanganinya warganegara migran korban tindak kekerasan.

2.2.3.7 Urusan Tenaga Kerja

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 3 program, 8 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.892.576.734,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.121 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.07	Tenaga Kerja				
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	30,65	SR	104,40	ST
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	27,78	SR	98,68	ST
3	Program Hubungan Industrial	47,14	SR	91,81	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	35,19	SR	99,50	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2023)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Tenaga Kerja adalah sebesar 35,19% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Rendah, sementara untuk capaian keuangan sebesar 99,50% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 melaksanakan 3 program, 7 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.119.671.794,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.122 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 2.1.3.a Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase tersusunya dokumen rencana tenaga kerja daerah	Dokumen	2	0
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	31,48
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	65,41
Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang ditempatkan	%	100	84,18
Program Hubungan Industrial	Persentase terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja	%	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat Indikator Program urusan tenaga kerja yang tidak tercapai yaitu Persentase tersusunya dokumen rencana tenaga kerja daerah, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan serta Besaran pencari kerja yang ditempatkan.

2.2.3.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melaksanakan 5 program, 10 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.063.094.400,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.123 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	100	ST	86,5	T
2	Program Perlindungan Perempuan	66,67	S	80,46	T
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100	ST	135,70	ST
4	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	100	ST	103,41	ST
5	Program Perlindungan Khusus Anak	100	ST	161,62	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	93,33	ST	100,87	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar 93,33% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara capaian keuangan sebesar 100,87% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023 untuk urusan ini melaksanakan 5 program, 10 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.081.714.800,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.124 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Tahun 2023

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 1.4.3.a Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan ekonomi	%	85 (36 Organisasi Wanita)	85 (36 Organisasi Wanita)
IKS 1.4.3.b Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
Program Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	%	100	100
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga yang memiliki kesadaran dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	%	42	42
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Data dan profil gender dan anak Hasil analisis	%	90	87
IKS 1.4.3.c Kabupaten/Kota Layak Anak				
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	%	100 (47 PD)	100
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap anak	%	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat Indikator Program yang tidak tercapai yaitu Persentase Data dan profil gender dan anak Hasil analisis.

2.2.3.9 Urusan Pangan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan 2 program, 4 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.117.274.800,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.125 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Urusan Pangan**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Rata-Rata Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.09	Pangan				
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	0	SR	0	SR
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	76,11	T	102,59	ST
3	Prog Penanganan Kerawanan Pangan	0	SR	19,40	SR
	Rata-Rata Capaian Urusan	38,06	SR	125,41	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Pangan adalah sebesar 38,06% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Rendah, sementara untuk capaian keuangan sebesar 125,41% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 untuk urusan ini melaksanakan 3 program, 4 kegiatan dan 7 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.706.863.524,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.126 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 1.3.1.a Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah PSAT	Serti fikat	12	13
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	40	10
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan informasi pasokan dan akses pangan	Lap	12	12
	Peningkatan PPH)Ketersediaan	Point	86	77,30
	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	40	10
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penurunan Jumlah desa rawan pangan	Desa	20	0

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat Indikator Program tidak tercapai, yaitu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Penurunan Jumlah desa rawan pangan.

2.2.3.10 Urusan Pertanahan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 5 program, 6 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.036.384.753,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.127 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pertanahan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.10	Pertanahan				
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100	ST	107,01	ST
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	50	SR	24,65	SR
3	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	50	SR	88,46	T
4	Program Pengelolaan Tanah Kosong	100	ST	52,90	R
5	Program Penatagunaan Tanah	100	ST	88,95	T
	Rata-Rata Capaian Urusan	80	T	53,59	R

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan pertanahan adalah sebesar 80% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 53,59% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Rendah. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2022 untuk urusan ini melaksanakan 5 program, 6 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 598.054.176,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.128 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 3.1.2.a Persentase penduduk yang terlayani oleh sistem prasarana sosial				
Program pengelolaan tanah kosong	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	100%	100%
Program penatagunaan tanah	Terkoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan penatagunaan tanah dan konsolidasi tanah	Kegiatan	100%	100%
Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Tersedia data subjek, Objek redistribusi tanah dan terkoordinasikan, tersinkronisasikan untuk aset akses reforma agraria	Dokumen	100%	100%
Program penyelesaian sengketa tanah garapan	penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan	Kasus	100%	100%

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2023)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui adanya perbedaan indikator dengan output dihasilkan sehingga capaian kinerja program menjadi sulit terhitung.

2.2.3.11 Urusan Lingkungan Hidup

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 8 program, 10 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 27.592.244.549,- .

Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.129 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Urusan Lingkungan Hidup**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.11	Lingkungan Hidup				
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	ST	56,14	R
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	50	SR	64,26	R
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100	ST	106,50	ST
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1.550	ST	92,56	ST
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	141,67	ST	96,18	ST
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50	SR	98,99	ST
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.116,70	ST	84,90	T
8	Program Pengelolaan Persampahan	44,44	SR	77,27	T
	Rata-Rata Capaian Urusan	394,10	ST	77,77	T

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan lingkungan hidup adalah sebesar 394,10% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 77,77% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 melaksanakan 8 program, 10 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.335.409.899,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.130 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 3.1.2.a Persentase penduduk yang terlayani oleh sistem prasarana sosial				
Program pengelolaan persampahan	Tonase sampah terangkut ke TPA	Ton	53.700	50.513,59
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik sampling air yang status mutunya baik	%	6	0
Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase pemenuhan kebutuhan dok. pendukung perencanaan LH	%	100	100
Program pengendalian bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Bertambahnya usaha dan keg yang mengelola limbah LB3 sesuai peraturan pada tahun ke-n	Industri	5	12
Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH dibagi jumlah usaha yang dilakukan pemeriksaan pada tahun ke-n	%	100	100
Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Meningkatnya gerakan peduli sungai / situ / air tanah	Jumlah Lokasi Desa	1	1
Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH pada tahun ke-n	sekolah	1-3 Sekolah	30
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	RTH taman yang terawat	Lokasi	36	31

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2023 Indikator Program yang tidak tercapai, yaitu Tonase sampah terangkut ke TPA dan Persentase titik sampling air yang status mutunya baik.

2.2.3.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 3 program, 7 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.001.708.000,-.

Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.131 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				
1	Program Pendaftaran Penduduk	50	SR	88,98	T
2	Program Pencatatan Sipil	100	ST	107,37	ST
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	150	ST	95,01	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	100	ST	95,47	ST

Sumber : Bappeditbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan lingkungan hidup adalah sebesar 100% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 95,47% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 melaksanakan 3 program, 6 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.011.280.300,-. Selanjutnya untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.132 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 4.2.1.a Indeks Kepuasan Masyarakat				
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga	%	86	99,7
	Persentase Penduduk Memiliki KTP-El	%	94	98,7
	Persentase Anak Ber KIA	%	30	25,8
Program Pencatatan Sipil	persentase penduduk ber Akta kelahiran	%	38	39,9
	persentase penerbitan Akta kematian	%	35	100
	Persentase penduduk ber akta kelahiran 0-18 tahun	%	98	90,29
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan	%	35	57
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Profil Kependudukan yang terselesaikan	Dokumen	100%	100%

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2023)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat Indikator Program yang tidak tercapai yaitu Persentase Penduduk Memiliki KTP-El, Persentase Anak Ber KIA dan Persentase penduduk ber akta kelahiran 0-18 tahun.

2.2.3.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 4 program, 4 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 13.009.081.834,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.133 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1	Program Penataan Desa	100	ST	136,07	ST
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	100	ST	143,30	ST
3	Program Adm. Pemerintahan Desa	66,67	S	86,21	T
4	Program Pemberdayaan Lembagakemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat hukum Adat	100	ST	82,72	T
	Rata-Rata Capaian Urusan	91,67	ST	91,87	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebesar 91,67% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 91,87% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 melaksanakan 4 program, 4 kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.737.952.084,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.133 Indikator Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 1.4.1.a Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif				
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100
IKS 1.4.1.b Persentase Desa Mandiri				
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	%	20	1,82
Program Penataan Desa	Jumlah Desa Persiapan	Desa	5	0
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Kerjasama Desa yg Terfasilitasi	Desa	40	20

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat Indikator Program tidak tercapai, yaitu Persentase Desa Cepat Berkembang, Jumlah Desa Persiapan dan Jumlah Kerjasama Desa yg Terfasilitasi.

2.2.3.14 Urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melaksanakan 3 program, 7 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 18.988.738.500,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.135 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	Program Pengendalian Penduduk	75	S	128,01	ST
2	Program Pembinaan KB	88,77	T	105,31	ST
3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	73,81	S	102,57	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	79,19	T	104,68	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebesar 79,19% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 104,68% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023 untuk urusan ini melaksanakan 3 program, 7 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.917.873.750,-.

Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.136 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Tahun 2023

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 1.2.1.b Total Fertility Rate**				
Program Pengendalian Penduduk	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	55	0
	Persentase penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	%	8,46	8,46
	Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/ Kelurahan	%	80	80
	Persentase pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang di evaluasi	%	100	100
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase KB Aktif	%	73,95	76,29
	Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	20,75	20,28
	Persentase UNMETNEED	%	10,22	8,18
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Sejahtera dan Cakupan Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	%	60	60

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat Indikator Program yang tidak tercapai, yaitu Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk dan Persentase KB Aktif serta Persentase UNMETNEED.

2.2.3.15 Urusan Perhubungan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang melaksanakan 2 program, 10 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 98.097.605.566,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.137 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Perhubungan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Rata-Rata Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.15	Perhubungan				
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	410,5	ST	63,28	R
2	Program Pengelolaan Pelayaran	33,33	ST	53,77	R
	Rata-Rata Capaian Urusan	221,92	ST	63,25	R

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan perhubungan adalah sebesar 221,92% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 63,25% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Rendah. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Tahun 2023 untuk urusan ini melaksanakan 2 program, 10 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 92.111.435.634,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Perhubungan Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.138 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan Tahun 2023

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 3.1.1.a Indeks Kesulitan Geografis				
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah penumpang yang menggunakan prasarana transportasi darat	Penumpang	1.633.786	463.774
	Jumlah Angkutan yang berkeselamatan	unit	937	612
	Jumlah ruas jalan yang berkeselamatan	ruas	11	11
	Jumlah Pelayanan angkutan darat yang beroperasi wilayah KBB	trayek	19	19

Program pengelolaan pelayaran	Jumlah angkutan sungai danau dan penyeberangan yang terkelola	unit	195	165
	Jumlah penumpang yang menggunakan prasarana transportasi ASDP	Penumpang	7.100	82.723

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2023)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat Indikator Program yang tidak tercapai, yaitu Jumlah penumpang yang menggunakan prasarana transportasi darat, Jumlah Angkutan yang berkeselamatan dan Jumlah angkutan sungai danau dan penyeberangan yang terkelola.

2.2.3.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan Statistik melaksanakan 2 program, 3 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.17.963.996.888,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.139 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Urusan Komunikasi dan Informatika**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.16	Komunikasi dan Informatika				
1	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	100	ST	51,44	R
2	Program Aplikasi Informatika	85,71	T	65,82	S
	Rata-Rata Capaian Urusan	92,86	ST	63,08	R

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebesar 92,86% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 63,08% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Rendah.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023 melaksanakan 2 program, 3 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.745.459.487,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.140 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 4.1.1.d Indeks SPBE				
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	100	73,18
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Teknologi Informasi Pemerintahan Yang Termanfaatkan	%	100	64,51

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 Indikator Program urusan komunikasi dan informatika tidak tercapai.

2.2.3.17 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang melaksanakan 6 program, 6 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.225.530.500,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.141 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	58,15	R	99,30	ST
2	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	41,43	SR	59,05	R
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	100	ST	102,81	ST
4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	298,63	ST	67,62	S
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	393,07	ST	47,80	SR
6	Program Pengembangan Umkm	83,77	T	67,66	S
	Rata-Rata Capaian Urusan	162,51	ST	60,19	R

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebesar 162,51% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 60,19% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Rendah. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 melaksanakan 6 program, 6 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.787.146.000,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.142 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 2.1.4.a Pertumbuhan Koperasi Sehat				
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	44	17
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%	31	4
Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase Peserta Diklat Perkoperasian	%	23	23
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Kegiatan	10	4
IKS 2.1.4.b Penumbuhan Wirausaha Baru				
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah Pertumbuhan Pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha Mikro	Pelaku Usaha	580	838
Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan pengembangan pelaku usaha mikro	Pelaku Usaha	175	215

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat Indikator Program yang tidak tercapai, yaitu Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, dan Jumlah kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.

2.2.3.18 Urusan Penanaman Modal

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 5 program, 5 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan pagu indikatif sebesar Rp. 1.094.509.250,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.143 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Penanaman Modal

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.18	Penanaman Modal				
1	Program Promosi Penanaman Modal	100	ST	106,85	ST
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	162,36	ST	107,49	ST
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	30,3	SR	97,86	ST
4	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	75	S	76,95	T
	Rata-Rata Capaian Urusan	91,92	ST	101,55	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Penanaman Modal adalah sebesar 91,92% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 101,55% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 melaksanakan 5 program, 5 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.155.107.900,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.144 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 2.1.2.a Nilai Investasi PMDN				
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase dokumen yang ditindaklanjuti	%	3 dokumen	-%
	Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal	Dokumen	2 Dokumen	-%
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Dokumen	2	1
		Pameran	6	1
IKS 2.1.2.b Jumlah Investor PMDN				
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Perusahaan	200	1520
IKS 4.2.1.a Indeks Kepuasan Masyarakat				
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pelayanan berbasis aplikasi	%	100	100
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai SOP	%	100	90,49

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat Indikator Program yang tidak tercapai yaitu Persentase dokumen yang ditindaklanjuti, Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal, Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi dan Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai SOP.

2.2.3.19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan 3 program, 8 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 31.660.328.023,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.145 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Rata-Rata Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.19	Kepemudaan dan Olahraga				
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	88,71	T	67,82	S
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	88,85	T	84,50	T
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	5,19	SR	25,77	SR
	Rata-Rata Capaian Urusan	60,92	R	80,43	T

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebesar 60,92% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Rendah, sementara untuk capaian keuangan sebesar 80,43% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dispora Tahun 2023 melaksanakan 3 program, 8 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.525.015.957,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dispora Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.146 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 1.4.2.a Presentase Layanan Kepemudaan				
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Kapasitas Layanan Kepemudaan	%	7,83	10,24
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase peningkatan pemuda yang aktif pada organisasi kepramukaan	%	10	3,21
IKS 1.4.2.b IKS Indeks Pembangunan Olahraga				
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah ketersediaan ruang terbuka dan sarana olahraga	Indeks	2.550	2.957
	Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi	Indeks	100	160
	Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Indeks	20	35

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2023)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui masih terdapat Indikator Program yang harus ditingkatkan kinerjanya, yaitu Presentase peningkatan pemuda yang aktif pada organisasi kepramukaan.

2.2.3.20 Urusan Statistik

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 453.547.150,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.147 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Statistik

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.20	Statistik				
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100	ST	94,90	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	100	ST	94,90	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Statistik adalah sebesar 100% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 94,90% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023 melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 625.229.800,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik urusan statistik Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.148 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Urusan Statistik Tahun 2023

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 4.1.1.d Indeks SPBE				
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	100	68,84

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, target kinerja Indikator Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2023 tidak tercapai.

2.2.3.21 Urusan Persandian

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022 Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 258.931.250,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.149 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Persandian

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.21	Persandian				
1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100	ST	108,46	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	100	ST	108,46	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Persandian adalah sebesar 100% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk rata-rata capaian keuangan sebesar 108,46% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Diskominfo Tahun 2023 melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 410.724.750,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Diskominfo urusan persandian Tahun 2023, disajikan berikut:

Tabel 2.150 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Urusan Persandian Tahun 2023

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 4.1.1.d Indeks SPBE				
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	%	100	82

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, target capaian Indikator Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi tahun 2023 tidak tercapai.

2.2.3.22 Urusan Kebudayaan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 2 program, 4 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.410.811.932,- Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.151 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.22	Kebudayaan				
1	Program Program Pengembangan Kebudayaan	20,32	SR	38,96	SR
4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	50	SR	39,02	SR
	Rata-Rata Capaian Urusan	35,16	SR	38,96	SR

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Kebudayaan adalah sebesar 35,16% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Rendah, sementara untuk capaian keuangan sebesar 38,96% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Rendah.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 melaksanakan 2 program, 4 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.577.782.782,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.152 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 1.3.2.a Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan				
Program Pelestarian dan Pengelolaan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan	Cagar Budaya	30	30
	Cagar Budaya yang dilestarikan		30	0

Cagar Budaya			30	0%
Program Pembinaan Sejarah	Benda, Situs dan Kawasan Cagar yang dilestarikan	Orang	175	0
		Dokumen	1	0
Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Nilai budaya lokal dan objek pemajuan budaya yang di lestarikan	Dokumen	2	0%
		Orang	175	65
		Orang	175	28
		Pergelaran	7	1
		Orang	75	50
		Ritual dan Pagelaran	17 Ritual 7 Pergelaran	0
		Orang	75	0%
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Persiapan dan perencanaan Kebudayaan dan kesenian yang berjalan dengan baik	Kegiatan	5	0

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 target Indikator Program urusan kebudayaan tidak tercapai.

2.2.3.23 Urusan Perpustakaan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Disarpus melaksanakan 1 program, 2 kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.962.804.300,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023, yaitu:

Tabel 2.153 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Perpustakaan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.23	Perpustakaan				
1	Program Pembinaan Perpustakaan	290,3	ST	100,01	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	290,3	ST	100,01	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Perpustakaan adalah sebesar 290,3% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk rata-rata capaian keuangan sebesar 100,01% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023 melaksanakan 1 program, 2 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 7.215.747.000,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.154 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 1.1.2.a Jumlah Pengunjung Perpustakaan				
Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan	Predikat	B	B

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target indikator program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan urusan perpustakaan telah tercapai.

2.2.3.24 Urusan Kearsipan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melaksanakan 1 program, 3 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 775.272.500,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.155 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Urusan Kearsipan**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.24	Kearsipan				
1	Program Pengelolaan Arsip	100.00	ST	119,17	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	100.00	ST	119,17	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Kearsipan adalah sebesar 100% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 119,17% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023 melaksanakan 1 program, 3 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 957.626.400,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan urusan kearsipan Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.156 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Arsip dan Perpustakaan Urusan Kearsipan Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 4.1.1.d Indeks SPBE				
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip yang sudah dilakukan penyelamatan	%	57	66
Program Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip PD yang sudah di Kelola secara baku	PD	31	34
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah rumusan kebijakan perizinan kearsipan	Dok	1	0

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat target indikator program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan urusan kearsipan yang tidak tercapai yaitu Jumlah rumusan kebijakan perizinan kearsipan.

2.2.3.25 Urusan Kelautan dan Perikanan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan melaksanakan 4 program, 8 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 13.383.949.026,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.157 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Urusan Kelautan dan Perikanan**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.25	Kelautan dan Perikanan				
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	0	SR	100,00	ST
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	100	ST	94,79	ST
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	100	ST	91,70	ST
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	100	ST	93,78	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	75	S	94,60	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 75% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sedang, sementara untuk capaian keuangan sebesar 94,60% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 melaksanakan 4 program, 8 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.029.020.722,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.158 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS.2.1.1.c Persentase Kenaikan Produksi Budidaya Perikanan				
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Penyebaran Benih Unggul	Persen	20	12,9
	Jumlah RTP	RTP	2.650	3.019
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan	SDP	2	2
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Kelompok	90	86

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2023)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat target Indikator Program Dinas Perikanan dan Peternakan urusan kelautan dan perikanan yang tidak tercapai yaitu Persentase Penyebaran Benih Unggul dan Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.

2.2.3.26 Urusan Pariwisata

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata urusan pariwisata melaksanakan 4 program, 7 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 7.337.820.113,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.159 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Urusan Pariwisata**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.26	Pariwisata				
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	7,28	SR	24,85	SR
2	Program Pemasaran Pariwisata	28,21	SR	43,78	SR
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	200	ST	80,40	T
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	54,2	R	35,19	SR
	Rata-Rata Capaian Urusan	72,42	S	41,08	SR

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Pariwisata adalah sebesar 72,42% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sedang, sementara untuk capaian keuangan sebesar 41,08% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Rendah.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 melaksanakan 4 program, 7 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.312.169.143,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata urusan pariwisata Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.160 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata urusan Pariwisata Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS.2.1.1.f Jumlah Kunjungan Wisatawan				
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kegiatan promosi pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif yang efektif	Media	6	2
		Event	7	3
		Dokumen	3	0
		Kemitraan	5	0
IKS.2.1.1.g Persetasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata				
Program Pengembangan Sumber Daya	Jumlah pelaku usaha industri kreatif, penggerak pariwisata dan budaya	Orang	150	0
		Lembaga	5	0
		Orang	125	125

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	yang meningkat kompetensinya	Orang	125	50
		Orang	125	50
		Orang	125	0
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Perluasan sub sektor ekonomi kreatif	Zona Kreatif	1	3
		Produk	7	0
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Persentase destinasi pariwisata yang memenuhi standar	Destinasi	3	0
		Destinasi	6	2
		Dokumen	1 Dokumen & 4 perjanjian	0
		Orang	40.000	4.136
		Pokdarwis	6	0
		Industri	85	50
		Industri	85	0
		Industri	85	0
		Orang	40.000	0

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun target indikator kinerja program urusan pariwisata tidak ada yang tercapai.

2.2.3.27 Urusan Pertanian

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Pertanian dilaksanakan oleh 2 (Dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang melaksanakan 3 program, 4 kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 26.228.528.933,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.161 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Urusan Pertanian**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27	Pertanian (DKPP)				
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	104,17	ST	62,02	R
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	19,44	SR	33,85	SR
3	Program Penyuluhan Pertanian	63,75	R	96,25	ST

	Rata-Rata Capaian Urusan	62,45	R	60,79	R

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebesar 62,45% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Rendah, sementara untuk capaian keuangan sebesar 60,79% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Rendah.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 melaksanakan 3 program, 4 kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.378.346.470,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.162 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian (Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan)	Ton	464.660	425.446
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Tangkai	88.613.470	117.643.635
Program Perizinan Usaha Pertanian				
Program Penyuluhan Pertanian	Nilai Tukar Petani	Point	112,5	113,86
	Jumlah Ahli Pertanian Berkualitas	orang	100	100
	Jumlah penyuluh pertanian yang melaksanakan Diklat Teknis	orang	25	45

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat Indikator Program yang tidak tercapai, yaitu Jumlah Produksi Komoditas Pertanian (Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan) Nilai Tukar Petani dan Jumlah penyuluh pertanian yang melaksanakan Diklat Teknis

Perangkat Daerah ke 2 (dua) yang melaksanakan urusan pertanian adalah Dinas Perikanan dan Peternakan yang melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan

dengan pagu indikatif sebesar Rp. 19.277.824.944,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.163 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Urusan Pertanian**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27	Pertanian (Dispernakan)				
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	100	ST	52,24	R
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100	ST	94,05	ST
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100	ST	90,14	T
4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100	ST	92,60	ST
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	79,17	T	42,73	SR
6	Program Penyuluhan Pertanian	100	ST	86,23	T
	Rata-Rata Capaian Urusan	96,53	ST	62,98	S

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan adalah sebesar 96,53% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 62,98% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sedang.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Perikanan dan Perikanan Tahun 2022 melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.603.806.513,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program Dinas Perikanan dan Perikanan Tahun 2023, disajikan dalam tabel sebagaimana berikut:

**Tabel 2.164 Capaian Indikator Kinerja
Program Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS.2.1.1.b Persentase Kenaikan Produksi Peternakan				
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyebaran Bibit Unggul	Persen	20	12,9
	Persentase kelahiran Ternak	Persen	80	80
	Jumlah Kelompok Yang menerapkan teknologi peternakan	Kelompok	25	15
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Peternakan	Persen	20%	20%
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pelayanan kesehatan hewan	Persen	80	80
	Prevalensi Brucellosis (%)	Persen	2	3
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Kasus Wabah Zoonosis yang tertanggulangi	Persen	100	100
Program Perizinan Usaha Pertanian	Tefasilitasinya Penerbitan izin usaha peternakan	Persen	100	100
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Ternak / Tahun	Kelompok	10	15

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat Indikator Program yang tidak tercapai, yaitu Persentase Penyebaran Bibit Unggul dan Jumlah Kelompok Yang menerapkan teknologi peternakan.

2.2.3.28 Urusan Perdagangan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.280.934.638,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.165 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Urusan Perdagangan**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.28	Perdagangan				
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	0	SR	0	SR
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	75	S	42,62	SR
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	50	SR	87,29	T
4	Program Pengembangan Ekspor	50	SR	64,19	R
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	100	ST	99,72	ST
6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100	ST	62,63	R
	Rata-Rata Capaian Urusan	62,50	R	73,37	S

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebesar 62,50% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Rendah, sementara untuk capaian keuangan sebesar 73,37% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sedang.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023s melaksanakan 5 program, 7 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.060.081.700,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.166 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 2.1.1.e Pertumbuhan Sektor Perdagangan				
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan standarisasi dan perlindungan konsumen	%	30	26,31
Program	Persentase Pengembangan Usaha	%	50	48,47

Pengembangan Ekspor	Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota			
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan	Jumlah	4.696	4.370
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan	%	34	31,79
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten Kota	Jumlah	7	3
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah Monitoring Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah	180	90

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2023)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 6 target Indikator Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan urusan perdagangan pada tahun 2023 tidak tercapai.

2.2.3.29 Urusan Perindustrian

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 3 program, 3 kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 10.678.727.457,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.167 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Perindustrian

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.29	Perindustrian				
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	100	ST	113,43	ST
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	100	ST	100	ST
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100	ST	52,70	R
	Rata-Rata Capaian Urusan	100	ST	112,23	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Disperindag adalah sebesar 100% atau dengan kriteria

penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 112,23% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 melaksanakan 3 program, 3 kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.627.382.196,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.168 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Urusan Industri Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 2.1.1.d Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan				
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase Pengembangan IKM	%	30	26,75
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pertumbuhan industri yang berizin	Jumlah	2.350	2.350
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Pertumbuhan Industri yang terintegrasi ke dalam SIINAS	Jumlah	350	313

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 2 indikator program pada tahun 2023 yang tidak mencapai target yaitu Prosentase Pengembangan IKM dan Pertumbuhan Industri yang terintegrasi ke dalam SIINAS.

2.2.3.30 Urusan Transmigrasi

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 17.500.000,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.169 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Urusan Transmigrasi**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.30	Transmigrasi				
1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	ST	100	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	100	ST	100	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Unsur Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja adalah sebesar 100% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 100% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 17.500.000,-.. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Tenaga Kerja Urusan Transmigrasi Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.170 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan Transmigrasi Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 2.1.3.a Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran mandiri	%	100	0

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwatarget indikator program urusan transmigrasi tidak tercapai.

2.2.3.31 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Urusan Pendukung Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh 2 Perangkat daerah yaitu Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program, 8 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 44.998.498.576,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah:

**Tabel 2.171 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.01	Sekretariat Daerah				
1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	96,5	ST	59,58	R
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	62,73	R	67	S
	Rata-Rata Capaian Urusan	79,62	T	61,85	R

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah adalah sebesar 79,62% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 61,5% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Rendah. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Tahun 2023 melaksanakan 2 program, 8 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 34.081.989.825,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Sekretariat Daerah Tahun 2022, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.171 Capaian Indikator Kinerja Program
Sekretariat Daerah Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 4.1.1.d Indeks SPBE				
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase data dan informasi bid. Perekonomian yang di gunakan sebagai policy brief	%	100	85
	Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan policy brief	%	100	100
	Center of excelent pengadaan barang jasa	%	100	100
IKS 4.2.1.a Indeks Kepuasan Masyarakat				
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	%	100	100
	Persentase Perda yang ditetapkan	%	100	100
	Persentase Data dan Informasi Bidang Sosial yang digunakan sebagai Policy Brief	%	90	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 1 indikator program pada tahun 2023 yang tidak mencapai target yaitu indikator Persentase data dan informasi bid. Perekonomian yang di gunakan sebagai policy brief.

Sementara itu untuk Urusan Pendukung Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dilaksanakan juga oleh daerah yaitu Sekretariat DPRD yang melaksanakan 1 program, 8 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 22.914.980.000,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.173 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.02	Sekretariat DPRD				
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100,79	ST	157,95	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	100,79	ST	157,95	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD adalah sebesar 100,79% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 157,95% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Tahun 2023 melaksanakan 1 program, 8 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.248.880.600,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Sekretariat DPRD Tahun 2022, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.174 Capaian Indikator Kinerja Program
Sekretariat DPRD Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 4.2.1.a Indeks Kepuasan Masyarakat				
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks	74	81,89

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target Indikator Program Sekretariat DPRD telah tercapai.

2.2.3.32 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 20223Unsur Penunjang Urusan Pemerintah untuk Unsur Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan 2 program, 6 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.764.500.200,-. Adapun

rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.175 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.01	Perencanaan				
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	95,24	ST	95,76	ST
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	96,85	ST	95,14	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	96,05	ST	95,41	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebesar 95,24% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 95,41% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 melaksanakan 2 program, 6 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.807.459.100,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang melaksanakan Tahun 2022, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.176 Capaian Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 4.1.1.b Nilai SAKIP				
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD	%	100	100
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD	%	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui masih terdapat Indikator Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2023 seluruhnya tercapai.

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Unsur Penunjang Urusan Pemerintah untuk Unsur Keuangan dilaksanakan oleh 2 Perangkat Daerah yaitu BKAD melaksanakan 2 program, 5 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 534.076.926.821,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.177 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.02	Keuangan				
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	77,73	T	40,69	SR
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	85,17	T	76,88	T
	Rata-Rata Capaian Urusan	81,45	T	40,94	SR

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebesar 81,45% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 40,94% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Rendah.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 melaksanakan 2 program, 5 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 479.085.565.939,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.178 Capaian Indikator Kinerja Program Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 4.1.1.c Opini BPK				
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun sesuai standar dan peraturan yang berlaku	%	100	100

Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase peningkatan pengelolaan aset daerah	%	100	64

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target Indikator Program Persentase peningkatan pengelolaan aset daerah pada tahun 2023 tidak tercapai.

Perangkat daerah selanjutnya yang melaksanakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah untuk Unsur Keuangan yaitu Badan Pendapatan Daerah yang dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 8.020.564.100,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.179 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.02	Keuangan				
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	95,03	ST	94,91	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	95,03	ST	94,91	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah sebesar 95,03% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 94,91% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.993.827.000,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.180 Capaian Indikator Kinerja Program Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 4.1.1.c Opini BPK				
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	%	8,20	10,8

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target Indikator Program Badan Pendapatan Daerah telah tercapai.

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Unsur Penunjang Urusan Pemerintah untuk Unsur Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 1 program, 4 kegiatan dan 17 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.714.998.500,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.181 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.03	Kepegawaian				
1	Program Kepegawaian Daerah	99,32	ST	112,33	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	99,32	ST	112,33	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebesar 99,32% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 112,33% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 melaksanakan 1 program, 4 kegiatan dan 17 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.357.045.100,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.182 Capaian Indikator Kinerja Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 4.1.1.a Indeks Merit				
Program Kepegawaian Daerah	Presentase Aparatur yang mendapatkan Pembinaan Kepegawaian	%	80	78,16

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target capaian Persentase Aparatur yang mendapatkan Pembinaan Kepegawaian pada tahun 2023 tidak tercapai.

Unsur Penunjang Urusan Pemerintah untuk Unsur Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh BKPSDM yang dalam RKPD Perubahan Tahun 2022 melaksanakan 1 program, 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.1.981.615.400,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.183 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.04	Pendidikan dan Pelatihan				
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	ST	120,91	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	100	ST	120,91	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebesar 100% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 120,91% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) BKPSDM tahun 2022 melaksanakan 1 program, 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.544.593.500,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.184 Capaian Indikator Kinerja Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 4.1.1.a Indeks Merit				
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Aparatur yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	%	80	75

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui target indikator kinerja untuk urusan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2023 tidak tercapai.

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Unsur Penunjang Urusan Pemerintah untuk Unsur Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan 1 program, 4 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.660.615.000,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.185 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.05	Penelitian dan Pengembangan				
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	60,56	R	49,83	SR
	Rata-Rata Capaian Urusan	60,56	R	49,83	SR

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebesar 60,56% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Rendah, sementara untuk capaian keuangan sebesar 49,83% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Rendah. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Bappelitbangda Tahun 2023 melaksanakan melaksanakan 1 program, 4 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.130.425.900,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Bappelitbangda Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.186 Capaian Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 4.1.1.b Nilai SAKIP				
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase diseminasi hasil kelitbang	%	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui target indikator kinerja untuk urusan penelitian dan pengembangan telah tercapai.

2.2.3.33 Pengawasan Urusan Pemerintahan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yang melaksanakan 2 program, 4 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.1.752.780.300,-.

Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.187 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.01	Pengawasan				
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	140,63	ST	85,88	T
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	25	SR	128,20	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	82,82	T	98,54	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Pengawasan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah adalah sebesar 82,82% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 98,54% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Inspektorat Daerah Tahun 2023 melaksanakan melaksanakan 2 program, 4 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.778.708.400,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Inspektorat Daerah Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.188 Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Daerah Tahun 2023

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2022
IKS 4.1.1.b Nilai SAKIP				
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan	Rata-rata Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Mutu	A	B*

Dan Asistensi				
IKS 4.1.1.c Opini BPK				
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Temuan BPK RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	%	100	100*

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2023)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui target indikator kinerja inspektorat daerah telah tercapai.

2.2.3.34 Unsur Pemerintahan Umum

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 5 program, 5 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 18.227.189.112,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.189 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Pemerintahan Umum

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik				
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	112,5	ST	80,17	T
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	73,33	S	204,12	SR
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	61,25	R	99,97	ST
4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	91,67	SR	81,17	T
5	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	70	S	37,28	SR
	Rata-Rata Capaian Urusan	81,75	T	171,78	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar 81,7% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 171,78% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 melaksanakan 5 program, 5 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.272.480.000,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.190 Capaian Indikator Kinerja Program
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023**

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
IKS 1.3.5.b Indeks Kerukunan Umat Beragama				
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian jumlah potensi konflik sosial	%	100	81,17
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	100	80,17
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	100	99,97
IKS 1.3.5.c Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat				
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM yang tercatat di Badan Kesbangpol kab. Bandung Barat	%	100	100
Program Peningkatan Peran Partai Politik & Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat pemahaman politik di masyarakat	%	100	77,46

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2023)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui masih terdapat Indikator Program yang tidak tercapai, yaitu Persentase penyelesaian jumlah potensi konflik sosial, Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan Tingkat pemahaman politik di masyarakat.

2.2.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Triwulan IV tahun 2023, ketercapaian dan ketidak tercapainya target kinerja Perangkat Daerah dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat dari eksternal maupun internal. Adapun faktor pendorong keberhasilan dan faktor penghambat pencapaian kinerja, disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.191 Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung Barat Tahun 2023

NO	OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	Dinas Pendidikan	1. Terjalannya koordinasi dengan berbagai pihak dalam setiap pelaksanaan kegiatan. 2. Dukungan kebijakan pusat dalam pelaksanaan urusan pendidikan di daerah.	1. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang disebabkan oleh perencanaan alur pewaktuan yang kurang optimal. 2. Beberapa sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD tidak direncanakan dalam dokumen RKPD/Renja. Sebagian besar disebabkan oleh anggaran DAK baik fisik dan non fisik yang tidak diperhitungkan dengan baik pada proses perencanaan.
2	Dinas Kesehatan	1. Kebijakan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus secara langsung berdampak pada meningkatnya capaian kinerja pada Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya dan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah pusat.	1. Adanya kendala pencairan baik dari Dana alokasi Umum ataupun sumber dana lainnya. Serta ada kendala dalam peran barjas juga yang membuat output kinerja rendah. 2. Beberapa Sub Kegiatan tidak direncanakan pada RKPD/Renja namun dianggarkan dalam APBD.
3	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	1. Percepatan pelaksanaan proses administrasi pada saat sistem pengadaan dibuka yang salah satunya dilakukan dengan membagi tim kerja lapangan agar melakukan survey lapangan lebih awal disaat proses pengadaan dijalankan.	1. Realisasi anggaran yang tinggi disebabkan oleh adanya hutang bayar pekerjaan tahun sebelumnya, sehingga belum terlalu berdampak pada capaian target kinerja tahun berjalan. 2. Kebijakan penghentian proses pencairan sebagai konsekuensi kondisi keuangan daerah yang belum stabil serta adanya rencana refocusing anggaran pekerjaan fisik menyebabkan beberapa kegiatan fisik tertahan dan belum dapat dilaksanakan. 3. Adanya perubahan jenis pekerjaan mengakibatkan ketidaksesuaian antara output kegiatan dengan target kinerja. 4. Adanya pengurangan bantuan keuangan provinsi Jawa Barat yang mempengaruhi tidak tercapainya target tahunan. 5. Beberapa Kegiatan yang sudah selesai dalam proses pekerjaan mengalami kendala dalam proses pencairan anggaran yang

NO	OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			disesuaikan dengan ketersediaan kas daerah, sehingga tercapainya target kinerja tidak bersamaan dengan realisasi anggaran pada tahun berjalan.
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	1. Ketepatan pewaktuan untuk kegiatan yang sifatnya rutin telah terealisasi, seperti pembayaran gaji, penyediaan alat tulis kantor, barang cetak penggandaan dan belanja pemeliharaan. 2. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga tercapai pelayanan yang prima. 3. Terlaksananya SPM Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana sejumlah 87 Unit dan Rumah Tidak Layak huni (Rutilahu) Sejumlah 233 Unit sehingga target kinerja tahun 2023 tercapai. 4. Terlaksananya sosialisasi penyerahan PSU Perumahan sehingga menambah data perumahan yang tersertifikasi.	1. Tidak terlaksanakannya Kegiatan Sarpras dikarenakan masalah pewaktuan pekerjaan yang tidak cukup. 2. Ada beberapa CPCL yang berubah pada saat tahapan perubahan, sehingga pelaksanaan kegiatan terhambat. 3. Pada anggaran murni 2023 beberapa sub kegiatan tidak direncanakan dalam Renja/RKPD sehingga cukup berpengaruh pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan.
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Mendapatkan sumber dana lainnya yaitu dari DBHCHT yang terkomodir dalam kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.	1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas sehingga menghambat beberapa pelaksanaan kegiatan. 2. Terhambatnya Pelaksanaan Tugas akibat belum adanya regulasi yang mengatur tindak lanjut hasil penegakan perda/perkada serta dampak pasca penagakan. 3. Jumlah SDM Tidak Sebanding dengan Luas Wilayah Kabupaten Bandung Barat sehingga Pelaksanaan Tugas Tidak Merata disetiap Wilayah.
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota melampaui target seiring dengan banyaknya jumlah kejadian sehingga meningkatkan frekuensi pelaksanaan kegiatan.	1. Beberapa sub kegiatan tidak mencapai target karena tidak dianggarkan dalam APBD. 2. Beberapa capaian kinerja sub kegiatan tidak dapat dihitung karena tidak direncanakan dalam RKPD/Renja, namun dianggarkan dalam APBD/DPA. 3. Adanya hold anggaran yang membuat program di sekretariat tidak menjadi skala prioritas meskipun pelaksanaan di RAK seharusnya sudah berjalan.
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1. Damkar banyak mendapat penambahan pagu terutama di parsial 2 dikarenakan adanya urgensitas dinas yang tidak terakomodir dalam APBD tahun sebelumnya. Capaian kinerja pada triwulan berjalan pun melebihi dari target yang dikarenakan adanya penambahan pagu yang otomatis realisasi	1. Adanya ketidaksesuaian indikator antara Renja dengan DPA sehingga mempengaruhi perhitungan capaian kinerja.

NO	OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		kinerja pun bertambah.	
8	Dinas Sosial		1. Adanya hold anggaran yang berpengaruh terhadap output kinerja. 2. Terbatasnya kondisi sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1. Capaian Kinerja tidak dapat dihitung karena tidak adanya target dalam perencanaan sehingga tidak ada faktor pembagi untuk menghitung rata-rata capaian kinerja.
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A	1. Dukungan sumber dana lainnya (DAK) yang dapat mendorong capaian kinerja. 2. Optimalisasi alur pewartuan pelaksanaan kegiatan.	1. Inkonsistensi indikator antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran dimana sebagian besar rata-rata capaian kinerja program tidak dapat dihitung karena banyaknya sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD namun tidak direncanakan dalam Perencanaan. 2. Anggaran DAK baik fisik dan non fisik tidak diperhitungkan dengan baik pada proses perencanaan.
11	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dalam sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Renja terakomodir namun target nya kecil. Dikarenakan mendapat tambahan anggaran sehingga capaian nya melebihi dari 100% sekaligus untuk mengejar target renstra yang masih kecil.	1. Ada sub kegiatan yang tidak direncanakan namun muncul dalam APBD. Dasarnya karena adanya urgensi dalam melaksanakan kajian pemulihan pencemaran lingkungan hidup.
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Adanya dukungan anggaran dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kependudukan.	1. Tidak konsistennya jumlah sub kegiatan antara Renja dengan DPA.
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Beberapa Sub Kegiatan memiliki tingkat capaian yang tinggi sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan timeline perencanaan (<i>cash budget</i>). 2. Pelaksanaan BSMSS dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal telah disepakati oleh KODIM dan Pemda KBB. 3. Pemahaman akan regulasi/aturan oleh desa semakin baik.	1. Pada anggaran murni 2023, ada sub kegiatan yang tidak direncanakan dalam Renja namun dianggarkan dalam DPA. 2. Pengaturan penyerapan anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang telah disusun. 3. Kelengkapan dokumen pencairan dari pihak ketiga masih kurang lengkap. 4. Terdapat kendala pada sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan.

NO	OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
14	Dinas Perhubungan	1. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan di sisa tahun anggaran.	1. Inkonsistensi sub kegiatan antara renja dengan DPA. 2. Dampak dari perubahan anggaran telah mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Seperti salah satunya adalah perubahan mekanisme dari lelang menjadi pengadaan langsung sehingga mempengaruhi alur pewaktuuan pelaksanaan kegiatan. 3. Adanya pengurangan bantuan keuangan provinsi Jawa Barat yang mempengaruhi tidak tercapainya target tahunan.
15	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	1. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan <i>Timeline</i> perencanaan dan skala prioritas. Kegiatan dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang diajukan untuk mengejar target yang telah ditetapkan baik itu Renstra maupun target RPJMD. 2. Semua kegiatan melalui Pengadaan Langsung (LS) telah semua Dilaksanakan melalui kerjasama yang baik dengan pihak ke tiga walaupun menjadi utang ditahun 2023 dan akan dibayarkan di tahun 2024.	1. Beberapa kegiatan terlambat dilaksanakan sebagai akibat dari penerapan kebijakan beberapa waktu yang lalu terkait penghentian sementara pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD sebagaimana Surat Edaran Nomor: 000.7/1177/Adbang tentang Pelaksanaan kegiatan PD TA 2023. Hal ini pun berdampak pada penutupan akses LPSE, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan pihak ketiga mengalami keterlambatan. 2. Adanya inkonsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran dimana ada beberapa sub kegiatan yang dianggarkan tapi tidak direncanakan pada dokumen Renja/RKPD. 3. Terjadinya Desfisit anggaran tahun 2023 yang menyebabkan realisasi anggaran untuk dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dibawah 95% terutama untuk pembayaran Pengadaan Langsung yang sekarang menjadi Utang sebesar Rp. 4.493.567.433,-.
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Adanya dukungan Kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung produk UMKM yang berimplikasi pada capaian target kinerja dinas. 2. Dukungan dan sinergitas antar lembaga, mitra, dan stakeholder terkait. 3. Dukungan sumber dana di luar APBD yang dapat meningkatkan target kinerja. 4. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan cenderung melebihi target kinerja karena adanya urgensi peningkatan kapasitas SDM yang didukung dengan efisiensi anggaran.	1. Beberapa kegiatan belum dilaksanakan karena terkendala oleh kebijakan pembatasan pencairan sehubungan dengan kondisi keuangan daerah. 2. Kurangnya aksesibilitas dalam proses pemasaran produk dan permodalan koperasi.
17	Dinas Penanaman Modal PTSP	1. Dukungan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang cukup memadai. 2. Terintegrasinya pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Perizinan.	1. Terdapat realisasi sub kegiatan dalam APBD yang tidak direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah sehingga capaian kinerja tidak dapat dihitung. 2. Adanya kebijakan penundaan

NO	OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			pencairan kegiatan dari TAPD sehingga beberapa kegiatan terlambat dilaksanakan. 3. Adanya keterbatasan sumber daya manusia sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1. Beberapa sub kegiatan pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, memiliki tingkat capaian kinerja yang tinggi karena adanya penambahan anggaran dalam APBD.	1. Pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga anggaran pada Renja hanya mencukupi untuk biaya umum. Sedangkan kondisi aktual yang terjadi ada tuntutan untuk memberikan bonus pada atlet yang berprestasi dengan kebutuhan anggaran sebesar 20M. Dalam APBD sendiri telah dianggarkan sebesar 5 M sehingga masih mengalami kekurangan. 2. Tidak efisiennya belanja dan kurangnya ketersediaan anggaran pada beberapa Sub Kegiatan yang menyebabkan sulitnya untuk mencapai target kinerja. 3. Adanya pengurangan bantuan keuangan provinsi Jawa Barat yang mempengaruhi tidak tercapainya target tahunan. 4. Kurang optimalnya sinergitas dengan stakeholder atau pihak-pihak terkait terutama dalam pengumpulan data dan pelaksanaan kegiatan.
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Dukungan sumber keuangan lainnya (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) yang berdampak pada meningkatnya realisasi kinerja. 2. Optimalisasi pengerahan Sumber Daya Manusia/Arsiparis dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Pemanfaatan fasilitas dan teknologi yang tersedia. 4. Adanya koordinasi dan kolaborasi yang terbangun dengan perangkat daerah, pemangku kepentingan dan stakeholder terkait.	1. Adanya kebijakan rasionalisasi anggaran pada saat APBD perubahan sehingga berpengaruh pada tidak tercapainya target kinerja. 2. Terdapat sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD namun tidak masuk dalam dokumen perencanaan.
20	Dinas Perikanan dan Peternakan	1. Optimalisasi pelaksanaan sisa kegiatan pada triwulan terakhir dengan memperhatikan sumber daya manusia dan alur pewaktuan.	1. Adanya kebijakan hold dari LPSE pada triwulan sebelumnya sehingga beberapa paket tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana.
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		1. Adanya sub kegiatan yang tidak direncanakan namun ada di dalam dalam APBD. 2. Kebijakan penghentian sementara pencairan anggara yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. 2. Adanya kolaborasi yang terbangun dengan kelompok tani dan swadaya masyarakat lainnya 3. Komitmen dan perhatian pimpinan daerah terkait urusan pangan dan pertanian.	1. Perbedaan antara dokumen Renja dengan APBD dimana ada beberapa sub kegiatan yang tidak ada dalam renja namun ada dalam APBD. 2. Ketidaktepatan PPTK dalam menentukan target di renja yang membuat ada beberapa sub kegiatan yang capaian kinerja nya tidak

NO	OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			terhitung dan tidak selaras dengan isian yang berada di DPA.
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Adanya komunikasi dan kerjasama yang terbangun dengan mitra kerja dinas dalam beberapa kegiatan sehingga mampu mendorong capaian kinerja. 2. Dukungan sarana dan prasarana administrasi perkantoran. 3. Komitmen pimpinan dan aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.	1. Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan sebagai dampak dari adanya <i>refocusing</i> perubahan anggaran di tahun berkenaan. 2. Adanya sub kegiatan yang tidak direncanakan namun ada di dalam dalam APBD.
24	Sekretariat Daerah	1. Pengarahan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang dilakukan seoptimal mungkin. 2. Dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. 3. Pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada cash budget dan alur pewaktuan.	1. Tidak konsistennya dokumen perencanaan dengan penganggaran.
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1. Adanya dukungan anggaran dalam pencapaian target kinerja dimana bisa dilihat dari perbedaan pagu renja dan pagu APBD yang jauh lebih besar. 2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alur pewaktuan yang telah direncanakan. 3. Beberapa sub kegiatan memiliki capaian kinerja di atas 100% yang disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan yang bersifat insidental dan mendesak namun tidak direncanakan.	1. Tidak konsistennya target kinerja dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran sehingga menyebabkan sulitnya menghitung capaian kinerja. 2. Pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam realisasi kinerja masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dari komisi untuk melakukan pengawasan karena ada satu komisi yang membidangi 2 pengawasan sekaligus.
26	Inspektorat Daerah	1. Pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, capaian kinerja melebihi target karena terdorong oleh ketersediaan anggaran dan pada saat penyusunan Renja standar biaya tertinggi yang diambil karena diklat yang diperlukan Inspektorat Daerah tidak ada pada SIPD. 2. Pada Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu realisasi kinerja melebihi target seiring dengan banyaknya pengaduan kasus sehingga mendorong pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tidak direncanakan.	1. Tidak konsistennya dokumen perencanaan dengan penganggaran. 2. Adanya kebijakan penghentian sementara kegiatan (LS), sehingga banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. 3. Beberapa Sub Kegiatan tidak dapat dilaksanakan seiring dengan kondisi kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan tersebut dan rencana <i>refocusing</i> untuk beberapa kegiatan. 4. Beberapa kegiatan mengalami jadwal pemeriksaan yang mundur seiring dengan banyaknya permohonan pemeriksaan atau pemeriksaan lain yang diprioritaskan.
27	Bappelitbangda		1. Adanya perbedaan dokumen renja dengan yang diinputkan kepada sistem yang membuat adanya sub kegiatan yang tidak direncanakan namun di realisasikan.

NO	OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah		1. Keterlambatan dalam menyelesaikan <i>output</i> kinerja yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia. 2. Adanya sub kegiatan yang tidak direncanakan yang dikarenakan adanya kebijakan pimpinan untuk mengakomodir sebuah kegiatan Ketika triwulan berjalan.
29	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	1. Merumuskan strategi kebijakan yang komprehensif melalui penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi sistem manajemen kinerja ASN. 2. Kerja sama dengan beberapa K/L/D/I Penyelenggara Diklat/Pelatihan yang pelaksanaannya menggunakan metode blended learning;	1. Terdapat beberapa sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD namun tidak direncanakan dalam Renja sehingga rata-rata capaian program tidak dapat dihitung seluruhnya.
30	Badan Pendapatan Daerah	1. Komitmen Kepala Daerah dalam meningkatkan PAD dan adanya upaya penyesuaian dasar hukum di bidang pajak daerah yang didukung oleh sistem informasi, memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja beberapa sub kegiatan yang memiliki relevansi dengan pengembangan dan penyesuaian kebijakan.	1. Adanya Surat Edaran terkait penundaan pencairan Kegiatan yang berdampak pada belum terpenuhinya target kinerja yang direncanakan.
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan program prioritas nasional terutama kaitannya dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sehingga memiliki urgensi untuk dilaksanakan. 2. Adanya sinergitas dari mitra kerja Kesbangpol dalam mendukung setiap capaian target kinerja pada Sub Kegiatan.	1. Terdapat sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD namun tidak direncanakan dalam Renja sehingga rata-rata capaian program tidak dapat dihitung (DIV#). 2. Tidak adanya konsistensi penentuan koefisien indikator dalam dokumen perencanaan sehingga terdapat beberapa output kinerja sulit untuk dihitung. 3. Sumber Daya Manusia yang terbatas dari segi kualitas dan kuantitas menjadi hambatan dalam upaya pencapaian target kinerja.
32	Kecamatan	1. Sebagian besar Kecamatan memiliki kinerja yang tinggi pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Hal ini salah satunya didukung oleh mekanisme jemput bola yang diterapkan beberapa kecamatan pada pelaksanaan kegiatan pelayanan kependudukan. 2. Konsistensi pelaksanaan kegiatan telah mengikuti <i>Timeline</i> kinerja sesuai dengan <i>cashbudget</i>. 3. Pengelolaan SDM yang efektif yang didukung oleh faktor kebijaksanaan pimpinan menjadi faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja. 4. Adanya sinergitas dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dan <i>stakeholder</i> di tingkat Desa	1. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah terkait dengan penundaan pencairan kegiatan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu berimplikasi pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan yang disebabkan oleh <i>timeline</i> pelaksanaan kegiatan yang mundur. 2. Tidak konsistennya dokumen perencanaan dengan penganggaran. 3. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan mengalami keterlambatan dalam penyusunan dan penginputan SPJ sehingga kinerja belum dapat dihitung. 4. Sebagian besar kecamatan mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan RT, RW, dan Linmas yang diakibatkan oleh kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan

NO	OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		menjadi salah satu pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.	rencana <i>refocusing</i> anggaran pada kegiatan tersebut.

Sumber: Evaluasi hasil RKPD Tahun 2023, Bappelitbangda

2.2.5 Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs)

Penyusunan kebijakan mengenai perencanaan TPB/SDGs di tingkat pusat dituangkan dalam Peta Jalan Nasional (Roadmap SDGs) yang telah mengalami revisi pada tahun 2023 berdasarkan adanya Peraturan Presiden No.111 Tahun 2022 mengenai Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang kemudian diikuti dengan penyesuaian Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD). Target dan indikator dari 17 TPB/SDGs juga menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka panjang, 7 agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan juga Visi, Misi Indonesia 2045. Sedangkan untuk pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga berbagai pihak seperti pemerintah pusat, akademisi, organisasi non-pemerintah, masyarakat/komunitas, sektor swasta, dan organisasi internasional.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah agenda kesepakatan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan atas hak asasi manusia dan kesetaraan, bersifat universal, holistik, terintegrasi, inklusif dan membutuhkan kemitraan dan partisipasi antar pihak. TPB/SDGs memiliki 17 tujuan yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2030, adapun 17 tujuan tersebut diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) pilar, yaitu:

- 1) Pilar Sosial, bertujuan meningkatkan kualitas pembangunan manusia berkualitas, terdiri dari 5 (lima) tujuan:
 - Tujuan 1 Tanpa kemiskinan
 - Tujuan 2 Tanpa kelaparan
 - Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
 - Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
 - Tujuan 5 Kesetaraan Gender
- 2) Pilar Ekonomi meliputi penyediaan energi untuk semua, faktor penting dalam mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan dan penurunan kemiskinan, terdiri dari 5 (lima) tujuan:

- 
- Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
 - Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
 - Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
 - Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
 - Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
- 3) Pilar Lingkungan merupakan landasan semangat transformatif pembangunan berkelanjutan, terdiri dari 6 (enam) tujuan:
- Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi yang Layak
 - Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan
 - Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
 - Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
 - Tujuan 14 Ekosistem Laut
 - Tujuan 15 Ekosistem Daratan
- 4) Pilar Hukum dan Tata Kelola terdiri dari 1 (satu) tujuan yaitu tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Setiap wilayah mengalami hambatan dalam pencapaian TPB/SDGs berupa keterbatasan sumber daya. Tidak semua indikator dapat mencapai TPB/SDGs dengan pola kerja seperti biasanya atau bussiness as usual (BAU). Terutama, indikator yang masih belum mencapai tingkat kinerja yang baik dan memerlukan perhatian khusus serta upaya yang inovatif. Kajian ini merupakan update dari proyeksi pencapaian Kabupaten Bandung Barat yang telah dilakukan tahun lalu guna mengetahui tingkat kesiapan Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai TPB/SDGs. Hasil kajian berupa proyeksi pencapaian TPB/SDGs dengan nilai indikator yang ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- Nilai A (skor 4) diberikan jika hasil proyeksi mencapai atau hampir mencapai (97.5%) target TPB/SDGs.
- Nilai B (skor 3) diberikan jika hasil proyeksi pada tahun 2030 mendekati target TPB/SDGs setidaknya 90%.
- Nilai C (skor 2) diberikan apabila hasil proyeksi lebih dari 75% menuju target TPB/SDGs.
- Nilai D (skor 1) diberikan jika hasil proyeksi pencapaian indikator di tahun 2030 setidaknya mencapai 50% dari target TPB/SDGs.
- Nilai E (skor 0) diberikan jika indikator masih cukup jauh dari mencapai target TPB/SDGs (dibawah 50%).

Terdapat 66 indikator pilihan TPB/SDGs di Kabupaten Bandung Barat karena adanya keterbatasan data (98 jika mempertimbangkan subindikator) dengan perolehan nilai secara keseluruhan adalah 2,63 atau C. Pencapaian TPB/SDGs yang menyeluruh menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Bandung Barat apabila masih menggunakan skema BAU. Berikut ini adalah hasil proyeksi pencapaian SDGs hingga tahun 2030 berdasarkan scorecard TPB/SDGs:

**Tabel 2.192 Hasil Proyeksi Pencapaian SDGs
Kabupaten Bandung Barat s.d Tahun 2030 Berdasarkan Scorecard**

No.	Scorecard	Jumlah Indikator
1	A	37
2	B	11
3	C	21
4	D	12
5	E	7
6	Belum dapat ditentukan nilainya	4
Total		92

Sumber : Kajian Studi Baseline Indikator TPB/ SDGs KBB, Litbang Bappelitbangda, 2023

Sejumlah indikator memperoleh nilai C, D dan E menunjukkan perlunya perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan pihak-pihak terlibat dalam pembangunan, agar pencapaian mereka dapat ditingkatkan. Penting untuk diingat bahwa peningkatan kinerja indikator ini tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan pola kerja seperti biasanya (business as usual), perlu adanya upaya tambahan, inovasi, dan kerjasama lintas sektor dari berbagai pihak. Sebagai pertimbangan, berikut ini adalah scorecard hasil kajian tahun ini dan tahun lalu:

**Tabel 2.193 Daftar Indikator Terpilih (Data, Target, dan Scorecard indikator) untuk
Tiap Tujuan SDGs di Kabupaten Bandung Barat**

Goal	Kode	Indikator	Nilai 2022	Nilai 2023	Ket.
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	A	D	▼
1	1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (B40) (%)	A	A	—
1	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (B40)	D	D	—
1	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (B40)	D	D	—
1	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (B40)	B	B	—

Goal	Kode	Indikator	Nilai 2022	Nilai 2023	Ket.
1	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (B40) (%)	A	A	—
1	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (B40) (%)	C	C	—
1	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat (B40) (%)	C	C	—
1	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (B40)	A	A	—
1	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (1) akses pada layanan air minum		D	
1	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (2) akses pada layanan sanitasi dasar		C	
1	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (3) akses pada fasilitas penyehatan dasar		A	
1	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (B40)	A	A	—
1	1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (ks).	E	E	—
1	1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (ms)	C	C	—
2	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	A	E	▼
2	2.1.1.(a)	Prevelansi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	C	C	—
2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	C	C	—
2	2.2.2*	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah 5 tahun/balita.	A	A	—
3	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.		A	
3	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan	A	A	—
3	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	A	A	—
3	3.7.1*	Proporsi perempuan berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern	D	D	—
3	3.8.1.(a)	Proporsi penduduk yang sakit tetapi tidak berobat jalan	B	C	▼
3	3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih Besar	A	A	—

Goal	Kode	Indikator	Nilai 2022	Nilai 2023	Ket.
		10%)			
3	3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih Besar 25%)	A	A	—
3	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		B	
3	3.A.1*	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang pernah merokok tembakau	D	D	—
4	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	A	A	—
4	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	A	A	—
4	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.	A	A	—
4	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >=15 tahun.	C	C	—
4	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat	A	A	—
4	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/sederajat	C	C	—
4	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP/sederajat	A	A	—
4	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar)	A	A	—
4	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	C	C	—
4	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	D	B	▲
4	4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	A	A	—
4	4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-59 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	A	A	—
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	B	D	▼
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	E	B	▲
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	A	B	▼
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	A	C	▼
4	4.5.1*	Rasio APK-SD antara Pedesaan dan Perkotaan		A	
4	4.5.1*	Rasio APK SD antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas		A	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	C	C	—

Goal	Kode	Indikator	Nilai 2022	Nilai 2023	Ket.
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	D	C	▲
4	4.5.1*	Rasio APK-SMA antara Pedesaan dan Perkotaan		D	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	B	A	▲
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	C	B	▲
4	4.5.1*	Rasio APK-SMP antara Pedesaan dan Perkotaan		B	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	B	B	—
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	E	E	—
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	A	A	—
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	A	B	▼
4	4.5.1*	Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan		A	
4	4.5.1*	Rasio APM-SD antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas		A	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	C	C	—
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	D	D	—
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/ sederajat untuk perempuan/ laki-laki	B	B	—
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/ sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	C	C	—
4	4.6.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/ lainnya	A	A	—
4	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk 15-59 tahun (%)	A	A	—
4	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun (%)	A	A	—
5	5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 15 tahun	B	A	▲
5	5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 18 tahun	C	B	▲
5	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	E	E	—

Goal	Kode	Indikator	Nilai 2022	Nilai 2023	Ket.
5	5.b.1*	Proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir	C	D	▼
6	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	E	E	—
6	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	A	A	—
6	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	A	A	—
6	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	C	C	—
7	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	A	A	—
8	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	D	E	▼
8	8.1.1.(a)	PDB per kapita (ribu rupiah)	E	E	—
8	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	A	A	—
8	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal	D	D	—
8	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	D	E	▼
8	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	B	B	—
8	8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja			
8	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	B	B	—
8	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran			
8	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)	C	C	—
8	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (dalam juta)	C	C	—
9	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	D	D	—
9	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband		A	
10	10.1.1*	Koefisien Gini	D	C	▲
10	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur		D	
10	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup dibawah 50 persen dari median pendapatan	B	B	—
11	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	A	C	▼
11	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (1) meninggal		Tidak dapat diproyeksi	
11	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (2) terkena dampak (luka)		Tidak dapat diproyeksi	
11	11.7.2(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		A	
16	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		A	

Goal	Kode	Indikator	Nilai 2022	Nilai 2023	Ket.
16	16.3.1.(a)	Proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi	A	E	▼
16	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	E	C	▲
16	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	C	A	▲
16	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun		A	
17	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.		Tidak dapat diproyeksi	
17	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		Tidak dapat diproyeksi	
17	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.		Tidak dapat diproyeksi	
17	17.8.1	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	A	A	—

Sumber : Kajian Studi Baseline Indikator TPB/ SDGs KBB, Litbang Bappelitbangda, 2023

Indikator dengan nilai C, D, E diklasifikasikan berdasarkan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial dengan rincian sebagai berikut:

- Bidang pendidikan ditunjukkan dengan rendahnya APK PAUD, APM SMP dan SMA; rata-rata lama sekolah yang masih rendah; tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/ sederajat yang masih rendah; tidak setaranya APK berdasarkan gender untuk perguruan tinggi dan SMA; tidak setaranya APK berdasarkan kuintil untuk SD dan SMA; tidak setaranya APK SMA di pedesaan dan perkotaan; tidak setaranya APM berdasarkan kuintil untuk SMP, SMA dan perguruan tinggi; tidak setaranya APM berdasarkan gender untuk SMA.
- Bidang kesehatan ditunjukkan dengan rendahnya sumber air dan sanitasi layak; tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan; tingginya angka stunting dan underweight; tingginya angka penduduk di bawah 15 tahun yang merokok; rendahnya penggunaan alat kontrasepsi; serta tingginya proporsi penduduk yang sakit namun tidak berobat jalan.
- Bidang ekonomi ditunjukkan dengan tingginya presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; rendahnya PDB per kapita dan lajunya; tingginya lapangan kerja informal; rendahnya tenaga kerja formal (termasuk tenaga kerja industri manufaktur); rendahnya angka usia muda yang tidak bersekolah dan tidak bekerja; rendahnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara; serta tingginya koefisien gini.

- 
- Bidang sosial ditunjukkan dengan rendahnya rendahnya proporsi rumah yang memiliki hak atas tanah milik sendiri terutama kontrak/sewa; rendahnya proporsi perempuan yang menempati managerial; rendahnya proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir; rendahnya proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau; rendahnya proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi; serta rendahnya proporsi anak berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran;.

Mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia, pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu melakukan seleksi atau menetapkan prioritas untuk mencapai indikator-indikator tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan seleksi ini adalah dengan menggunakan analisis keterkaitan SDGs yang telah disiapkan oleh SDGs Center Unpad untuk Kabupaten Cirebon (Komarulzaman dkk, 2020). Fokus indikator prioritas dapat diarahkan pada kemiskinan dan stunting, dengan dukungan optimalisasi pencapaian indikator lainnya seperti proporsi perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu oleh tenaga kesehatan, kepemilikan akta kelahiran, rumah tangga dengan akses air minum yang layak dan sanitasi yang layak, tingkat penyelesaian SMP, tempat tinggal yang layak dan terjangkau, APM SD berdasarkan gender dan kuintil, serta penduduk yang menjadi korban kejahatan atau kekerasan.

2.2.6 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewajiban untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bagi warga negara.

Sebagaimana dimatkan dalam aturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konversi Internasional. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan



dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Secara garis besar, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik pada level Provinsi maupun level Kabupaten/Kota dimana menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Secara definisi, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, disebut dengan SPM. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Pasal 8 ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan dasar dan penghitungan warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar yang tidak mampu di muat dalam dokumen RPJMD dan RKPD, ayat (2) disebutkan bahwa Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

SPM diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan (yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar).

Adapun pengaturan lebih rinci mengenai Mutu Pelayan Dasar ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM menteri terkait yaitu berupa pengaturan mengenai standar teknis SPM. Sementara itu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan dan melekat dalam pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dimana terdapat 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar yang diantaranya ialah urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial. Adapun jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud, terdiri dari:

- 
- 
1. Urusan Pendidikan, dengan jenis pelayanan dasar:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Pendidikan Dasar; dan
 - c. Pendidikan Kesetaraan.
 2. Urusan Kesehatan, dengan jenis pelayanan dasar yaitu:
 - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. Pelayanan kesehatan balita;
 - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa;
 - k. Pelayanan kesehatan orang terduga *tuberculosis*; dan
 - l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan jenis pelayanan dasar yaitu:
 - a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan jenis pelayanan dasar yaitu:
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.
 5. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan jenis pelayanan dasar yaitu :
 - a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran.

6. Urusan Sosial, dengan jenis pelayanan dasar yaitu :
 - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

Tabel 2.194 Jenis SPM Tahun Anggaran 2023

No	JENIS SPM	JUMLAH JENIS LAYANAN DASAR
1	SPM PENDIDIKAN	3
2	SPM KESEHATAN	12
3	SPM PEKERJAAN UMUM	2
4	SPM PERUMAHAN RAKYAT	2
5	SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	5
6	SPM SOSIAL	5
	JUMLAH	29

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Adapun pembiayaan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa penerapan SPM itu memiliki 4 tahapan yaitu:

1. Pengumpulan Data
2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar
3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 60 Tahun 2019 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Hal itu diimplementasikan dengan adanya perencanaan dan penganggaran pada program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait dengan pelaksanaan SPM. Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pnerapan SPM sebesar Rp. 343.779.979.907,- atau 9,84% dari total APBD Perubahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 yang mencapai Rp. 3.492.240.920.902,-. Anggaran SPM Tahun 2023 sebagaimana dimaksud bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat dan sumber pendanaan lain di luar APBD yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Secara keseluruhan total anggaran SPM di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mencakup 6 Bidang SPM, 24 Jenis Pelayanan, 9 Program, dan 15 Kegiatan.

2.2.6.1 SPM Bidang Pendidikan

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Adapun jenis pelayanan, jumlah anggaran, target kinerja, realisasi kinerja dan sumber dana pada penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 dapat dijelaskan melalui Tabel berikut:

**Tabel 2.195 Target dan Realisasi Kinerja SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Sumber Dana
1.	Pendidikan Dasar	282.121.935.244	17.000 Orang	17.000 Orang	100%	DAU, DAK, BKK Jabar
2.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	28.229.964.828	1.000 Orang	1.000 Orang	100%	DAU, DAK
3.	Pendidikan Kesetaraan	7.681.777.340	1.000 Orang	1.000 Orang	100%	DAU, DAK

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, diolah

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 318.033.677.412,- atau 92,51% dari total anggaran SPM Tahun 2023. Hal ini menjadikan SPM Bidang Pendidikan memiliki proporsi anggaran yang paling tinggi diantara bidang SPM lainnya. Sementara untuk realisasi capaian kinerja telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis layanan dasar dengan tingkat persentase sebesar 100% mulai dari Pendidikan Dasar sebanyak 17.000 orang, Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 1.000 orang, dan Pendidikan Kesetaraan sebanyak 1.000 orang. Dalam kaitannya dengan



dokumen perencanaan dan penganggaran, SPM Bidang Pendidikan dianggarkan pada Program Pengelolaan Pendidikan yang terdiri dari 4 kegiatan yakni Pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Adapun rincian kegiatan pada SPM Bidang Pendidikan pada Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 1) Pembangunan Gedung Sekolah;
 - 2) Penambahan Ruang Kelas Sekolah;
 - 3) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
 - 4) Rehabilitasi sedang atau berat Ruang kelas sekolah;
 - 5) Penyediaan Biaya personil Peserta Didik PAUD;
 - 6) Pengembangan Karir pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan PAUD;
 - 7) Pembinaan Kelembagaan dan manajemen PAUD;
 - 8) Pembangunan Gedung/ Ruang kelas/ Ruang guru PAUD.
- b. Program Pengelolaan Sekolah Dasar
 - 1) Pengadaan Perlengkapan Siswa Sekolah Dasar;
 - 2) Rehabilitasi sedang/berat/Ruang kelas;
 - 3) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik;
 - 4) Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
 - 5) Pembangunan Sarana dan Pembangunan Prasarana Pendidikan untuk Sekolah Dasar.
- c. Program Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama
 - 1) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
 - 2) Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP;
 - 3) Rehabilitasi Sengah/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP;
 - 4) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik;
 - 5) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.
- d. Program Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan
 - 1) Nonformal/Kesetaraan Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan;
 - 2) Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
 - 3) Penyelenggaraan Proses Belajar.

Dalam penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal. Adapun beberapa permasalahan sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan melalui Tabel berikut:

Tabel 2.196 Permasalahan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

NO	KATEGORI	PERMASALAHAN
1.	Pengumpulan Data	• Data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan dapodik sehingga terdapat ATS yang belum terdata.
2.	Penghitungan Kebutuhan	• Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kemenag dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat. • Belum semua admin dapodik mengupdate data tepat waktu dan tidak melakukan sinkronisasi, serta terdapat satuan pendidikan yang tidak aktif tapi tidak segera mengajukan penutupan sekolah. • Belum semua operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi dapdik secara berkala.
3.	Perencanaan dan Penganggaran	• Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar belum maksimal karena belum maksimalnya data yang tersedia serta keterbatasan anggaran pasca COVID 19.
4.	Pelaksanaan	• Belum ada SOP di Tingkat Kabupaten tentang pelaksanaan penerapan SPM yang menyeluruh dan terkoneksi dengan instrumen lainnya.

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, diolah

2.2.6.2 SPM Bidang Kesehatan

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Adapun jenis pelayanan, jumlah anggaran, target kinerja, realisasi kinerja dan sumber dana pada penerapan SPM

Bidang Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.197 Target dan Realisasi Kinerja SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Sumber Dana
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	8.700.000	31.264 ibu hamil	29.616 ibu hamil	94,73%	DAU
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	78.730.000	29.843 ibu bersalin	28.535 ibu bersalin	95,62%	DAU/DAK Non Fisik
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	8.700.000	28.422 bayi baru lahir	28.115 bayi baru lahir	98,92%	DAU
4.	Pelayanan kesehatan balita	37.762.000	137.673 balita	129.449 balita	94,03%	DAU
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	23.315.400	262.549 orang	255.547 orang	97,33%	DAU
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	83.420.000	1.072.548 orang	919.646 orang	85,74%	DAU
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	35.542.600	212.254 orang	145.586 orang	68,59%	DAU
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	50.000.000	108.649 orang	76.325 orang	70,25%	DAU
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	1.564.992.000	15.874 orang	14.001 orang	88,20%	DAU/DAK Non Fisik
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa		2.390 orang	2.533 orang	105,98%	
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi	910.248.920	22.595 orang	19.023 orang	84,19%	DAU/DAK Non Fisik
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	505.000.000	28.092 orang	22.721 orang	80,88%	DAU/DAK Non Fisik

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, diolah



Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 3.306.410.920,- atau 0,96% dari total anggaran SPM Tahun 2023. SPM Bidang Kesehatan dianggarkan pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan. Sementara itu, untuk tingkat realisasi capaian kinerja 12 jenis pelayanan dasar Bidang Kesehatan berkisar antara 68,59% - 105,98% dengan rata-rata capaian sebesar 87,71%. Adapun rincian kegiatan pada SPM Bidang Kesehatan pada Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 1) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan;
 - 3) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 1) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP;
 - 2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - 2) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
 - 3) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

Dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal. Adapun beberapa permasalahan sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan melalui Tabel berikut:

Tabel 2.198 Permasalahan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

NO.	KATEGORI	PERMASALAHAN
1.	Pengumpulan Data	• Pelaporan belum tercapai, pemeriksaan K1 dan K6 USG dengan doker belum maksimal, karena pengadaan USG baru di anggarkan Tahun ini untuk 16 Puskemas (Ibu Hamil, Ibu bersalin, Bayi baru lahir). • Dalam pengumpulan data, masih ada beberapa data yang tidak terinput dan tidak dapat mencakup seluruh sasaran di luar gedung (Balita). Kesulitan mengidentifikasi dan mengumpulkan data serta proses mengolah data (usia pendidikan dasar). • Kurangnya tenaga kesehatan dalam menjangkau lansia untuk melakukan skrining (Lanjut Usia). • Pengentrian SIPTM dan Aplikasi ASIK belum maksimal (Usia Produktif, Hipertensi, Diabetes). • Laporan bulanan yang dikirim oleh Puskesmas Jumlah Kunjungan (ODGJ). • Data suspek TBC dari DPM (Dokter Praktik Mandiri) dan Klinik Swasta belum masuk ke dalam sistem pelaporan (TBC). • Tenaga input data ke Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) di puskesmas dan Rumah sakit belum tersedia khusus, masih dirangkap kerja oleh petugas lain, sehingga input data tidak maksimal (HIV).
2.	Penghitungan Kebutuhan	• Belum terpenuhi untuk pengadaan USG (ibu Hamil, Ibu bersalin, Bayi baru lahir). • Kesulitan menghitung kesenjangan (selisih) kebutuhan pelayanan dasar (usia pendidikan dasar). • Perhitungan kebutuhan setiap program masih belum maksimal karena dalam kelengkapan penunjang pemeriksaan skrining tidak tercatat dengan baik (Usia Produktif, Hipertensi, Diabetes, ODGJ). • Stok kebutuhan pot dahak hanya sampai bulan Juni (TBC).

		• Kelompok sasaran populasi kunci (LSL, waria, penasun, WPS) sulit dijangkau keberadaan jumlahnya karena tersembunyi, tidak membuka diri di masyarakat (HIV).
3.	Perencanaan dan Penganggaran	• Perencanaan dan penganggaran dari sumber APBD dan DAK tidak tersinkron dengan optimal (ibu Hamil, Ibu bersalin, Bayi baru lahir). • Penganggaran yang minim membuat sulit tercapainya capain SPM. • Pada Tahun 2023 tidak ada menu BOK untuk menganggarkan BMHP dan terbatasnya dana APBD untuk menganggarkan BMHP dalam pelaksanaan skrining usia lanjut usia >60 Tahun (Lanjut Usia). • Perencanaan tidak sesuai dengan realisasi • Belum mendapatkan alat fiksasi semua Puskesmas (ODGJ) • Dana APBD untuk Program TBC nol (TBC). • Anggaran kegiatan tidak ada buat mendukung pelaksanaan kegiatan SPM HIV, hanya tersedia untuk pengadaan BHP saja dari sumber DAK.
4.	Lain-lain	• Stigma penyakit HIV di masyarakat sangat tinggi menghambat pelayanan (HIV). • Mengerjakan SPM dengan waktu singkat (usia pendidikan dasar)

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, diolah

2.2.6.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Adapun jenis pelayanan, jumlah anggaran, target kinerja, realisasi kinerja dan sumber dana pada penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 dapat dijelaskan melalui Tabel berikut:

Tabel 2.199 Target dan Realisasi Kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Sumber Dana
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	9.140.400.535	16.456 Jiwa	16.456 Jiwa	100%	DAU
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	2.213.603.300	2.448 orang	2.448 orang	100%	DAU

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, diolah

Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 11.354.003.835,- atau 3,30% dari total anggaran SPM Tahun 2023. Sementara itu, untuk realisasi kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum telah mencapai target kinerja sebagaimana yang direncanakan dengan tingkat capaian pada masing-masing jenis pelayanan sebesar 100% yang meliputi Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebanyak 16.456 Jiwa dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic sebanyak 2.448 orang.

SPM Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan pada 2 Program yakni Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. 2 Program tersebut terdiri dari masing-masing kegiatan yang mana dimaksudkan untuk mengintervensi jenis pelayanan Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Adapun rincian kegiatan pada SPM Bidang Pekerjaan Umum pada Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal. Adapun beberapa permasalahan sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan melalui Tabel berikut:

Tabel 2.200 Permasalahan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

NO.	KATEGORI	PERMASALAHAN
1.	Perencanaan dan Penganggaran	• Sistem Penganggaran belum menyesuaikan dengan RPJMD. Banyak perubahan anggaran dikarenakan penyesuaian anggaran yang disesuaikan dengan Kemampuan Daerah/ Kebijakan
2.	Pelaksanaan	• Dengan adanya penyesuaian anggaran, realisasi kegiatan belum mengacu terhadap cash budget keuangan daerah.
3.	Lain-lain	• Dengan tidak berjalannya rencana penganggaran yang telah direncanakan maka terjadi keterlambatan pekerjaan yang menyebabkan realisasi pencapaian output belum terpenuhi.

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, diolah

2.2.6.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Adapun jenis pelayanan, jumlah anggaran, target kinerja, realisasi kinerja dan sumber dana pada penerapan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 dapat dijelaskan melalui Tabel dibawah ini:

Tabel 2.201 Target dan Realisasi Kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Sumber Dana
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	1.172.753.540	83 unit	83 unit	100%	DAU
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah					

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, diolah

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.172.753.540,- atau 0,34% dari total anggaran SPM Tahun 2023. Anggaran tersebut dilaksanakan pada Program Pengembangan Perumahan atau pada Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Dari dua jenis layanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdapat 1 jenis pelayanan dasar yang tidak dilaksanakan yakni Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah. Jenis pelayanan dasar ini tidak dilaksanakan karena tidak adanya program pemerintah yang bersinggungan langsung dengan jenis pelayanan dasar ini. Sementara untuk realisasi capaian kinerja pada jenis layanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana telah mencapai target kinerja sebagaimana yang telah direncanakan sebanyak 83 unit rumah.

Dalam penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal. Adapun beberapa permasalahan sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan melalui Tabel di bawah ini.

Tabel 2.202 Permasalahan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

NO.	KATEGORI	PERMASALAHAN
1.	Pengumpulan Data	• Untuk relokasi sifatnya masih dalam tahap survei dan pengumpulan data-data. Jadi belum adanya DED untuk kebutuhan relokasi bencana.
2.	Penghitungan Kebutuhan	• Proses penghitungan kebutuhan berdasarkan laporan kejadian dari Desa dan BPBD, sehingga untuk total kebutuhan akan dihitung secara berkala. Untuk sementara data kejadian yang telah kami terima yaitu data kejadian bencana tahun 2022.
3.	Perencanaan dan Penganggaran	• Beberapa indikator belum bisa dilaksanakan, dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun 2023.
4.	Pelaksanaan	• Ada beberapa CPCL yang tersedia telah menerima bantuan stimulan dari provinsi, maka dari itu dinas harus mengganti dengan CPCL baru.

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, diolah

2.2.6.5 SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas dilaksanakan oleh 3 perangkat dan secara teknis penerapannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Adapun jenis pelayanan, jumlah anggaran, target kinerja, realisasi kinerja dan sumber dana pada penerapan SPM Bidang Perumahan dan Kwasan Pemukiman di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 dapat dijelaskan melalui Tabel berikut:

**Tabel 2.203 Target dan Realisasi Kinerja SPM Bidang Trantibumlinmas
Tahun 2023**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Sumber Dana
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	3.973.194.100	24	24	100%	DAU
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	499.632.000	254.660 orang	241.200 orang	94,71%	DAU
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	785.720.350	254.660 orang	206.500 orang	81,09%	DAU/BKK Jabar
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	198.222.000	12.101 orang	12.101 orang	100%	DAU
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	3.487.550.750	1.834.256 orang	1.758.600 orang	95,88%	PAD

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, diolah

Pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas secara garis besar diampu oleh 3 perangkat daerah dimana diantaranya ialah Satuan Polisi Pamongpraja pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 3.973.194.100,-, Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Program Penanggulangan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 1.483.574.350,-, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan

Penyelamatan Non Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 3.487.550.750,-. Secara keseluruhan total anggaran dari SPM Bidang Trantibumlinmas sebesar Rp. 8.944.319.200,- atau 2,60 dari total anggaran SPM Tahun 2023. Sementara untuk realisasi capaian kinerja SPM pada Satuan Polisi Pamongpraja yang mengampu satu jenis pelayanan dasar memiliki tingkat persentase sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengampu 3 jenis pelayanan dasar memiliki rata-rata tingkat persentase sebesar 91,93%. Terakhir realisasi capaian kinerja SPM pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang mengampu satu jenis pelayanan dasar memiliki tingkat persentase sebesar 100%. Adapun rincian kegiatan pada SPM Bidang Trantibumlinmas pada Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) daerah Kab/Kota;
 - 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.
- b. Program Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
 - 1) Pencegahan dan Kesiapsiagaan kebencanaan;
 - 2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- c. Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
 - 1) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Dalam penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal. Adapun beberapa permasalahan sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan melalui Tabel di bawah ini.

Tabel 2.204 Permasalahan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2023

NO.	KATEGORI	PERMASALAHAN
	Pengumpulan Data	• Data Pelaporan SPM di setiap bidang rentan tercecer dan hilang. • Belum updatenya dokumen kajian resiko bencana dimana sudah berakhir pada tahun 2021. • Banyak yang masih kebingungan dalam pengelolaan dan peyajian data-data dilapangan sesuai Permendagri 114 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran.

	Penghitungan Kebutuhan	• Perhitungan kebutuhan SPM di setiap bidang terkadang muncul kebutuhan yang mendadak diluar perhitungan sebelumnya. • Belum updatenya Dokumen Kajian Resiko Bencana dimana sudah berakhir pada tahun 2021. • Masih belum memenuhi standar sesuai dengan Permendagri 122 tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
	Perencanaan dan Penganggaran	• Perencanaan dan penganggaran terkadang berubah diakibatkan oleh rasionalisasi anggaran akibat terbatasnya anggaran yang ada. • Kurangnya data dukung sehingga dalam perencanaan dan penganggaran menjadi tidak efektif. • Pada Anggaran Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) pada Kegiatan Penegakan Perda/Perbup, Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada tidak direalisasikan karena terkendala pada Perdanya yang belum menegaskan secara rinci adanya proses tindak lanjut dari penegakan perda atau perkada berbentuk Yustisi dan Non Yustisi. • Pada anggaran Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS tidak terealisasi dikarenakan belum adanya Kesekretariatan dalam Pengembangan kapasitas dan karier PPNS, Jumlah PPNS di Kab. Bandung Barat pun sebanyak 11 orang.

Pelaksanaan	• Dengan luas wilayah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 165 Desa. Dalam Pelaksanaan Kegiatan di Bidang SPM urusan Gakda dan Trantibumlinmas hanya dilakukan di sebagian wilayah hal ini akibat kekurangan SDM dan Sarana Prasarana serta terbatasnya anggaran yang ada. • Kurangnya SDM dimana harus melayani 16 kecamatan dan 165 Desa. Saat ini BPBD memiliki personil 19 ASN dan 27 TKK. • Belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan.
Lain-lain	• Indikator SPM tidak mendorong/mendukung kinerja SATPOL PP sesuai tupoksi (Capaian SPM pelayanan ganti rugi atas dampak penegakan hukum Perda/Perkada tidak mencerminkan kinerja SATPOL PP) dan Target SPM Trantibumlinmas berupa warga Negara yang terlayani dampak tidak realistis, hanya mengukur pasca dari seluruh rangkaian upaya Satpol PP mewujudkan Trantibumlinmas melalui proses penegakan Perda/Perkada. • Terdapat Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau (DBCHT) tapi hanya untuk diperuntukan untuk proses Pemberantasan Rokok Ilegal tidak diperuntukan kegiatan pelayanan dasar lainnya.

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, diolah

2.2.6.6 SPM Bidang Sosial

Pelaksanaan SPM Bidang Sosial diampu oleh Dinas Sosial yang secara teknis pelaksanaan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial. Adapun jenis pelayanan, jumlah anggaran, target kinerja, realisasi kinerja dan sumber dana pada penerapan SPM Bidang Perumahan dan Kwasan Pemukiman Tahun 2023 dapat dijelaskan melalui Tabel berikut:

Tabel 2.205 Target dan Realisasi Kinerja SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Sumber Dana
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	72.046.000	67 orang	67 orang	100%	DAU
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	66.393.000	36 orang	34 orang	94,44%	DAU
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	19.545.000	84 orang	84 orang	100%	DAU
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	114.420.000	32 orang	30 orang	93,75%	DAU

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, diolah

Pelaksanaan SPM Bidang Sosial memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 968.815.000,- atau 0,28 dari total anggaran SPM Tahun 2023. Anggaran tersebut dilaksanakan pada Program Rehabilitasi Sosial atau pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Anggaran SPM Bidang Sosial dimaksudkan untuk mengintervensi 4 jenis pelayanan yang meliputi Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, dan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. Adapun realisasi capaian kinerja pada Dinas Sosial yang mengampu 4 jenis pelayanan dasar memiliki rata-rata tingkat capaian sebesar 97,05%.

Dalam penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal. Adapun beberapa permasalahan sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan melalui Tabel di bawah ini.

Tabel 2.206 Permasalahan SPM Bidang Sosial Tahun 2023

NO.	KATEGORI	PERMASALAHAN
1.	Pengumpulan Data	• Tidak ada anggaran untuk pengumpulan data serta verifikasi dan validasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2.	Penghitungan Kebutuhan	• Anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih minim dan terbatas sehingga

		Penghitungan Kebutuhan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. • Masih banyak mutu layanan Barang/Jasa/SDM belum terpenuhi diantaranya: - Layanan data dan pengaduan; - Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K); - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial; - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas sosial, anak terlantar, disabilitas lanjut usia, terlantar, Gelandangan dan Pengemis; - Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan; - Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan; - Pemberian pelayanan penelusuran keluarga.
3.	Perencanaan dan Penganggaran	• Dalam Anggaran Layanan dasar Urusan Sosial sebagian besar menggunakan anggaran APBD, ada juga bantuan dari Kemensos RI berupa bantuan permakanan dan alat bantu tetapi bantuan tersebut merupakan pengadaan dari Kemensos RI yang langsung diberikan kepada masyarakat sehingga Dinas Sosial Kabupaten tidak mengetahui besaran APBN yang direalisasikan sebagai dana bantuan. Sehingga pengampu SPM tidak memasukan besaran APBN.

4.	Pelaksanaan	Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan SPM di Kabupaten Bandung Barat belum dilaksanakan secara maksimal, dan sebagian besar akan dilaksanakan di Triwulan 3 dan Triwulan 4.

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, diolah

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah yang mana faktor- faktor tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah diperlukan sebagai dasar pijakan dalam perencanaan tahun 2025 mendatang.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2023. Hasil evaluasi tersebut menjadi rujukan proses identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat yang harus menjadi perhatian tahun 2025, diantaranya: 1) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, 2) Belum pulihnya kondisi perekonomian pasca dampak pandemi Covid-19, 3) Masih tingginya tingkat kemiskinan dan angka pengangguran, 4) Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah, 5) Kerusakan dan pencemaran lingkungan, 6) Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat, 7) Kondusifitas wilayah serta kehidupan sosial masyarakat dan berdemokrasi. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah pada subbab aspek demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya terhadap target akhir RPJMD, maka permasalahan pembangunan yang harus menjadi perhatian pada tahun 2025, diantaranya:

1. Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan, keberhasilan pembangunan manusia dapat terwujud apabila manusia



berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Pengukuran keberhasilan capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Capaian pembangunan manusia Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun terakhir termasuk dalam kategori “kelompok sedang” dengan capaian di tahun 2023 sebesar 70,33 poin, masih berada jauh di posisi ke 21 dari 27 Kab/Kota di Jawa Barat yang rata-rata capaian IPM nya berkisar 72 poin. Masih kurangnya kualitas SDM, bisa dilihat dari dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Berdasarkan data pada tahun 2023, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Bandung Barat walaupun telah mencapai 73,10 tahun. Tetapi capaian kualitas umur panjang ini masih belum dibarengi dengan kualitas hidup sehat yang ditandai dengan Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan ketercapaiannya masih 87,71 persen, ketersediaan tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan capaiannya baru 70%. Dalam hal Intervensi Gizi Spesifik dalam rangka menurunkan prevalensi stunting, masih belum optimal hal ini dilihat dari masih tingginya angka stunting di Kabupaten Bandung Barat dengan capaian s.d tahun 2023 prevalensi stunting sebesar 25,10 persen.

Dari sisi pendidikan, penduduk Bandung Barat yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata menempuh 8,23 tahun masa sekolah atau berada di kelas VIII. Selain itu, rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diperkirakan dapat mengenyam pendidikan hingga 11,91 tahun atau setara dengan Kelas XI atau sampai SMA kelas 2. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2018 hingga 2023. Secara rata-rata, harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 0,01 persen per tahun selama tahun 2018-2023. Sementara itu, rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 0,01 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama.

Walau HLS dan RLS menunjukkan peningkatan tetapi peningkatannya lambat, sehingga sector pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Sedangkan bila dilihat dari kualitas pembangunan dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat berdasarkan gender yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Gender, capaian IPG Kabupaten Bandung Barat s.d tahun 2023 sebesar 80,37 dengan indeks



pemberdayaan gender sebesar 66,97 poin. Pelaksanaan pengarusutamaan gender yang belum optimal dan kepekaan perencanaan terkait isu gender masih rendah; strategi pemberdayaan belum sensitif pada isu-isu inklusif gender, perempuan belum mampu memahami dan mengaspirasikan isu-isu sensitif gender.

2. Melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2023, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2023 mengalami pelambatan sebesar 0,34 bila dibanding dengan realisasi tahun 2022 yang mencapai 5,34 persen. Capaian LPE KBB tahun 2023 samadengan capaian LPE Provinsi Jawa Barat yang berada di angka 5,00 persen. Pelambatan LPE tahun 2023 ini tercermin dari melambatnya beberapa sektor unggulan seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang melambat sebesar 2,52 persen dari capaian tahun 2022 sebesar 4,11 persen menjadi 1,59 persen di tahun 2023. Begitu pula dengan pertumbuhan pada sektor industri pengolahan mengalami pelambatan sebesar 1,13 persen dari capaian tahun 2022 sebesar 6,43 persen menjadi 5,30 persen di tahun 2023.

Capaian Kinerja untuk beberapa sektor yang biasanya berkontribusi terhadap PAD dan perekonomian di tahun 2023 mengalami penurunan seperti: jumlah kunjungan wisatawan yang menurun jumlahnya di tahun 2023 sebanyak 215.793 orang dari capaian tahun 2022 sebanyak 504.5679 orang menjadi 4.829.886 orang di tahun 2023. Masih rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap penciptaan nilai tambah ekonomi merupakan salah satu permasalahan hal ini disebabkan masih kurangnya aksesibilitas dalam proses pemasaran produk dan permodalan koperasi.

3. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan angka pengangguran

Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, Hal ini ditandai dengan persentase penduduk miskin sampai dengan tahun 2023 sebesar 10,52% dan tingkat pengangguran sebesar 8,81%. Penurunan angka kemiskinan ini masih terbilang tinggi masih berada pada skala 2 digit bila dibandingkan dengan capaian Jawa Barat sebesar 7,62 persen bahkan di Kab/Kota di Jawa Barat angka kemiskinan Kab. Bandung Barat masih berada pada peringkat 22 dari 27 Kab/Kota. Hal ini merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah di tahun berikutnya. Dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Angka kemiskinan yang masih tinggi, hal ini yang perlu diberikan perhatian terhadap golongan masyarakat yang rawan miskin dan berpotensi kembali miskin karena golongan



inilah yang rentan menjadi miskin akibat adanya perubahan kondisi sosial dan kebijakan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan dasar serta pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan.

Selain itu penting diperlukan akses pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada karakter, kapasitas serta potensi penerima manfaat. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kondisi Tahun 2019 sebesar 1,54 tetap pada angka 1,54 pada keadaan Tahun 2023. Kondisi nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi Garis Kemiskinan, artinya kondisi kemiskinan semakin memburuk. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Bandung Barat mencapai 0,34 di tahun 2023. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin dibandingkan pada Tahun 2022 (0,31). Ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung semakin menyempit. Kenaikan Indeks Keparahannya Kemiskinan ini menggambarkan ketimpangan kemiskinan yang semakin lebar. Tentunya kondisi ketimpangan ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Gambaran ini menunjukkan adanya segmen masyarakat yang masih belum tersentuh bantuan yang diberikan pemerintah.

Permasalahan kemiskinan ada kaitannya dengan permasalahan ketenagakerjaan, tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik jika pertumbuhan angkatan kerja yang terserap/terakomodasi oleh lapangan kerja dapat mengimbangi pengangguran yang terjadi. Permasalahan ketenagakerjaan juga berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, kondisi angkatan kerja Kab. Bandung Barat pun semakin meningkat dari tahun 2019 sebanyak 766.961 jiwa menjadi 947.124 jiwa di tahun 2023, tetapi bila tidak diimbangi dengan penyerapan kesempatan kerja maka akan menyebabkan pengangguran, Kondisi ini menandakan laju pertumbuhan angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat lebih cepat dibanding pertumbuhan lapangan kerja, sehingga angkatan kerja yang tersedia tidak seluruhnya terserap pasar kerja. Jika persentase kesempatan kerja semakin tinggi maka penyerapan terhadap angkatan kerja akan semakin baik, atau pemenuhan dan perluasan kesempatan kerja bagi daerah yang bersangkutan dapat dikategorikan berhasil. Sebaliknya jika persentase kesempatan kerja itu rendah maka pengangguran akan meningkat. Begitu pun pula kondisi tingkat pengangguran di Kab. Bandung Barat masih tinggi bila dibandingkan dengan capaian TPT Jawa Barat dan nasional.

4. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup

Alasan yang mendasari infrastruktur wilayah perlu ditingkatkan adalah kualitas infrastruktur jalan masih kurang, kualitas dan kuantitas pemenuhan irigasi masih kurang, masih diperlukan peningkatan kualitas lingkungan hidup, belum optimalnya dukungan konektivitas antar wilayah, serta belum optimalnya penyediaan infrastruktur digital. Hal ini ditandai dengan capaian beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan, seperti: Indeks Kesulitan Geografis, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana, Persentase Rumah Layak Huni, serta permasalahan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.

Dalam melaksanakan pembangunan di desa, tingkat kesulitan geografis desa dalam menjangkau infrastruktur ketersediaan akan pelayanan dasar, pembangunan, serta transportasi masih menjadi kendala. Desa dengan tingkat aksesibilitas tinggi maka desa dengan mudah mendorong kegiatan perekonomian masyarakat. Sedangkan, desa dengan tingkat aksesibilitas rendah artinya desa tersebut memiliki kesulitan dalam mobilitas dalam menjalankan aktivitasnya. Berdasarkan hasil perhitungan, di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 terdiri dari 165 desa, dengan rentang IKG berkisar antara 7,25 sampai dengan 41,95, ini menandakan masih terdapat beberapa desa dengan kesulitan tinggi dalam hal aksesibilitas terhadap infrastruktur kebutuhan dasar. Sehingga desa yang memiliki Indeks Kesulitan Geografis yang tinggi perlu diperhatikan infrastruktur serta pelayanan dasarnya oleh pemerintah, agar pembangunan infrastruktur di setiap wilayah dapat merata.

Pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak, akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah ketersediaan fasilitas tempat buang air besar dan pemenuhan akan kebutuhan air minum. Rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat 88,27% telah memiliki fasilitas sendiri, sementara 11,73% belum memiliki fasilitas sendiri atau menggunakan fasilitas secara bersama, umum atau bahkan tidak memiliki fasilitas. Sedangkan terkait ketersediaan air minum, persentase rumah tangga yang menggunakan air tidak bersih untuk memasak/mandi/cuci/dll adalah 10,68% untuk golongan pengeluaran terendah, 6,02% untuk golongan pengeluaran menengah, dan nyaris tidak ada 0,07% untuk golongan pengeluaran atas. Bila dilihat dari kualitas lingkungan hidup, capaian Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun terakhir masih rendah pada kisaran 45-60 persen.



Hal ini disebabkan menurunnya kualitas air, udara dan tanah karena adanya pembangunan yang kurang memperhatikan dampak terhadap lingkungan ini pun menyebabkan potensi bencana akibat kerusakan lingkungan dengan indikator capaian indeks ketahanan daerah masih rendah dengan katagori “sedang”.

5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public belum berjalan efektif dan optimal

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Nilai IRB Kab. Bandung Barat pada tahun 2019 masih pada kategori CC (CUKUP) dengan nilai 56,79 poin sampai dengan tahun 2023 Nilai IRB meningkat pada katagori BB dengan nilai sebesar 72,27. Salah satu fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Capaian indikator SAKIP Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan walaupun masih pada katagori “B” tetapi secara nilai mutu pada Tahun 2019 sebesar 66,00 mengalami kenaikan s.d tahun 2023 menjadi sebesar 68,59.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kab. Bandung Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, perlu ditingkatkannya profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, belum optimalnya penerapan inovasi daerah dalam rangka pelayanan publik, Sistem akuntansi berbasis akrual yang masih terbatas sehingga pelaporan pemerintah daerah tidak optimal; masih perlunya peningkatan kompetensi dan pengelolaan penilaian kinerja aparatur daerah; belum optimalnya pengawasan pemerintah daerah belum optimalnya layanan informasi daerah yang salah satunya berupa sosialisasi produk hukum daerah serta tingkat kepuasan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan disusun berdasarkan hasil evaluasi yang tercantum dalam sub bab evaluasi capaian RKPD Tahun 2023 dan gambaran umum kondisi daerah. Berikut permasalahan pembangunan yang disusun menurut bidang urusan.

2.3.2.1 Permasalahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Urusan Pendidikan

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Masih rendah dan lambatnya pertumbuhan Harapan Lama Sekolah dan rata rata lama sekolah dengan peningkatan hanya sebesar 0,01 persen per tahun.
- b. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP
- c. Masih terdapat anak usia 13- 15 tahun yang melanjutkan sekolah diluar kota atau lebih memilih bekerja atau tidak sekolah;
- d. Belum optimalnya Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs baru sebesar 96%
- e. Belum optimalnya Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA sebesar 85%
- f. Masih rendahnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- g. Masih terdapat ruang kelas SD/SMP dalam kondisi rusak sedang dan rusak ringan
- h. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan yang berkualitas masih belum merata;
- i. Belum optimalnya penguatan pendidikan karakter pada anak
- j. Masih perlu ditingkatkannya kualifikasi dan kompetensi guru.

2) Urusan Kesehatan

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan baru mencapai 76,17%
- b. Akses layanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata
- c. Belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi
- d. Masih ditemukannya kematian ibu (60/10.000 KH) dan kematian bayi (0,2/1.000 KH);
- e. Masih ditemukannya balita gizi buruk (0,29%)
- f. Prevelansi stunting masih tinggi sebesar 25,10%
- g. Masih terdapat ibu hamil dan remaja putri yang menderita anemia

- 
- h. Masih ditemukan golongan pengeluaran bawah ibu yang melahirkan bukan di fasilitas kesehatan (19,41%) dan yang belum ditolong tenaga kesehatan sebanyak (13,38%).
 - i. Masih tingginya angka kesakitan baik menular maupun tidak menular
 - j. Masih kurangnya Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan capaian 70%
 - k. Jumlah tenaga medis dan non medis masih belum sesuai standar
 - l. Fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi Standar baru 90%
 - m. Belum optimalnya gerakan PHBS dan masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat
 - n. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan baik FKTP maupun rujukan untuk melayani 1,8 juta jiwa penduduk Kab. Bandung Barat.
 - o. Masih rendahnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan melalui Desa Siaga Aktif baru 92 desa dari 165 desa yang ada.
 - p. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Belum optimalnya pengelolaan sanitasi dan air limbah domestic (61,48%)
 - b. Belum meratanya layanan akses terhadap air minum layak dan aman dengan capaian 68,50%
 - c. Masih rendahnya persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik;
 - d. Pertumbuhan kendaraan tidak diikuti dengan penambahan ruas jalan
 - e. Masih rendahnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan kondisi 71,69% jalan baik
 - f. Jalan poros desa dalam kondisi baik masih belum memadai;
 - g. Masih rendahnya presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (65%);
 - h. Masih kurangnya ketersediaan air irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian.
 - i. Masih kurangnya ketersediaan alat berat/peralatan kebinamargaan.
 - j. Belum teroptimalisasi pemanfaatan sumber mata air secara maksimal dan pembebasan lahan yang belum merata.
- 

- k. Dengan kondisi indeks kesulitan geografis desa berkisar antara 7,25 sampai dengan 41,95, ini menandakan masih terdapat beberapa desa dengan kesulitan tinggi dalam hal aksesibilitas terhadap infrastruktur kebutuhan dasar
- l. Masih terdapat desa dengan indeks kesulitan geografis
- m. Masih kurang tersedianya lahan untuk proses pembangunan fasilitas publik.
- n. Masih rendahnya Presentase bangunan publik yang memadai dengan capaian baru 50%
- o. Masih rendahnya kesesuaian dalam rangka pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang berlaku

4) Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Kebutuhan akan tempat tinggal terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk, dengan kondisi eksisting tahun 2023 sebanyak 82.692 unit rumah diperkirakan pada tahun 2025 ketika jumlah penduduk mencapai 1.907.820 jiwa, kebutuhan rumah tinggal mencapai 381.565 unit. Perlu adanya respon akan peningkatan kebutuhan tempat tinggal dengan pelaksanaan program yang memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan perumahan
- b. Belum optimalnya penyediaan perumahan layak huni yang terjangkau
- c. Masih banyaknya Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan permukiman di wilayah kabupaten Bandung Barat yang tersebar di 165 Desa yang belum tertangani antara lain Pembangunan Jalan Setapak (jalan Gang), Pembangunan Jalan Lingkungan, Pembangunan Drainase, Pembangunan TPT, dan Pembangunan Penerangan Jalan;
- d. Belum terciptanya Rekapitulasi dan administrasi pencatatan lahan pemakaman atau TPU yang baik serta pengelolaan TPU yang belum maksimal.
- e. Belum optimalnya pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni dalam rangka Pemenuhan kebutuhan rumah/tempat tinggal bagi keluarga tidak mampu
- f. Masih belum optimalnya penataan areal wilayah kumuh di bawah 10 Ha

5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

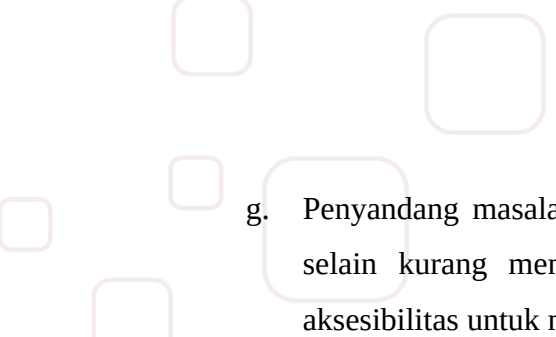
- a. Masih kurangnya SDM baik secara kuantitas dan kualitas dalam rangka pelaksanaan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat

- 
- b. Masih terdapat ancaman konflik social yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban umum dimasyarakat
 - c. Belum optimalnya peranan Satlinmas dalam pencegahan dan penanggulangan gangguan trantibum
 - d. Masih rendahnaya ketaataan masyarakat dan pelaku usaha dalam mematuhi Peraturan Daerah yang berlaku
 - e. Adanya aduan yang tidak tertangani menengani IMB, karena adanya PP 16 tahun 2021 yang menyebutkan tidak adanya kewenangan pemerintahan daerah mengenai sanksi dan belum adanya penyesuaian Perda terkait tersebut;
 - f. Masih kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran
 - g. Belum optimalnya antisipasi mitigasi bencana
 - h. Belum optimalnya peran relawan bencana dalam mitigasi dan penanganan pasca bencana
 - i. Perlunya kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait dalam menghadapi terjadinya bencana dan penanggulangan dampak dan akibat bencana terhadap korban maupun infrastruktur yang terkena bencana;
 - j. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah pada aspek-aspek pengurangan resiko bencana dan mematuhi rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan;
 - k. Perlunya keterlibatan akademisi dalam meneliti, mengkaji dan menganalisis potensi Bencana, agar dapat mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana.

6) Urusan Sosial

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Cakupan perlindungan sosial bagi individu dan/atau kelompok rentan masih perlu ditingkatkan
- b. Pemberdayaan dan bantuan sosial masih belum tepat sasaran
- c. Perlu tersedianya satu data terpadu yang up to date dalam pengelolaan DTKS
- d. Belum optimalnya penanganan PPKS yang tertangani sebesar 52,15 persen, s.d tahun 2023 realisasi capaian cenderung menurun pada tahun 2023 sebesar 48,86 persen.
- e. Belum optimalnya pemberdayaan organisasi/lembaga sosial (Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Penyuluh Sosial
- f. Penyandang masalah kesejahteraan sosial pada umumnya kurang memiliki kemampuan untuk menggali potensi yang ada pada diri mereka;

- 
- 
- g. Penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya Fakir Miskin pada umumnya selain kurang memiliki motivasi untuk berusaha mereka juga tidak memiliki aksesibilitas untuk menjangkau sistem sumber daya yang ada;
 - h. Masih banyak Penyandang Disabilitas yang menggantungkan hidupnya kepada pihak lain baik secara ekonomi maupun sosial;
 - i. Penyandang masalah kesejahteraan sosial eks Penyandang Penyakit Sosial pada umumnya mereka sulit kembali ke masyarakat dan hidup sebagaimana warga masyarakat pada umumnya.
 - j. Belum semuanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial tertangani.

2.3.2.2 Permasalahan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Walaupun mengalami penurunan tetapi angka pengangguran di Kab. Bandung Barat masih tinggi (8,11%)
- b. Perluasan akses dan kesempatan kerja belum optimal
- c. Belum optimalnya besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
- d. Kualitas SDM tenaga kerja masih rendah masih didominasi dengan pendidikan SMA ke bawah
- e. Lapangan pekerjaan semakin terbatas;
- f. Rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja;
- g. Minimnya perlindungan hukum terhadap kasus ketenagakerjaan;
- h. Kualifikasi/ jurusan lulusan pendidikan SMK belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- i. Masih kurangnya kemampuan angkatan kerja untuk berusaha mandiri

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dapat menjadi indikator untuk mengetahui peran aktif perempuan dengan capaian TPAK perempuan sebesar 40,20%.

- 
- b. Pembangunan dan pemberdayaan gender belum optimal dengan capaian Indeks Pembangunan Gender sebesar 80,37 poin dan Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 66,97 poin
 - c. Masih rendahnya keluarga yang memiliki kesadaran dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak (42%)
 - d. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Bandung Barat
 - e. Permasalahan sosial dan ekonomi menyebabkan ketimpangan gender sehingga perempuan menjadi lebih rentan.
 - f. Belum optimalnya peran keluarga dalam pembentukan karakter anak
 - g. Masih belum optimalnya peran aktif perempuan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan ekonomi

3) Urusan Pangan

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Sampai dengan tahun 2023 masih terdapat 43 desa yang rentan rawan pangan.
- b. Tingkat Konsumsi pangan yang kurang beragam.
- c. Masih kurangnya mencukupinya produksi pangan dengan indikator Skore Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan sebesar 77,30%
- d. Pengawasan distribusi pangan yang belum optimal.
- e. Masih rendahnya cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

4) Urusan Pertanahan

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pertanahan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Belum terealisasinya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kosong
- b. Belum optimalnya penyelesaian kasus konflik pertanahan
- c. Pengelolaan asset tanah belum didukung dengan data dan informasi yang jelas dan akurat yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan

5) Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup dengan capaian sebesar 55,79%
- b. Berdasarkan hasil uji pemantauan IPAL industri, dari 17 yang dipantau ternyata hanya 10 IPAL industri yang memenuhi baku mutu.

- 
- c. Masih rendahnya kualitas air sungai dan udara
 - d. Belum optimalnya pengelolaan limbah LB3 sesuai peraturan, dengan bertambahnya usaha dan atau kegiatan yang mengelola limbah LB3 belum dibarengi dengan pengawasan dan monitoring bila terjadi pelanggaran terhadap perda yang berlaku
 - e. Cakupan luasan taman dan RTH masih belum sesuai aturan
 - f. Masih terdapat lahan kritis yang belum terkelola
 - g. Belum optimalnya pengelolaan sampah dari hulu dan hilir dengan capaian kapasitas sampah yang terangkut ke TPA menurun pada tahun 2022 sebanyak 55.667 ton menjadi 50.514 ton di tahun 2023, hal tersebut untuk menjadi perhatian Pemkab Bandung Barat (DLH) dalam memberikan pelayanan pengelolaan sampah di tahun 2025
 - h. Permasalahan terkait persampahan masih kurangnya armada yang dimiliki dan terbatasnya SDM dalam pengelolaan sampah dibandingkan dengan luas area pelayanan.
 - i. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan memilih sampah yang dihasilkan rumah tangga
 - j. Masih adanya usaha dan atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH

6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Masih perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Dengan capaian persentase penduduk memiliki KTP elektronik sdan Kartu Keluarga sebesar 98,7 persen di tahun 2023, ini berarti masih terdapat 11,3 persen penduduk Kab. bandung Barat yang belum memiliki administrasi kependudukan
- c. Sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan kurang memadai dikarenakan banyak nya peralatan dan perlengkapan pelayanan yang sudah lama dan sering rusak terutama Server dan Alat Perekaman KTP-EL.
- d. Data yang terecord di data base itu banyak data sampah yang terus di gunakan oleh penduduk dan tetap dilayani sehingga perhitungan capaian kinerja atau berbasis data konsolidasi bersih akan tidak sinkron dengan pelayanan sebenarnya.
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan anak dengan Persentase Anak Ber KIA sebesar 25,8%

- f. Masih rendahnya Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan (57%)

7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Pergantian pengurus BUMDes apabila terpilihnya Kepala Desa baru.
- b. Usaha yang dilakukan oleh BUMDes tidak melalui proses perencanaan dan kajian sehingga resiko kegagalan usaha sangat besar.
- c. Masih sedikitnya BUMDes yang menghasilkan PADes.
- d. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa dalam pembangunan sarana prasarana desa.
- e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana desa dan dalam mengikuti lomba desa.
- f. Terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional;
- g. Belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif dan belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas.

8) Urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Arus penduduk masuk ke Kabupaten Bandung Barat yang besar pada umumnya Pasangan Usia Subur (PUS), perlu intervensi langsung dan pemberian informasi dan pelayanan KB yang memadai;
- b. Sebagai pengaruh dari keberhasilan Program KB di masa lampau, persentase penduduk usia reproduksi saat ini relatif tinggi. Kondisi ini menuntut konsistensi dan pemerataan akses terhadap pelayanan KB.
- c. Belum optimalnya Petugas KB di lini lapangan hal ini ditandai belum semua desa memiliki rasio satu PKB satu desa sehingga belum maksimalnya pembinaan KIE.
- d. Penggerakan yang kurang tepat sasaran dalam Penggunaan metode MKJP (masih didominasi oleh peserta PUS tua dan sudah memiliki anak lebih dari 2), sehingga jumlah peserta KB MKJP belum dapat mendorong untuk penurunan TFR.

9) Urusan Perhubungan

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Berdasarkan data penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa trayek yang sudah tidak beroperasi, sehingga terdapat ketidakcocokan antara data eksisting



dengan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 550/Kep.5-Dishub/2012 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

- b. Adanya kebijakan Pemerintah terkait Over Dimension Over Loading (ODOL) sehingga tidak menjalankan uji berkala.
- c. Adanya peraturan Daerah terkait adanya pembatasan angkutan penumpang sehingga kendaraan yang melewati batas usia kendaraan tidak dapat melaksanakan uji KIR atau uji keliling.
- d. Pendapatan Asli Daerah seperti Retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak mencapai target disebabkan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor direncanakan memiliki Alat Uji Kendaraan bermotor sebanyak 2 line, tetapi hanya terealisasi 1 line.

10) Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Belum seluruh Perangkat Daerah memahami dan mematuhi Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan regulasi lainnya di Pemkab Bandung Barat.
- b. Dalam rangka implementasi layanan aplikasi, terutama layanan perizinan online, aplikasi e-presensi (absensi) dan e-kinerja diperlukan spesifikasi server yang mencukupi. dalam hal ini server yang dimiliki oleh Diskominfo belum mendukung untuk implementasi aplikasi dengan baik.
- c. Ruang server yang belum terstandarisasi internasional dan belum tersedianya back up plan Disaster Recovery Center (DRC).
- d. Tidak adanya anggaran peningkatan SDM melalui pelatihan dan sertifikasi di bidang Teknologi Informasi.
- e. Masih kurangnya perangkat pendukung jaringan internet dikarenakan usia perangkat yang ada saat ini sudah tidak layak, perangkat pendukung jaringan internet ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan kepada pengguna.
- f. Belum terkoreksinya seluruh media yang bekerjasama dengan organisasi KBB dan Belum terkoordinasinya pemberitaan dengan perangkat daerah

11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Koperasi

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- 
- a. Terbatasnya Sarana, prasarana dan akses permodalan dalam memfasilitasi para pelaku usaha umkm dan pengawasan koperasi;
 - b. Kondisi sumber daya manusia yang terbatas baik dari kuantitas maupun kapasitas yang menyebabkan pengembangan koperasi yang cenderung stagnan dan sulit untuk mencapai koperasi sehat..
 - c. Masih rendahnya akses produk-produk UMKM Bandung Barat kepada pasar;
 - d. Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal;
 - e. Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang;
 - f. Kualitas SDM koperasi dan UMKM, jaringan pemasaran, teknologi tepat guna yang belum optimal;
 - g. Belum adanya database UMKM yang telah diperbaharui

12) Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Sinergitas antar lembaga dalam proses pelayanan perizinan belum optimal.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi perizinan, masih ada pola pikir bahwa melengkapi/tertib izin itu adalah kebutuhan belum merupakan suatu kewajiban.
- c. Rendahnya pelaporan perusahaan dalam menyampaikan LKPM.
- d. Belum tersedianya Detail Engineering Design (DED) terhadap potensi unggulan daerah yang akan dipromosikan.
- e. Belum meratanya penyebaran infrastuktur yang mendukung pengembangan investasi.

13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Masih rendahnya layanan kepemudaan dengan capaian hanya 7,83 persen di tahun 2022
- b. belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan
- c. Belum optimalnya pemberdayaan pemuda pada organisasi kepemudaan
- d. Masih tingginya angka pengangguran pada usia pemuda padahal pemuda adalah penduduk yang berusia 16 -30 tahun yang merupakan termasuk usia produkti
- e. Pembinaan dan pengembangan olahraga masih sangat tergantung kepada ketersediaan melalui APBD

- 
- f. Belum adanya prasarana olahraga berupa gelanggang/gedung/lapang olahraga/Gedung Diklat olahraga sebagai pusat aktifitas masyarakat maupun atlet dalam penyelenggaraan olahraga
 - g. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan aktifitas olahraga yang dipengaruhi oleh kurang tersedianya sarana dan prasarana serta ruang terbuka untuk melakukan kegiatan berolahraga

14) Urusan Statistik

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Dengan telah ditetapkannya Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, terdapat beberapa kendala terkait tata kelola data di Kab. Bandung Barat, diantaranya:
 - Bahwa Data statistik yang dikumpulkan harus sesuai dengan prinsip SDI terkait data harus memenuhi standar data, harus memiliki metadata, harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data dan harus menggunakan Kode Referensi;
 - Belum adanya penentuan Data Prioritas yaitu Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data;
 - Bahwa sesuai Perpres 39 tahun 2019 bahwa Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
- b. Dalam rangka integrasi dan publikasi data masih secara manual belum menggunakan aplikasi yang terintegrasi

15) Urusan Persandian

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan persandian di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan keamanan audit, pertimbangan kelayakan keamanan dalam pembangunan infrastruktur seperti pusat data nasional, sistem jaringan pemerintah, dan badan penghubung layanan pemerintah.
- b. Masih rendahnya pengetahuan aparatur sipil perangkat daerah di lingkup Pemkab Bandung Barat tentang keamanan informasi.

16) Urusan Kebudayaan

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Masih belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi;
- b. Memudarnya semangat masyarakat untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal;
- c. Peninggalan warisan budaya saat ini sudah semakin terancam keberadaannya;
- d. Belum tersedianya gedung kesenian representatif untuk pementasan;
- e. Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku seni budaya;
- f. Pelaksanaan event seni budaya masih terbatas;
- g. Pelestarian situs cagar budaya belum optimal

17) Urusan Perpustakaan

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Kurangnya minat baca masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
- b. Belum adanya gedung perpustakaan yang representatif sebagai gedung perpustakaan umum daerah dengan lokasi yang mudah di akses terutama oleh masyarakat KBB.
- c. Kurangnya koleksi bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka/ pengunjung perpustakaan.
- d. Penurunan pengunjung perpustakaan akibat perubahan pola dengan adanya medsos.
- e. Kurang efektifnya pengelolaan perpustakaan daerah sebagai pusat referensi daerah.

18) Urusan Kearsipan

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan kearsipan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Masih rendahnya pengelolaan kearsipan di Perangkat daerah dengan capaian 31%.
- b. Masih kurangnya sumber daya manusia seperti tenaga arsiparis, tenaga teknis dan tenaga ahli, baik itu di lingkungan SKPD, kecamatan, desa dan sekolah.

2.3.2.3 Permasalahan Urusan Pilihan

1) Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Produksi ikan, baik ikan hias, ikan konsumsi dan benih ikan belum optimal;
- b. Turunnya daya beli masyarakat terhadap bahan pangan asal hewan khususnya ikan;
- c. Tingginya harga pakan yang mempengaruhi biaya produksi baik di sektor perikanan, sehingga pendapatan pembudidaya ikan dan peternak masih rendah
- d. Pemasaran produksi perikanan masih kurang.

2) **Urusan Pariwisata**

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pariwisata di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Kurang memadainya akses menuju destinasi wisata di wilayah Kab. Bandung Barat;
- b. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata unggulan yang telah ada, dan kurangnya pengembangan potensi wisata sebagai destinasi wisata baru;
- c. Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan sentra kerajinan;
- d. Masih rendahnya daya saing pelaku usaha ekonomi kreatif
- e. Belum efektifnya kegiatan promosi pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif
- f. Masih kurangnya daya saing pelaku usaha dan pendukung pariwisata

3) **Urusan Pertanian**

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pertanian di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Kurangnya penerapan teknologi pertanian oleh petani;
- b. Berkurangnya hasil usaha pertanian dan peternakan;
- c. Masih tingginya gangguan hama/penyakit tanaman yang menyebabkan berkurangnya tingkat produksi pertanian;
- d. Makin berkurangnya luas lahan pertanian produktif;
- e. Berkurangnya Minat usaha tani dan ternak;
- f. Penyampaian informasi mengenai pertanian dan peternakan kepada masyarakat Belum Optimal;
- g. Relatif rendahnya Produktivitas ternak;
- h. Tempat pemotongan hewan ternak/unggas yang berada di bawah standar ketentuan kesmavet;
- i. Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah belum tersedia;
- j. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang sulit karena ketersediaan lahan tanam dan kualitas HPT yang belum memenuhi standar gizi yang di butuhkan oleh ternak;
- k. Penyakit pada hewan/ternak dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan kesehatan yang cukup besar bagi peternak khususnya dan masyarakat Bandung Barat. Karena banyak penyakit hewan/ternak yang tidak hanya menyerang hewan/ternak tetapi juga dapat menular kepada manusia. Kondisi peternakan di Bandung Barat yang sebagian besarnya merupakan peternakan rakyat akan sangat rentan dengan ancaman penyakit hewan menular strategis dan zoonosis strategis.

- 
- l. letak geografis Bandung Barat yang sangat strategis, menyebabkan tingginya lalu lintas hewan/ternak yang dapat menimbulkan rentannya perpindahan penyakit;
 - m. Minimnya sarana dan prasarana serta SDM kesehatan hewan walaupun merupakan kendala klasik namun tetap masih menjadi faktor kurangnya pelayanan kesehatan hewan.
 - n. Akses ke lokasi kelompok tani kurang baik dan kondisi musim penghujan menyulitkan pengiriman barang ke lokasi.

4) Urusan Perdagangan

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan perdagangan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Perlu dioptimalkan pengamanan, penguatan dan akses pada pasar tradisional agar mendukung produktivitas.
- b. Kurangnya jaringan pemasaran, pemberian fasilitas permodalan, kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen sehingga menjadi lambatnya perkembangan perdagangan.
- c. Belum optimalnya pengembangan sistem distribusi perdagangan yang optimal.
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat penggunaan produk dalam negeri yang dapat menguntungkan masyarakat lokal.

5) Urusan Perindustrian

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan perindustrian di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Belum tersedianya *Grand Planning* penataan kawasan industri di Kabupaten Bandung Barat.
- b. Perlu dilaksanakan kajian secara komprehensif mengenai dampak negatif hasil proses pengelolaan industri agar bisa di selesaikan secara menyeluruh dan menyelesaikan masalah hasil produksi pertanian dan sektor primer lainnya;
- c. Masih kurangnya Kontribusi keterkaitan industri besar yang ada di Bandung Barat dengan IKM setempat;
- d. Belum optimalnya jasa pelayanan/rekomendasi untuk pemberian lisensi terhadap produk IKM (seperti HAKI, Hak Cipta, Label Halal);
- e. Belum optimalnya pemasaran produk IKM.

6) Urusan Transmigrasi

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan transmigrasi di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya: Permasalahan urusan transmigrasi adalah transmigrasi regional



dari Kabupaten Bandung Barat selama kurang waktu 3 tahun (2018-2020) tidak memberangkatan transmigran dari kabupaten Bandung Barat, dikarenakan tidak memperoleh kuota dari pemerintah pusat.

2.3.2.4 Permasalahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Unsur Perencanaan

Permasalahan pembangunan fungsi penunjang urusan Pemda unsur perencanaan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Belum optimalnya sinergitas perencanaan terhadap usulan kegiatan pada renja perangkat daerah dan usulan hasil Musrenbang Kecamatan.
- b. Masih belum optimalnya keterlibatan peran masyarakat dalam proses-proses penyusunan perencanaan
- c. Belum optimalnya Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD

2) Unsur Keuangan

Permasalahan pembangunan fungsi penunjang urusan Pemda unsur keuangan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Belum terintegrasinya SIPD dengan sistem pelaporan keuangan.
- b. Menu tampilan dan rumusan perhitungan nilai perhitungan air (NPA) belum sempurna.
- c. Penatausahaan pendapatan dan piutang pajak daerah (non PBB) dan penatausahaan PBB-2 belum memadai.
- d. Penatausahaan dan pengelolaan asset tetap dan aset lainnya belum memadai.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi elektronik pelayanan secara Online;
- f. Belum optimalnya penggunaan Aplikasi Pengelolaan pendapatan daerah

3) Unsur Kepegawaian

Permasalahan pembangunan fungsi penunjang urusan Pemda unsur kepegawaian di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Assesement belum dilaksanakan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- b. Peningkatan program dan strategi pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai belum optimal.
- c. Belum membangun talent pool dan menyusun rencana suksesi.

- d. Pemenuhan Kebutuhan Pegawai yang sesuai dengan Peta Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan belum optimal.
- e. Sistem aplikasi yang terintegrasi guna mendukung pelayanan administrasi kepegawaian belum optimal.

4) Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pembangunan fungsi penunjang urusan Pemda unsur pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Masih kurangnya ASN yang mendapatkan Pembinaan Kepegawaian
- b. Masih kurangnya ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan
- c. Belum memadainya sarana dan prasarana teknologi informasi pendukung tata laksana pemerintahan dalam menunjang pengembangan kompetensi ASN.

5) Unsur Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan fungsi penunjang urusan Pemda unsur penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Belum optimalnya peran penelitian dan pengembangan dalam menunjang pembangunan daerah.
- b. Belum optimalnya peran penelitian dan pengembangan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik

2.3.2.5 Permasalahan Pengawasan Urusan Pemerintahan

Permasalahan pembangunan pengawasan urusan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Masih sering terjadinya temuan yang berulang-ulang ditemukan di beberapa perangkat daerah termasuk di Kecamatan dan Desa.
- b. Masih banyak audit yang tidak menyelesaikan TLHP sampai tuntas terutama desa-desa.
- c. Rata-rata nilai SAKIP perangkat daerah masih “B”
Masih rendahnya Kapabilitas APIP berada pada level 2

2.3.2.6 Permasalahan Fungsi Lainnya

Permasalahan pembangunan unsur pendukung urusan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel;

- 
- 
- b. Penyusunan produk hukum daerah yang belum sesuai dengan kondisi daerah dan Perpu;
 - c. Kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum masih perlu ditingkatkan;
 - d. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa masih terdapat yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - e. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan;
 - f. Kelembagaan dan nomenkatur Perangkat Daerah yang belum efektif dan efisien;
 - g. Belum tersedianya sistem yang efektif dalam mengakomodir tingginya tuntutan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan publik terkait dengan pelaksanaan fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan DPRD;
 - h. Masih adanya potensi konflik sosial dan rendahnya penyelesaian konflik sosial yang terjadi di masyarakat;
 - i. Tingkat pemahaman politik masyarakat yang masih rendah;
 - j. Belum efektifnya keberadaan ormas dalam mendukung kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - k. Asimilasi budaya asing yang tidak sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada degradasi moral dan budaya di masyarakat

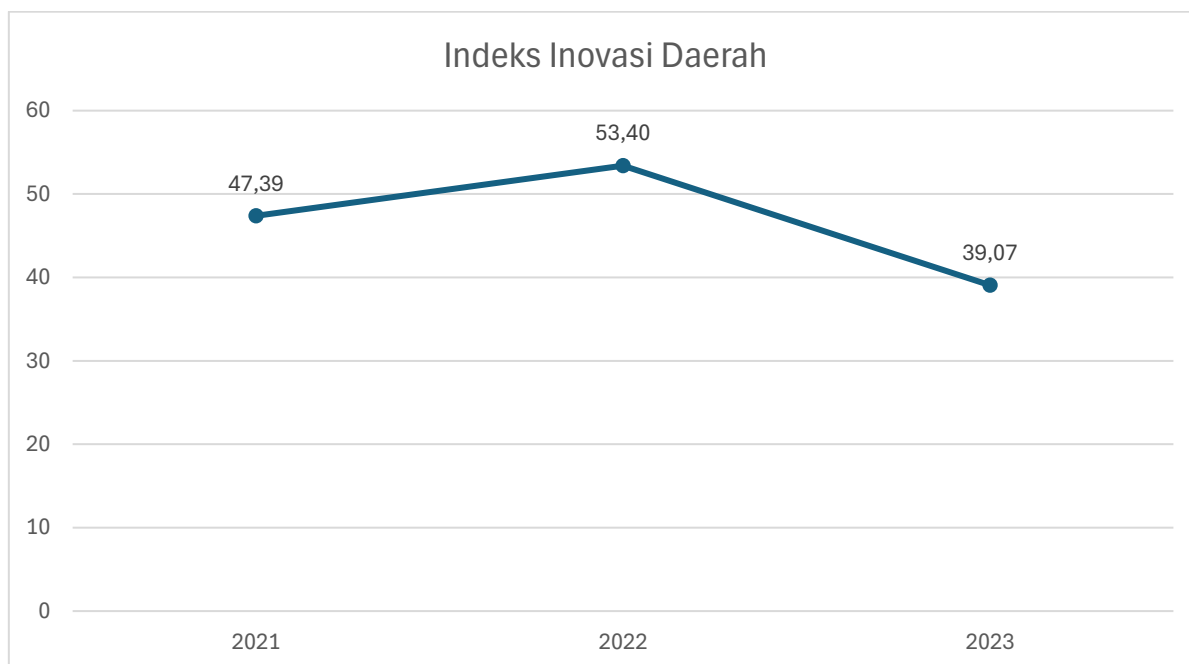
2.4 Inovasi Pembangunan Daerah

Berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, bahwa semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah disebut dengan Inovasi Daerah, yang pada hakikatnya bertujuan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri setiap tahun melaksanakan penilaian inovasi daerah dengan menggunakan indikator Indeks Inovasi Daerah (IID) serta memberikan penghargaan Innovative Government Award (IGA) kepada pemerintah daerah yang terinovatif. Pada tahun 2019 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Barat sebesar

550 dan pada tahun 2020 menjadi 673. Tetapi mulai tahun 2023 perhitungan Indeks Inovasi Daerah Pada Tahun 2021 menggunakan metode yang berbeda dengan capaian tahun 2021 sebesar 47,39 dengan kategori inovatif, menduduki peringkat ke-120 dari 415 kabupaten. Pada tahun 2022 capaian IID sebesar 53,40 dengan katagori inovatif tetapi pada tahun 2023 capaian IID turun menjadi 39,07 tetapi masih pada katagori inovatif.

**Gambar 2.30 Capaian Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 – 2023**



Sumber: Litbang Bappelitbangda, 2024, diolah

Sampai dengan Januari 2023, terdapat 81 inovasi unggulan yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 10 Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah, 31 Inovasi Pelayanan Publik, dan 40 Inovasi Daerah Lainnya. Inovasi tersebut digunakan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja program dan kegiatan di tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

2.4.1 Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

**Tabel 2.207 Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2023**

NO	JENIS TATA KELOLA	NAMA TATA KELOLA	KETERANGAN	TAHUN
1	TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Aplikasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Analisis Kelembagaan)	SIMAK merupakan aplikasi yang dibangun oleh Bagian Organisasi pada Sekretaris Daerah yang menghasilkan informasi dokumen Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (Evjab) Perangkat Daerah, sedangkan informasi mengenai dokumen Standar	2021

			Kompetensi Jabatan (SKJ), Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah, Perbup SOTK dan Perbup Tupoksi Perangkat Daerah sedang dalam tahap pengembangan. Aplikasi berbasis web ini didirikan pada tahun 2021 dan berada pada tahap pelaksanaan dan pengembangan	
2		SMART ASN (Sistem Monitoring ASN RealTime)	Aplikasi SMART ASN merupakan super app yang dibangun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DISKOMINFOTIK) pada tahun 2022 dan berada pada tahap pelaksanaan. Aplikasi ini dibangun atas dasar prinsip keterpaduan (standar data dan informasi, harmonisasi proses bisnis dan layanan terpadu). SMART ASN dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kemudahan dan efisiensi. Dengan serangkaian fitur yang disematkan, aplikasi ini membawa pengalaman pengelolaan kepegawaian ke tingkat baru. Fitur absensi yang terintegrasi memungkinkan para ASN untuk melakukan pencatatan kehadiran dengan cepat dan akurat, sementara riwayat absensi memberikan gambaran yang jelas tentang pola kehadiran mereka. Pengguna dapat dengan mudah menginput aktivitas harian mereka, memantau progres tugas, dan memastikan bahwa semua pekerjaan terlaksana dengan efisien. Tidak hanya itu, SMART ASN juga menyediakan akses langsung ke eoffice, sehingga pengguna dapat dengan cepat menanggapi komunikasi resmi. Informasi instruksi dari pimpinan juga tersedia dengan mudah, memastikan para ASN selalu terhubung dengan arahan terbaru dan prioritas organisasi. Fitur layanan pengaduan aplikasi dan jaringan memastikan setiap masalah teknis pada aplikasi dan jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif. SMART ASN juga memberikan akses langsung untuk memeriksa Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), memberikan kenyamanan dalam mengurus kewajiban pajak. Dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, pengguna dapat melakukan donasi dengan mudah melalui platform ini, membantu masyarakat yang membutuhkan dengan lebih cepat dan efisien. Dengan integrasi fitur-fitur kepegawaian yang komprehensif dan kemudahan penggunaan yang luar biasa, SMART ASN tidak hanya menjadi alat penting bagi para ASN dalam menjalankan tugas-tugas mereka, tetapi juga sebagai katalisator untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di seluruh organisasi pemerintah	2022
3		Aplikasi e-SKM (elektronik Survei Kepuasan Masyarakat)	Secara garis besar e-SKM dapat menghasilkan nilai akhir indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang merupakan indikator utama yang terdapat pada misi 4 dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023. Setiap tahunnya indikator kinerja utama harus selalu diukur keberhasilannya apakah mencapai target atau tidak. Indikator	2021

			kinerja utama juga digunakan sebagai ukuran keberhasilan aspek pelayanan pada setiap dokumen perencanaan strategis perangkat daerah (RENSTRA PD). Aplikasi berbasis web ini didirikan pada tahun 2021 dan berada pada tahap pelaksanaan. Aplikasi ini dibangun oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.	
4		Pengaduan Layanan Diskominfo (PLASTIK)	PLASTIK merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DISKOMINFO) sejak tahun 2019 dan saat ini berada pada tahap pelaksanaan. Aplikasi Pengaduan Layanan Diskominfo (PLASTIK) berbasis web dan android telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja secara eksternal. Proses pengaduan layanan aplikasi, jaringan dan persandian menjadi lebih mudah, sementara pelapor dapat memantau perkembangan aduan mereka berdasarkan nomor tiket yang diberikan oleh sistem hingga penyelesaiannya. Hal ini membantu dalam mewujudkan pelayanan Diskominfo yang berkualitas, efektif dan efisien. Selain itu, aplikasi ini telah terintegrasi dengan aplikasi SMART untuk memperluas jangkauan layanan pengaduan dan meningkatkan koordinasi antaraplikasi dalam jaringan pemerintah, yang berdampak positif bagi efisiensi operasional dan pelayanan publik yang lebih baik.	2019
5		Aplikasi Raja Papanting	Aplikasi Kinerja Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) dalam Percepatan Penurunan Stunting (Raja Papanting) didirikan oleh DP2KBP3A pada Juni 2022, yang bertujuan untuk mengukur kinerja TPK dalam melaksanakan tugas. Aplikasi ini dapat menghasilkan informasi antara lain : a. Capaian target dan jumlah keluarga yang dikunjungi dalam memberikan informasi tentang stunting b. Sebagai bahan evaluasi yang dilakukan untuk tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa c. Mengetahui kinerja TPK, apa dan bagaimana kinerja yang telah dilakukan dalam percepatan penurunan stunting	2022
6		SITANTI (Sistem Informasi Transaksi Non Tunai)	Inovasi ini didirikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada bulan Agustus 2022, dengan tujuan memudahkan transaksi dari segi waktu, biaya dan tenaga, mengurangi resiko kehilangan uang, serta mengurangi resiko penyalahgunaan anggaran pada transaksi desa	2022
7		SIPEPEP ADA KABAR (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pengamanan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat).	Melalui aplikasi “SIPEPEP ADA KABAR” ini diharapkan kegiatan pengamanan aset daerah komplek Pemda Kab. Bandung Barat dapat terdokumentasi secara digital dan terintegrasi. Yang kemudian dapat memudahkan didalam melakukan monitoring dan pelaporan kegiatan Pam aset tersebut sebagai bahan evaluasi. Selain kewajiban melaksanakan tugas secara teknis, POLPP diwajibkan untuk membuat pelaporan secara administrasi sebagai bukti pelaksanaan	2023

			yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. sebagai contoh yaitu melaksanakan salah satu tugas pengamanan asset daerah milik pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang cukup banyak.	
8		SICPAK (Sistem Pencatatan dan Pengelolaan Angka Kredit) Bagi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja)	Melalui SICPAK ini diharapkan Aparatur Polisi Pamong Praja yang merupakan ASN termasuk kedalam kualifikasi jenis Jabatan Fungsional, dapat melakukan inventarisasi/pendokumentasian pelaksanaan tugas / kegiatan, dengan mudah dan efisien, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur capaian organisasi didalam pelaksanaan penegakan perda & perkara, penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas juga sebagai bahan ajuan penetapan Angka Kredit bagi pejabat fungsional itu sendiri	2023
9	Tata Kelola Pemerintahan di	Inovasi Puskesmas DTP Saguling	1. Aplikasi E BLUD 2. Aplikasi SIAP BARANG	2022 2022
10	Puskesmas	Inovasi Puskesmas DTP Cikole	1. Aplikasi E BLUD 2. Aplikasi SIAP BARANG	2022 2022

Sumber : Litbang Bappelitbangda, 2023

2.4.2 Inovasi Pelayanan Publik

Tabel 2.208 Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

NO	JENIS TATA KELOLA	NAMA TATA KELOLA	KETERANGAN	TAHUN
1	PELAYANAN PUBLIK	SIDILAN MASUK SEKOLAH	SIDILAN MASUK SEKOLAH merupakan pengembangan dari SIDILAN (Sistem Daftar Informasi Layanan Online) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis web mulai dikembangkan pada masa pandemik Covid-19. Dengan sidilan masuk sekolah, permasalahan orang tua murid dalam memenuhi persyaratan pendaftaran masuk sekolah dapat terselesaikan. 681 sekolah dasar di wilayah Kab Bandung Barat mempunyai user khusus akses SIDILAN, yang berfungsi untuk permohonan adminduk (KIA dan akta kelahiran) secara online. Orang tua murid membawa berkas persyaratan adminduk ke sekolah dan sekolah akan memprosesnya melalui sidilan. Inovasi ini sendiri didirikan pada tahun 2022 dan berada pada tahap pelaksanaan	2022
2		KBB Superapp	Aplikasi KBB Superapp adalah aplikasi berbasis mobile yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DISKOMINFOTIK) pada bulan Mei tahun 2022 dan berada pada tahap pelaksanaan. KBB Superapp adalah solusi terkini yang mengubah cara berinteraksi	2022

			dengan layanan publik dan kesejahteraan sosial. Dengan menyatukan berbagai fitur unggul dalam satu platform, KBB Superapp menghadirkan kemudahan dan kenyamanan dalam genggaman. Salah satu fitur utama KBB Superapp adalah layanan pendaftaran UMKM pada berbagai event, memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperluas jangkauan mereka dan meningkatkan eksposur bisnis. Tak hanya itu, dalam situasi darurat, layanan gawat darurat seperti panggilan ambulans, fogging, dan disinfektan dapat diakses dengan cepat melalui aplikasi ini, membantu menyelamatkan nyawa dan mencegah penyebaran penyakit. Kesehatan juga menjadi prioritas utama dalam KBB Superapp. Pengguna dapat dengan mudah menemukan fasilitas kesehatan terdekat untuk keperluan medis mereka. Di samping itu, layanan Islami seperti informasi waktu shalat, arah kiblat, dan lokasi masjid terdekat memberikan kenyamanan bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah mereka sehari-hari. Dalam hal kemanusiaan, KBB Superapp menyediakan layanan donasi yang memudahkan pengguna untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bersatu dalam membantu sesama.	
3	Aplikasi Kir Online Bandung Barat (AKURAT)	Aplikasi AKURAT ini didirikan pada tahun 2022 dibawah Dinas Perhubungan, dalam rangka mewujudkan <i>e-Government</i> , masyarakat dapat melaksanakan pendaftaran dan pembayaran pengujian kendaraan secara online dari ponsel masing masing sehingga diharapkan dapat menghilangkan pungutan liar. Aplikasi ini di unduh melalui playstore dan berada pada tahap pelaksanaan, pada tahun 2023 mengalami pengembangan dalam aplikasi ini pengembangan yang dibuat menambahkan sebuah fitur pelayanan pemeriksaan uji emisi bagi kendaraan pribadi		
4	“POJOK KOPEAH (POJOK KONSULTASI	Secara garis besar Pojok Konsultasi Pertanahan dan Pajak Daerah dapat	2022	

		PERTANAHAN DAN PAJAK DAERAH)” Di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat	memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat terkait bidang pertanahan dan pajak daerah, selain itu Pojok Kopeah juga merupakan embrio pelayanan baru di Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara. Inovasi POJOK KOPEAH sendiri didirikan pada Januari 2022 dan berada pada tahap pelaksanaan	
5		LAYAR PRIMA BANDUNG BARAT (Layanan Arsip Pribadi Masyarakat Bandung Barat)	LAYAR PRIMA BANDUNG BARAT didirikan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan pada Juni 2022 dan berada pada tahap pelaksanaan. Secara garis besar kegiatan Layanan Arsip Pribadi Masyarakat ini merupakan jembatan antara warga masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya bersama-sama memelihara kelestarian dan keterjagaan arsip sejarah dan kebudayaan Kabupaten Bandung Barat sebagai warisan bagi generasi penerus Bandung Barat. Manfaat Layar Prima Bandung Barat : a. informasi kemasyarakatan ; b. terciptanya forum komunikasi dengan tokoh masyarakat; c. tergali dan terhimpunnya potensi data arsip bernilai sejarah ; dan d. tersimpannya data arsip perorangan dengan kemudahan untuk mengakses kembali arsip yang disimpan bilamana ada bencana/musibah kapan saja; e. Melakukan pelayanan sapa warga perihal layanan kearsipan kepada masyarakat. Kemungkinan pengembangan ke depan bisa menjadi peluang pemasukan bagi Pendapatan Daerah Bandung Barat.	2022
6		Sistem Aplikasi Mall Pelayanan Publik Digital (MPP Digital)	Aplikasi Mall Pelayanan Publik Digital (MPP Digital) adalah pembaharuan aplikasi dari Sistem Aplikasi Perizinan Layanan Unggul, Mudah dan Cepat (SIAP LUMPAT), aplikasi yang berbasis web ini didirikan oleh DPMPTSP pada tahun 2018 dan berada pada tahap pelaksanaan. Sistem Aplikasi Perizinan Layanan Unggul, Mudah dan Cepat (SIAP LUMPAT) merupakan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan. Aplikasi tersebut terdapat fitur cetak mandiri dan dilengkapi dengan pengamanan	2018

			digital berupa tanda tangan digital. Dan dengan adanya aplikasi ini dapat mengurangi kontak fisik antara pemohon dan petugas pelayanan perizinan, sehingga dapat meminimalisir adanya gratifikasi pada tahun 2024 aplikasi (SIAP LUMPAT) mengalami pembaharuan menjadi aplikasi MPP Digital (Mall Pelayanan Publik Digital) Sistem MPP Digital adalah Tempat berlangsungnya penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau dan nyaman. Berikut merupakan langkah-langkah untuk mengakses aplikasi Sistem MPP melalui laman website dengan menggunakan browser pada komputer atau perangkat mobile lain yang dapat terhubung ke internet, aplikasi ini memiliki penambahan beberapa fitur didalamnya fitur baru yang terdapat pada aplikasi MPP antara lain adalah Terintegrasi dengan sistem antrian MPP fisik (bisa cek antrian dan booking antrian), Alur perizinan disesuaikan (sebelumnya ada verifikasi dokumen oleh dpmpstsp, sekarang langsung diverifikasi tim teknis), Terintegrasi dengan SISDMK - Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Tandatanganan Digital terintegrasi dengan BsrE.	
7		Link Adminduk Mandiri Kecamatan Lembang	Inovasi ini didirikan pada tahun 2022 dan sudah pada tahap pelaksanaan, inovasi ini digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk per batas usia desa dan kecamatan sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan wilayah, perangkat daerah dan Lembaga Akses link adminduk mandiri	2022
8		Jemput Bola Kendaraan Keliling (JEBOL DARLING)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat (Disdukcapil KBB) pada tahun 2015 berinisiatif meluncurkan Program JEBOL DARLING, yaitu pelayanan jemput bola dengan menggunakan kendaraan roda 4, berkeliling ke desa-desa, sekolah-sekolah untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Setelah melalui serangkaian tahapan dan penyempurnaan, baik dari segi jaringan konektivitas, mekanisme	2015

			pelayanan maupun peningkatan kualitas SDM, selama periode Januari – Desember 2023 pelayanan Darling telah menyelesaikan 11.500 layanan administrasi kependudukan. Jika dinominalkan, pelayanan Jebol Darling telah menghemat belanja masyarakat KBB dengan memangkas biaya pengurusan dokumen kependudukan.	
9		SIKOBRA	Media website dengan alamat <i>sikobra.bandungbaratkab.go.id</i> didirikan pada April 2021 oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan merupakan inovasi yang mampu mempermudah penyebaran informasi serta penyediaan data keolahragaan dengan harapan dapat meningkatkan layanan keolahragaan. Masyarakat dan pelaku olahraga kapan dan dimana saja dengan akses internet melalui perangkat handphone dapat dengan mudah, cepat dan mudah mengakses data dan informasi keolahragaan melalui informasi keolahragaan berbasis website ini	2021
10		Jemput Pajak (JEJAK)	Layanan mobil jemput pajak atau biasa disapa "Jejak" merupakan layanan jemput bola kepada para wajib pajak (WP) oleh BAPENDA. Tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam melaporkan pajak. Layanan Mobil Jejak ini berkeliling ke daerah dengan jadwal yang telah ditetapkan setiap bulannya. Inovasi ini merupakan pengembangan dari layanan warung pajak yang dilaksanakan mulai 2017 yang dirintis oleh bidang pendapatan dengan membuka warung/tenda pelayanan pajak (pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak reklame) di kecamatan - kecamatan. Pada tahun 2020 diluncurkan mobil layanan warung pajak daerah. Pada tahun 2021 branding layanan ini menjadi "Jejak" (Jemput Pajak). Inovasi ini dibuat sebagai upaya untuk mengejar target pendapatan asli daerah (PAD).	2020
11		Aplikasi Alat Rekam Transaksi Pajak Daerah	Aplikasi alat rekam transaksi pajak daerah didirikan pada November 2021 oleh BAPENDA, aplikasi ini digunakan sebagai alat untuk mencatat transaksi pembayaran	2021

			pada cashier sehingga antara pelaporan wajib pajak (<i>self assesment</i>) dapat dibandingkan dengan keadaan sebenarnya/realtime. Hal ini sangat berdampak pada besaran pelaporan pajak wajib pajak.	
12		Sistem Informasi Pajak Daerah – Pajak Bumi Bangunan (SIPADA-PBB)	Aplikasi berbasis web ini didirikan oleh BAPENDA pada Maret 2022 dan berada pada tahap pelaksanaan. Secara garis besar Sistem Informasi Pajak Daerah merupakan inovasi pelayanan pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Manfaat dari inovasi ini adalah : - Wajib Pajak dapat melakukan pengajuan pelayanan hanya dengan mendatangi kecamatan sesuai dengan domisili terdekat; - Wajib Pajak dapat melakukan monitoring posisi berkas secara online melalui nomor resi berkas yang sudah diberikan petugas dengan mengakses website Bapenda; - Wajib Pajak dapat melakukan pengecekan tunggakan PBB-P2 secara online melalui website Bapenda (https://sipada-pbb.bandungbaratkab.go.id/) dengan mengisi Nomor Objek Pajak (NOP) - Wajib Pajak dapat melakukan cetak SPPT Mandiri secara online melalui website Bapenda dengan mengisi Nomor Objek Pajak (NOP) dan nama pemilik; - Pelayanan dari awal hingga selesai dilakukan melalui administrasi secara online, sehingga monitoring berkas dapat diakses secara transparan dan akuntabel oleh petugas Bapenda dan Wajib Pajak; - Transaksi data pengajuan pelayanan per-harinya dapat dilakukan lebih banyak dari sebelumnya selama kantor pelayanan masih buka dan mendapat antrean; - Dokumen persyaratan akan tersimpan pada Database Server, sehingga pengajuan pelayanan ini bersifat paperless dan berkas tidak akan tercecer/hilang.	2022
13	PELAYANAN PUBLIK	Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak	Geprak didirikan pada April 2022 oleh DP2KBP3A, secara garis besar	2022

		(GEPRAK)	GEPPRAK (Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak) timbul dari keresahan masih banyaknya perlakuan yang tidak sepatutnya dialami perempuan dan anak di Kabupaten Bandung Barat sehingga menjadi satu kegiatan gerakan yang diusung oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan fungsi perlindungan perempuan dan anak secara optimal dengan melibatkan pentahelix yang melibatkan peran pemerintah, lembaga swasta, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media massa. Dalam pelaksanaannya menguatkan jejaring dan kerjasama/kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dalam pencegahan dan penanganan serta penguatan dan pengembangan struktur pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan, anak, disabilitas dan lanjut usia untuk mewujudkan Bandung Barat bebas kekerasan.	
14		Sistem Informasi Kelitbangan	Aplikasi Sistem Informasi Kelitbangan didirikan pada tahun 2020 oleh Bappelitbangda, dimana secara garis besar Sistem Informasi Kelitbangan dapat menghasilkan informasi : hasil kelitbangan (hasil kelitbangan Bappelitbangda dan perangkat daerah lainnya), forum komunikasi (usulan penelitian/kajian dari perangkat daerah, usulan ide dan inovasi, input hasil kelitbangan perangkat daerah, input hasil kelitbangan stakeholder lainnya). Sistem Informasi Penelitian dikembangkan berbasis web, memudahkan untuk mengakses sistem tersebut dimana saja dan kapan saja.	2020
15		LAYUNG MILA (Layanan Antar Langsung Pemilih Pemula)	Inovasi yang baru didirikan di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 4 Januari tahun 2023 demi memberikan pelayanan prima terhadap perekaman dan cetak KTP pemula untuk mencapai sasaran Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 melalui data pemilih potensial. Inovasi ini didirikan bertujuan untuk mempercepat pelayanan terhadap perekaman,	2023

			cetak dan pengantaran KTP pemula.	
16		ABTHREE (AMBULANCE BANDUNG BARAT BERKAH)	Inovasi ini berdiri dilatarbelakangi untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan ke rumah sakit juga membantu kecelakaan dan paramedis kedaruratan di wilayah Ngamprah, manfaat dengan adanya inovasi ini mempercepat pelayanan kedaruratan masalah kesehatan, bencana serta kesiapsiagaan mengatasi masalah kesehatan yang terjadi, membantu mempercepat penurunan angka kematian karena kehamilan, nifas dan melahirkan.	2023
17		SI TT (Sidat Tuk PMT)	Inovasi ini didirikan pada 4 Agustus 2021 di Kecamatan Ngamprah karena adanya kasus stunting. Inovasi ini bertujuan untuk menurunkan dan mencegah angka stunting di wilayah Kecamatan Ngamprah melalui pemberian PMT bagi balita di posyandu	2021
18		GURILEM KBB (Gudang Literasi Elektronik Masyarakat Kabupaten Bandung Barat)	Inovasi ini didirikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat diantaranya dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, baik itu pendidikan secara formal maupun non formal Artinya bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak lepas dari upaya mendorong masyarakat supaya terbiasa belajar, kegiatan belajar tidak bisa dipisahkan dari kegiatan membaca. Berdasarkan data statistik UNESCO tahun 2012, indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001 yang artinya dari 1.000 penduduk, hanya satu warga yang tertarik untuk membaca dan indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada di peringkat 69 dari 127 negara. Dengan adanya E-book, harapannya bisa lebih mendekatkan bahan bacaan dan bahan informasi bagi seluruh masyarakat secara merata sehingga dengan demikian tugas Pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat bisa dilaksanakan oleh semua pihak mulai dari pemerintah kabupaten sampai ke tingkat desa dan masyarakat umum yang mempunyai perhatian terhadap pemyarakatan minat baca masyarakat. Aplikasi ini di unduh melalui	2022

			playstore. Adapun manfaat aplikasi adalah : 1. terwujudnya pelayanan kepada masyarakat untuk dapat membaca dimana saja dan kapan saja; 2. pemerataan layanan perpustakaan kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat; 3. mendorong masyarakat untuk lebih memanfaatkan perpustakaan digital guna meningkatkan minat dan kebiasaan membaca.	
19		SIGAP BENCANA	Aplikasi SIGAP BENCANA adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPBD untuk memudahkan warga dalam melaporkan kejadian bencana. Aplikasi ini tersedia dalam versi web, sedangkan untuk versi mobile akan segera dikembangkan. Aplikasi ini juga menyediakan fitur untuk membantu Admin dalam mengelola laporan bencana yang diterima oleh dari masyarakat. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini, BPBD dapat mempercepat penanganan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat.	2021
20		INDAH (Inovasi Data Harmonis)	Indah adalah inovasi yang dibangun di Kecamatan Lembang yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum adanya inovasi, pelayanan hanya dilayani oleh operator kartu keluarga dan KTP sehingga menyebabkan antrian yang panjang, prosesnya lama dan hasil dokumennya lama. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk Kecamatan Lembang kurang lebih 197.000 jiwa yang tersebar di 16 desa sehingga rata-rata per hari terdapat 50 permohonan pembuatan kartu keluarga dan permohonan rekam cetak KTP (cetak baru, perubahan data atau hilang) kurang lebih 1.000 per bulan serta permohonan dokumen administrasi lainnya. Layanan Indah terdiri dari : register dan legalisir dokumen, surat keterangan tidak mampu, keterangan pensiun, kartu kuning, surat pindah datang, akta kelahiran dan kematian, SPPT PBB, ahli waris, PPAT AJB, Sipada Online dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terkait mobile JKN dan	2023

			pengguna yang sudah meninggal. Dengan adanya Indah, masyarakat mengajukan permohonan via wa ke hp kasi pemyanlik (satu nomor hp satu pemohon), tidak perlu datang ke kantor kecamatan, kemudian hasil dokumen dalam bentuk pdf di wa kembali ke pemohon dan bisa dicetak sendiri oleh pemohon.	
21		Gerakan Makan Telur Minimal Sebutir Oleh Ibu Hamil Untuk Mencegah Stunting (Getol Mieling)	Stunting dipengaruhi oleh multifaktor dimana salah satu diantaranya yaitu status gizi ibu pada saat hamil. Ibu hamil kurang gizi (Ibu hamil KEK) akan beresiko melahirkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), berat badan bayi kurang dari 2500 gram dan panjang badan lahir kurang 47 cm (resiko stunting). Pemberian makanan tambahan atau suplementasi gizi khususnya bagi ibu hamil kurang gizi merupakan salah satu strategi peningkatan akses pangan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan ibu hamil dalam mengatasi masalah gizi. Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Kesehatan melakukan kegiatan pemberian makanan tambahan lokal berupa pemberian extra telur ayam sebanyak 1 butir setiap hari pada ibu hamil KEK dan beresiko KEK. Getol Mieling sendiri didirikan pada tahun 2022 dan sudah dilaksanakan diberbagai desa di Kabupaten Bandung Barat.	2022
22		GOBANG (Go Obat Lembang)	Inovasi ini dibangun untuk memberikan pelayanan kefarmasian di rumah sakit untuk memecahkan masalah lamanya pelayanan penyediaan obat dari resep yang diberikan untuk pasien. Pasien yang telah selesai dari poli rawat jalan, memasukkan resep obat ke bagian farmasi kemudian oleh bagian farmasi ditawarkan pengantaran obat ke rumah yang bersangkutan atau ke toko obat atau apotik yang sudah bekerjasama dengan RSUD Lembang yang lokasinya dekat rumah pasien. Gobang diutamakan untuk pasien lansia atau prolanis.	2022
23		SIP (SISTEM INFORMASI POSYANDU)	Inovasi ini dibangun di DPMD untuk memecahkan masalah lambatnya pendataan informasi tentang pelayanan terhadap proses tumbuh kembang anak dan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak yang meliputi cakupan program, pencapaian program hasil penimbangan dan partisipasi	2022

			masyarakat. Data yang dihasilkan dari sistem informasi ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi kader posyandu untuk memahami permasalahan sehingga dapat mengembangkan kegiatan yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran. Inovasi ini memudahkan pendataan serta menghasilkan informasi yang tepat guna dan tepat waktu mengenai pengelolaan posyandu, agar berbagai pihak yang berperan dalam pengelolaan posyandu dapat menggunakannya untuk membina posyandu demi kepentingan masyarakat	
24		PETADIK (Pelayanan Data Pendidikan)	Aplikasi ini didirikan tepatnya pada 09 Mei 2022, latar belakang didirikannya PETADIK (Pelayanan Data Pendidikan) demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat khususnya di sektor pendidikan dengan demikian Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat membuat inovasi Pelayanan Data Pendidikan (PETADIK), Tujuan utama inovasi pelayanan data pendidikan dalam bentuk digitalisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.	2022
25		SIKASIK (Sistem Informasi Layanan Berbasis Elektronik)	Aplikasi ini berdiri pada tahun 2020, latar belakang didirikannya aplikasi ini berdasarkan hasil dari Project Leader bersama Sistem Analis Program Sistem Informasi Dan Layanan Berbasis Elektronik (SIASIK) mendesain kebutuhan. Kebutuhan user berdasarkan hasil FGD. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan layanan yang maksimal terkait Kesiswaan, Sarana Prasarana dan Kelembagaan, dan Kurikulum pada masyarakat sehingga informasi diperoleh secara jelas dan aktual terkait Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat.	2020
26		Alumni Ngaraksa Sakola	Alumni Ngaraksa Sakola merupakan Program mengajak alumni untuk memberikan bantuan kepada sekolah SD atau SMP tempat dahulu menimba ilmu. Dengan semangat "ngaraksa", yang berarti melindungi atau	2023

			memelihara, para alumni diundang untuk memberikan kembali kepada sekolah mereka dengan berbagai bentuk bantuan. Melalui program ini, kami bertujuan untuk membangun kembali jejak pendidikan yang telah kami lalui dan memberikan kontribusi positif bagi masa depan pendidikan di sekolah kami. Para alumni memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan fasilitas, sarana, dan lingkungan belajar di sekolah mereka. Dengan demikian, kami tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga membangun hubungan yang berkelanjutan antara alumni, sekolah, dan masyarakat. Berbagai bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh para alumni meliputi penyediaan peralatan pembelajaran, buku -buku referensi, perlengkapan olahraga, renovasi ruang kelas, dan program pengembangan guru. Selain itu, para alumni juga dapat memberikan bantuan berupa pembinaan, pelatihan, dan mentoring kepada siswa -siswa yang membutuhkan. Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi sekolah dan siswa, tetapi juga membangun rasa kebersamaan dan kepedulian di antara alumni. Melalui kolaborasi dan solidaritas, kami bersama -sama menjaga warisan pendidikan kami dan memberikan kontribusi positif bagi masa depan generasi mendatang. Dengan semangat "Alumni Ngaraksa Sakola", kami berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan dan perkembangan sekolah kami serta menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan inklusif bagi semua siswa.	
27		Ekstrakurikuler Hafid Al-Quran	Ekstrakurikuler Hafid Al-Quran merupakan program inovasi yang Di Sekolah dilaksanakan ekstra Kulikuler Hafid Alquran sehingga siswa dapat menjadi hafid/hafidoh Alquran sekaligus membentuk karakter siswa yang religious. Melalui program ini, siswa memiliki kesempatan untuk mendalami pemahaman, membaca, menghafal, dan mengamalkan Al - Quran sebagai bagian integral dari pendidikan mereka di sekolah. Dengan memperkenalkan	2023

			ekstrakurikuler ini, kami ingin menciptakan lingkungan belajar yang mempromosikan nilai-nilai keagamaan dan mengembangkan keterampilan membaca Al - Quran. Siswa diajak untuk mengeksplorasi dan mendalami makna serta ajaran - ajaran yang terkandung dalam Al - Quran melalui berbagai kegiatan, seperti pengajian, diskusi, tadarus, dan perlombaan membaca Al - Quran. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang religius, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Melalui pembelajaran Al - Quran, siswa diajak untuk memahami nilai - nilai moral dan etika Islam, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga dibimbing untuk menjadi teladan dalam kebaikan, toleransi, dan kasih sayang kepada sesama. Dalam pelaksanaannya, program Ekstrakurikuler Hafid Al-Quran melibatkan guruguru yang berkualifikasi di bidang keagamaan dan pengajar AlQuran. Mereka memberikan bimbingan, pembinaan, dan motivasi kepada siswa dalam proses pembelajaran AlQuran. Selain itu, kerja sama dengan komunitas keagamaan dan lembaga-lembaga terkait juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan program ini. Melalui program Ekstrakurikuler Hafid Al-Quran, kami berharap siswa dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam membaca AlQuran, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dan karakter religius mereka. Kami yakin bahwa dengan mendalami AlQuran, siswa akan menjadi individu yang lebih baik, bermanfaat bagi diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa	
28		Podcast BISA CERDAS (Bincang Santai Cerita Seputar PAUD, Penmas, Pendas	Podcast BISA CERDAS (Bincang Santai Cerita Seputar PAUD, Penmas, Pendas yang mengupas inovasi-inovasi para pendidik dan tenaga kependidikan di Bandung Barat agar dapat disebarluaskan.. Dengan gaya bincang santai, podcast ini bertujuan untuk membagikan cerita inspiratif, pengalaman, dan praktik terbaik dalam dunia pendidikan kepada seluruh masyarakat. Melalui	2023

			podcast ini, kita berusaha untuk memberikan pengakuan kepada para pahlawan pendidikan yang selama ini bekerja keras untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berkualitas di Kabupaten Bandung Barat. Para pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman, strategi, dan inovasi yang telah berhasil mereka terapkan di sekolah - sekolah mereka. Podcast BISA CERDAS tidak hanya mempromosikan inovasi -inovasi tersebut, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi para pendidik dan tenaga kependidikan lainnya untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah mereka. Dengan mendengarkan cerita -cerita sukses dari rekan -rekan seprofesi, diharapkan para pendidik dapat merasa termotivasi dan terdorong untuk mengembangkan ide -ide kreatif dalam upaya menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Kami berharap bahwa melalui podcast ini, inovasi -inovasi yang dilakukan oleh para pendidik dan tenaga kependidikan di Bandung Barat dapat disebarluaskan secara lebih luas, bahkan hingga ke seluruh Indonesia. Dengan demikian, kita dapat membangun jaringan kolaboratif yang kuat dan saling mendukung dalam menciptakan masa depan pendidikan yang lebih cerdas dan berkualitas	
29		Majalah Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)	Majalah Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih) sebagai media menyebarluaskan informasi inovasi-inovasi dari para pendidik juga menyebarluaskan kegiatan kegiatan Dinas Pendidikan, agar dapat dibaca oleh halayak ramai, majalah kinanti ini terbit setiap bulan. Majalah Kinanti adalah sebuah inovasi media yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai berbagai inovasi dari para pendidik serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Majalah ini terbit setiap bulan dan tersedia untuk dibaca oleh masyarakat luas. Dalam setiap edisinya, Majalah Kinanti akan mengulas berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh para	2023

			pendidik di Kabupaten Bandung Barat. Ini termasuk cerita inspiratif, praktik terbaik, dan kegiatan - kegiatan kreatif yang telah berhasil mereka terapkan di lingkungan pendidikan. Melalui penyebaran informasi ini, kita berharap untuk memotivasi dan menginspirasi pembaca, baik para pendidik maupun masyarakat umum, untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, Majalah Kinanti juga akan menjadi wadah untuk menyebarluaskan kegiatan -kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Ini termasuk program -program unggulan, acara - acara penting, dan informasi - informasi terkini mengenai perkembangan pendidikan di daerah tersebut. Dengan demikian, Majalah Kinanti tidak hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga sumber informasi yang penting bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Kami berharap bahwa melalui Majalah Kinanti, inovasi-inovasi dari para pendidik serta kegiatan-kegiatan dari Dinas Pendidikan dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih dinamis, kreatif, dan berdaya saing untuk masa depan yang lebih baik.	
30		Jurnal Kinanti	Jurnal Kinanti: Media untuk menerbitkan Karya Tulis Ilmiah Bagi Pendidik dan tenaga kependidikan secara gratis sebagai salah satu media untuk mendapatkan Angka Kredit. Jurnal kinanti terbit setiap 6 bulan. Jurnal Kinanti merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk menjadi media publikasi karya tulis ilmiah bagi para pendidik dan tenaga kependidikan secara gratis. Dengan terbitnya Jurnal Kinanti setiap 6 bulan, para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Bandung Barat memiliki akses yang lebih luas terhadap karya - karya tulis ilmiah yang relevan dan berkualitas. Mengirimkan karya tulis ilmiah ke Jurnal Kinanti adalah salah satu cara bagi para pendidik dan tenaga kependidikan	2023

			untuk mendapatkan Angka Kredit yang diperlukan dalam proses penilaian kinerja mereka. Jurnal ini menyediakan platform yang terbuka bagi para penulis untuk membagikan hasil-hasil penelitian, pemikiran, dan praktik terbaik dalam bidang pendidikan. Dengan menjangkau pembaca dari berbagai latar belakang dan bidang keahlian, Jurnal Kinanti bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran gagasan, pengetahuan, dan pengalaman antara para profesional pendidikan. Ini juga menjadi sarana untuk memperluas wawasan, meningkatkan kualitas, dan mempromosikan kolaborasi di antara komunitas pendidikan. Keberadaan Jurnal Kinanti tidak hanya memberikan manfaat bagi penulis, tetapi juga bagi pembaca yang ingin mendapatkan wawasan baru tentang perkembangan terkini dalam pendidikan. Dengan menyediakan akses gratis, Jurnal Kinanti berkomitmen untuk mendukung pengembangan pendidikan yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Bandung Barat. Kami berharap bahwa melalui Jurnal Kinanti, para pendidik dan tenaga kependidikan dapat lebih mudah mengakses, menyebarkan, dan memperoleh pengetahuan baru yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.	
31		LAMSIJAN (Limbah Sisa Uang Jajan)	Limbah sisa uang jajan (LAMSIJAN) merupakan fenomena yang umum terjadi di masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Banyak dari kita memiliki kebiasaan menyisihkan sebagian uang jajan atau uang saku setiap hari, yang pada akhirnya tidak terpakai dan menjadi limbah yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, di Palestina, kondisi sosial dan ekonomi yang sulit telah menyebabkan banyak penduduk hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan sumber daya.	2023
32		SISPRAJAL (Sistem Pendaftaran Rawat Jalan)	Inovasi ini berdiri dilatarbelakangi oleh Penumpukan Pasien Rawat Jalan karena pendaftaran dilakukan secara manual sehingga menciptakan sebuah inovasi yang bertujuan untuk Memudahkan	2023

			Pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan mengurangi penumpukan pasien rawat jalan dengan adanya SISPAJAL dengan harapan dapat membantu Pasien untuk mendaftarkan diri secara online tanpa harus mengantri dan dapat mengurangi penumpukan pasien rawat jalan.	
33		SINANSI (Sistem Informasi Layanan Edukasi Ruang Perawatan Kebidanan)	Inovasi yang berdiri dilatarbelakangi Banyaknya mitos/hoak seputar kesehatan khususnya kebidanan membuat pasien tidak mendapatkan pendidikan kesehatan yang benar, dengan adanya SINANSI pasien/keluarga yang pernah dirawat di RSUD Cililin ruangan perawatan kebidanan (Nifas) akan dengan mudah mendapatkan edukasi kesehatan dengan murah, mudah dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun, tujuan adanya inovasi ini Memudahkan pasien mendapatkan edukasi kesehatan secara digital mengenai permasalahan pada saat kehamilan, nifas, bayi baru lahir dan ginekolog, hasil dari hadirnya SINANSI dapat membantu pasien/keluarga/masyarakat untuk mendapatkan edukasi pendidikan kesehatan seputar kebidanan dari sumber yang benar, akurat, terupdate dan professional.	2023
34	Pelayan Publik di Puskesmas	Inovasi Puskesmas DTP Cikalongwetan	1. CENTING DAWAL	2022
35		Inovasi Puskesmas DTP Padalarang	1. JASUKE (Jamu Suka – suka hari Kemis) 2. KIPAS (Kleompok Ibu Peduli ASI)	2023 2023
36		Inovasi Puskesmas DTP Cipongkor	1. BADE ULIN (Bantuan Desa Untuk Bersalin) 2. MARTABAK KEMALIN (Mari Kenali Tanda Bahaya Kehamilan Untuk Mencegah Kematian Ibu Bersalin). 3. GEBUK BUNYI (Gerakan Cegah Bumil Kurang Energi Kronik dan Bayi Stunting Tertangani)	2019 2022 2022
37		Inovasi Puskesmas DTP Parongpong	1. KECEMAGI (Kelompok Cegah Masalah Gizi) 2. KETUBES (Keroyok Tuntas Tuberkulosis)	2019 2023
38		Inovasi Puskesmas DTP Cisarua	1. JEMBATAN PANGANTUK (JEMPUT DAN PENGobatan PASIEN DENGAN BATUK LEBIH DARI 2 MINGGU)	2023
39		Inovasi Puskesmas DTP Cibodas	1. Asumsi Joki DeSi (Asuhan Makanan Bergizi dan Jogging	2023

			Kecil untuk DM dan Hipertensi)	
40		Inovasi Puskesmas DTP Jayamekar	1. Gemasi Botak (Gerakan Masyarakat Imunisasi Booster Anak) 2. Gasternak (Gerakan Sadar Booster Anak) 3. Geter (Gerakan Imunisasi Booster) 4. Kajedak (Kader Jemput Dahak) 5. Penyulumpat (Penyuluhan Setiap Hari Jumat)	2024 2024 2024 2020 2019
41		Inovasi Puskesmas DTP Rende	1. Gardu Gempita (Gerakan Terpadu Gizi, Edukasi, Monitoring, dan Penanganan Ibu Hamil dan Balita) 2. Sekring Isma (Sekali skrining, isi semua)	2023 2023
42		Inovasi Puskesmas DTP Cipatat	1. “RUMAH KASIH “ SURVIVOR ODGJ	2024
43		Inovasi Puskesmas DTP Jayagiri	1. Bikini (Bidan isi link Bumil KEK dan resti, intervensi dan evaluasi) 2. AB TRI (Ajak Bidan Tripel Eliminasi) 3. ROK MINI (Mengurangi Rokok Meminimalisir Resiko) 4. ASIK TB (Ayo Skrining Investigasi Kontrak Erat Tuberkolosa) 5. SKY-LINE (Skrining Konseling Gangguan Mental Emosional dan Napza Online)	2023 2021 2023 2023 2021
44		Inovasi Puskesmas DTP Rongga	1. Geprek Caltin 2. Paduka Beristri 3. Pelur Resing (Pemberian Telur Resiko Balita Stunting) 4. LINK Kosan (Link Konseling Sanitasi)	2018 2022 2023 2023
45		Inovasi Puskesmas DTP Sindangkerta	1. Rikat TB 2. Goreng Mas Kepiting	2021 2018
46		Inovasi Puskesmas DTP Cimareme	1. ASIH KURING (Asuhan Sayang Ibu Hamil Keluarga bebas Stunting) 2. BAJIGUR [Balita Gizi Buruk Mendapat Formula 100) 3. KARTU CERDAS PTM	2017 2022 2022
47		Inovasi Puskesmas DTP Ciwaruga	1. BANK SYANJAYA (BANK Sampahku untuk posyandu jaya) 2. BLACKPINK (Berkeliling Lacak Keluarga Penderita Tb Investigasi Kontak)	2023 2023
48		Inovasi Puskesmas DTP Cicangkanggirang	1. MINTAKES (Mitra Akademisi Kesehatan) 2. GUNTING KERTAS (Gerakan Cegah Stunting Kerahkan, Eratkan bersama lintas sektor) 3. SI WAWA HAMIL (edukasi	2022 2022 2022

			lewat WA pada Ibu Hamil)	
49		Inovasi Puskesmas DTP Mukapayung	1. GERAKAN MASYARAKAT SADAR CEGAH STUNTING (GEMAR CETING)	2022
50		Inovasi Puskesmas DTP Lembang	1. UPETI (Upaya Pemantauan Resiko Tinggi) 2. POTENSI (Pojok Hipertensi)	2023
51		Inovasi Puskesmas DTP Rajamandala	1. Barang Tambah (Balita Gizi Kurang yang Mendapat Makanan Tambahan)	2023
52		Inovasi Puskesmas DTP Cihampelas	1. NATASA (Pembina Kesehatan Desa) 2. MAWAS DIRI (Masyarakat Dan Tenaga Kesehatan Waspada Dengan Ibu Hamil Resiko Tinggi) 3. Doyan Jalan Sore (Dokter Pelayanan Rawat Jalan Sore) 4. SEKITAR PECEI (Skrining Penyakit Tidak Menular Puskesmas Cihampelas)	2020 2022 2022 2023
53		Inovasi Puskesmas DTP Pasirlangu	1. Maspenjaga 2. Lita (Layani Penderita Tb) Merekah Bersama Ultrasonografi(“Mendeteksi Resiko Tinggi Kehamilan Dengan Usg”) 3. Ceker Seuhah (Cek Kesehatan Rutin Sehat Untuk Semua) 4. Dedi Berbisa (Deteksi Dini Bersama Bidan Desa) 5. Hai Cinta 6. Sazi Pintar (Kelompok Ibu Pintar Sadar Gizi)	2022 2022 2022 2023 2023 2023
54		Inovasi Puskesmas DTP Pataruman	1. Kunjungan Rumah Balita Berisiko Stunting dan Wasting	2023
55		Inovasi Puskesmas DTP Cililin	1. SAYANG IKAN (Sayang Ibu Melahirkan) 2. YUMI DARA MANIS(Yu Minum Tablet Tambah Darah Tiap Hari Kamis) 3. MARSELA (Mari Raih Kesehatan Lanjut Usia) 4. TOPLI KTR (Tidak Anti Orang Perokok tapi Jadikan Lingkungan Kawasan Tanpa Rokok)	2023 2023 2023 2023
56		Inovasi Puskesmas DTP Batujajar	1. Lentera Jiwa 2. Nya'ah ka kolot	2021 2022
57		Inovasi Puskesmas DTP Tagogapu	1. KOPPI TUBRUK(KONSELING,PEN CEGAHAN dan PENGENDALIAN TUBERKULOSIS) 2. Pendekatan Keluarga Berorientasi mengatasi penyakit hipertensi (Pendekar Bereaksi) 3. SOLATIF(Sekolah Lansia Alfatih)	2023 2023 2023 2023

			4. GEMA PERANG GAJI (Gerakan Bersama Penanggulangan Orang dengan Gangguan Jiwa)	
58		Inovasi Puskesmas DTP Ngamprah	1. Kemas chating (Kegiatan Memasak Cegah Stunting) 2. Kejar Dahak	2023 2018
59		Inovasi Puskesmas DTP Cipeundeuy	1. GETUK 41 (Gerakan Mengetuk Pintu pada 4 Rumah yang kontak erat dengan 1 Pasien TB) 2. PEDESAN (Peduli Desa Siaga Untuk Persalinan) 3. HIBER LUMPAT (Hirup Bersih, Lumampah Liwat Sampah Manfaat) 4. GEMURUH (Gerakan Mengasuh 10 Ibu Hamil) 5. MADU 3P (Pemantauan Terpadu PTM - Prolanis dan PRB) 6. CAFÉ KERITING (Cegah Anemia dengan Tablet Fe Konsumsi Rame-rame untuk Cegah Stunting) 7. ANTER PAKET CINTA (Ante Natal Terpadu Pada Kehamilan Cegah Kematian Ibu, Bayi, dan Balita) 8. POJOK JKN	2019 2019 2019 2022 2022 2022 2022 2023
60		Inovasi Puskesmas DTP Rawat Inap Saguling	1. Sacanting (Saguling Cegah Stunting) 2. Sacanting (Saguling Cegah Stunting)	2023 2019
61		Inovasi Puskesmas DTP Cirata	1. Anjelin Puspita (Antar Jemput Ibu Bersalin Di Puskesmas Pilihan Cirata)	2023
62		Inovasi Puskesmas DTP Sumur Bandung	1. Mulus	2018

Sumber : Litbang Bappelitbangda, 2023

2.4.3 Inovasi Daerah Lainnya

Tabel 2.209 Inovasi Lainnya Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

NO	JENIS TATA KELOLA	NAMA TATA KELOLA	KETERANGAN	TAHUN
1	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	GERAI BerAKHLAK (UP2PKK, UMKM, UPPKA, PEKKA)	Gerai Kecamatan BerAKHLAK bertujuan untuk memasarkan produk produk unggulan dari 11 Desa se Kecamatan Ngamprah agar dapat dikenal secara umum, dimana Gerai ini didirikan pada tahun 2022 dan sudah berjalan, produk unggulan dari Kecamatan Ngamprah yang dikembangkan dari hasil UMKM,	2022

			UP2K, UPPKA, dan PEKKA	
2		Petani Zilenial Berbasis Digital Internet of Things (IoT)	Pembangunan pertanian yang menjadi bagian dari RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan ke-4 dan kelanjutan dari RPJPN 2005-2025. Pada RPJMN keempat (2020-2024) ini, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2023 dengan visi “Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia”. Kendala pembangunan pertanian antara lain rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian menyebabkan kesenjangan regenerasi sumber daya manusia di sektor pertanian. Petani zilenial dengan rentang usia 17 – 21 tahun memerlukan strategi khusus untuk menarik minat dan menjadi pelaku utama usaha pertanian. Salah Oleh karena itu diperlukan inovasi khusus yaitu Program Petani Zilenial Berbasis Digital Internet of Things (IoT) di Kabupaten Bandung Barat . Tujuan adanya ini mendorong regenerasi petani dan wirausahawan muda pertanian yang maju, mandiri dan modern, dengan teknologi pertanian Berbasis Digital Internet of Things (IoT)	2022
3		SAMARAJU (Sampah Magot Jadi Rupiah)	Inovasi ini didirikan pada 4 Agustus 2021 di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Latar belakang didirikannya inovasi demi memaksimalkan pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Ngamprah, tujuan didirikannya inovasi SAMARAJU demi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta membantu perkeekonomian masyarakat melalui pengelolaan sampah secara tepat	2021
4		Manik (Majalah dinding elektronik)	Aplikasi ini didirikan pada tahun 2021, secara garis besar Manik DISDIK dapat membangun komunikasi secara utuh antara siswa, guru, Dinas Pendidikan dan Masyarakat secara luas. Manik	2021

			DISDIK KBB diharapkan dapat menjadi alternatif media pembelajaran bagi siswa dan menjadi referensi bahan ajar yang dapat digunakan oleh guru. Selain itu melalui Manik DISDIK KBB berbagai potensi siswa dan daerah dapat terangkat serta dikenal oleh masyarakat luas. Inovasi Manik DISDIK dimanfaatkan sebagai media dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara hybrid/kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan luring. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara luring dengan peserta terbatas, secara daring melalui aplikasi zoom, dan disiarkan melalui streaming youtube dan live instagram, kepada masyarakat umum sebagai Dokumentasi kegiatan Disdik dan memperkenalkan ciri khas, potensi daerah, dan keunikan lokal Kabupaten Bandung Barat.	
5		RADIO BELAJAR DISDIK	Radio belajar adalah inovasi dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemic covid 19. Pembelajaran yang disiarkan melalui radio merupakan salah satu solusi bagi siswa yang tidak memiliki akses mengikuti pembelajaran secara online. Inovasi ini digagas berdasarkan kebutuhan akan layanan Pendidikan dalam masa pandemi covid – 19. Seluruh kegiatan dihentikan secara massif, termasuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Para pemangku kebijakan di ranah Pendidikan mengambil sikap untuk merubah pola pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ), salah satunya melalui daring (online) maupun luring (offline). Pembelajaran secara daring mewajibkan seluruh siswa untuk memiliki perangkat teknologi seperti handphone, komputer, laptop, dan juga kuota internet. Bagi siswa yang orangtuanya terdampak secara ekonomi sangat kesulitan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran online ini, jangankan untuk membeli perangkat teknologi dan juga kuota internet, untuk kehidupan sehari-hari pun terasa sangat sulit. Hal ini pun dirasakan oleh masyarakat yang tidak memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan formalnya. Peserta didik dalam program	2021

			pendidikan kesetaraan pun ikut mengalami penurunan yang signifikan, hal ini akan sangat berdampak pada angka rata-rata lama sekolah yang otomatis akan mengalami penurunan. Selain pembelajaran secara online, bagi siswa yang tidak bisa mengakses jenis pembelajaran ini maka Dinas Pendidikan memfasilitasi pembelajaran offline melalui berbagai metode. Metode yang digunakan dalam pembelajaran jenis ini diantaranya adalah guru berkunjung ke rumah siswa untuk memberikan materi, pembelajaran dengan menggunakan media TV melalui channel TVRI, dan juga pembelajaran dilakukan melalui media radio sekolah seperti yang dilakukan oleh beberapa SMP di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya SMP Negeri 1 Ngamprah. Radio ESTU 107.2 FM yang dimiliki SMPN 1 Ngamprah, menjadi salah satu solusi dalam melaksanakan program Pembelajaran Jarak Jauh. Tujuan utama diluncurkannya Radio ESTU adalah untuk mengakomodasi sebagian besar siswa yang belum memiliki smartphone sebagai perangkat utama dalam pembelajaran jarak jauh. Sekolah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi seluruh siswanya dalam mendapatkan layanan pendidikan yang sama.	
6		Tantangan Membaca Bandung Barat (TMBB)	Kabupaten Bandung Barat menindaklanjuti program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan Gerakan Literasi Sekolah Membaca dan Berkarya (GLS MEKAR), yang dideklarasikan pada Desember 2017. Pendeklarasian ini sekaligus pula peluncuran salah satu program GLS MEKAR yaitu Tantangan Membaca Bandung Barat (TMBB). TMBB merupakan program tantangan dari Bupati Bandung Barat kepada guru dan peserta didik. Awalnya tantangan ini dilakukan terhadap sekolah-sekolah jenjang Pendidikan Dasar baik SD maupun SMP, namun pada tahun kedua karena berbagai kendala, TMBB hanya diikuti oleh SMP saja. Kegiatan TMBB (Tantangan Membaca Bandung Barat) dilaksanakan selama 7 bulan pada tahun 2018 dan 2019, selama 3 bulan pada tahun 2020 dan	2022

			2021 dengan kegiatan yang terstruktur dan terencana. Akhir kegiatan siswa yang lolos mendapat reward dari Bupati Bandung Barat. Secara sederhana literasi diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Seseorang dikatakan literat jika ia mampu membaca dan menulis. Seiring dengan perkembangan zaman definisi literasi pun bergeser dari pengertian yang sempit sebagai keterampilan berbahasa menuju pengertian yang lebih luas menjadi literasi dalam berbagai bidang ilmu. Oleh karena itu, kemampuan literasi dalam berbagai bidang ilmu perlu dikuasai peserta didik dalam era digital 4.0. Pada era ini, kemampuan literasi peserta didik berkaitan erat dengan tuntutan untuk memahami berbagai informasi secara analitis, kritis, dan reflektif. Untuk terwujudnya kemampuan literasi tersebut, menuntut sekolah lebih menggalakkan kegiatan literasi. Pelaksanaan Tantangan Membaca Bandung Barat mengadopsi kegiatan tantangan membaca yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat walaupun ada inovasi yang dikemas dalam West Java Leader Reading's Challenge (WJLRC) yang dilaksanakan tahun 2017 dan Kabupaten Bandung Barat mengikuti tantangan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi tersebut kemudian menindak lanjuti kegiatan tersebut di Kabupaten Bandung Barat yang dikemas dalam TMBB yang sekarang sudah memasuki tahun ke empat. Tantangan membaca yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selama 10 bulan, namun dalam TMBB waktunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yaitu tahun 2018 selama 7 bulan dari bulan Februari sampai bulan Agustus, tahun 2019 selama 7 bulan, dari bulan maret sampai bulan September, sedangkan tahun 2020 dan 2021 karena terjadi pandemi covid 19 waktunya hanya selama 3 bulan yaitu dari bulan September sampai November. Tahun 2018 siswa ditantang untuk membaca buku dan mereview selama 7 bulan minimal seganyak 15 buku, tahun 2019 dengan jumlah bulan yang sama dengan	

			tahun 2018 siswa harus membaca dan mereviu minimal sebanyak 21 buku, sedangkan tahun 2020 dan 2021 siswa ditantang untuk membaca dan mereviu buku selama 3 bulan minimal 9 buku.	
		Jarnasih (Pembelajaran Kombinasi)	Peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik dan kependidikan sangat perlu dilakukan. Ada beberapa kendala yang menyebabkan hal ini belum dapat dilaksanakan dengan baik diantaranya: masih rendahnya kompetensi PTK (Penelitian Tindakan Kelas) khususnya pendidik yang dapat dilihat salah satu indikatornya rata-rata Uji Kompetensi Guru (UKG), banyaknya jumlah PTK, anggaran yang belum optimal, kondisi pandemi COVID 19, Revolusi Industri 4.0, dan wilayah yang luas. Oleh karena perlu adanya inovasi pembelajaran kombinasi (Jarnasi) yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online dalam rangka peningkatan kompetensi PTK. Inovasi ini didirikan pada tahun 2020. Adapun tujuan untuk jangka pendek dari Inovasi adalah tersedianya pedoman Jarnasi, tersedianya Learning Management System (LMS), dan terlaksananya Jarnasi bagi guru jenjang SD	2022
7		Kurikulum Muatan Lokal BKKL	Muatan lokal merupakan isi kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat. Muatan lokal sebagai program pendidikan mengandung makna kearifan lokal dengan media ajar yang dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan pembangunan daerah yang perlu diajarkan kepada peserta didik. Muatan lokal merupakan program pendidikan yang mengandung dua hal, yaitu bahan ajar dan media penyampaian yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Pendidikan Muatan Lokal Berbasis Keunggulan dan Kearifan Lokal Bandung Barat merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan	2022

			pendidikan melalui pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Keunggulan dan Kearifan Lokal Bandung Barat (BKKL – KBB) termasuk mata pelajaran muatan lokal di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Kedudukannya dalam proses pendidikan sama dengan kelompok mata pelajaran inti dan pengembangan diri. BKKL-KBB yang disajikan dalam bentuk Mata Pelajaran Muatan Lokal yang berdiri sendiri, atau Muatan Mata Pelajaran yang diimplementasikan dengan cara integrasi, korelasi atau insersi ke dalam mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum. BKKL KBB dalam struktur kurikulum pendidikan dasar adalah berupa muatan lokal pilihan. BKKL-KBB mencakup seperangkat acuan mengenai bahan ajar, prosedur, strategi, metoda, dan teknik pembelajaran yang berbasis keunggulan dan kearifan lokal di jenjang pendidikan dasar. Terdapat 3 jenis kompetensi dalam BKKL-KBB, yaitu: 1. Kompetensi Generik: esensial yang harus diajarkan di seluruh wilayah Bandung Barat; 2. Kompetensi Elektif: bersifat pilihan sesuai karakteristik wilayah tertentu; 3. Kompetensi Spesifik: bersifat khusus sesuai karakteristik lingkungan sekolah atau tempat tinggal peserta didik. Tujuan dari inovasi ini diantaranya : 1. Untuk menumbuhkan semangat dan nilai-nilai budaya yang berkembang di Bandung Barat terkait pembentukan karakter anak bangsa sejak dini; 2. Untuk memperkenalkan budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal Bandung Barat kepada anak sejak dini; 3. Untuk melestarikan budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal Bandung Barat. Hasil inovasi ini adalah implementasi kurikulum BKKL-KBB khususnya	



			dalam mata pelajaran muatan lokal jenjang SD dan SMP di wilayah KBB	
8		Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)	Terwujudnya peningkatan Inovasi non-digital pelayanan respon time. Pembentukan REDKAR sebagai strategi penanggulangan kebakaran merupakan Implementasi strategi pelayanan penanggulangan kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, yang bertujuan untuk Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, Membantu pencapaian mutu layanan, standar pelayanan sub urusan kebakaran, Menciptakan sinergi antara dinas dengan Masyarakat, Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran	2023

Sumber : Kajian Studi Baseline Indikator TPB/ SDGs KBB, Litbang Bappelitbangda, 2023

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 berdasarkan prospek ekonomi hasil perhitungan proyeksi dengan mempertimbangkan kondisi agregat perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2025. Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2025. Kerangka pendanaan menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan upaya untuk memberikan gambaran perkembangan ekonomi makro diberbagai level yang akan mempengaruhi penerimaan pendapatan dan belanja daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat dalam bidang perekonomian tercantum di dalam Tujuan 2 yaitu “Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan”

Sasaran yang akan di capai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan diantaranya:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan (Pertanian, Perdagangan, Industri Pengolahan dan Pariwisata)
2. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha
4. Terkendalinya Tingkat Kemiskinan
5. Meningkatnya Ketahanan Pangan
6. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2023, target tahun 2024 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2024 dan 2025. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bandung Barat juga mempertimbangkan perkembangan ekonomi global,



nasional dan provinsi tahun 2024 maupun perkiraan tahun 2025, serta arah kebijakan dan target yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Bandung Barat.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Bandung Barat

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu menggunakan pendekatan produksi/sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya/pengeluaran yang disajikan atas harga berlaku dan harga konstan.

Selama periode 2019-2023, perekonomian Kabupaten Bandung Barat menunjukkan trend yang relatif baik, walaupun pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan minus. Perekonomian Kabupaten Bandung Barat mengalami fluktuasi, yakni tahun 2019 sebesar 5,05 persen, kemudian tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,41 persen negatif dibanding tahun 2019. Pada tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan kembali yakni sebesar 3,46 dan 5,34 persen. Percepatan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ini secara umum dikarenakan keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang berangsur-angsur menuju normal sejalan dengan proses transisi status dari pandemi menuju endemi. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat mengalami perlambatan, dari 5,34 persen (2022) menjadi 5,00 persen (2023). Perlambatan tersebut dari sisi produksi dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan akibat kekeringan dan el nino. Berdasarkan permintaan akhir, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan yang relatif kecil, yakni dari 4,37 persen pada tahun 2022 menjadi 4,84 persen tahun 2023

Pada periode tahun 2019-2023 PDRB Kabupaten Bandung Barat atas dasar harga berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 47.180,08 miliar Rupiah (2019); 46.478,90 miliar Rupiah (2020); 48.764,31 miliar Rupiah (2021); 52.921,29 miliar Rupiah (2022) dan 56.945,18 miliar Rupiah (2023). Peningkatan pada periode 2019-2023 ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume.

Pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2023 disertai dengan kasus COVID-19 yang semakin kecil, mengakibatkan kegiatan perekonomian semakin aktif. Berputarnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor disertai dengan peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.



Nilai PDRB Bandung Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 56.945,18 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 4.023,89 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 52.921,29 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB Bandung Barat ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 33.393,29 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 35.062,19 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Kabupaten Bandung Barat mengalami pertumbuhan ekonomi 5,00 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian PDRB ini akibat dampak positif makin pulihnya dan aktifnya kegiatan perekonomian yang menyebabkan meningkatnya aktivitas produksi hampir di seluruh lapangan usaha.

3.1.1.1 Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung Barat

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu menggunakan pendekatan produksi/sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya/pengeluaran. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap Kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha bertujuan untuk melihat struktur ekonomi, besarnya peranan berbagai lapangan usaha dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha atau yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah tersebut.

Selama lima tahun terakhir (2019-2022) struktur perekonomian Bandung Barat didominasi oleh 6 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sementara peranan lapangan usaha- lapangan usaha lainnya masing- masing masih berada di bawah 5 (lima) persen, distribusi peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 (persen)

	Sektor	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,4 9	13,2 8	12,5 9	12,8 7	12,7 3
2	Pertambangan dan Penggalian	1,01	1,02	1,04	0,98	0,94
3	Industri Pengolahan	39,8 8	40,3 3	41,4 0	41,6 0	41,6 6
4	Listrik dan Gas	0,83	0,81	0,86	0,83	0,81
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
6	Konstruksi	7,66	7,36	7,55	7,33	7,35
7	Perdagangan besar dan eceran	13,5 8	12,8 9	12,6 9	12,3 5	12,4 0
8	Transportasi dan pergudangan	5,31	5,24	5,15	5,49	5,99
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,16	5,17	4,96	5,26	5,38
10	Informasi dan komunikasi	1,67	2,15	2,19	2,12	2,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,88	0,90	0,93	0,93	0,91
12	Real Estate	1,81	1,84	1,93	1,92	1,93
13	Jasa Perusahaan	0,45	0,41	0,45	0,48	0,50
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,89	2,73	2,55	2,27	2,19
15	Jasa Pendidikan	3,69	4,18	4,07	3,93	3,95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	0,55	0,56	0,56	0,55	0,56
17	Jasa lainnya	1,11	1,08	1,03	1,06	1,08
PDRB ADHB		100	100	100	100	100

Sumber: PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha 2019 – 2023, BPS 2024.

1. Industri Pengolahan

Industri pengolahan merupakan sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat dibanding sektor lainnya, dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antar 39,96 - 41,66 persen dari total PDRB.

2. Perdagangan Besar dan Eceran

Sektor Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi terbesar ke dua setelah Industri Pengolahan dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antar 12,35 - 13,58 persen dari total PDRB. Pada saat pandemi covid-19 sektor ini sangat terpengaruh dengan adanya pembatasan aktifitas manusia atau barang sehingga kontribusinya melambat dibanding saat kondisi normal sebelum adanya covid-19 tetapi berangsur-angsur pulih kembali di tahun 2022 dan 2023.

3. Pertanian

Lingkup lapangan usaha ini meliputi Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Perikanan. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antar 12,59 - 13,49 persen dari total PDRB. Khusus di tahun 2020 pada saat awal terjadi pandemi covid-19, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ada pergeseran dimana lapangan usaha pertanian menjadi urutan kedua melampaui pencapaian lapangan usaha perdagangan. Ini terjadi karena dampak Pandemi Covid-19, lapangan usaha pertanian walaupun sama mengalami hantaman karena covid namun tidak sebesar lapangan usaha perdagangan.

4. Konstruksi

Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha konstruksi memberikan andil terhadap PDRB dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antar 7,33 - 7,66 persen dari total PDRB. Kegiatan ekonomi utama pada lapangan usaha ini mencakup konstruksi pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prefabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Proyek pembangunan infrastruktur strategis di Bandung Barat jangka menengah seperti Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung serta Proyek perbaikan dan pembukaan ruas jalan di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat memberikan kontribusi pada perekonomian di sektor ini.

5. Transportasi dan Pergudangan

Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada tahun 2018 - 2022 memberikan andil 5,15 - 5,99 persen terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ekonomi utama pada lapangan usaha sektor transportasi dan pergudangan didorong oleh perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, dan konstruksi serta juga dipengaruhi oleh peningkatan volume ekspor dan impor.

6. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman

Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman pada tahun 2019 - 2023 memberikan andil 4,96 - 5,38 persen terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ekonomi utama pada lapangan usaha ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (expenditure) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (production). PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang

terlibat (balas jasa faktor produksi). Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Dari sisi pengeluaran selama periode 2018-2022, PDRB Kabupaten Bandung Barat sebagian besar (lebih dari 65 persen) digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) dan pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) yakni sekitar 20,13 s.d 21,61 persen. Di sisi lain, perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih tinggi dari impor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “surplus” atau menguntungkan, yang mengindikasikan bahwa kebutuhan domestik dapat dipenuhi oleh produk yang berasal dari dalam wilayah sendiri bahkan dapat membantu memenuhi kebutuhan domestik wilayah lain (ekspor).

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 5,63 - 6,34 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih tinggi dari impor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “surplus” atau menguntungkan, yang mengindikasikan bahwa kebutuhan domestik dapat dipenuhi oleh produk yang berasal dari dalam wilayah sendiri bahkan dapat membantu memenuhi kebutuhan domestik wilayah lain (ekspor).

Untuk lebih jelasnya kontribusi masing-masing komponen, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022*	2023**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga(1.a. s/d 1.g.)	65,71	67,26	66,16	67,24	68,07
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	34,65	36,47	36,21	37,31	37,39
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,46	2,39	2,31	2,24	2,21
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,75	9,85	9,43	9,36	9,44
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,24	2,36	2,34	2,28	2,25
1.e. Transportasi, Komunikasi,Rekreasi & Budaya	11,30	10,86	10,68	10,91	11,06
1.f. Hotel dan Restoran	2,62	2,56	2,49	2,50	2,54
1.g. Lainnya	2,69	2,77	2,69	2,64	2,63
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,96	0,95	0,93	0,92	0,98
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,14	6,34	6,31	5,82	5,63
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	21,06	20,13	21,61	21,20	21,27
4.a. Bangunan	20,08	19,30	20,75	20,32	20,37
4.b. Non Bangunan	0,99	0,83	0,87	0,88	0,90

5. Perubahan Inventori	3,91	1,42	-0,79	0,11	0,09
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	2,22	3,90	5,77	4,71	3,97
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB KBB Menurut Pengeluaran 2019 – 2023, BPS 2024.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Bandung Barat, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Bandung Barat maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dari tabel 3.2 terlihat bahwa selama periode 2019-2023, pengeluaran rumah tangga didominasi oleh konsumsi pada kelompok makanan, minuman dan rokok yang berkisar antara 34,65-37,39 persen, kemudian pengeluaran untuk transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya sekitar 10,68 - 11,30 persen, disusul kemudian oleh pengeluaran pada kelompok perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumahtangga yang berkisar antara 9,36 - 9,85 persen.

3.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah, hal ini berguna untuk mengetahui apakah suatu wilayah tersebut mengalami peningkatan secara terus menerus atau sebaliknya yaitu mengalami penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan 2010, pertumbuhan PDRB Bandung Barat pada tahun 2023 melambat dibandingkan tahun 2022. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh penurunan pendapatan di beberapa industri kimia, penurunan laju pertumbuhan ekonomi secara umum dan produksi tanaman pangan (padi) turun akibat bencana kekeringan dan el nino. Nilai PDRB Bandung Barat tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 35.062,19 miliar rupiah. Angka tersebut naik sebesar 1.668,90 miliar dari 33.393,29 miliar rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 persen melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5,34 persen.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Bandung Barat pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian, kehutanan

dan perikanan, sector industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, penyediaan akomodasi dan makan minum, real estate dan jasa perusahaan. Perlambatan pertumbuhan terbesar terjadi pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang hanya bertumbuh 1,59 persen, disusul kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang tumbuh melambat sebesar 2,23 persen. Kategori pengadaan listrik dan gas melambat lajunya sebesar 2,32 persen, diikuti kategori industri pengolahan dan real estate yang pertumbuhannya melambat sebesar masing-masing 5,30 persen dan 6,23 persen. Pertumbuhan yang relative lambat juga terjadi pada kategori jasa perusahaan dan penyediaan akomodasi dan makan minum yang masing-masing bertumbuh sebesar sebesar 7,27 persen dan 9,20 persen.

Sepuluh kategori lapangan usaha lainnya mengalami percepatan pertumbuhan pada tahun 2023 dibanding tahun 2022. Percepatan pertumbuhan terbesar terjadi pada kategori transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 10,37 persen, diikuti jasa lainnya sebesar 6,78 persen, kemudian kategori informasi dan komunikasi sebesar 6,27 persen. Kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kategori konstruksi, serta kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga mengalami percepatan pertumbuhan sebesar masing-masing 5,74 persen, 4,48 persen serta 4,03 persen.

Pertumbuhan yang relatif cepat juga dicapai 4 kategori lainnya, yaitu kategori jasa pendidikan, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan serta pertambangan dan penggalian. Keempat kategori tersebut mengalami percepatan pertumbuhan sebesar masing-masing 3,96 persen, 3,53 persen, 2,41 persen serta 0,69 persen. Tabel berikut memperlihatkan capaian kinerja pembangunan sector ekonomi dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2019 – 2023:

Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 (persen)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,24	-0,62	-1,03	4,11	1,59
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,29	-2,18	6,26	-0,11	0,69
C	Industri Pengolahan	6,26	-2,42	4,87	6,43	5,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,17	-3,08	10,94	4,70	2,32
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,94	10,21	9,58	7,61	2,23
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,38	-5,71	7,38	1,75	4,48

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,84	-8,15	2,93	3,93	4,03
H	Transportasi dan Pergudangan	4,43	-3,82	1,10	9,95	10,37
I	Penyediaan Akomodasi & Mamin	6,33	-4,67	-0,99	10,03	9,20
J	Informasi dan Komunikasi/	8,39	27,03	7,79	5,58	6,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,44	1,41	5,61	-1,24	3,53
L	Real Estat	8,58	0,21	9,86	8,06	6,23
M,N	Jasa Perusahaan	7,58	-12,11	7,98	10,65	7,27
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,03	-7,68	-2,56	-3,09	2,41
P	Jasa Pendidikan	4,76	6,53	0,04	2,44	3,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,55	-0,28	6,09	5,25	5,74
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,45	-0,38	0,76	6,30	6,78
Produk Domestik Regional Bruto		5,05	-2,41	3,46	5,34	5,00

Sumber: PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha 2019 – 2023, BPS 2024.

Peningkatan volume ekonomi di Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 tersebut tercermin baik dari sisi produksi (supply side) seperti tabel 3.3 dengan percepatan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 10,37 persen.

Bila dilihat dari sisi permintaan akhir (*demand side*) atau PDRB pengeluaran, terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan, dengan pertumbuhan masing-masing komponen PDRB pengeluaran selama periode tahun 2019-2023 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2019 - 2023 (persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022*	2023**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	5,13	-0,88	1,33	4,37	4,84
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,78	1,97	2,01	4,37	4,37
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,84	-7,16	0,48	3,41	3,92
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,49	-1,41	-0,17	4,30	4,54

1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,35	2,15	4,60	2,68	3,76
1.e. Transportasi, Komunikasi,Rekreasi & Budaya	4,47	-5,53	0,79	5,66	6,90
1.f. Hotel dan Restoran	4,75	-4,86	0,61	4,89	5,62
1.g. Lainnya	2,79	-2,08	0,03	1,25	3,57
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	3,24	-4,58	1,57	3,05	10,34
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,26	0,02	2,05	-2,25	2,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,70	-6,24	7,35	0,59	4,55
4.a. Bangunan	6,15	-5,71	7,38	0,40	4,48
4.b. Non Bangunan	-3,33	-17,82	6,69	5,35	6,15
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	5,05	-2,41	3,46	5,34	5,00

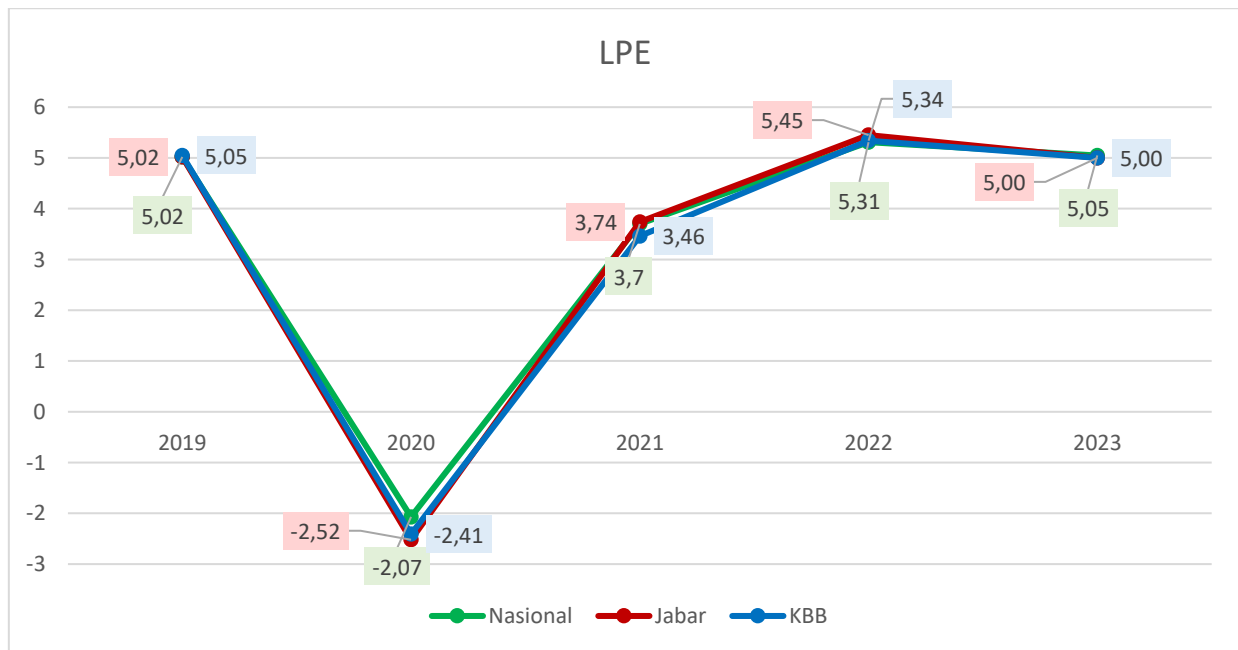
Sumber: PDRB KBB Menurut Pengeluaran 2019 – 2023, BPS 2024

Pada tabel diatas, bahwa pertumbuhan terbesar PDRB menurut pengeluaran tahun 2023 adalah komponen konsumsi LNPR sebesar 10,34 persen, hal ini karena Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPR merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran sebagian besar (lebih dari 65 persen) digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 20,13 s.d 21,61 persen. Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 5,63 - 6,34 persen. Pada periode tahun 2019-2023 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan. Sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Bandung Barat maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga. Periode 2019-2023, pengeluaran rumah tangga didominasi oleh konsumsi pada kelompok makanan, minuman dan rokok yang berkisar antara 52,74 sampai dengan 55,75 persen. Pengeluaran untuk transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 16,14 sampai dengan 17,20 persen, disusul kemudian oleh pengeluaran pada kelompok perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga yang berkisar antara 13,92 sampai dengan 14,83 persen

Dibandingkan LPE Nasional dan Provinsi Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 menunjukkan kinerja yang sedikit lebih rendah dari capaian nasional dengan relisasi sebesar pada tahun 2023 sebesar 5,05 persen, tetapi pada tahun 2023 LPE Kab. Bandung Barat sebesar 5,00 sama dengan capaian Prov. Jawa Barat, seperti terlihat pada diagram berikut:

Gambar 3.1 Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Prov. Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2023, diolah Bappelitbangda

3.1.1.3 Inflasi

Secara teoritis, laju inflasi berperan dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tergolong rendah akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif (meskipun pertumbuhan tersebut dapat saja bersifat menurun). Apabila sisi permintaan di dalam perekonomian lebih kuat dibandingkan dengan sisi penawarannya, maka secara teoritis penurunan laju inflasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, demikian sebaliknya.

Kabupaten Bandung Barat bukan termasuk Kabupaten/Kota yang dihitung nilai inflasinya. Bagi kabupaten yang tidak dihitung maka ada kota rujukan inflasi, dimana kota inflasi tersebut memiliki karakteristik ekonomi yang tidak jauh berbeda dan atau memiliki kedekatan secara geografis. Berikut ditampilkan inflasi Kota Bandung, dengan pertimbangan secara geografis Kota Bandung merupakan kota yang menjadi acuan perhitungan inflasi Kabupaten Bandung Barat, serta sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat berbelanja dan memiliki pola konsumsi yang mengarah ke Kota Bandung.

Berdasarkan data BPS, perkembangan inflasi tahunan 7 Kota di Jawa Barat Desember 2023, Inflasi y-on-y terendah terjadi di Kota Bandung sebesar 0,63 persen, dengan IHK 116,16 angka inflasi dan IHK Kota Bandung ini sebagai rujukan inflasi dan IHK di Kabupaten Bandung Barat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tujuh Kota di Jawa Barat Desember 2023

Kota	IHK Des 2023	Inflasi		
		Des 2023/1	Des 2023	Des 2023/3
Kota Bogor	119,42	0,22	3,36	3,36
Kota Sukabumi	116,40	0,19	2,72	2,72
Kota Bandung	116,16	0,32	0,63	0,63
Kota Cirebon	113,87	0,29	3,22	3,22
Kota Bekasi	119,30	0,54	3,14	3,14
Kota Depok	117,76	0,27	2,49	2,49
Kota Tasikmalaya	114,96	0,27	2,84	2,84
Jawa Barat	119,42	0,22	3,36	3,36

Sumber: Perkembangan IHK Gabungan 7 Kota di Jabar Des 2023, BPS Prov. Jabar, 2024

Sepanjang tahun 2023, Kota Bandung sebagai rujukan inflasi dan IHK Kabupaten Bandung Barat mengalami inflasi sebanyak 10 kali dan deflasi sebanyak 2 (dua) kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari 2024 sebesar 7,50 persen dan deflasi terjadi pada bulan Maret dan Agustus 2024. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2023 secara umum menunjukkan adanya kenaikan.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS pada Desember 2023 terjadi inflasi y-on-y sebesar 0,63 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,43 pada Desember 2022 menjadi 116,16 pada Desember 2023. Secara m-to-m mengalami inflasi sebesar 0,32 persen dan inflasi y-to-d sebesar 0,63 persen.

Pada awal Tahun Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar 115,87. Indeksnya meningkat sehingga pada akhir tahun IHK Kabupaten Bandung Barat mencapai 116,16. Dengan demikian Inflasi y-to-y Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 adalah sebesar 0,63 persen.

Tabel 3.6 Perkembangan IHK dan Inflasi Tahun 2023

IHK dan Inflasi	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
IHK	115.87	116.17	114.43	114.80	114.92	115.08	115.34	115.32	115.45	115.54	115.79	116.16
Inflasi m to m	0.38	0.26	-1.50	0.32	0.10	0.14	0.23	-0.02	0.11	0.08	0.22	0.32
Inflasi y to y	7.37	7.50	5.00	4.17	3.90	3.28	2.89	3.12	2.30	2.27	2.36	0.63

Sumber: BPS Kota Bandung, 2024

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,45 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,57 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,91 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,26 persen; kelompok transportasi sebesar 0,42 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,14 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,06 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,39 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,61 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,01 persen. Sementara kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga deflasi sebesar 5,96 persen, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 IHK Des Tahun 2022, IHK Des Tahun 2023 dan Inflasi Tahun 2023 Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok	IHK Desember 2022	IHK Desember 2023	Inflasi m-to-m Tahun 2023	Inflasi y-to-y Tahun 2023
Umum	115.43	116.16	0.32	0.63
Makanan, Minuman Dan Tembakau	119.18	126.87	1.04	6.45
Pakaian Dan Alas Kaki	108.93	109.55	-0.06	0.57
Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	116.50	109.56	-0.04	-5.96
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	120.41	121.51	-0.11	0.91
Kesehatan	113.86	115.29	0.03	1.26
Transportasi	116.55	117.04	0.11	0.42
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	99.28	99.42	-0.06	0.14
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	108.24	108.31	0.00	0.06
Pendidikan	106.81	107.23	0.00	0.39
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	111.10	112.89	0.15	1.61
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	125.64	130.68	0.42	4.01

Sumber: BPS Kota Bandung, 2024

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Desember 2023, diantaranya beras, cabai merah, rokok kretek filter, sewa rumah, kontrak rumah, emas perhiasan, cabai rawit, bawang putih, rokok putih, rekreasi, daging ayam ras, sate, gula pasir, sekolah menengah atas, upah asisten rumah tangga.

Berdasarkan data BPS, perkembangan IHK dan inflasi Kabupaten Bandung Barat sampai dengan bulan April tahun 2024, dengan IHK awal tahun sebesar 105.00 meningkat pada bulan April 2024 menjadi 106.12 dengan inflasi m to m bulan April sebesar 0,13 persen dan

inflasi y to y sebesar 2,42 persen. Selama Tahun 2024 inflasi tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 2,58 persen, berikut rincian perkembangan IHK dan inflasi tahun 2024.

Tabel 3.8 Perkembangan IHK dan Inflasi s.d April Tahun 2024

IHK dan Inflasi	Januari	Februari	Maret	April
IHK	105,00	105,40	105.98	106,12
Inflasi m-to-m	0.10	0.38	0.55	0.13
Inflasi y-to-y	1.90	1.95	2.58	2.42

Sumber: BPS Kota Bandung, 2024

Inflasi April 2024, terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, dengan kenaikan tertinggi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,36 persen dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 5,05 persen.

Tabel 3.9 IHK dan Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran April Tahun 2024

Kelompok	IHK Maret	IHK April 2024	Inflasi m-to-m Tahun 2024	Inflasi y-to-y Tahun 2024
Umum	114.80	106.12	0.13	2.42
Makanan, Minuman Dan Tembakau	122.66	111.26	-0.13	6.36
Pakaian Dan Alas Kaki	109.62	102.17	0.40	1.21
Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	109.76	101.81	-0.01	-0.36
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	121.32	101.05	0.32	-0.31
Kesehatan	114.55	105.85	0.24	3.93
Transportasi	116.47	109.63	0.58	0.35
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	99.36	100.09	0.00	-0.08
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	108.24	103.59	-0.04	0.62
Pendidikan	106.81	100.85	0.00	0.43
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	111.97	105.46	0.06	2.06
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	127.92	109.77	1.35	5.05

Sumber: BPS Kota Bandung, 2024

Beberapa komoditi yang memberi andil inflasi pada bulan April 2024, yaitu bawang merah sebesar 0,09 persen; Sigaret Kretek Mesin sebesar 0,06 persen; emas perhiasan sebesar 0,06 persen; angkutan antar kota sebesar 0,05 persen; bawang putih sebesar 0,03 persen; daging ayam sebesar 0,03 persen, beras sebesar -0,03 persen; cabai rawit sebesar -0,07 persen; telur ayam ras sebesar -0,10 persen; dan cabai merah sebesar -0,14 persen

3.1.1.4 Ketenagakerjaan

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik jika pertumbuhan angkatan kerja yang terserap/terakomodasi oleh lapangan kerja dapat mengimbangi pengangguran yang terjadi. Ketenagakerjaan tidak dapat terlepas dari pertumbuhan ekonomi, tumbuhnya ekonomi diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

Penduduk angkatan kerja yang terdiri dari komposisi penduduk bekerja dan mencari pekerjaan pada dasarnya merupakan bagian dari penduduk yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan perekonomian di suatu wilayah. Indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat dilihat berdasarkan jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat pengangguran Terbuka (TPT).

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023, dengan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 1.413.347 orang, sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 947.124 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 466.223 orang. Komposisi angkatan kerja pada tahun 2023 terdiri dari 870.269 orang penduduk yang bekerja dan 76.855 orang pengangguran. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 129.630 orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 17,5 persen, sementara pengangguran turun sebanyak 2.065 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. TPAK pada tahun 2023 sebesar 67,01 persen, naik 2,64 persen poin dibandingkan tahun 2022. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2023, TPAK laki-laki sebesar 87,72 persen, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang sebesar 45,55 persen. Jika dibandingkan tahun 2022, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 2,24 persen poin (dari 85,48 persen menjadi 87,72 persen) dan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 2,84 persen poin (dari 42,71 persen menjadi 45,55 persen).

Tabel 3.10 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Perubahan Thn 2021 - Thn 2022		Perubahan Thn 2022 - Thn 2023	
	orang	orang	orang	orang	persen	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	1.260.800	1.273.131	1.413.347	12.331	0,98	140.216	11,01
Angkatan Kerja	765.935	819.559	947.124	53.624	7,00	127.565	15,57
- Bekerja	676.733	740.639	870.269	63.906	9,44	129.630	17,50
- Pengangguran	89.202	78.920	76.855	-10.282	-11,53	-2.065	-2,62
Bukan Angkatan Kerja	494.865	453.527	466.223	-41.338	-8,35	12.696	2,80
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
TPAK	60,75	64,37	67,01	3,62		2,64	
- Laki-Laki	80,76	85,48	87,72	4,72		2,24	
- Perempuan	40,19	42,71	45,55	2,52		2,84	

Sumber: Ketenagakerjaan KBB, BPS 2023.

Karakteristik penduduk bekerja di Kabupaten Bandung Barat dilihat berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, adalah sebagai berikut:

1. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor jasa sebesar 49,47 persen; sektor manufaktur sebesar 31,51 persen; dan Pertanian sebesar 19,02 persen. Dibandingkan tahun 2022, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah lapangan pekerjaan sektor jasa (92.296 orang), sektor manufaktur (24.255 orang) dan sektor pertanian (13.079 orang)

2. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Pada tahun 2023, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/ pegawai, yaitu sebesar 38,15 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 2,59 persen. Dibandingkan tahun 2022, status pekerjaan yang mengalami kenaikan persentase terbesar adalah status pekerja keluarga/tak dibayar yaitu sebesar 3,03 persen poin

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada tahun 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 515.696 orang (59,26 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 354.573 orang (40,74 persen).

Dibandingkan Agustus 2022, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal mengalami kenaikan sebesar 84.324 orang

3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pada tahun 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah, yaitu sebesar 40,87 persen. Sementara penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan universitas sebesar 5,36 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022. Dibandingkan dengan tahun 2022, penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah mengalami penurunan persentase sebesar 2,11 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mengalami peningkatan persentase, dengan peningkatan terbesar pada pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, yakni sebesar 1,85 persen poin.

Lebih jelasnya untuk melihat karakteristik penduduk bekerja di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Karakteristik Penduduk Bekerja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Karakteristik Penduduk Bekerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Perubahan Thn 2021-Thn 2022		Perubahan Thn2022—Thn2023	
	orang	persen (%)	orang	persen (%)	orang	persen (%)	orang	persen poin ¹⁾	orang	persen poin ¹⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Lapangan Pekerjaan Utama										
A. Pertanian	171.855	25,39	152.453	20,58	165.532	19,02	-19.402	-4,81	13.079	-1,56
B. Manufaktur	189.780	28,04	249.979	33,75	274.234	31,51	60.199	5,71	24.255	-2,24
C. Jasa	315.098	46,56	338.207	45,66	430.503	49,47	23.109	-0,9	92.296	3,81
Jumlah	676.733	100,00	740.639	100,00	870.269	100,00	63.906		129.630	
Status Pekerjaan Utama										
Berusaha sendiri	166.482	24,60	197.371	26,65	210.495	24,19	30.889	2,05	13.124	-2,46
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	70.999	10,49	70.986	9,58	84.073	9,66	-13	-0,91	13.087	0,08
Berusaha dibantu buruh tetap	10.672	1,58	17.903	2,42	22.572	2,60	7.231	0,84	4.669	0,18
Buruh/karyawan/pegawai	276.393	40,84	291.364	39,34	332.001	38,15	14.971	-1,5	40.637	-1,19
Pekerja bebas di pertanian dan non pertanian	98.637	14,58	119.814	16,18	144.043	16,55	21.177	1,6	24.229	0,37
Pekerja keluarga/tak dibayar	53.550	7,91	43.201	5,83	77.085	8,86	-10.349	-2,08	33.884	3,03
Jumlah	676.733	100,00	740.639	100,00	870.269	100,00	63.906		129.630	
Status Pekerjaan Formal/Informal										
Formal	325.523	48,10	309.267	41,76	354.573	40,74	-16.256	-6,34	45.306	-1,02
Informal	351.523	51,90	431.372	58,24	515.696	59,26	79.849	6,34	84.324	1,02
Jumlah	676.733	100,00	740.639	100,00	870.269	100,00	65.593		129.630	
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan										
SD ke Bawah	316.379	46,75	352.722	47,62	396.043	45,51	36.343	0,87	43.321	-2,11
Sekolah Menengah Pertama	141.744	20,95	150.531	20,32	187.853	21,59	8.787	-0,63	37.322	1,27
Sekolah Menengah Atas	107.114	15,83	109.707	14,81	121.680	13,98	2.593	-1,02	11.973	-0,83
Sekolah Menengah Kejuruan	67.107	9,92	81.077	10,95	111.356	12,80	13.970	1,03	30.279	1,85
Diploma I/II/III	9.716	1,44	9.871	1,33	9.829	1,13	155	-0,11	-42	-0,2
Universitas (Diploma IV, S1, S2, S3)	34.673	5,12	36.731	4,96	43.508	5,00	2.058	-0,16	6.777	0,04
Jumlah	676.733	100,00	740.639	100,00	870.269	100,00	63.906		129.630	

Sumber: Ketenagakerjaan KBB, BPS 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas tahun 2023 sebesar 8,11 persen. Hal

ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar delapan orang penganggur. Capaian TPT tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,52 persen poin dibandingkan dengan tahun 2022 (9,63 persen).

Pada tahun 2023, TPT laki-laki sebesar 8,76 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,84 persen. Jika dibandingkan tahun 2022, TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 2,22 persen poin sedangkan yang perempuan mengalami penurunan, sebesar 9,14 persen poin. Berikut tabel karakteristik pengangguran di Kab. Bandung Barat tahun 2023.

Tabel 3.12 Karakteristik Penduduk Bekerja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Karakteristik Pengangguran	Tahun 2021 persen	Tahun 2022 persen	Tahun 2023 persen	Perubahan Thn 2021—Thn 2022 persen poin	Perubahan Thn 2022—Thn 2023 persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	11,65	9,63	8,11	-2,02	-1,52
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	11,78	6,54	8,76	-5,24	2,22
- Perempuan	11,37	15,98	6,84	4,61	-9,14

Sumber: Ketenagakerjaan KBB, BPS 2023

3.1.1.5 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan sebagai indikator yang dihasilkan dari perbedaan pengeluaran/pendapatan masyarakat, suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin ketika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Perkembangan tingkat kemiskinan, penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 - 2029 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.13 Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2023

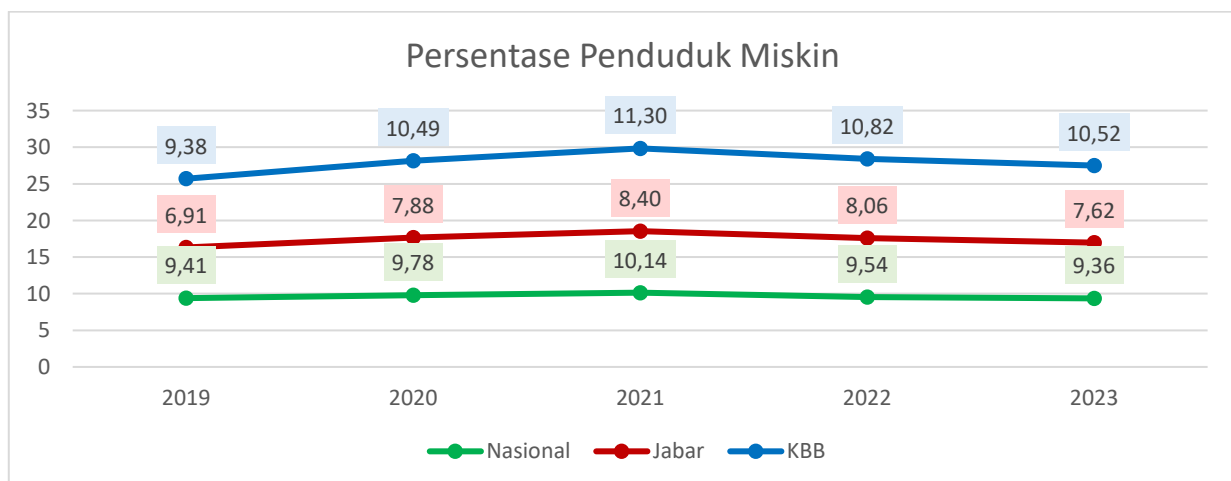
Persentase Penduduk Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	
		(rupiah/kapita/bulan)	Miskin (persen)
2019	341.307	159,03	9,38
2020	362.212	179,46	10,49
2021	374.470	190,77	11,30
2022	393.956	183,70	10,82
2023	426.355	179,43	10,52

Sumber : KBBDA, 2020-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah.

Dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2019 –2023, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp.85.048,- dari Rp.341.307,- per kapita per bulan pada Tahun 2019 menjadi Rp.426.355,- per kapita per bulan pada Tahun 2023.

Capaian tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 10,52 persen dari target 10,75 persen. Bila dilihat dari pencapaian tahun 2022 keberhasilan penanggulangan kemiskinan tahun 2023 turun sebesar 0,30 persen. Walaupun mengalami penurunan, angka kemiskinan ini masih terbilang tinggi masih berada pada skala 2 digit bila dibandingkan dengan capaian Jawa Barat sebesar 7,62 persen bahkan di Kab/Kota di Jawa Barat angka kemiskinan Kab. Bandung Barat masih berada pada peringkat 22 dari 27 Kab/Kota. Hal ini merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah di tahun berikutnya.

Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023



Sumber : Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Berdasarkan Kepmen Menko Bidang PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 bahwa Kab. Bandung Barat merupakan salah satu prioritas lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem dari 212 Kab/Kota. Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Bandung Barat terus mengalami penurunan dari 2,91 persen tahun 2020 menjadi 0,88 persen pada tahun 2023 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Data Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Data P3KE di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem				Persen Penduduk Miskin Ekstrem			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Bogor	63,497	107,250	146,120	47,220	1.17	1.77	2.38	0.76
2	Sukabumi	30,525	24,610	19,900	24,050	1.12	0.98	0.78	0.94
3	Cianjur	94,891	57,040	36,160	11,890	3.83	2.45	1.55	0.51
4	Bandung	89,145	66,960	56,430	46,810	2.46	1.78	1.48	1.22
5	Garut	50,937	30,320	82,170	9,550	1.97	1.15	3.10	0.36
6	Tasikmalaya	23,315	28,240	15,740	27,120	1.25	1.57	0.87	1.49
7	Ciamis	20,280	5,510	17,900	1,320	1.65	0.45	1.47	0.11
8	Kuningan	73,564	24,030	31,890	15,700	6.30	2.20	2.90	1.42
9	Cirebon	74,930	64,440	81,890	36,640	3.30	2.92	3.70	1.65
10	Majalengka	39,164	43,840	24,130	10,640	3.00	3.58	1.96	0.86
11	Sumedang	57,510	31,710	36,820	6,370	4.99	2.69	3.11	0.53
12	Indramayu	110,433	75,820	53,050	38,550	6.02	4.32	3.01	2.18
13	Subang	59,825	57,510	35,440	34,610	3.75	3.63	2.23	2.16
14	Purwakarta	29,437	18,580	16,930	10,190	2.95	1.95	1.76	1.06
15	Karawang	110,003	28,220	64,020	17,890	4.51	1.20	2.70	0.75
16	Bekasi	71,288	56,000	25,820	19,820	2.29	1.44	0.64	0.48
17	Bandung Barat	52,041	28,250	33,590	15,040	2.91	1.67	1.98	0.88
18	Pangandaran	17,413	5,610	5,930	2,650	4.11	1.38	1.46	0.65
19	Kota Bogor	28,789	13,590	14,450	4,930	2.76	1.23	1.30	0.44
20	Kota Sukabumi	10,875	9,980	4,490	2,540	3.14	3.03	1.35	0.76
21	Kota Bandung	41,795	24,790	25,370	9,140	1.71	0.96	0.98	0.35
22	Kota Cirebon	17,732	13,060	5,320	1,090	5.32	4.10	1.66	0.34
23	Kota Bekasi	31,796	33,250	61,750	-	1.25	1.09	1.99	-
24	Kota Depok	50,380	9,440	17,570	-	2.45	0.38	0.69	-
25	Kota Cimahi	11,027	8,340	2,630	2,980	1.94	1.37	0.43	0.49
26	Kota Tasikmalaya	30,365	27,170	23,880	6,590	4.24	3.99	3.49	0.96
27	Kota Banjar	2,894	2,080	2,490	80	1.44	1.10	1.32	0.04
Provinsi Jawa Barat		1,293,850	895,640	941,860	403,380	2.68	1.79	1.86	0.79
Nasional						4.00	2.14	1.74	1.12

Sumber : Data P3KE, Kemenko PMK, 2024.

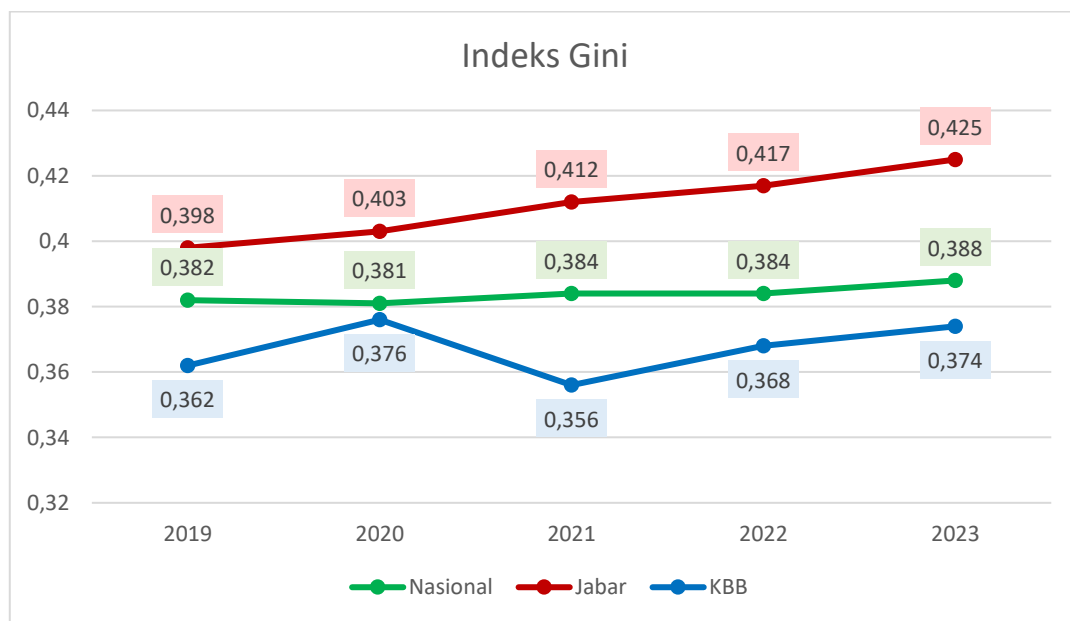
3.1.1.6 Gini Rasio

Indikator pertama yang digunakan untuk mendapatkan gambaran ketimpangan pendapatan suatu wilayah yaitu gini rasio. Secara umum perkembangan nilai Gini Ratio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2022 berfluktuatif namun cenderung selalu berada pada level ketimpangan rendah ($<0,4$). Pada tahun 2023 gini rasio dengan capaian tertinggi yaitu sebesar 0,374 poin bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Tetapi capaian ini masih dibawah capain indeks Gini Jabar sebesar 0,425. Namun capaian indek gini di tahun 2023

walaupun masih kategori rendah, Pemerintah Daerah harus bertindak cepat karena jaraknya cukup dekat dengan kategori sedang.

Nilai indeks pada grafik berikut, menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan wilayah Kabupaten Bandung Barat termasuk kategori dengan ketimpangan rendah karena nilainya masih di bawah 0,4. Tetapi Pemerintah Daerah harus bertindak cepat walaupun masih kategori rendah namun jaraknya cukup dekat dengan kategori sedang.

**Gambar 3.3 Grafik Capaian Gini Rasio
Kabupaten Bandung Barat, Prov. Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023**



Sumber : BPS 2019-2023, diolah

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

3.1.2.1 Tantangan Ekonomi Nasional

Tantangan nasional bersumber dari dua aspek, yaitu inflasi, serta perdagangan dan investasi. Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan bergantung pada faktor-faktor internal karena adanya estimasi perlambatan permintaan global di tahun 2025. Stabilitas inflasi domestik dan meredanya tekanan pasar keuangan di Indonesia membuka peluang untuk kebijakan moneter yang lebih longgar pada tahun 2025. Meskipun demikian, ketidakpastian terkait suku bunga global yang fluktuatif tetap menjadi faktor yang membuat Bank Indonesia berada dalam kewaspadaan. Diperkirakan Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga sebesar 50-75 basis poin pada tahun 2025, bergantung pada kebijakan dovish yang diambil oleh Federal Reserve Amerika Serikat

Tantangan juga bersumber dari sektor perdagangan dan investasi. Meskipun Indonesia berhasil mempertahankan surplus perdagangan, proyeksi harga komoditas yang tinggi,



pertumbuhan permintaan domestik yang kuat, dan kinerja investasi yang tangguh dapat menyebabkan neraca transaksi berjalan tetap defisit sebesar 0,5 persen dari PDB pada tahun mendatang.

Selain itu, konsumsi domestik menjadi faktor penting dalam dinamika ekonomi Indonesia. Evaluasi konsumsi domestik pasca kenaikan harga bahan bakar pada tahun 2022 menunjukkan pemulihan yang signifikan pada pertengahan tahun 2023. Stabilitas harga dan peningkatan impor barang konsumsi dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memfasilitasi pemulihan ini. Dengan mempertahankan stabilitas harga dan menanggulangi tantangan impor barang konsumsi, Indonesia dapat menjaga keberlanjutan pemulihan konsumsi domestik. Terakhir, ketergantungan pada pasar ekspor untuk pertumbuhan ekonomi merupakan dinamika yang perlu diperhatikan. Meskipun Indonesia telah lama mengandalkan pasar ekspor sebagai pendorong pertumbuhan, penurunan harga komoditas telah memengaruhi terms of trade. Diversifikasi ekspor menjadi strategi yang semakin penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor. Perubahan paradigma ini akan memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, membuka jalan menuju keberlanjutan dan ketahanan ekonomi di masa depan

3.1.2.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Jawa Barat

Tantangan ekonomi Jawa Barat bersumber dari belum meratanya investasi yang masuk ke Jawa Barat, karena masih terkonsentrasi di Jawa Barat bagian utara. Kemudian mayoritas kabupaten/kota di Jawa Barat terkategori memiliki kapasitas fiskal yang rendah, dimana porsi realisasi belanja yang bersifat produktif masih rendah, sehingga perlu kerangka kebijakan untuk mendorong produktivitas kabupaten/kota .

Tekanan inflasi di negara maju yang masih berlanjut, dan kebijakan moneter ketat diproyeksikan akan membebani aktivitas ekonomi di beberapa negara mitra dagang Jawa Barat, sehingga akan menurunkan permintaan luar negeri atas produk Industri manufaktur, sebagaimana diketahui bahwa industri manufaktur adalah penyumbang terbesar PDRB Jawa Barat. Perubahan iklim juga ikut andil dalam yang membuat sulitnya memprediksi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Jawa Barat, sehingga menjadi penyebab utama inflasi pada komoditas pangan. Perubahan iklim juga menjadi tantangan bagi sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang PDRB Jawa Barat dan penyerapan tenaga kerja. Berikut merupakan tantangan perekonomian Jawa Barat pada tahun 2025, diantaranya:

1. Memelihara stabilitas kinerja perekonomian di tengah ketidakpastian perekonomian global;

- 
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci PDRB Jawa Barat melalui percepatan realisasi investasi;
 3. Optimalisasi ekonomi digital dan industri yang berbasis high tech;
 4. Penguatan konektivitas dan inklusivitas ekonomi Jawa Barat, diversifikasi ekonomi khususnya UMKM, IKM serta pariwisata;
 5. Pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan di tengah perubahan iklim; dan
 6. Tenaga kerja yang terampil sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi:
 - a. Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS- RBA) pada seluruh sektor perizinan;
 - b. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi;
 - c. Memperkuat fungsi kelembagaan dalam promosi, business matching, market sounding, link and match investor industri kecil dan industri besar;
 - d. Formalisasi Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Industri Kecil Menengah (IKM) pada OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Tantangan pada sektor industri:
 - a. Penyerapan tenaga kerja lokal oleh industri berteknologi tinggi;
 - b. Hilirisasi industri yang terdiversifikasi;
 - c. Perwujudan kawasan industri pada Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. Substitusi bahan baku impor
 - e. Kemitraan industri besar dan IKM;
 - f. Pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri 40 persen.
3. Tantangan pada sektor UMKM:
 - a. Memperkuat ekosistem digital UMKM dari hulu ke hilir;
 - b. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian Jawa Barat melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas.
4. Tantangan pada sektor pariwisata:
 - a. Operasionalisasi dan optimalisasi destinasi wisata;
 - b. Pengembangan Desa Wisata;
 - c. Pengembangan destinasi pariwisata berstandar nasional dan internasional;

- 
- d. Percepatan Sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE).
 - e. Pengembangan SDM pelaku ekonomi kreatif.
5. Tantangan pada sektor perdagangan:
- a. Perdagangan berorientasi ekspor ke luar negeri maupun antar provinsi;
 - b. Pasar rakyat yang memenuhi SNI;
 - c. Ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok yang terjangkau melalui Pusat Distribusi Provinsi;
 - d. Market intelligence untuk penetrasi pasar regional dan ekspor;
 - e. Promosi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - f. Penyediaan komoditas perdagangan yang kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya terjaga.
6. Tantangan pada sektor pertanian dan pangan:
- a. Penyediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau;
 - b. Perlindungan harga ditingkat produsen;
 - c. Peningkatan produksi komoditas substitusi bahan pangan
 - d. Peningkatan produktivitas bahan pangan;
 - e. Peningkatan Produksi Pertanian potensi ekspor.
7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan:
- a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - b. Penempatan calon tenaga kerja Jawa Barat;
 - c. Penguatan Balai Pelatihan Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - d. Pengangguran baru sebagai dampak dari relokasi industri ke luar wilayah Jawa Barat;
 - e. Penciptaan lapangan pekerjaan melalui usaha mandiri

Memperhatikan kondisi saat ini serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi ke depan maka proyeksi kinerja ekonomi tahun 2024 dan 2025 sebagaimana ditunjukkan Tabel 3.4. Nilai PDRB pada tahun 2024 ditargetkan untuk bertambah sekitar 14 persen dengan asumsi PDRB pada tahun 2023 mencapai 2.500 triliun rupiah, dan pada 2025 bertambah sekitar 4 persen dari tahun 2024. Proyeksi ini tidak terlepas dari kondisi industri pengolahan yang menyumbang lebih dari 40 persen dan perdagangan yang menyumbang lebih dari 14 persen terhadap PDRB Jawa Barat, masih tumbuh di atas 4 persen, dan peluang pertumbuhan lebih besar di masa depan

seiring peningkatan teknologi, infrastruktur, dan tenaga kerja yang dapat mendorong produktivitas sektor tersebut.

Meskipun demikian, tantang juga muncul dari sektor pertanian yang menyumbang sekitar 9 persen nilai PDRB Jawa Barat pada tahun 2023, dimana pertumbuhan sektor ini terlihat sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan cuaca. Pada kuartal III 2023, pertumbuhan sektor ini mencapai -1,90 persen, dimana pada kuartal ini adalah puncak fenomena el-nino yang telah menyebabkan kemarau berkepanjangan. Tantangan ini juga dirasakan oleh negara dengan kontribusi sektor pertanian yang tinggi terhadap perekonomian, seperti Brazil dan India. Akibat el-nino, India mengalami penurunan produksi pada komoditas pangan pokok, biji-bijian untuk minyak, dan sereal bernutrisi dengan rata-rata penurunan produksi sekitar 9 persen. Sementara itu Brazil mengalami penurunan sekitar 7 persen pada produksi komoditas gandum.

Indikator pertumbuhan ekonomi juga diproyeksikan berada di kisaran lebih besar dari 5,5 persen, meskipun capaian pertumbuhan kuartal III 2023 yang berada di bawah 5 persen. Optimisme ini didukung oleh pertumbuhan sektor lapangan usaha jasa yang masih positif, dan kuatnya permintaan domestik dalam mengimbangi penurunan permintaan luar negeri atas berbagai produk, terutama produk industri pengolahan.

Tabel 3.15 Realisasi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan Target Tahun 2024-2025

No	Indikator	Realisasi 2023 ¹⁾	Target			
			2024	2025	2026	2027
			RPD ²⁾	Hasil Perhitungan ³⁾	RPD ²⁾	Hasil Perhitungan ³⁾
1	Nilai PDRB ADHB (triliun rupiah) kumulatif	1.953,42		2853,56		2990,98
2	Laju Pertumbuhan PDRB (y-o-y, %)	4,57	5,67	4,75	5,81	4,87-5,37
3	Inflasi Tahunan (%)	2,48	N/A	1,5 - 3,5		1,5-3,5
4	Pendapatan per Kapita (juta rupiah) ²⁾	48,32 ⁴⁾	57,28	51,00	61,57	61,57
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (y-o-y, %) Agustus	7,44	8,01	7,41 - 7,16	7,45-7,26	7,25
6	Persentase Penduduk Miskin (%) Maret 2023	7,62	7,34	7,48 - 7,03	7,13)	7,13
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB (triliun rupiah)	162,43	532,22	600,03	542,86	639,59

Sumber: 1) BPS Provinsi Jawa Barat 2023 (Triwulan III);
 2) RPD Tahun 2024-2026 Provinsi Jawa Barat;
 3) Hasil Perhitungan Tim KEMD Provinsi Jawa Barat berdasarkan kondisi 2023; dan
 4) BPS Provinsi Jawa Barat 2022.

Kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diharapkan telah memasuki fase pematangan dan stabilisasi pertumbuhan menuju penormalan ekonomi. Tiga sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan akan didorong untuk tetap tumbuh positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional. Sektor-sektor lainnya seperti sektor Informasi dan Komunikasi, Real Estate dan Jasa Perusahaan juga diperkirakan menjadi sektor yang tumbuh positif pada tahun 2024. Proyeksi pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.16 Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2024-2025 (Persen)

Lapangan Usaha		Share	Realisasi	Proyeksi	
		2023	2023 ¹⁾	2024 ²⁾	2025 ³⁾
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,07	-1,90	1,51	1,58
B	Pertambangan dan Penggalan	1,00	0,44	-0,79	-0,80
C	Industri Pengolahan	41,55	4,72	4,31	4,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,48	-0,34	3,99	3,86
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	-3,29	4,82	4,90
F	Konstruksi	8,42	5,88	5,78	5,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,47	4,32	3,70	3,78
H	Transportasi dan Pergudangan	5,84	12,44	6,62	6,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,95	7,76	6,44	6,60
J	Informasi dan Komunikasi	3,77	6,31	8,38	8,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,85	4,93	3,99	4,01
L	Real Estate	1,15	5,72	5,29	5,34
M,N	Jasa Perusahaan	0,46	6,31	7,08	7,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,63	-5,74	2,09	2,00
P	Jasa Pendidikan	3,31	1,08	6,07	6,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	6,74	7,36	7,60
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,15	9,86	6,48	6,71

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Triwulan III 2023 (distribusi PDRB ADHB)
 BPS Provinsi Jawa Barat Triwulan III 2023 (yoy)
 Hasil Perhitungan Tim KEMD Provinsi Jawa Barat berdasarkan kondisi 2023.

Dari sisi komponen pengeluaran, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 digerakkan oleh komponen pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor, dan Konsumsi Rumah Tangga.

Kinerja PMTB diproyeksikan mengalami kenaikan pertumbuhan seiring dengan masuknya investasi dalam bentuk penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, khususnya pada kawasan industri pada wilayah WPPI I dan II, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, serta pusat pertumbuhan lainnya. Sementara di sektor pelayanan publik, agenda pembangunan beberapa infrastruktur strategis di Jawa Barat tahun 2024 seperti Tol Patimban, Tol Jakarta-Cikampek II, Tol Getaci juga akan turut mendorong kinerja PMTB.

Kinerja Ekspor Jawa Barat tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh di kisaran 4,23 persen dengan dorongan ekspor non migas khususnya produk-produk Industri Pengolahan. Penguatan peran dan fungsi pelabuhan patimban dan BIJB secara efisien sebagai simpul transportasi berskala internasional untuk aktivitas ekspor juga akan turut mendorong kontribusi kinerja ekspor di tahun 2025.

Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan akan meningkat seiring dengan membaiknya ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat, serta sistem kesehatan daerah yang lebih resiliensi terhadap potensi ancaman penyakit infeksi menular-pandemi. Risiko penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak dari tekanan inflasi tahun 2024 dikendalikan melalui sinergi program penguatan ketahanan pangan serta program pengendalian inflasi daerah. Inflasi daerah tahun 2024 dikendalikan pada level (2,5+1) persen. Proyeksi pertumbuhan komponen pengeluaran tahun 2024 dan 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.17 Proyeksi Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Tahun 2024-2025

Komponen Pengeluaran		Realisasi	Proyeksi	
		2023 ¹⁾	2024 ²⁾	2025 ³⁾
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,83	4,08	3,94
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	21,17	12,58	3,34
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-3,34	2,35	2,46
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,4	5,17	4,10
5	Ekspor	14,63	5,05	5,52
6	Impor	22,28	4,65	5,07

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2023 (yoy);
RKPD Tahun 2023 Provinsi Jawa Barat dan
Hasil Perhitungan Tim KEMD Provinsi Jawa Barat berdasarkan kondisi 2023.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, dan nasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di

tahun 2025. Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.18 dibawah ini.

**Tabel 3.18 Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat
Tahun 2025**

No.	Indikator Makro dan Pembangunan	TARGET	
		2025 ¹⁾	2025 ²⁾
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	N/A	74,39
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,96 – 5,37	5,81
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,42 – 6,99	7,25
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,85 – 6,46	7,13
5	Indeks Gini (Poin)	0,383 – 0,390	0,383
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	N/A	1,02
7	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)*	N/A	61,57

Sumber: 1) Target Nasional terhadap Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil rakortekbangnas 2024
2) Hasil Perhitungan Tim KEMD Provinsi Jawa Barat berdasarkan kondisi 2023.

3.1.2.3 Tantangan dan Prospek Ekonomi Kabupaten Bandung Barat

Dalam rangka perencanaan tahun 2025 perlu memproyeksikan indikator ekonomi makro yang menjadi kerangka untuk perencanaan pembangunan. Kondisi ekonomi tahun 2025 diharapkan masuk pada fase pematapan pertumbuhan menuju peningkatan ekonomi, seluruh sektor lapangan usaha akan didorong untuk tumbuh ekspansif sejalan dengan mantapnya transformasi struktural ekonomi yang telah mengalami percepatan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kondisi perekonomian Kabupaten Bandung Barat ke depan tidak terlepas dari kebijakan menjaga stabilitas pada sektor-sektor unggulan penggerak ekonomi seperti sektor industri, perdagangan dan pariwisata serta dan meningkatkan sektor - sektor yang masih minim berkontribusi terhadap perekonomian. Tantangan perekonomian Bandung Barat pada tahun 2025, diantaranya:

1. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakatnya, di satu sisi dihadapkan pada tantangan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, sementara di sisi lain diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah output dari setiap sektor ekonomi
2. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan dalam rangka memanfaatkan nilai positif dari bonus demografi untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja khususnya bagi generasi milenial yang mencapai 464.462 jiwa atau sekitar 25,54 persen dari total penduduk KBB yang akan memasuki dunia tenaga kerja.

- 
- 
3. Tantangan pada sektor pertanian, dalam rangka mendorong penempatan calon tenaga kerja generasi milenial pada bidang peternakan dan pertanian dengan konsep pengembangan agribisnis yang maju, mandiri, modern, berdaya saing dan menguntungkan sekaligus pula memanfaatkan teknologi digital yang efektif dan efisien sejalan dengan pembangunan pertanian dan peternakan 4.0.
 4. Tantangan pada sektor investasi yang paling utama adalah pengimplementasian sistem Online Single Submission (OSS) pada seluruh sektor perizinan yang saat ini masih belum optimal. Disamping itu perlu adanya Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi dan Formalisasi Usaha Mikro Kecil pada OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.
 5. Tantangan pada sektor industri antara lain mengembangkan wilayah industri pada Kawasan Peruntukan Industri, Substitusi bahan baku impor untuk meningkatkan produksi dalam negeri, membangun kemitraan antara industri besar dan Industri Kecil dan Menengah serta Penyesuaian alur produksi terhadap protokol kesehatan dan percepatan revolusi industri 4.0.
 6. Tantangan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagian besar tenaga kerja dalam UMKM merupakan pekerja berkeahlian rendah, banyak usaha yang bergerak di sektor dengan nilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil dalam rangka memperkuat ekosistem digital dari hulu ke hilir dan Meningkatkan kontribusi sektor UKM dalam perekonomian Bandung Barat
 7. Tantangan pada sektor pariwisata adalah Pengembangan wisata ramah lingkungan dan desa wisata yang didukung dengan Promosi destinasi pariwisata baru dan Pengembangan destinasi pariwisata berstandar internasional;
 8. Tantangan pada sektor perdagangan dalam rangka memangkas jarak rantai distribusi barang untuk pengendalian dan stabilitas harga kebutuhan pokok, berupa infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya yang menyebabkan biaya logistik tinggi, masih banyaknya regulasi yang menghambat, termasuk tantangan mengenai integrasi konektivitas pedesaan dan perkotaan yang dinilai masih cukup rendah terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan
 9. Kondisi Geografi Kab. Bandung Barat yang rawan bencana serta perubahan iklim, masih menjadi tantangan yang perlu dihadapi Kabupaten Bandung Barat pada tahun

2025 dalam rangka ketahanan daerah terhadap ketersediaan pangan yang terjangkau dan terlindunginya harga ditingkat produsen.

10. Tantangan krisis global yang menyebabkan ketidakpastian perekonomian nasional dalam rangka memelihara stabilitas kinerja perekonomian

Prospek perekonomian pada tahun 2025 diperkirakan akan mengalami penormalan bahkan cenderung meningkat seiring dengan normalnya kembali seluruh aktifitas perekonomian, walaupun harus tetap diantisipasi dengan adanya isu global serta meningkatnya inflasi. Hal ini ditandai dengan UMKM akan lebih banyak yang dapat beroperasi secara digital seperti menggunakan aplikasi dan pembayaran non tunai, serta pemasaran secara daring (*e-commerce*), Industri sudah mulai berjalan normal seiring banyaknya permintaan pasar ekspor, pariwisata sudah bergerak, perdagangan luar dan dalam negeri sudah mulai membaik, pembangunan infrastruktur strategis sudah dimulai kembali.

Perekonomian Kabupaten Bandung Barat diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat yang pada tahun 2023 sempat melambat diharapkan mengalami percepatan kembali di tahun 2025.

Kecenderungan meningkat ini diharapkan akan terus berlangsung sehingga laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tetap stabil dan optimis meningkat di kisir 5 -6%. Secara umum, pada tahun 2025 diharapkan perekonomian sudah mulai pulih dan semakin meningkat, dengan proyeksi kinerja capaian perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 ditargetkan berdasarkan perhitungan proyeksi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19 Capaian dan Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023-2025

No	Indikator	Capaian Tahun 2023*	Target (hasil proyeksi)	
			2024**	2025***
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,00	5,66	4,87 - 5,37
2	Laju Inflasi	0,63	1,66	1,14
3	PDRB harga berlaku (milyar)	56.945,18	57.489,33	61.436,42
4	PDRB harga Konstan (milyar)	35.062,19	36.524,24	38.591,39
5	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	30.622,00	30.806,36	31.728,63
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	8,11	6,40	7,49 - 8,16
7	Persentase Penduduk Miskin (persen)	10,52	10,40	9,05 - 9,99
8	Indeks Gini (poin)	0,374	0,341	0,345 - 0,358

Sumber: * 2023 BPS,

**2024 Target RKPD Tahun 2024

***2025 Target berdasarkan berita Acara Kesepakatan dng Prov. Jabar

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 masih dalam fase pemulihan ekonomi menuju pematangan pertumbuhan ekonomi. Seluruh sektor lapangan usaha akan didorong untuk tumbuh ekspansif sejalan dengan mantapnya transformasi struktural ekonomi yang telah mengalami percepatan.

Tiga sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Pertanian, serta Kehutanan dan Perikanan akan didorong untuk tetap tumbuh positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional dan provinsi. Sektor-sektor lainnya seperti sektor Konstruksi, Real Estate dan Jasa Perusahaan juga diperkirakan menjadi sektor yang tumbuh positif pada tahun 2024. Proyeksi distribusi presentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha tahun 2024 ditargetkan berdasarkan perhitungan proyeksi berikut:

Tabel 3.20 Capaian dan Proyeksi Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 - 2025 (persen)

	Lapangan Usaha	Capaian Tahun 2023*	Target (hasil proyeksi)	
			2024**	2025***
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,73	12,88	12,89
B	Pertambangan dan Penggalian	0,94	1,03	1,01
C	Industri Pengolahan	41,66	41,61	41,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,81	0,83	0,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,05
F	Konstruksi	7,35	7,49	7,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,40	12,98	13,01
H	Transportasi dan Pergudangan	5,99	5,22	5,24
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,38	5,16	5,19
J	Informasi dan Komunikasi	2,09	2,06	2,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,91	0,91	0,93
L	Real Estate	1,93	1,87	1,88
M,N	Jasa Perusahaan	0,50	0,43	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,19	2,70	2,71
P	Jasa Pendidikan	3,95	4,03	4,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,56	0,56	0,58
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,08	1,07	1,08

Sumber: * 2023 BPS,

**2024 Target RKPD Tahun 2024

***2025 Proyeksi RPD tahun 2025, Bappelitbangda

3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

3.1.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan nasional dalam pengembangan wilayah Tahun 2025 yaitu:

- 1) mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan;
- 2) mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah;
- 3) mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah; dan
- 4) mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Strategi nasional dalam pengembangan wilayah Tahun 2024 yaitu:

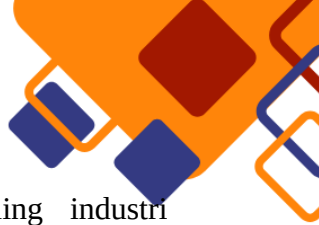
- 1) Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, kawasan transmigrasi serta Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) perbatasan negara; dan
- 2) Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan serta kawasan rawan bencana.

Sasaran nasional dalam pengembangan wilayah Tahun 2025 yaitu:

- 1) mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah;
- 2) mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali, dan
- 3) meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Prioritas pengembangan wilayah nasional Tahun 2025 adalah investasi, industri pengolahan dan pariwisata.

1. Arah kebijakan investasi yaitu: percepatan investasi industri, pariwisata dan infrastruktur; penyiapan peta potensi investasi daerah; fasilitasi relokasi investasi swasta dari luar negeri; penuntasan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko; dan deregulasi serta integrasi perijinan investasi.

- 
2. Arah kebijakan industri manufaktur yaitu: re-skilling dan up-skilling industri pengolahan; pengamanan pasokan bahan baku dan peningkatan penggunaan produksi lokal; substitusi impor dan TKDN; peningkatan ekspor hasil industri; percepatan operasionalisasi Kawasan Industri dan KEK; serta inovasi dan adaptasi teknologi.
 3. Arah kebijakan industri pariwisata yaitu: reaktivasi pasar wisatawan domestik dan mancanegara; reorientasi pada pariwisata berkualitas dan massal; penerapan standar kebersihan dan keselamatan; serta re-skilling dan up-skilling pariwisata.

Setiap wilayah dikembangkan sesuai dengan keunggulannya. Untuk wilayah Jawa-Bali fokus pengembangannya adalah: 1) industrialisasi berbasis pasar, memproduksi barang konsumsi, dan memanfaatkan keunggulan aglomerasi; 2) simpul pengolahan dalam rantai nilai domestik antar wilayah; 3) berpartisipasi dalam Global Value Chains; 4) pusat jasa modern nasional; 5) pintu gerbang internasional pariwisata nasional; dan 6) lumbung pangan nasional.

3.1.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat

Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2025 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

Arah pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2025 tersebut dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan diferensiasi produk di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian serta kelautan dan perikanan
 - b. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian
 - c. Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu, dan intensifikasi pertanian;
 - d. Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan petani;
 - e. Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
 - f. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

- 
- 
- g. Pengembangan sentra pertanian dan perikanan yang terpadu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas;
 - h. Penerapan prinsip UMKM hijau terutama yang mengembangkan potensi unggulan daerah;
 - i. Peningkatan perhutanan sosial;
2. Pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
 - a. Perbaikan tata kelola pangan, dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan;
 - b. Integrasi Kultur (Budaya) dalam Peningkatan Daya Saing Pangan Lokal;
 - c. Pengembangan Smart Fishing dan Sustainable Aquaculture.
 3. Peningkatan Daya Saing Produk Industri dan Perdagangan, dengan arah kebijakan :
 - a. Penerapan link and match industri kecil-industri besar;
 - b. Pengembangan IKM dan industri hijau;
 - c. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur industri serta pengembangan sentra industri terpadu;
 - d. Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta perdagangan digital;
 - e. Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan pasar tujuan ekspor;
 - f. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok
 4. Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal, transformasi perluasan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan
 - a. Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi
 - b. Promosi dan peningkatan layanan investasi;
 - c. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas
 - d. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global;
 - e. Peningkatan keterampilan angkatan kerja;
 - f. Pengembangan pendidikan vokasional sesuai dengan kebutuhan kerja;
 - g. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan;
 - h. pembentukan wirausaha baru;
 - i. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha kecil.
 5. Peningkatan daya saing pariwisata, dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing;

- 
- b. Peningkatan dan perluasan promosi dan pemasaran pariwisata dan produk ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis;
 - c. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. Pengembangan budaya lokal yang mendukung pengembangan pariwisata.

3.1.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 difokuskan pada menjaga stabilitas dan peningkatan ekonomi yang diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan nilai investasi dan daya saing usaha, terkendalinya tingkat kemiskinan, meningkatnya ketahanan pangan, dan peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja. Dalam rangka pelaksanaan pemulihan ekonomi tersebut ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan, yaitu:

1. Peningkatan produksi dan diferensiasi produk pertanian, peternakan dan perikanan, melalui:
 - a. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian, peternakan dan perikanan
 - b. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peternakan dan perikanan
 - c. Penanggulangan bencana pertanian dan pengendalian kesehatan ternak
 - d. Peningkatan Kualitas SDM Pertanian
 - e. Terjaminnya pasokan air untuk pertanian
2. Peningkatan pelaku usaha perdagangan dan daya saing produk perdagangan, melalui:
 - a. Meningkatkan Perdagangan Dalam & Luar Negeri
 - b. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang
 - c. Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan
3. Peningkatan pelaku industri dan daya saing produk industri, melalui:
 - a. Peningkatan Jumlah IKM
 - b. Peningkatan standar dan daya saing produk IKM
4. Peningkatan daya saing pariwisata dan Penguatan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam mendukung sektor pariwisata, melalui:
 - a. Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan
 - b. Peningkatan pengelolaan dan promosi destinasi wisata
 - c. Peningkatan SDM dan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
 - d. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
 - e. Pelestarian budaya lokal dlm mendukung pariwisata
 - f. Pementasan kesenian tradisional di objek wisata

- 
- 
- g. Pelestarian cagar budaya dalam mendukung pariwisata
 - 5. Meningkatkan potensi investasi dan kualitas usaha, melalui:
 - a. Penyediaan Peta Potensi Investasi
 - b. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
 - c. Kepatuhan Perusahaan yang menyusun LKPM
 - d. Peningkatan koperasi sehat
 - e. Fasilitasi pertumbuhan volume usaha koperasi
 - f. Peningkatan Usaha Mikro yang Mandiri
 - g. Peningkatan kapasitas & kualitas produk UMKM
 - 6. Penanggulangan kemiskinan terpadu dan tepat sasaran, melalui:
 - a. Pemenuhan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
 - b. Penguatan fasilitasi pendataan Perlindungan dan Jaminan Sosial keluarga miskin
 - c. Mengendalikan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli dari kelayakan tempat hunian (Rutilahu)
 - d. Menangani Kantong-Kantong Kemiskinan
 - e. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - f. Memberdayakan masyarakat miskin dan mencegah terjadinya kemiskinan baru
 - 7. Peningkatan Ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan, melalui:
 - a. Peningkatan ketersediaan pangan
 - b. Penanganan kerawanan pangan bagi masyarakat Miskin
 - c. Diversifikasi pangan dan pemanfaatan Pangan Segar Asal Tumbuhan
 - 8. Perluasan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja, melalui:
 - a. Meningkatkan skill dan keterampilan tenaga kerja
 - b. Meningkatkan pelatihan kewirausahaan tenaga kerjaPenanganan kasus perselisihan hub. Industrial.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kerangka keuangan daerah dirancang berdasarkan hasil analisis potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang akan dialokasikan memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan pada tahun 2025. Dengan adanya rancangan tersebut



diharapkan alokasi belanja dan pembiayaan APBD pada tahun 2025 dapat memenuhi berbagai aspirasi pembangunan yang disampaikan melalui proses partisipasi masyarakat dalam musrenbang, proses politis dengan DPRD, proses teknokratis dengan para akademisi, proses bottom up dan top down serta semakin efektif untuk mencapai target-target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 285, sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer Pusat dan Daerah.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah guna meningkatkan pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pajak Daerah

Kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah antara lain:

- 1) Pendataan wajib pajak/pembaruan wajib pajak. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan;
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak potensial. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib pajak potensial dalam membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo;
- 3) Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak;
- 4) Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif, sistem pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pungutan pajak melalui legalitas formal berupa dikeluarkannya Peraturan Daerah;
- 5) Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan mengikutsertakan aparatur dalam program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;

- 
- 
- 6) Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya;
 - 7) Sharing (tukar pendapat) informasi dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah;
 - 8) Mempromosikan potensi unggulan daerah baik ke dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk menarik investor

b. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersumber dari hasil Penerimaan jasa giro memanfaatkan uang mengendap (idle money), tuntutan ganti kerugian daerah (TGR), pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian.

2. Pendapatan Dana Transfer Pusat ke Daerah

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Dana Transfer Pusat ke Daerah untuk Kabupaten Bandung Barat terdiri dari Dana Perimbangan yang meliputi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak, Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Transfer Dana Alokasi Umum dan Transfer Dana Alokasi Khusus.

Selanjutnya kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

- 1) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
- 2) Meningkatkan akurasi data potensi daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dalam pelaksanaan dan evaluasi dana perimbangan.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Struktur Pendapatan Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah tahun 2025 diasumsikan mengalami penurunan sebesar 22 persen apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2024, selanjutnya untuk proyeksi/target Pendapatan Daerah disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.21 Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025**

No/Kode	Uraian	Jumlah (rupiah)	
		APBD 2024	Proyeksi 2025
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	3.366.716.470.270	2.644.875.698.168
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	774.635.794.050	787.502.955.904
4.1.01	Pajak Daerah	565.000.000.000	577.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	16.289.533.900	14.789.433.900
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.253.070.525	1.253.070.525
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	192.093.189.625	194.460.451.479
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.592.080.676.220	1.857.372.742.264
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.205.143.899.000	1.545.800.393.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	386.936.777.220	311.572.349.264
Jumlah Pendapatan		3.366.716.470.270	2.644.875.698.168

Sumber : SIPD kabupaten bandung barat Tahun 2024, diolah Bappelitbangda KBB

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 pada Pendapatan Asli Daerah, terdapat perbedaan pada pos proyeksi lain-lain PAD yang sah dikarenakan proyeksi mengikuti realisasi dari LRA Pada Tahun 2025 dan belum dialokasikan karena berkaitan dengan penerimaan dari pemerintah Provinsi maupun pemerintah Pusat antara lain Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dana Tambahan. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pengembangan wilayah, pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, intensifikasi dan ekstensifikasi PAD penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengurangan dan penanggulangan resiko bencana yang sering terjadi setiap tahun dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan guna pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Prinsip money follow function harus diubah menjadi prinsip money follow program dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus menjadi kebijakan yang diaplikasikan pada semua pos-pos belanja. Belanja daerah terdiri dari: Belanja Operasi, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer, Belanja Modal, Dana cadangan pembiayaan dan bunga untuk. Kebijakan belanja daerah diupayakan penggunaannya untuk:

1. Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan Urusan Wajib dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, Pendidikan, Kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial. Sedangkan penyelenggaraan Urusan pilihan dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban daerah disesuaikan potensi daerah dan wilayah.
3. Peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi, dan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.
5. Menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan untuk peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
6. Pembentukan Dana Cadangan untuk pembiayaan Pilkada serentak Tahun 2024, Dana cadangan dialokasikan untuk seluruh tahapan dalam pilkada serentak tahun 2024 sehingga alokasinya dimulai sejak tahapan awal pilkada tahun 2023, Tahapan Pelaksanaan Tahun 2024 dan tahapan akhir tahun 2025.

7. Belanja Bunga Pinjaman SMI. Belanja bunga dialokasikan untuk pemenuhan kewajiban bunga pinjaman ke PT. Sarana Multiguna Infrastruktur, untuk tahun 2024 sebesar 4 termin sebesar Rp. 15.000.000.000,-

Belanja daerah dialokasikan kepada 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- Prioritas I adalah dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat;
- Prioritas II adalah untuk program-program sesuai arah prioritas perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung Barat serta untuk memenuhi program-program yang berkaitan dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib pelayanan dasar; dan terakhir
- Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

Sedangkan proyeksi/target Belanja Daerah taun 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.22 Belanja Daerah Tahun 2024 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025

No/Kode	Uraian	Jumlah (rupiah)	
		APBD 2024	Proyeksi 2025
1	2	3	4
5	BELANJA	3.579.115.389.520	2.717.656.725.260
5.1	BELANJA OPERASI	2.572.466.481.437	2.077.241.393.686
5.1.01	Belanja Pegawai	1.396.926.783.525	1.261.771.839.960
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.066.798.030.998	785.554.796.863
5.1.03	Belanja Bunga	17.773.034.345	0
5.1.04	Belanja Subsidi	1.872.000.000	0
5.1.05	Belanja Hibah	83.746.632.569	22.650.180.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.350.000.000	7.264.576.863
5.2	BELANJA MODAL	498.285.739.557	132.305.292.719
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.000.000.000	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.340.929.881	59.646.013.088
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148.073.176.986	49.120.688.756
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	219.529.663.867	20.306.489.875
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	330.453.100	232.101.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.011.515.723	3.000.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.111.796.000	38.712.187.865
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.111.796.000	38.712.187.865
5.4	BELANJA TRANSFER	484.251.372.526	469.397.850.990
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	51.091.197.700	58.928.953.390

No/Kode	Uraian	Jumlah (rupiah)	
		APBD 2024	Proyeksi 2025
1	2	3	4
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	433.160.174.826	410.468.897.600
	Jumlah Belanja	3.579.115.389.520	2.717.656.725.260
	Total Surplus / (Defisit)	(100.498.063.609)	-72.781.027.092

Sumber : SIPD Tahun 2024, diolah

Rencana belanja daerah tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan belum masuknya proyeksi Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat serta menyesuaikan dengan hasil LRA Tahun 2023.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi- potensi daerah.

Berikut ini ditampilkan mengenai pembiayaan daerah tahun 2024 dan proyeksi pembiayaan tahun 2025.

**Tabel 3.23 Pembiayaan Daerah tahun 2024 dan
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025**

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	APBD Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi/Target APBD Tahun 2024(Rp)
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	247.387.130.276	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.430.069.276	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	46.957.061.000	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	247.387.130.276	0

6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	146.889.066.667	0
6.2.02	Penyertaan Modal		0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	126.889.066.667	0
6.2.04	Dana Cadangan	20.000.000.000	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	146.889.066.667	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	100.498.063.609	0

Sumber : SIPD kabupaten bandung barat Tahun 2024, diolah Bappelitbangda KBB

3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dan terbatasnya sumber–sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Kabupaten Bandung Barat. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain:

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kabupaten Bandung Barat selain bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menjadi Kunci Menghadapi Keterbatasan Fiskal dalam APBD pada Masa Pasca Pandemi COVID-19.

APBN sebagai suatu rencana keuangan, mengandung arti bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintahan. Dalam perencanaan keuangan, pengeluaran direncanakan setinggi-tingginya, atau serendah-rendahnya. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD Provinsi.

Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan



dengan syarat bahwa program dan kegiatan Kabupaten Bandung Barat sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah provinsi sehingga dapat bekerja sama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi Pendanaan dari APBD Kabupaten Bandung Barat dan APBDes dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan Desa sejalan dan sinergi dengan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten sehingga dapat bekerja sama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.



BAB IV

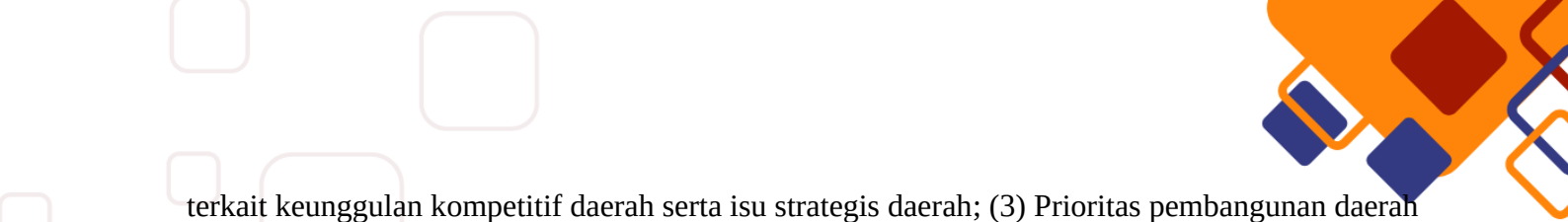
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan DOB, dokumen RPD merupakan penjabaran visi dan misi RPJPD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan di Kabupaten Bandung Barat maka penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat harus selaras dan sinergi dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 - 2026. Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, dokumen RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran periode tahun pertama dari pelaksanaan RPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 - 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 - 2026 serta mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Barat dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Dokumen RKPD memuat prioritas pembangunan daerah yang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat urgensi dan sebagai daya ungkit kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan Tahun 2025 dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (top down).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) kesesuaian dengan dokumen perencanaan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025; (2) Korelasi terhadap pencapaian Visi dan Misi RPJPD yang dituangkan dalam RPD, didalamnya terdapat arahan pengembangan sektor/bidang yang



terkait keunggulan kompetitif daerah serta isu strategis daerah; (3) Prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana sebagai arahan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana; (4) Untuk masing-masing prioritas pembangunan, dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dan fokus/agenda pokok, nama program, Perangkat Daerah pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas; (5) Dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, masing-masing kegiatan prioritas dilengkapi dengan tolak ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya.

Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026; (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023; (3) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan (4) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2025.

Pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap tujuan pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJMN) Tahun 2025-2029. Pada 5 (lima) tahun pertama yaitu Tahun 2025-2029 menjadi tahapan yang penting dalam RPJPN Tahun 2025-2045 untuk meletakkan dasar-dasar transformasi menjadi basis tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya serta menjadi pemicu untuk *engine of growth* yang baru yaitu: industri biru, industri kreatif, bioteknologi, hilirisasi sampai dengan produk akhir, dan industri hijau.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Sasaran visi pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menuju 0 (nol) persen dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *Net Zero Emission*.

Gambar 4.1

Target Sasaran Visi Indonesia Emas Menuju 2045

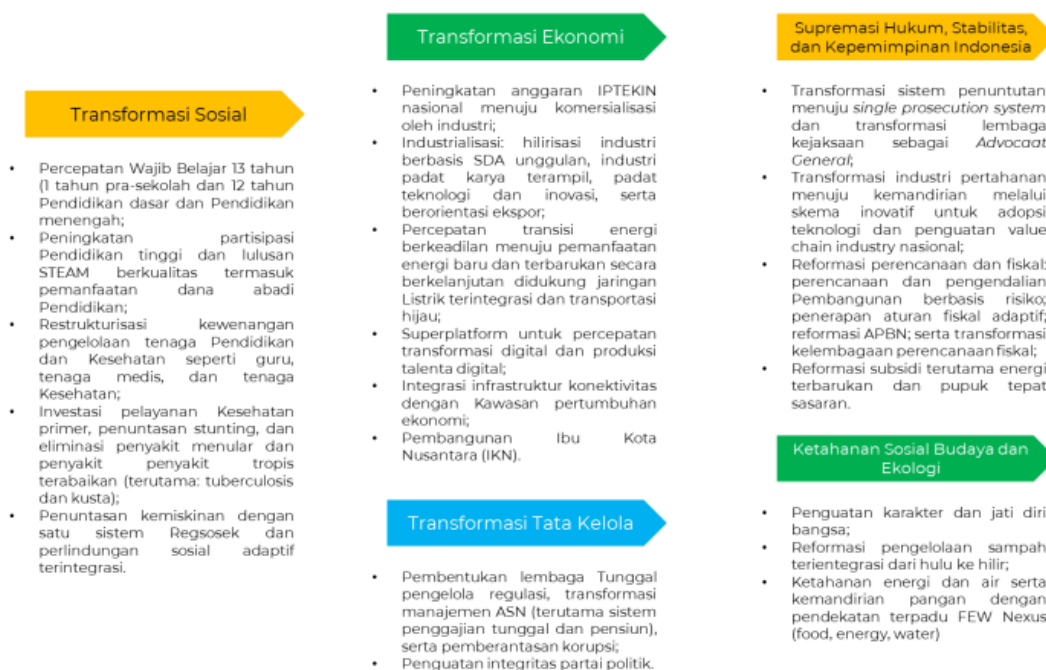


Sumber: Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, 2024

Rencana pembangunan nasional tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 5 (lima) penguatan fondasi transformasi, sebagai berikut: **Transformasi Sosial** Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; **Transformasi Ekonomi** Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja; **Transformasi Tata Kelola** Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil; **Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia** Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi, dan **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan. Kelima fondasi transformasi tersebut diwujudkan melalui upaya transformatif super prioritas (*game changers*) sebagai berikut:

Gambar 4.2

Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*)



Sumber: Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, 2024

Arah pembangunan untuk wilayah pulau Jawa difokuskan pada tema pembangunan "Megalopolis Yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, Dan Berkelanjutan". Tema pembangunan Provinsi Jawa Barat dikhususkan menjadi "**Pusat *Cutting-edge* industri, inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional**". Tema tersebut memberikan makna bahwa fokus intervensi kewilayahan dan sarana prasarana di pulau Jawa pada tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
2. Pengembangan industrialisasi perikanan modern, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur;
3. Penurunan *logistic cost* guna meningkatkan *comparative advantage* investasi di Jawa, antara lain melalui: lanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban, serta optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan hub utama Jawa (Tanjungpriok dan Tanjungperak);
4. Pengelolaan urban governance pada WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya, termasuk pengembangan infrastruktur perkotaan (antara lain: transportasi, sumber daya air dan air minum, persampahan dan sanitasi, perumahan dan permukiman

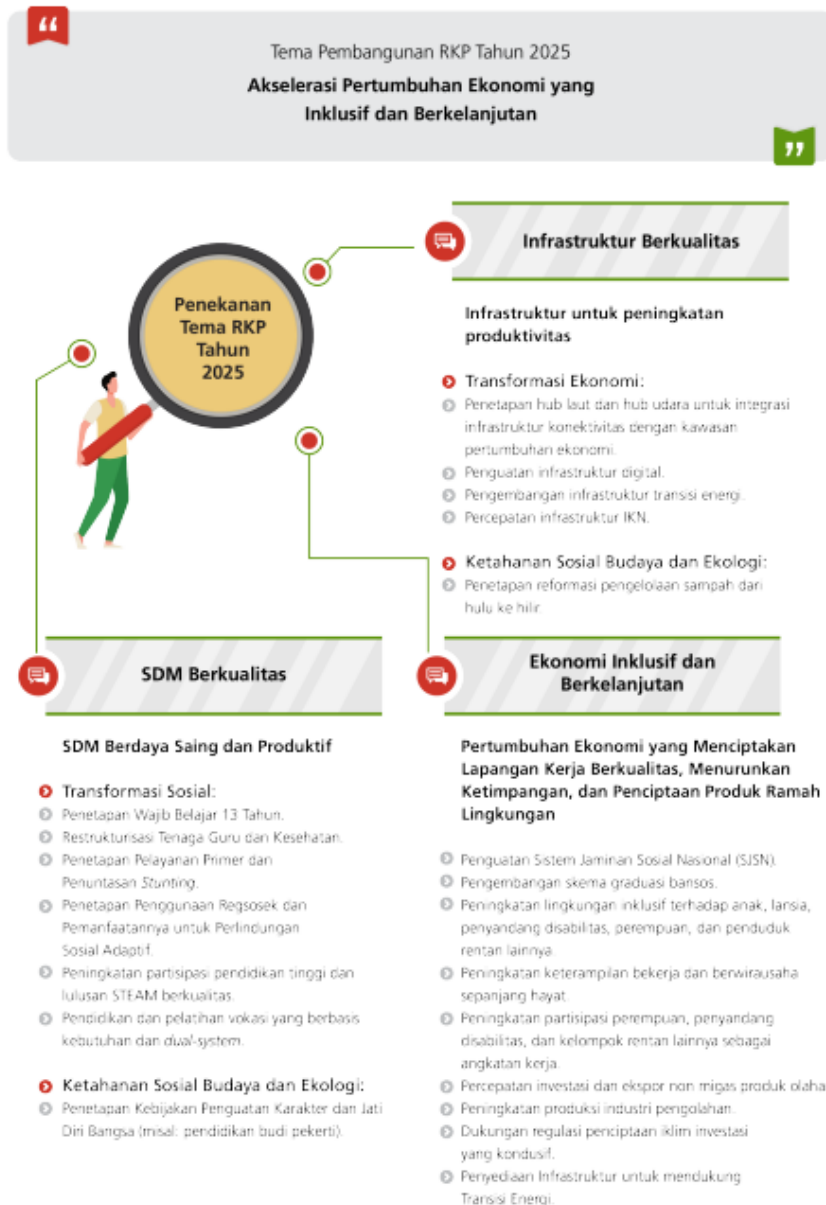


perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;

5. Pengembangan perguruan tinggi riset STEAM bertaraf internasional, guna mewujudkan Jawa sebagai salah satu *global brain hub*;
6. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green, gray, dan social infrastructure)* terutama pada kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multiancaman bencana: abrasi, rob, penurunan tanah, banjir).

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Untuk itu, "*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*" ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2025 dengan berfokus pada komponenkomponen sebagaimana termuat pada ilustrasi di bawah ini.

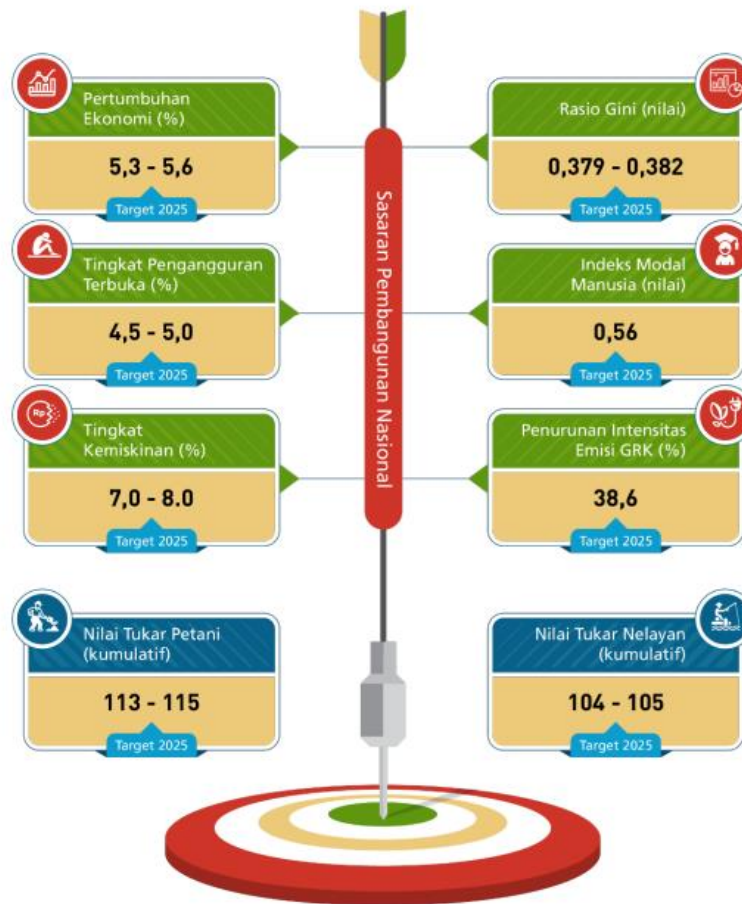
Gambar 4.3
Tema dan Penekanan RKP Tahun 2025



Sumber: Rancangan Awal RKP 2025

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

Gambar 4.4
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025



Sumber: Rancangan Awal RKP 2025

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan. Gambar di bawah ini memperlihatkan lima Agenda Pembangunan RKP Tahun 2025.

Gambar 4.5
Agenda Pembangunan RKP Tahun 2025



Sumber: Rancangan Awal RKP 2025

1. Transformasi Sosial

Pembangunan dan pembentukan modal manusia harus menjamin bahwa sejak dalam kandungan, setiap anak termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan Agenda Pembangunan Transformasi Sosial, diarahkan untuk:

- (1) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua;
- (2) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata;
- (3) Perlindungan sosial yang adaptif yang berfokus pada peletakan fondasi awal reformasi perlindungan sosial menjadi lebih adaptif dan inklusif, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk sesuai kondisi kerentanan, serta mendorong penduduk miskin dan rentan untuk mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan.

2. Transformasi Ekonomi

Arah kebijakan Transformasi Ekonomi antara lain:

- (1) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
- (2) Penerapan Ekonomi Hijau;
- (3) Transformasi Digital;
- (4) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
- (5) Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Transformasi Tata Kelola

Transformasi Tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Oleh karena itu, arah kebijakan transformasi tata kelola melingkupi bidang regulasi; pelayanan publik; proses bisnis dan kelembagaan; manajemen Aparatur Sipil Negara; pengawasan pembangunan; serta partai politik. Pembangunan bidang regulasi difokuskan pada pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dan penguatan tata kelola regulasi yang adaptif dan taat asas. melalui arah kebijakan:

- (1) Arah kebijakan bidang pelayanan publik berfokus pada transformasi dan digitalisasi pelayanan publik;
- (2) Arah kebijakan pada bidang proses bisnis dan kelembagaan;
- (3) Arah kebijakan bidang manajemen Aparatur Sipil Negara berfokus pada pembenahan kelembagaan dan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara serta perbaikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;

- 
- (4) Arah kebijakan bidang pengawasan pembangunan;
 - (5) Pembangunan bidang partai politik berfokus pada penguatan integritas partai politik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola partai politik yang berintegritas dalam mendukung terwujudnya demokrasi substansial.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Terdapat tiga sasaran dalam Agenda Pembangunan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia meliputi:

- (1) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial;
- (2) Stabilitas Ekonomi Makro;
- (3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah kebijakan Agenda Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi mencakup lima dari 17 Sasaran Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

- (1) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;
- (2) Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif dengan kebijakan yang diarahkan pada penguatan ketangguhan keluarga, peningkatan kesetaraan gender, serta perwujudan masyarakat inklusif yang memperhatikan perbedaan karakteristik dan kebutuhan berbagai kelompok;
- (3) Lingkungan Hidup Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan;
- (4) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
- (5) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim yang diukur melalui indikator proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap produk domestik bruto dan penurunan emisi gas rumah kaca secara tahunan dan kumulatif.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Provinsi Jawa Barat sama halnya dengan Kabupaten Bandung Barat yang kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023, dengan demikian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat bersamaan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Barat periode tahun 2024-2026.



Berdasarkan rancangan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat 2025, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat
 - b. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
 - c. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat
 - d. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pembangunan Pemuda
 - e. Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk
2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan
 - b. Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan
 - c. Meningkatkan pertumbuhan sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum
 - d. Meningkatkan nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja
3. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur
 - b. Meningkatkan Kualitas infrastruktur
 - c. Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman
 - d. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
 - e. Meningkatkan pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana
 - f. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan
4. Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi
 - b. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
 - c. Meningkatkan penerapan inovasi daerah dalam pembangunan

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat

Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah pada dokumen RPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026, merupakan perumusan hasil analisis capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan periode pembangunan jangka menengah sebelumnya (RPJMD 2018-2023) dan sinergitas pembangunan antar pusat dan daerah sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, dengan memperhatikan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,

- 5 Misi RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025;
- 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
- 4 Tujuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2026, dan
- 6 Isu-isu strategis 2024-2026.

Dalam rangka penetapan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merumuskan sebuah konsep RPD 2024-2026 yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Perumusan Konsep Dalam Rangka Penentuan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026

RPJPD 2005 - 2025	RPJMN 2020-2024	RPD Prov. Jabar 2024 -2026	ISU STRATEGIS	TUJUAN
Misi 1 Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Kreatif	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1. Daya Saing Sumberdaya Manusia	Tujuan 1 Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkesetaraan
Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)	Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Inovasi Daerah	6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Tujuan 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Misi 3 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif, Berkeadilan dan Berdaya Saing	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)	Tujuan 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	2. Daya Saing Ekonomi Yang Berkelanjutan	Tujuan 2 Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)		3. Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat	

Misi 4 Memelihara Kondisi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5)	Tujuan 3: Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	4. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah	Tujuan 3 Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan (PN 6)		5. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	
Misi 5 Mengintegrasikan kearifan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)			Tujuan 5 Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tenram dan Tertib Dalam Kerangka Demokrasi

Sumber: Analisa Bappelitbangda, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, telah ditentukan 5 (lima) tujuan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 – 2026, yaitu:

1. Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkesetaraan
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
5. Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tenram dan Tertib dalam Kerangka Demokrasi

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, dari lima (lima) tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, perlu dijabarkan dalam target sasaran yang akan dicapai selama 3 (tiga) tahun pada RPD tahun 2024-2026. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, dengan penjelasan masing-masing tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat

TUJUAN		SASARAN	
Tujuan 1	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berkesetaraan	1.1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan
		1.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan
		1.3	Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk
		1.4	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender
		1.5	Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan
Tujuan 2	Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan	2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		2.2	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		2.3	Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha
		2.4	Terkendalnya Tingkat Kemiskinan
		2.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan
		2.6	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
Tujuan 3	Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dengan memperhatikan kualitas lingkungan	3.1	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman
		3.2	Meningkatnya Aksebilitas Wilayah
		3.3	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		3.4	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
		3.5	Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan
		3.6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Tujuan 4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	4.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
		4.2	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel
		4.3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur
		4.4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
		4.5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		4.6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah
Tujuan 5	Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang tertib dan tentram dalam kerangka demokrasi	5.1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		5.2	Menurunnya Potensi Konflik Sosial
		5.3	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat Dan Berpolitik Di Masyarakat

Sumber: RPD KBB 2024-2026

4.1.4 Keselarasan antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat dan Nasional Tahun 2025

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan. Atas dasar tersebut RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 perlu berintegrasi, tersinkronisasi dan bersinergi dengan RKP Tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tingkat keselarasan tujuan sasaran pembangunan daerah dengan Agenda Nasional pada RKP Tahun 2025, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat dengan Agenda Nasional Tahun 2025

Agenda Nasional	Sasaran Agenda Nasional	Tujuan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat	Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat	
Transformasi Ekonomi	Penguatan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	
	Penerapan Ekonomi Hijau		Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	
	Transformasi Digital		Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha	
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Terkendalinya Tingkat Kemiskinan	
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	
			Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	
			Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman

		Wilayah Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan	Meningkatnya Akseibilitas Wilayah
			Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
			Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan
Transformasi Sosial	Meningkatkan akses kesehatan untuk semua	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkesetaraan	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
	Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata		Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan
	Perlindungan Sosial yang Adaptif		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
			Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender
		Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	
		Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tentram dan Tertib Dalam Kerangka Demokrasi	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Menurunnya Potensi Konflik Sosial		
	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat Dan Berpolitik Di Masyarakat		
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Dengan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	Memperhatikan Kualitas Lingkungan	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
	Lingkungan Hidup Berkualitas		
	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan		
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional tangguh, dan Demokrasi Substansial	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
	Stabilitas Ekonomi Makro		Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan		Berkembangnya a Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur
Transformasi Tata Kelola	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah

Sumber : Bappelitbangda KBB 2024, diolah

4.1.5 Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat dengan Provinsi Jawa Barat

Sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 pada periode yang sama. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa walaupun perodesasi kedua dokumen rencana ini berbeda, namun seluruh sasaran RPD Kabupaten Bandung Barat dapat mendukung seluruh sasaran RPD Provinsi Jawa Barat.

Sebuah sasaran RPD Kabupaten Bandung Barat dapat mendukung lebih dari 1 (satu) sasaran RPD Provinsi Jawa Barat sebab lingkupnya masih berkaitan. Dengan demikian, sinergi

perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan.

Untuk mengetahui keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025 antara Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat tidak dapat dilihat secara parsial, karena pada prinsip nya untuk satu tujuan dan sasaran provinsi Jawa Barat bisa didukung oleh beberapa tujuan dan sasaran di tingkat Kabupaten Bandung Barat. Secara rinci berikut tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat

Tujuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Tujuan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat	Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkesetaraan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Meningkatnya Kualitas Kesehatan
	Meningkatnya taraf hidup masyarakat		
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda		Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender
	Terkendalnya pertumbuhan dan distribusi penduduk		Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan	Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk
	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan		Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum		Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing		Meningkatnya Ketahanan Pangan
			Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha
			Terkendalnya Tingkat Kemiskinan

	dan penempatan tenaga kerja		Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan	Meningkatnya Aksebilitas Wilayah
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur		Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman		Meningkatnya Infrastruktur Permukiman
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah		Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
	Meningkatnya pemerataan pembangunan di Wilayah Pedesaan		Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan
Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang didukung oleh inovasi daerah	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tentram dan Tertib Dalam Kerangka Demokrasi	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
			Menurunnya Potensi Konflik Sosial
	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat Dan Berpolitik Di Masyarakat
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
			Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel
			Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah

	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan		

Sumber: Bappelitbangda, 2024 diolah

Strategi merupakan rangkaian pilihan tindakan yang membentuk skenario pembangunan dalam jangka 3 (tiga) tahun ke depan. Strategi juga menjadi tema pembangunan tahunan untuk periode 3 (tiga) tahun. Tema pembangunan ini adalah arah kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tindakan yang harus dilakukan. Setiap tahun rencana pembangunan memiliki penekanan atau prioritas tertentu yang mengarahkan untuk perumusan program dan kegiatan pembangunan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025

Strategi Pembangunan	Arah Kebijakan
Meningkatkan layanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan Intervensi Gizi Spesifik	1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja 2. Peningkatan Pelayanan Penyakit Menular 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan 4. Peningkatan Kualitas Pengawasan Obat Dan Makanan 5. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai dengan standar 6. Pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, bayi dan balita 7. Penyediaan akses air minum layak dan aman 8. Penyediaan akses pengelolaan air limbah 9. Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan 10. Peningkatan kondisi keluarga sejahtera
Meningkatkan kualitas pendidikan merata bagi seluruh masyarakat	1. Peningkatan pemerataan akses lay. pendidikan dasar 2. Peningkatan kualitas proses belajar dan mengajar 3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan 5. Meningkatkan minat budaya baca

Strategi Pembangunan	Arah Kebijakan
Pengendalian jumlah dan distribusi penduduk	1. Penurunan angka Total Fertility Rate 2. Peningkatan Layanan KB dan kesehatan reproduksi 3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	1. Peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak 2. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 3. Pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak 4. Pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak
Meningkatkan kapasitas daya saing pemuda serta meningkatkan pembinaan, pengembangan dan prestasi olahraga	1. Pengembangan Kepemimpinan, Kepeloporan Pemuda 2. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dan pemuda kader 3. Meningkatkan peran serta pemuda dalam organisasi kepemudaan 4. Peningkatan penyediaan Saprasi olahraga 5. Peningkatan SDM Keolahragaan 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga
Peningkatan produksi dan diferensiasi produk pertanian, peternakan dan perikanan	1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian, peternakan dan perikanan 2. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peternakan dan perikanan 3. Penanggulangan bencana pertanian dan pengendalian kesehatan ternak 4. Peningkatan Kualitas SDM Pertanian 5. Terjaminnya pasokan air untuk pertanian
Peningkatan pelaku usaha perdagangan dan daya saing produk perdagangan	1. Meningkatkan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri 2. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang 3. Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan
Peningkatan pelaku industri dan daya saing produk industri	1. Peningkatan Jumlah IKM 2. Peningkatan standar dan daya saing produk IKM
Peningkatan daya saing pariwisata dan Penguatan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam mendukung sektor pariwisata	1. Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Peningkatan pengelolaan dan promosi destinasi wisata 3. Peningkatan SDM dan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif

Strategi Pembangunan	Arah Kebijakan
	4. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 5. Pelestarian budaya lokal dalam mendukung pariwisata 6. Pementasan kesenian tradisional di objek wisata 7. Pelestarian cagar budaya dalam mendukung pariwisata
Meningkatkan potensi investasi dan kualitas usaha	1. Penyediaan Peta Potensi Investasi 2. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 3. Peningkatan Kepatuhan Perusahaan yang menyusun LKPM 4. Peningkatan koperasi sehat 5. Fasilitasi pertumbuhan volume usaha koperasi 6. Peningkatan Usaha Mikro yang Mandiri 7. Peningkatan kapasitas dan kualitas produk UMKM
Penanggulangan kemiskinan terpadu dan tepat sasaran	1. Pemenuhan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin 2. Penguatan fasilitasi pendataan Perlindungan dan Jaminan Sosial keluarga miskin 3. Mengendalikan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli dari kelayakan tempat hunian(Rutilahu) 4. Menangani Kantong-Kantong Kemiskinan 5. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 6. Memberdayakan masyarakat miskin dan mencegah terjadinya kemiskinan baru
Peningkatan Ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan	1. Peningkatan ketersediaan pangan 2. Penanganan kerawanan pangan bagi masyarakat Miskin 3. Diversifikasi pangan dan pemanfaatan Pangan Segar Asal Tumbuhan
Perluasan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1. Meningkatkan skill dan keterampilan tenaga kerja 2. Meningkatkan pelatihan kewirausahaan tenaga kerja 3. Penanganan kasus perselisihan hubungan industrial
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman	1. Penataan permukiman dan pengembangan kawas permukiman

Strategi Pembangunan	Arah Kebijakan
	2. Pengelolaan prasarana dan sarana umum perumahan 3. Pembangunan sistem drainase permukiman
Peningkatan ketersediaan jalan dalam kondisi baik dan ruas jalan yang berkeselamatan	1. Pembangunan, peningkatan, rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap 2. Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pengendalian pembangunan infrastruktur berdasarkan rencana tata ruang	1. Penataan ruang sebagai arahan penyusunan rencana struktur ruang, pola ruang dan pemanfaatan ruang 2. Mendukung pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung dan Kawasan Cekungan Bandung dan sekitarnya, dengan sektor unggulan industri, t. pangan, pariwisata, dan perkebunan 3. Penatagunaan tanah sesuai tata ruang
Mitigasi bencana serta penanggulangan bencana dan penanganan pasca bencana alam dan non alam	1. Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 2. Peningkatan Upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan korban bencana 3. Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan korban bencana 4. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana 5. Rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa	1. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan desa 3. Pengembangan kerjasama Desa 4. Peningkatan Keberdayaan lembaga dan masyarakat desa
Peningkatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	1. Pengendalian dan pemantauan pencemaran udara 2. Pengendalian dan pemantauan pencemaran air sungai dan buangan air limbah domestik dan industri 3. Peningkatan layanan pengelolaan sampah

Strategi Pembangunan	Arah Kebijakan
	4. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan 5. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah
Peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Penataan Perundang-undangan 2. Penataan dan penguatan organisasi 3. Penyusunan Laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu 4. Penguatan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan bidang ekonomi 5. Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah 6. Center of excelent pengadaan barang jasa 7. Peningkatan kualitas dan keselarasan Perencanaan pembangunan 8. Peningkatan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 9. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 10. Pembangunan Zona Integritas dan pencegahan korupsi 11. Meningkatkan Kualitas Penelitian, Pengembangan dan penerapan Inovasi daerah 12. Peningkatan kualitas penunjang urusan pemerintahan
Meningkatkan tata kelola keuangan dan barang Milik Daerah	1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah 2. Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah 4. Tindaklanjut Rekomendasi Temuan BPK RI dan APIP oleh Perangkat Daerah
Pengelolaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit	1. Peningkatan Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian 2. Peningkatan Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin ASN 3. Peningkatan Aspek Pengembangan Karir ASN 4. Meningkatkan Kompetensi ASN
Tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	1. Pengembangan Smart Governance 2. Peningkatan layanan keterbukaan informasi dan komunikasi publik berbasis teknologi informasi

Strategi Pembangunan	Arah Kebijakan
	3. Peningkatan SDM Teknologi, Informasi & Komunikasi 4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral 5. Penerapan manajemen Keamanan Informasi
Peningkatan kualitas dan penerapan inovasi pelayanan publik	1. Peningkatan layanan administasi kependudukan dan pencatatan sipil 2. Peningkatan layanan dan kemudahan perijinan 3. Peningkatan Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD 4. Peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan
Peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan	1. Meningkatkan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis 2. Penyelamatan dan perlindungan arsip
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 2. Peningkatan penegakan Perda dan Perkada 3. Peningkatan SDM Satpol PP dan Pemberdayaan Satlinmas
Peningkatan Kewaspadaan Nasional serta Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	1. Peningkatan Koordinasi Kondusifitas dan Stabilitas Daerah 2. Fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik sosial 3. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
Peningkatan kesadaran politik dan demokrasi di masyarakat	1. Pembinaan Terhadap Kelembagaan, Organisasi Masyarakat dan Partai Politik 2. Peran Partai Politik dalam Peningkatan pemahaman politik di masyarakat

Sumber: RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tema RKP 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dilakukan melalui percepatan penghapusan



kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Adapun sasaran pembangunan tahun 2025 adalah:

1. Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui (a) penetapan Wajib Belajar 13 Tahun; (b) restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan; (c) penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting; (d) penetapan Penggunaan Registrasi Sosial Ekonomi dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif; (e) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics berkualitas; (f) pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system; serta (g) penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (pendidikan budi pekerti).
2. Infrastruktur Berkualitas melalui (a) penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi, (b) penguatan infrastruktur digital, (c) pengembangan infrastruktur transisi energi, (d) Percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, serta (e) penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui (a) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional; (b) pengembangan skema graduasi bantuan sosial; (c) peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; (d) peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; (e) peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja; (f) percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan; (g) peningkatan produksi industri pengolahan; (h) dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; serta (i) penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

Selaras dengan tema dan sasaran pembangunan tersebut, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan tahun 2025 serta strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan beserta operasionalisasinya sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi, Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sangat penting sebagai landasan awal dalam pembangunan jangka menengah tahun



2025-2029. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,6 persen pada tahun 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka diupayakan turun menjadi 4,5–5,0 persen. Demikian pula Rasio Gini akan turun menjadi 0,379–0,382. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Modal Manusia menjadi 0,56 dan penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi pada kisaran 7,0–8,0 persen. Kesejahteraan petani dan nelayan diharapkan akan meningkat dan terjaga dengan capaian Nilai Tukar Petani pada kisaran 113–115 dan Nilai Tukar Nelayan pada kisaran 104–105.

2. Arah Kebijakan Tingkat Pengangguran Terbuka Pada tahun 2025, prospek positif pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan akan berada pada kisaran 4,5–5,0 persen. Semakin kondusifnya perekonomian nasional juga diharapkan akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka di daerah juga akan menurun. Target Tingkat Pengangguran Terbuka wilayah Sumatera berada pada kisaran 4,2–4,7 persen, wilayah Jawa sebesar 5,1–5,6 persen, wilayah Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,2–2,7 persen, wilayah Kalimantan sebesar 4,0–4,5 persen, wilayah Sulawesi sebesar 3,2–3,7 persen, wilayah Maluku sebesar 4,6–5,1 persen, dan wilayah Papua sebesar 2,5–3,0 persen. Arah kebijakan dan upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja inklusif, melalui penumbuhan investasi padat pekerja; penumbuhan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; belanja pemerintah yang bersifat padat karya; dan penciptaan iklim ketenagakerjaan kondusif. Kemudian, strategi penyiapan kebhkerjaan dan keahlian angkatan kerja dilakukan melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, perwujudan sistem informasi pasar kerja yang komprehensif dan kredibel, serta reformasi sistem perlindungan sosial.
3. Arah Kebijakan Tingkat Kemiskinan Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan berada di kisaran 7,0-8,0 persen. Hal ini mempertimbangkan banyak hal antara lain kondisi dan capaian tingkat kemiskinan sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah berkomitmen bahwa target ini dapat tercapai sehingga tidak mengganggu Visi Indonesia Emas 2045 menuju kemiskinan 0 persen. Beberapa hal diupayakan pemerintah antara lain melalui penyusunan peta jalan pengurangan kemiskinan dengan melakukan analisis per provinsi untuk mengkaji permasalahan di masing-masing daerah yang berpotensi



memengaruhi capaian tingkat nasional. Berdasarkan dua strategi besar pengurangan kemiskinan, yaitu strategi makro dan mikro, maka dibutuhkan kondisi yang optimal di masing-masing strategi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dijaga inklusif serta stabilitas inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi prasyarat utama kebijakan makro penurunan kemiskinan. Hal ini didorong dengan pemenuhan sarana dan prasarana dasar; akses terhadap informasi; layanan dasar; serta kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Arah kebijakan mikro atau program-program afirmasi disempurnakan dalam payung Reformasi Sistem Perlindungan Sosial melalui beberapa fokus, yaitu (1) perluasan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi oleh seluruh kementerian/lembaga/daerah untuk melakukan pensasaran program; (2) peningkatan kapasitas pemerintah hingga tingkat desa/kelurahan dalam melakukan perencanaan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti; (3) penguatan dan pelaksanaan skema graduasi program-program bantuan sosial dan komplementaritasnya dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti kewirausahaan dan akses lapangan kerja; (4) integrasi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan dengan pendekatan adaptif dan penyaluran nontunai; (5) penyempurnaan sasaran program utamanya untuk pilar peningkatan pendapatan masyarakat sehingga secara tepat menyasar kelompok miskin dan rentan; (6) penguatan kapasitas pendamping pembangunan untuk mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku penerima manfaat; serta (7) penyempurnaan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan terutama yang berada di luar keluarga.

4. Arah Kebijakan Rasio Gini Arah kebijakan untuk mengurangi ketimpangan antarkelompok masyarakat ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Kedua masyarakat tersebut membutuhkan arah kebijakan dan strategi yang berbeda. Kebijakan yang tepat untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah kebijakan yang dapat mempertahankan daya beli dan meningkatkan pendapatan. Sementara, untuk masyarakat berpenghasilan tinggi, kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan yang dapat menciptakan redistribusi yang merata. Kemudian, arah kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa strategi yang harus di implementasikan. Strategi yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan antarkelompok masyarakat dilakukan dengan kolaborasi lintas sektor antara lain melalui (1) pengembangan registrasi sosial-ekonomi; (2) peningkatan akurasi



penargetan bantuan sosial; (3) integrasi dan penyederhanaan program serta penyaluran bantuan sosial secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan; (4) penguatan bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah; (5) penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata, yang utamanya ditujukan untuk kelompok berpenghasilan tinggi; (6) meningkatkan penerimaan pajak dan mulai mengurangi kebijakan terkait relaksasi pajak (tax amnesty); (7) pemberian bantuan sosial langsung dan bantuan sosial sembako untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah; dan (8) reformasi agraria bagi petani yang tidak memiliki lahan. Upaya tersebut dimaksudkan agar kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah lebih berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kelompok tersebut dapat mengalami kenaikan pendapatan yang lebih cepat dibandingkan dengan kelompok 20 persen teratas. Diharapkan strategi tersebut dapat mengurangi Rasio Gini menjadi lebih kecil dan dapat mencapai target Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yaitu 0,379-0,382.

5. Arah Kebijakan Indeks Modal Manusia, Indeks Pembangunan Manusia telah digunakan sebagai indikator pencapaian pembangunan manusia selama kurang lebih 30 tahun terakhir dengan tren meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil evaluasi capaian dan dampak pembangunan, pengukuran Indeks Pembangunan Manusia masih terbatas pada komponen kuantitas yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta kehidupan layak (pengeluaran per kapita), sehingga dirasa belum mampu mendorong investasi pada unsur sumber daya manusia. Pada perencanaan pembangunan periode 2025-2045 akan digunakan indikator baru yaitu Indeks Modal Manusia yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing sumber daya manusia. Indeks Modal Manusia merupakan indikator baru yang dikembangkan oleh Bank Dunia, yang terdiri dari penilaian capaian aspek kesehatan (prevalensi balita tidak stunting, peluang bertahan hidup balita dan peluang bertahan hidup usia produktif) dan pendidikan (harapan lama sekolah dan harmonized test scores). Pada tahun 2020, nilai Indeks Modal Manusia Indonesia adalah sebesar 0,54 yang menunjukkan bahwa anak yang lahir pada tahun 2020 diperkirakan hanya akan mencapai 54 persen potensi produktivitas maksimumnya saat ia berusia 18 tahun jika mendapat akses pendidikan dan kesehatan yang ada saat ini secara penuh. Agar dapat dilakukan pemantauan secara rutin mempertimbangkan ketersediaan dan keterwakilan data, telah dilakukan penyesuaian metodologi perhitungan Indeks



Modal Manusia. Pada komponen pendidikan (harmonized test scores), Bank Dunia menggunakan skor Programme for International Student Assessment dari Organization for Economic Cooperation and Development yang memiliki beberapa keterbatasan antara lain tidak dilakukan secara tahunan dan tidak dapat diturunkan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga dilakukan konvergensi skor Programme for International Student Assessment dengan rata-rata nilai Asesmen Nasional. Berdasarkan hasil penyesuaian metodologi tersebut, didapatkan capaian Indeks Modal Manusia Indonesia sebesar 0,53 pada tahun 2023. Pada tahun 2025, Indeks Modal Manusia Indonesia ditargetkan mencapai nilai 0,56 melalui upaya peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Upaya peningkatan akses kesehatan untuk semua dilakukan melalui (1) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat; (2) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; (3) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan; dan (4) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola. Dalam hal akses dan kualitas pendidikan, akan ditingkatkan melalui (1) percepatan Wajib Belajar 13 Tahun mencakup perluasan 1 tahun pra-sekolah (perluasan Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal) dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang disertai penguatan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan; (2) peningkatan partisipasi dan kualitas pendidikan tinggi, melalui peningkatan efektivitas bantuan pendidikan, khususnya bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, berasal dari daerah afirmasi, dan berprestasi; (3) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui penerapan kurikulum dan model pembelajaran yang mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi, peningkatan kualitas sistem penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.

6. Arah Kebijakan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Target ambisius tersebut telah terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dimana diantara lima sasaran utama dalam Visi Indonesia 2045 adalah Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju Net-Zero Emission dengan target 93,5 persen di tahun 2045. Pada tahun 2025, penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca ditargetkan mencapai 38,6 persen. Nilai Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca didapatkan dengan memperhitungkan nilai Penurunan



Emisi Gas Rumah Kaca per satuan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian diperlukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui pembangunan rendah karbon yang selaras dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan koridor berkelanjutan dan transformasi melalui penerapan Ekonomi Hijau yang dilakukan melalui Percepatan Transisi Energi; Ekonomi Sirkular Industri; Terciptanya pekerjaan hijau (green jobs) yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing; serta Pengelolaan Hutan Lestari. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca dilakukan dengan memperkuat program Pembangunan Rendah Karbon yaitu (1) Peningkatan Proporsi Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Primer, (2) Efisiensi Energi, (3) Peningkatan Transportasi Hijau dan Berkelanjutan, (4) Peningkatan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dan Lahan, (5) Pencegahan Pengurangan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dan Lahan, (6) Implementasi Praktik Pertanian yang Rendah Karbon, (7) Peningkatan Cadangan Karbon di Ekosistem Karbon Biru, (8) Pengembangan Industri Hijau, serta (9) Pengelolaan Limbah dan Ekonomi Sirkular.

7. Arah Kebijakan Nilai Tukar Petani, Pada tahun 2025, Nilai Tukar Petani dijaga pada kisaran 113–115. Arah kebijakan dalam rangka pencapaian Nilai Tukar Petani tersebut menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan dari sisi harga yang diterima dan sisi harga yang dibayarkan oleh petani. Kebijakan dari sisi harga yang diterima berorientasi pada upaya yang meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, serta menjaga stabilisasi harga yang diterima. Kebijakan tersebut mencakup (1) pengembangan kawasan sentra produksi pangan dan sentra produksi lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian; (2) hilirisasi komoditas pertanian berbasis bioindustri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas; (3) pengembangan kelembagaan ekonomi petani menjadi korporasi untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas produk pertanian; dan (4) pengembangan ketertelusuran produk pertanian bernilai tambah seperti nilai budaya (Globally Important Agricultural Heritage Systems), geografis/endemik (Indeks Geografis), ataupun keberlanjutan (pertanian organik). Kebijakan dari sisi harga yang dibayar petani berorientasi pada upaya yang menjamin keterjangkauan input usaha tani meliputi (1) modernisasi akses pembiayaan usaha pertanian melalui digitalisasi akses pembiayaan serta kemitraan dengan agen sumber pembiayaan; (2) pengendalian inflasi produk agro input melalui peningkatan produksi dan akses pupuk, pestisida, benih, serta sarana dan prasarana; (3) reformasi subsidi pupuk dan input pertanian lainnya melalui Bantuan Langsung Petani; serta (4) modernisasi



pertanian melalui praktik pertanian presisi dan praktik pertanian konservasi agar usaha tani lebih efisien dan berkelanjutan.

8. Arah Kebijakan Nilai Tukar Nelayan, Pada tahun 2025, Nilai Tukar Nelayan dijaga pada kisaran 104–105. Dalam rangka pencapaian Nilai Tukar Nelayan, upaya yang dilakukan difokuskan pada peningkatan pendapatan nelayan dan stabilisasi pengeluaran nelayan lintas sektoral melalui (1) peningkatan akses nelayan terhadap modal usaha dan sumber daya produktif lainnya seperti bahan bakar minyak bersubsidi, fasilitasi kredit, pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi; (2) peningkatan mutu ikan melalui penguatan sistem rantai dingin dan logistik perikanan, serta tempat pelelangan/pemasaran dengan standar yang memadai sehingga harga ikan terjaga; dan (3) langkah afirmatif lainnya dalam rangka memudahkan nelayan berusaha, seperti mempermudah perizinan, perlindungan nelayan, penguatan kelembagaan korporasi nelayan, pembangunan kampung nelayan, dan sertifikasi awak kapal perikanan.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Prioritas pembangunan daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2025 di rumuskan melalui 6 (enam) prioritas pembangunan daerah. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan untuk tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan daerah yang tertuang pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Dalam hal ini, prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026.

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) **Tematik** (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) **Holistik** (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir; 3) **Integratif** (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) **Spasial** (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan). Adapun prioritas pembangunan dimaksud sebagaimana berikut:

1. **Prioritas 1**, yaitu, Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya;
2. **Prioritas 2**, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama;
3. **Prioritas 3**, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;

4. **Prioritas 4**, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
5. **Prioritas 5**, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;
6. **Prioritas 6**, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Tabel 4.6 Prioritas Provinsi Jawa Barat dan Rincian Program Prioritas

Prioritas Pembangunan Provinsi	Program Prioritas Provinsi
Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	1. Ekonomi Juara 2. Pembiayaan Inovatif Juara 3. Tenaga Kerja Juara
Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	1. Pendidikan Juara 2. Keagamaan Juara
Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	1. Kesehatan Juara
Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanganan Resiko Bencana	a. Kesejahteraan Juara b. Tenaga Kerja Juara c. Lingkungan Juara
Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Gerakan Membangun Desa	1. Infrastruktur Juara 2. Lingkungan Juara 3. Gerbang Desa Juara
Inovasi Pelayanan Publik dan penataan daerah	1. Pemerintahan Juara

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat 2025

4.2.3 Prioritas dan Program Pembangunan Kabupaten Bandung Barat

Untuk mengimplementasikan Tujuan, dan Sasaran RPD ke dalam rencana kerja tahunan sesuai tema pembangunan Tahun 2025, maka dirancang suatu prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan tema pembangunan tahun 2025 adalah **“Peningkatan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar melalui pengembangan SDM dan Peningkatan infrastruktur”** dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Peningkatan layanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan pengembangan UMKM dan Koperasi berbasis inovasi yang berdampak positif bagi investasi daerah.
4. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya local.
5. Peningkatan produktivitas daerah dan perlindungan social untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah.

7. Pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana.
8. Peningkatan implementasi *smart governance* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
9. Stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kehidupan social masyarakat serta penanganan potensi konflik sosial.

Penetapan prioritas program pembangunan daerah dan indikator kinerja yang ingin dicapai tahun 2025 mengacu pada penjabaran tahunan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 sebagaimana disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Arah Kebijakan dan Program Prioritas
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025**

Arah Kebijakan	Program Prioritas
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pembinaan Perpustakaan
Peningkatan layanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan pengembangan UMKM dan Koperasi berbasis inovasi yang berdampak positif bagi investasi daerah.	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 4. Program Penyuluhan Pertanian 5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 6. Program Pengembangan Ekspor 7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 9. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 10. Program Promosi Penanaman Modal 11. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 12. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 13. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 14. Program Pemberdayaan & Perlindungan Koperasi 15. Program Pemberdayaan Usaha Menengah dan UMKM 16. Program Pengembangan UMKM

Arah Kebijakan	Program Prioritas
Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya local.	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pelestarian dan Pengelolaan 6. Cagar Budaya
Peningkatan produktivitas daerah dan perlindungan social untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 5. Program Perlindungan Perempuan 6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 7. Program Perlindungan Khusus Anak 8. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh 9. Program Pemberdayaan Sosial 10. Program Rehabilitasi Sosial 11. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 12. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 13. Program Pengawasan Keamanan Pangan\ 14. Program Penanganan Kerawanan Pangan 15. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 16. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 17. Program Penempatan Tenaga Kerja
Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah.	1. Program pengembangan permukiman 2. Program pengembangan perumahan 3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 4. Program peningkatan PSU 5. Program penyelenggaraan jalan 6. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 7. Program penyelenggaraan penataan ruang
Pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana.	1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Penanganan Bencana 3. Program penataan bangunan dan lingkungannya 4. Program pengembangan perumahan 5. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 6. Program pengendalian bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

Arah Kebijakan	Program Prioritas
	7. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) 8. Program pengelolaan persampahan 9. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
Peningkatan implementasi <i>smart governance</i> dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik.	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2. Program Pengelolaaan Informasi dan Komunikasi Publik 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor 5. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 6. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 8. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 9. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Program Penyelenggaraan Pengawasan 11. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 13. Program Pengelolaan Arsip 14. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kehidupan social masyarakat serta penanganan potensi konflik sosial	1. Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 3. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat 2024

4.2.4 Keterkaitan antara Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Kabupaten Bandung Barat

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, sehingga keterkaitan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025 terjalin. Keselarasan Program Daerah terhadap Program Nasional menjadi factor penting bagi kelangsungan dan kesinambungan pembangunan. Keselarasan program Nasional, di turunkan kedalam program-program yang menjadi kewenangan Kabupaten Bandung Barat, selengkapnya keterkaitan dan keselarasan dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 4.8 Kesesuaian Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025

Program Prioritas Nasional	Sasaran PP	Program Prioritas Kabupaten Bandung Barat	Sasaran Program Prioritas Kabupaten Bandung Barat
PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan		
	PP 2: Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
	PP 3: Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Ketahanan Pangan Meningkatnya Kualitas Kesehatan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Pertumbuhan

			Ekonomi Sektor Unggulan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
	PP 4: Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
	PP 5: Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
	PP 6: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
	PP 7: Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
	PP 8: Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi		
PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP 1: Pembangunan Wilayah Jawa-Bali (Pengembangan Kawasan Perkotaan WM Bandung)	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PP 1: Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	PP 2: Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terkendalnya Tingkat Kemiskinan
	PP 3: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Meningkatnya Kualitas Kesehatan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Kualitas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Terkendalnya Tingkat Kemiskinan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Kesehatan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya Kualitas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Kesehatan
	PP 4: Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan

			Kesempatan Pendidikan
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan
	PP 5: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Kontribusi Pemuda Dalam Pembangunan
	PP 6: Pengentasan Kemiskinan	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Terkendalinya Tingkat Kemiskinan
		Program kawasan permukiman	Terkendalinya Tingkat Kemiskinan Meningkatnya Infrastruktur Permukiman
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Terkendalinya Tingkat Kemiskinan
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Terkendalinya Tingkat Kemiskinan
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terkendalinya Tingkat Kemiskinan
	PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP 1: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
			Menurunnya Potensi Konflik Sosial

	Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Menurunnya Potensi Konflik Sosial
	PP 2: Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	PP 3: Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Menurunnya Potensi Konflik Sosial
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
	PP 4: Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan
	PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Program penyelenggaraan jalan	Meningkatnya Aksebilitas Wilayah
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman
		Program pengembangan permukiman	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman
		Program kawasan permukiman	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman Terkendalinya Tingkat Kemiskinan
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman
	PP 1: Infrastruktur Pelayanan Dasar		

	PP 2: Infrastruktur Ekonomi	Program pengelolaan pelayaran	Meningkatnya Akseibilitas Wilayah
	PP 3: Infrastruktur Perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Akseibilitas Wilayah
	PP 4: Energi dan Ketenagalistrikan		
	PP 5: Transformasi Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PP 1: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		Program penatagunaan tanah	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Program pengendalian bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Program pengelolaan persampahan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	PP 2: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Program pengembangan jasa konstruksi	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
		Program pengembangan perumahan	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
		Program penataan bangunan gedung	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
		Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
		Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
	PP 3: Pembangunan Rendah Karbon		
PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP 1: Konsolidasi Demokrasi	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat Dan Berpolitik Di Masyarakat
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat Dan Berpolitik Di Masyarakat
	PP 2: Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri		

	PP 3: Penegakan Hukum Nasional	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
	PP 4: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		Program pengelolaan tanah kosong	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat,
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat,
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat,
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
		Program Kepegawaian Daerah	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Berkembangnya Kapasitas,

			Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur
		Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Sumber: Bappelitbangda, 2024 diolah

4.2.5 Keterkaitan antara Program Prioritas Provinsi Jawa Barat dan Program Prioritas Kabupaten Bandung Barat

Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, sehingga keterkaitan program pembangunan daerah sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Bandung Barat Tahun 2025 dengan Program Prioritas RKPD Jawa Barat Tahun 2025. Selengkapnya dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 4.9 Kesesuaian Program Prioritas Provinsi Jawa Barat dan Program Prioritas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	RINCIAN PROGRAM PRIORITAS	Sasaran Program Prioritas Kabupaten Bandung Barat
Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan	Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Pertumbuhan

Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya			Ekonomi Sektor Unggulan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Ketahanan Pangan Meningkatnya Kualitas Kesehatan
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		PROGRAM PENGELOLAAN	Meningkatnya Pertumbuhan

		PERIKANAN BUDIDAYA	Ekonomi Sektor Unggulan
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan
		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan

			Pemerataan Kesempatan Pendidikan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Kontribusi Pemuda Dalam Pembangunan
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Kontribusi Pemuda Dalam Pembangunan
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya Kontribusi Pemuda Dalam Pembangunan
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Menurunnya Potensi Konflik Sosial
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Menurunnya Potensi Konflik Sosial
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Menurunnya Potensi Konflik Sosial
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat Dan Berpolitik Di Masyarakat
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat Dan Berpolitik Di Masyarakat
		Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Terkendalinya Tingkat Kemiskinan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya Kualitas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya Kualitas Kesehatan
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender
		Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender
		Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Meningkatnya Kualitas Kesehatan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Kualitas Kesehatan
Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Terkendalinya Tingkat Kemiskinan

Penanganan Resiko Bencana	Peningkatan kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	Terkendalinya Tingkat Kemiskinan
		Program Rehabilitasi Sosial	Terkendalinya Tingkat Kemiskinan
		Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
		Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
		Program pengembangan jasa konstruksi	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
		Program pengembangan perumahan	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
		Program penataan bangunan gedung	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Gerakan Membangun Desa	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Penataan Desa	Meningkatnya Pembangunan di Wilayah Pedesaan
	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Meningkatnya Pembangunan di Wilayah Pedesaan
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	Meningkatnya Pembangunan di

		Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Wilayah Pedesaan
		Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Terkendalinya Tingkat Kemiskinan
		Program kawasan permukiman	Terkendalinya Tingkat Kemiskinan Meningkatnya Infrastruktur Permukiman
		Program penyelenggaraan jalan	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman
		Program pengembangan permukiman	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman
		Program pengelolaan pelayaran	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah
		Program penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		Program penatagunaan tanah	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Program pengendalian bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

		berbahaya dan beracun (limbah B3)	
		Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Inovasi Pelayanan Publik dan penataan daerah	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
	Peningkatan pelayanan perizinan dan kemudahan investasi	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat,

			Transparan dan Akuntabel
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
		Program Kepegawaian Daerah	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan

			Berbasis Elektronik
		Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
		Program pengelolaan persampahan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Meningkatnya Kesesuaian

			Pemanfaatan Ruang
		Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		Program pengelolaan tanah kosong	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Sumber: Bappelitbangda, 2024, diolah

4.2.6 Keterkaitan Program Prioritas Tahun 2025 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable DevelopmentGoals (SDGs)

Keterkaitan Program Prioritas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 dan SDGs dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.10 Keterkaitan Program Prioritas Tahun 2025 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable DevelopmentGoals (SDGs)

Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Prioritas Tahun 2025
Goal 1 Tanpa Kemiskinan	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	2. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
	3. Program kawasan permukiman
	4. Program Pemberdayaan Sosial
	5. Program Rehabilitasi Sosial
	6. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Goal 2 Tanpa Kelaparan	1. Program Penanganan Kerawanan Pangan
	2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
	3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Goal 3 Kehidupan Sehat & Sejahtera	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
	3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	4. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

	5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
	6. program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
Goal 4 Pendidikan Berkualitas	1. Program Pengelolaan Pendidikan
	2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
	3. Program Pembinaan Perpustakaan
Goal 5 Kesetaraan Gender	1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	2. Program Perlindungan Perempuan
	3. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
	4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	5. Program Perlindungan Khusus Anak
Goal 6 Air Bersih & Sanitasi Layak	1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
	2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
Goal 8 Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	4. Program Perizinan Usaha Pertanian
	5. Program Penyuluhan Pertanian
	6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	7. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
	8. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	9. Program pengelolaan sumber daya air (sda)
	10. Program Pengembangan Ekspor
	11. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
	12. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	13. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	14. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
	15. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
	16. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
	17. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
	18. Program Pemasaran Pariwisata

	19. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	20. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	21. Program Pengembangan Kebudayaan
	22. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	23. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	24. Program Promosi Penanaman Modal
	25. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	26. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
	27. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	28. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
	29. Program Pengembangan UMKM
	30. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
	31. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	32. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
	33. Program Penempatan Tenaga Kerja
	34. Program Perekonomian Dan Pembangunan
Goal 9 Industri, Inovasi & Infrastruktur	1. Program Pengembangan Ekspor
	2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
	3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	4. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
	6. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
	7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
	8. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	9. Program pengembangan permukiman
	10. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
	11. Program kawasan permukiman
	12. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
	13. Program penyelenggaraan jalan

	14. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	15. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Goal 10 Berkurangnya Kesenjangan	1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
	2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	4. Program Penanggulangan Bencana
	5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
Goal 11 Kota & Permukiman Yang Berkelanjutan	1. Program pengembangan permukiman
	2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
	3. Program kawasan permukiman
	4. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	1. Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
	2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Goal 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber: Bappelitbangda, 2024, diolah

4.2.7 Pelayanan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) melekat dalam pembagian urusan pemerintahan sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014, yakni ada 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar yakni urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial. Berikut Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.11 Pelayanan Standar Pelayanan Minimal

Urusan	Jenis Pelayanan Dasar
Urusan Pendidikan	a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); b. Pendidikan Dasar; dan c. Pendidikan Kesetaraan.
Urusan Kesehatan	a. Pelayanan kesehatan ibu hamil; b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d. Pelayanan kesehatan balita; e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h. Pelayanan kesehatan penderita



	hipertensi; i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa; k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.
Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum; b. Pelayanan informasi rawan bencana; c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; d. Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban bencana; dan e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran
Urusan Sosial	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luarpanti; dan e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

Sumber: Bappelitbangda, 2024, diolah

4.3 Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sesuai dengan kewenangan atributif yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal (149) disebutkan DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: (a) pembentukan Perda Kabupaten/Kota; (b) “Anggaran”; dan (c) Pengawasan. Kemudian di Pasal (104) salah satu sumpah/Janji Anggota DPRD adalah “bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Hal ini dipertegas dengan Pasal (108) tentang Kewajiban Anggota DPRD, yaitu: butir (i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; butir (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan butir (k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dalam rangka melaksanakan fungsi dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses.

Didalam Dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD Kabupaten Bandung Barat yaitu berupa dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung Barat, yang terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat provinsi. Dengan demikian maka dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung Barat, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi Kabupaten Bandung Barat. Disamping itu dokumen ini juga sangat dibatasi terkait dengan faktor waktu penyelesaiannya, karena Pokok-pokok Pikiran DPRD sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan draf awal dokumen RKPD.

Selanjutnya proses penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD memperhatikan pula beberapa Peraturan Perundang-undangan termasuk diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung Barat disampaikan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung Barat harus dapat disampaikan tepat waktu agar pembahasan dokumen turunannya seperti RKPD, KUA dan PPAS, serta RKA dan RAPBD menjadi lebih terarah. Gambaran Uraian dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung Barat tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 4.12 Uraian Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Kabupaten Bandung Barat**

Kamus Usulan	Perangkat Daerah	Satuan
Bantuan KUBE	Dinsos	Kelompok
Pembentukan Puskesmas Desa	Dinsos	Paket
Bantuan Modal PEKKA	DP2KBP3A	Kelompok
Pembentukan dan Revitalisasi PATBM (Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat)	DP2KBP3A	Kelompok
Bantuan Percepatan Penurunan Stunting	DP2KBP3A	Kegiatan
Bantuan DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting)	DP2KBP3A	Kegiatan
Pembelajaran Sekolah Perempuan	DP2KBP3A	Kegiatan
Penyediaan Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi Penunjang Pariwisata	Dispora	Paket
Pelatihan Wira Usaha Pemuda Pemula	Dispora	Paket
DRAINASE	PUTR	M'
TPT JALAN	PUTR	M3
REHAB JALAN	PUTR	M2
REHAB JEMBATAN	PUTR	M'
IRIGASI	PUTR	M2
SPAM	PUTR	Unit
MCK & IPAL	PUTR	Unit
REHAB KIRMIR / TPT IRIGASI	PUTR	M3
PRASARANA PERSAMPAHAN	PUTR	Unit
DRAINASE LINGKUNGAN	PUTR	M3
PRASARANA PENGOLAHAN SAMPAH	DLH	Buah
PRASARANA PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	DLH	Buah
PRASARANA PENGOLAHAN SAMPAH PLASTIK	DLH	Buah
SARPRAS JALAN	DISHUB	Titik
Coaching Clinic dan Pendidikan perkoperasian	DISKOPUKM	Koperasi
Fasilitasi pendirian Koperasi	DISKOPUKM	Koperasi
Pengembangan sentra/klaster/kelompok UMKM	DISKOPUKM	Pelaku Usaha
Inkubasi Bisnis dan Coaching Clinic	DISKOPUKM	Pelaku Usaha
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	DISNAKER	Pelaku Usaha
Bantuan alat kesenian	DISPARBUD	Kelompok Seni
Pelatihan dan bimbingan teknis SDM kesenian tradisional	DISPARBUD	Kelompok Seni
Bantuan Peralatan Promosi Pariwisata	DISPARBUD	Pokdarwis
Pelatihan/Sertifikasi SDM Pemasaran Pariwisata	DISPARBUD	Pokdarwis
Pembangunan sarana dan prasarana desa wisata/destinasi wisata	DISPARBUD	Pokdarwis
Pelatihan SDM pengelola destinasi wisata	DISPARBUD	Pokdarwis
Pelatihan Berbasis Kompetensi Pelaku/Komunitas Ekonomi Kreatif	DISPARBUD	Kelompok Ekonomi Kreatif
Pelatihan dasar /workshop/seminar SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	DISPARBUD	Kelompok Ekonomi Kreatif
Pelatihan Berbasis Kompetensi Pelaku/Komunitas Pariwisata dan ekonomi kreatif	DISPARBUD	Kelompok Ekonomi Kreatif
Pelatihan Uji Kompetensi dan sertifikasi profesi Pelaku ekonomi kreatif	DISPARBUD	Kelompok Ekonomi Kreatif



Pembangunan sarana infrastruktur Ruang Kreatif dan Prasarana Bantuan alat ekonomi kreatif	DISPARBUD	Kelompok Ekonomi Kreatif
Fasilitasi akses permodalan dan pendanaan UMKM Kreatif	DISPARBUD	Kelompok Ekonomi Kreatif
Fasilitasi HKI Kekayaan Intelektual Pelaku ekonomi Kreatif	DISPARBUD	Kelompok Ekonomi Kreatif
Fasilitasi Kemandirian Pangan	DKPP	
Diversifikasi pangan lokal	DKPP	Kelompok Tani
Pemanfaatan Perkarangan	DKPP	
Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	DKPP	Kelompok Tani
Pupuk dan pestisida	DKPP	Kelompok Tani
Alat dan Mesin Pertanian	DKPP	Kelompok Tani
Pengangkaran Tanaman	DKPP	Kelompok Tani
Bibit/ benih	DKPP	Kelompok Tani
Jaringan Irigasi tersier	DKPP	Kelompok Tani
Jalan usaha tani	DKPP	Kelompok Tani
Bangunan pertanian lainnya	DKPP	Kelompok Tani
Dam Parit	DKPP	Kelompok Tani
Pelatihan	DKPP	Kelompok Tani
Bantuan Sarana dan Prasarana Industri Kecil Menengah	DISPERINDAG	Kelompok usaha
Bantuan Korporasi peternakan	DISKANAK	Kelompok Ternak
Bantuan budidaya ikan	DISKANAK	Kelompok Ternak
Bantuan budidaya ternak	DISKANAK	Kelompok Ternak
Pelatihan budiaya Peternakan	DISKANAK	Kelompok Ternak
Pelatihan budiaya Perikanan	DISKANAK	Kelompok Ternak
Bantuan Pakan Ternak	DISKANAK	Kelompok Ternak
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Kawasan Kumuh)	DISPERKIM	Unit
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DISPERKIM	Unit

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 untuk penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025. Musrenbang menjadi salah satu media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2025 berpedoman pada RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di kabupaten/kota.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, dana umat, serta hibah.

5.1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan pusat dan daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, keterkaitan secara utuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Sinkronisasi Program Pembangunan Kabupaten Bandung Barat terhadap Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Prioritas Provinsi	Program Daerah Kabupaten Bandung Barat	Indikator Kinerja Program
Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase capaian pengelolaan sumber daya air secara optimal
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun

Prioritas Provinsi	Program Daerah Kabupaten Bandung Barat	Indikator Kinerja Program
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	"Presentase penanggulangan bencana pertanian
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi perizinan usaha
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM penyuluh pertanian
		Persentase kelompok tani yang naik kelas
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan yang tersertifikasi
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Tahan Pangan
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Pencapaian skore pola pangan harapan (pph) ketersediaan
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu
	Program standardisasi dan Perlindungan konsumen	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen
	Program peningkatan sarana distribusi Perdagangan	Peningkatan sarpras dan distribusi perdagangan
	Program pengelolaan perikanan tangkap	Pengelolaan perikanan tangkap
	program pengelolaan perikanan budidaya	pengelolaan perikanan budidaya
	program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
	program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	persentase koperasi aktif
	program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	persentase koperasi sehat
	program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	persentase koperasi yang mendapatkan fasilitasi penguatan kelembagaan
	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	persentase usaha mikro yang diberdayakan

Prioritas Provinsi	Program Daerah Kabupaten Bandung Barat	Indikator Kinerja Program
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Dikembangkan
	program pengembangan iklim penanaman modal	persentase ketersediaan dokumen pengembangan iklim penanaman modal
	program promosi penanaman modal	persentase promosi penanaman modal
	program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	jumlah perusahaan yang melaporkan lkp
	program pelayanan penanaman modal	persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai sop
	program perencanaan dan pembangunan industri	persentase pengembangan ikm
	program pengelolaan sistem informasi industri nasional	persentase industri yang terintegrasi ke dalam siinas
	program penempatan tenaga kerja	presentase pencari kerja yang ditempatkan
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
		Produktivitas Tenaga kerja
	Program Hubungan Industrial	Persentase terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan ke Disnaker
	Program pengembangan ekspor	Nilai ekspor barang dan jasa
	"Program penggunaan dan pemasaran Produk dalam negeri"	Presentase pelaku usaha terfasilitas dalam pemasaran produk dalam negeri
	"Program perizinan dan pendaftaran Perusahaan"	Pertumbuhan pelaku usaha sektor perdagangan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pelaku Kesenian Tradisional yang ditingkatkan kompetensinya
	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Dokumen Data dan Informasi Sejarah
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Desitinasi Wisata yang Dikembangkan
	Program pemasaran pariwisata	Persentase Jumlah kunjungan Wisatawan

Prioritas Provinsi	Program Daerah Kabupaten Bandung Barat	Indikator Kinerja Program
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya dan/atau Difasilitasi Sertifikasi
Reformasi Sistem Pendidikan Pemajuan Kebudayaan Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Objek Cagar Budaya yang dilestarikan
	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD
		APM SD
		APS (7-12)
		Ruang Kelas SD dalam kondisi baik
		Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional
		Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional
		Indeks Iklim Keamanan SD
		Indeks Iklim Kebinekaan SD
		Indeks Inklusivitas SD
		APK SMP
		APM SMP
		APS (13-15)
		Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik
		Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
		Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
		Indeks Iklim Keamanan SMP
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP
		Indeks Inklusivitas SMP
		Ruang Kelas PAUD dalam kondisi baik
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B

Prioritas Provinsi	Program Daerah Kabupaten Bandung Barat	Indikator Kinerja Program
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)
		Jumlah Lembaga PKBM, Kursus, dan Pelatihan yang berizin
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pemenuhan kurikulum
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru/Murid SD
		Rasio Pengawas SD
		Rasio Guru/Murid SMP
		Rasio Pengawas SMP
		Rasio Guru/Murid PAUD
		Rasio Penilik PAUD
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD, Pendidikan Non Formal yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B
		Peningkatan proporsi Jumlah satuan pendidikan dasar yang mendapatkan minimal akreditasi A
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Layanan Kepemudaan
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Indeks ketersediaan ruang terbuka dan sarana olahraga
		Indeks SDM Keolahragaan
		Indeks Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga
		Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase Pemuda yang Aktif Pada Organisasi Kepramukaan
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase fasilitasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Prioritas Provinsi	Program Daerah Kabupaten Bandung Barat	Indikator Kinerja Program
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase fasilitasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase fasilitasi Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Cakupan Sosialisasi dan Pemberdayaan Terhadap Organisasi Masyarakat
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase tingkat pemahaman politik di masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik
Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	persentase sambungan rumah tangga yang terlayani akses air minum
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase KK yang terlayani sistem air limbah domestik
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan
		Persentase Penduduk Miskin yang menerima bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Aktif
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan

Prioritas Provinsi	Program Daerah Kabupaten Bandung Barat	Indikator Kinerja Program
		yang memiliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga yang memiliki kesadaran dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap anak
Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanganan Resiko Bencana	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi sesuai standar
	Program pengembangan perumahan	Persentase penanganan rumah korban bencana
	Program penataan bangunan gedung	Persentase penataan bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik
Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Gerakan Membangun Desa	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di luar kawasan kumuh
	Program kawasan permukiman	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di kawasan kumuh di bawah 10 Ha
	Program penyelenggaraan jalan	Persentase panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase kenaikan panjang drainase yang terbangun
	Program pengembangan permukiman	Persentase sarana prasarana permukiman yang dibangun kawasan strategis kabupaten (Berdasarkan Kawasan)
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase perumahan formal yang melakukan

Prioritas Provinsi	Program Daerah Kabupaten Bandung Barat	Indikator Kinerja Program
		proses serahterima PSU kepada Pemerintah daerah
	Program pengelolaan pelayaran	Persentase armada angkutan ASDP yang terkelola
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	"Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik
	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
	Program penatagunaan tanah	Persentase capaian Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase sampel kualitas air sungai dengan status mutu air baik
		Persentase sampel kualitas udara dengan status mutu udara baik
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Presentase RTH Taman yang terawat
	Program pengendalian bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Presentase usaha/industri yang menagelola limbah LB3 sesuai peraturan
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Presentase ketaatan industri dan/atau usaha dalam pelaporan pelaksanaan PPLH
	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Presentase Desa yang telah menerapkan aksi peduli lingkungan
	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti

Prioritas Provinsi	Program Daerah Kabupaten Bandung Barat	Indikator Kinerja Program
Inovasi Pelayanan Publik dan penataan daerah	Program pengelolaan persampahan	Persentase cakupan pengelolaan sampah domestik
	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase Sarana Prasarana Persampahan yang memadai
	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan
	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase capaian dokumen penetapan daftar masyarakat penerima santunan
	Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persentase capaian inventarisasi berupa data subjek, Objek redistribusi tanah dan terkoordinasikan, ter-sinkronisasikan untuk penataan aset dan akses reforma agrarian
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti
		Persentase Perda yang ditetapkan
		Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti
		Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan policy brief
		Center of excelent pengadaan barang jasa
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD

Prioritas Provinsi	Program Daerah Kabupaten Bandung Barat	Indikator Kinerja Program
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai/Level Maturitas SPIP Pemda
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun sesuai standar dan peraturan yang berlaku
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan aset daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti
	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian
		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi
		Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Aspek Pengembangan Karir
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE
	Program Pengelolaaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Yang Terkelola
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat kematangan penerapan manajemen Keamanan Informasi Pemerintah
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk Memiliki KTP-El
		Persentase Indentitas Kependudukan Digital (IKD)
		Persentase Anak Ber KIA
	Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan Akta kematian
		Persentase penduduk ber akta kelahiran 0-18 tahun

Prioritas Provinsi	Program Daerah Kabupaten Bandung Barat	Indikator Kinerja Program
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi
	Program Pengelolaan Arsip	Nilai pengawasan kearsipan eksternal
		Nilai pengawasan kearsipan internal

Sumber: SIPD-RI Kab. Bandung Barat, 2023

5.2 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, telah menyusun rencana kegiatan yang diusulkan menjadi Kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Kompetitif Tahun 2024 yang didanai oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Berikut ini akan disajikan usulan rencana program dan kegiatan tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.2 Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Kompetitif Tahun 2024 untuk RKPD Provinsi Tahun 2025 (Hasil Coaching) Provinsi Jawa Barat

Kamus Tema	No	Usulan Kegiatan	Usulan Anggaran
Peningkatan Kompetensi Pemadam Kebakaran	1	Perlunya peningkatan kompetensi aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta pemenuhan sarana prasarana pendukung	1.250.000.000
Pengembangan Gerai Usaha Terpadu	1	masalah pemasaran apalagi di tengah persaingan pasar global dimana produk produk luar negeri dapat dengan bebas memasuki pasar Indonesia. Atas dasar hal tersebut kami berupaya memajukan produk UMKM Kabupaten Bandung Barat melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM	2.500.000.000

Kamus Tema	No	Usulan Kegiatan	Usulan Anggaran
Early Warning System Kebencanaan	1	Dalam rangka kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor perlu adanya penyediaan alat peringatan dini yang bisa memberikan informasi langsung kepada masyarakat secara real time	2.000.000.000

Sumber: Bappelitbangda, 2024

5.3 Program Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025

Perencanaan program Strategis merupakan perencanaan strategis memiliki pengaruh yang sangat luas dan memiliki intensitas lebih tinggi sehingga dalam pelaksanaannya menjadi tanggungjawab bersama antara Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Daerah. Program strategis/proyek strategis yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3 Proyek Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025

No	Proyek Strategis	Lokasi	Pagu Indikatif	Sumber Pendanaan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	EWS (Early Warning System)	tersebar		APBD	BPBD, Perangkat daerah Terkait
2	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	tersebar		APBN	Kementerian PUPR
3	BRT Bandung Raya	lembang padalarang cililin			BRT Bandung Raya

Sumber: Bappelitbangda, 2023 diolah

5.4 Rencana Program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan serta kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil input Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah terpetakan kedalam setiap urusan pemerintahan dengan rekapitulasi sebagaimana table berikut:

Tabel 5.4 Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pagu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub kegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	6	20	99	65.194.376.161	Dinas Pendidikan,
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	4	23	87	19.701.424.735	Dinas Kesehatan

3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	11	25	79	61.018.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4	17	49	17.800.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	6	29	130	23.809.254.700	Satpol PP, BPBD, Disdamkar
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	7	15	49	10.888.846.095	Dinas Sosial
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	5	23	78	8.002.711.033	Disnaker
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6	14	15	1.455.510.600	Dinas P2KBP3A
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	10	28	82	17.572.471.876	DKPP
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	5	6	14	3.717.306.632	Dinas Perumahan dan Permukiman
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	11	21	44	39.419.859.046	Dinas Lingkungan Hidup
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	15	36	12.136.170.706	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	10	20	40	12.356.389.626	DPMD
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	16	101	17.771.236.672	Dinas P2KBP3A
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	6	27	89	33.683.632.526	Dinas Perhubungan
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	4	16	65	9.534.176.628	Diskominfo
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	14	28	43	6.421.992.039	DiskopUMKM
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	12	38	10.488.404.877	DPMTSP
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	5	16	47	31.190.864.088	Dispora
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	5	315.340.300	Diskominfo
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	2	4	286.433.900	Diskominfo
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	4	7	13	4.530.436.000	Disparbud
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2	4	16	1.000.780.200	Disarpus
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	8	22	54	349.211.800	Disarpus
25	Urusan Pemerintahan	6	15	50	12.364.486.744	Dispernakan



	Bidang Kelautan Dan Perikanan					
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	6	22	80	7.671.490.630	Disparbud
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	10	23	63	8.231.359.575	DKPP
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	6	15	35	248.145.100	Disperindag
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	4	10	34	17.288.041.889	Disperindag
30	Sekretariat Daerah	3	19	72	55.803.848.324	Setda
31	Sekretariat DPRD	3	23	97	63.628.548.648	Setwan
32	Perencanaan	3	13	71	12.986.417.841	Bappelitbangda
33	Keuangan	8	30	193	591.881.092.562	BKAD
34	Kepegawaian	2	10	43	26.199.494.963	BKPSDM
35	Pendidikan Dan Pelatihan	1	2	2	508.927.300	BKPSDM
36	Penelitian Dan Pengembangan	1	4	10	2.039.999.800	Bappelitbangda
37	Inspektorat Daerah	3	10	35	19.783.410.113	Inspektorat
38	Kecamatan	12	35	120	60.562.778.281	Kecamatan
39	Kesatuan Bangsa Dan Politik	12	22	92	9.154.457.637	Bakesbangpol

Sumber: SIPD-RI 2024

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja dan kerangka pendanaan ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025. Secara rinci Program, Kegiatan dan sub kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025, dapat dilihat sebagaimana terlampir pada lampiran I.

Rencana Aktifitas Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025

Dari Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan serta kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2025 selanjutnya di buat rincian aktifitas prioritas untuk pendukung pelaksanaan dari rencana progam, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

NO	PD	Akftifitas Prioritas
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan	"Prioritas Dinas :
		*Ruang Kelas Rusak Berat SD(100 Ruang Kelas) SMP (92 Ruang Kelas)
		*Ruang Kelas Rusak Sedang Sd (25 Ruang kelas) SMP (25 Ruang Kelas)
		*Penekanan Angka Putus Sekolah
		*Peningkatan Perpustakaan SD 25 Perpustakaan, SMP 11 Perpustakaan
		*Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru Idola)
		*Penigkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Matematika Guru Handal Numerasi (GUNDALA)
		*Bantuan Peralatan Siswa Miskin
		*TIK Sekolah
		Stunting :
		*Paud Ceria (cegah stunting dengan edukasi riang bagi anak)
		- Penekanan angka stunting dengan menjangkau satuan pendidikan jenjang paud (16 Kecamatan) (paud HI) target untuk 25 : 250 Paud
		- Peningkatan Kapasitas Guru Paud
2	Dinas Kesehatan	Prioritas Dinas : Pemerataan akses dan kualitas Kesehatan :
		*Relokasi Puskesmas Ciwaruga (Fasum di Setiabudi Regency)
		*Pembangunan Sarpras 3 Rumah sakit RSUD (Lembang difokuskan ke penguatan struktur)

		*Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan tidak menular
		- Penanggulangan Penyakit TBC (Desa Siaga TB) (Prioritas Nasional)
		kegiatan TBC di tahun 2025 :
		1. Pertemuan kader TBC se-KBB (peningkatan kapasitas kader) :
		- pertemuan jejaring
		- Pertemuan lintas sektor terkait penanggulangan TBC
		2. Pengadaan kapasitas mesin TCM dgn penambahan mesin TCM utk penegakan diagnostik TBC. 3 alat
		*Pengawasan Higiene Sanitasi sekolah (TFU dan TPM) (16 Kec.)
		* 5 Pilar STBM 16 Kecamatan
		Stunting
		1. Pengadaan Makanan Tambahan Lokal untuk Bumil KEK (kurang Energi Kronik) dan Balita Gizi Kurang / berat badan Kurang (pemberiaan makanan diberikan dari kader posyandu)
		2. Pemeriksaan Anemia pada Remaja Putri (umur 12 - 19) :
		2a. Skrining SHK
		3. Aksi bergizi di 20 sekolah (SMP dan Sma sederajat) (Geber sijumo)
		(promosi Kesehatan : Aktifitas fisik,sarapan bersama, bersih2 bersama, TTD) didesa lokus stunting)
		4. Pengawasan Kualitas Air Minum di Lokus Stunting (lok stunting : 20 titik)
		5. Pelatihan guru uks
		*UHC
		*Blud
		*Program Aids:
		*Kebutuhan Penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025:

		*Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi dan Sertifikasi Laik Sehat, STBM, Pengawasan terhadap Sarana Air Minum di KPSPAM, Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji Bagi Penjamah Makanan Jasaboga Obatan dan Pelatihan tenaga kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Penyelenggaraan Jalan
		- Menunjang Pariwisata Curug Malela
		*Ruas Jalan Bunijaya - Rongga
		*Ruas Jalan Gununghalu -Bunijaya
		- Longsor
		*Ruas Jalan SPN - Kertawangi
		- Prioritas
		*Ruas Jalan Cangkorah - Bts Leuwigajah, Ruas Jalan Cililin- Sukatani
		*Ruas Jalan Cikakak - Leuwinutug, Ruas Jalan Rancapanggung - Ugrem
		*Ruas Jalan Cikadu - Rancasenggang
		*Ruas Jalan Sindangkerta - Celak
		*Rehab Jalan Kabupaten
		*Pemeliharaan Rutin Jalan UPT Wilayah I
		*Pemeliharaan Rutin Jalan UPT Wilayah II
		2. Spam Lokus Stunting dan Kawasan Kumuh
		3. Air Limbah Lokus Stunting dan Kawasan Kumuh
		4. RTBL (rencana Tata Bangunan Lingkungan) Kawasan Perkotaan Padalarang
		5. Riviur Masterplan Pemda
		6. Riviur RDTR Padalarang
		7. Penyusunan Peta Dasar Kecamatan *16 Kec.
		8. Penyusunan Master plan Drainase Perkotaan
		9. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 9 Daerah Irigasi
		-Pembangunan Tanggul Sungai di Saluran Cikahuripan

		- Daerah Irigasi Sukahaji
		10. rivi FS (IPLT)
		11. Pelatihan Jasa Konstruksi
		12. Tanggul untuk Sungai
		13. Pemeliharaan Gedung Pemda 4 Gedung
		14. Pengawasan dan Evaluasi
		15. Sistem Informasi Jasa Konstruksi
		16. UPT Jalan
		1. UPT SUMBER DAYA AIR WILAYAH 1 DAN 2
		2. REHAB BENDUNG IRIGAS DAN Operasi dan Pemeliharaan
		- DI Sukahaji, DI Pasir Angsana, DI Pasir Jeungjing
		- DI. Cidadap 2, DI. Cipinang 1
		3. Leger Jalan
		4. Inspeksi jalan
		(pemeliharaan)
		1. rehab jalan
		2. rehab jembatan
		*RTRW KE 4WP dan pemanfaatan dan pengendalian ruang
4*	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1. Penanganan Kumuh (SK kumuh thn 2021) Total (di prioritaskan di kecamatan ngamprah)
		• Jalan Lingkungan
		• Drainase Lingkungan
		• RTLH Kumuh 130 Unit
		2. Perbaikan RTLH diluar sk kumuh (80unit)
		3. Rehab Rumah Terdampak Bencana Total 150 UNIT
		• Rusak Berat 50 UNIT
		• Rusak Sedang 50 UNIT
		• Rusak Ringan 50 UNIT
		4. Peningkatan PSU yang sudah serah terima Total 9 Perumahan

		5. Operasional Forum dan POKJA PKP (FGD perumahan kawasan Permukiman)
		6. Pengadaan dan Peningkatan tata kelola pertanahan
		• Pendaftaran Bidang Tanah Pemda (400 DOK) 400 Bidang
		• Perencanaan Pengadaan perkantoran Pemda (dok. perencanaan pembebasan Lahan)
		• Inventarisasi subjek penerima redistribusi Tanah (3 DOK)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Pengawasan dan penanganan Pelanggaran Perda (Penegakan Perda (Perizinan, Reklame dan PKL)
		2. Pencegahan dan penanganan gangguan Trantibum (patroli, pembinaan dan Penertiban) diikutsertakan Linmas dan TNI Porli
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Dokumen Kajian resiko bencana (10 jenis Bencana)
		2. Dokumen Rencana penanggulangan Resiko Bencana
		3. Dokumen Rencana Contigensi untuk sesar lembar dan gunung merapi
		4. Penguatan tim Reaksi Cepat Penanggulangan bencana
		5. Penguatan Tim Jitu Pasna (Kaji Cepat Pasca Bencana)
		6. FS Gudang Logistik (diarea Pemda)
		Penataan Gudang dan Kantor
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Prioritas Pembangunan Gedung dan Mobil Damkar
		Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PAM Lebaran-, PAM Nataru-, Piket
8	Dinas Sosial	Prioritas Dinas :
		1. Pembinaan untuk pembangunan Puskesmas desa (target 160 desa (advokasi)
		Target 2 Orang per desa yg dibina
		2. Sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) Pelayanan di tingkat Kabupaten

9	Dinas Tenaga Kerja	3. Pemenuhan Pelayanan Bidang Sosial
		- Rehab Berat UPT di Cipatat (rumah singah) (SPM)
		4. Sidarling PEDE (sistem layanan dasar keliling PPKS dan Disabilitas sudah termasuk anak terlantar)
		-menujang SPM (berupa pemberian Permakanan, sandang, Mobil Pelayanan DLL)
		5. Rehabilitasi Sosial pmks lainnya bukan korban hv atau aids diluar panti sosial
		6. Penanganan bencana (SPM)
		Kemiskinan Ekstrim :
		1. Kube
		2. Pembinaan Operator SIKS-NG (target pembinaan 165 desa)
		- Pelatihan Operator SIKS-NG
		- honor Verval data (P3KE) OP SIKS-NG
		3. Pena (pelatihan dan pendampingan)
		Program pahlawan ekonomi Nusantara
		Pertumbuhan ekonomi dan (kemiskinan ekstrim) :
		1. Program GEMPAR (Gerakan Melatih Pencari Kerja)
		Ø Pelatihan Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Target 2 Kegiatan
		Jenis Pelatihan dari data Pencari Kerja :
		- difokuskan ke prioritas untuk kemiskinan Ekstrim (P1)
		- diprioritaskan ke kecamatan yang kemiskinan ekstrimnya tinggi
		- Paket pelatihan disesuaikan hingga mendapatkan sertifikat Kompetensi BNSP : 160orang
		Ø Pelatihan Pencari Kerja (Kerjasama dengan LPK) Target 100 orang
		Ø Job Fair (80 Perusahaan)
		Ø Pemagangan

		- Pemagangan dalam negeri 5 bulan (10 perusahaan x 5 orang) : - Pemagangan luar negeri (Program N4 : 20 orang) :
		Ø Peningkatan Sarana & Prasarana Pelatihan
		- (DED) Gedung BLK (harus ada dok pendukung (dok FS) sebelum DED)
		- Sarana Pelatihan
10	(DP2KBP3A)	Stunting
		1. Ini Genting (Kesekolah memberikan materi)
		2. Getol (Genre Go to School)
		3. Audit Stunting
		4. Pendampingan Keluarga Stunting (KCIC : Kunjungi, catat, Interpentsi, Cintai)
		5. Dahshat (Dapur Sehat Atasi Stunting) 165 Desa
		Kemiskrinan Ekstrim
		1. Pembinaan 100 Kepala Keluarga (program p2wkss)
		2. kampung KB (Kampung Keluarga berkualitas) 165 Desa
		3. bantuan untuk Pekka 60 kelompok
		• Pelayanan KB, Alokon, Bangga Kencana, Kampung Kb
		• Kabupaten Layak Anak
		• Pengarusutamaan Gender
		• Perlindungan Perempuan dan Anak
		• Rumah Data Kependudukan, Sekolah Siaga Kependudukan, Sarasehan PK
		• BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA
		• Pildugen, Monev dan Pendampingann TPK
		Ini Genting dan Getol
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi
		1. Kawasan Penyangga Pangan
		2. Pengembangan Kemitraan Closed loop

		3. Penyediaan Pangan berbasis sumberdaya Lokal (Pemberian alat Mesin Pasca Panen)
		Stunting
		1. penanaman pekarangan dengan sayur dan buah (P2L) Sasaran Keluarga Beresiko Stunting
		Kemiskinan Ekstrem
		1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (pengadaan beras premium untuk masyarakat P3KE; stok untuk keperluan bencana)
		2. Penyaluran CPPD (cadangan Pangan Pemerintah Daerah)
		3. Pemberian / Distribusi Pangan
		Inflasi
		1. Akses Pangan Berkualitas (Pasar murah, GPM)
		2. Gerakan Pangan Murah untuk FDP (fasilitas distribusi pangan)
		3. pengembangan komoditas cabe dan bawang merah
12	Dinas Lingkungan Hidup	Prioritas Dinas
		Pencegah, Penanggulangan dan Pemulihan pencemaran Lingkungan (dari pajak Tanah)
		1. Rivi FS TPST (sarimukti Cililin)
		2. KLHS RDTR Padalarang
		3. Penyusunan Raperda RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup)
		4. Pengujian Kualitas Air Sungai Udara dan Tutupan Lahan
		5. Konservasi Lahan / Rehabilitasi Lahan (penanaman pohon di lahan Kritis (data RTRW))
		6. Masterplan keanekaragaman hayati KBB
		7. Amdal Rivi Masterplan Pemda "
		KJP
		RISPS
		1. Penilaian Adipura
		2. KLHS RDTR Padalarang

		3. Pengawasan dan Pembinaan untuk Kegiatan dan / Atau Usaha
		4.(GRK) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim)
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pendaftaran Penduduk : (Kebutuhan 1 tahun : >> blangko, formulir, tinta, film KTP-e, cleaning card, dll)
		Pengelolaan Adminduk (Pemeliharaan jaringan dinas/kecamatan, pemeliharaan jarkomdat, pemeliharaan server, pembelian lisensi antivirus/firewall, pengembangan aplikasi Sidilan, pembuatan aplikasi network monitoring system, pembelian UPS, pengembangan website, perbaikan mesin cetak KTP/KIA) :
		Pemeliharaan tower :
		Pembangunan Aplikasi Dashboard Data Kependudukan :
14	Dinas Perhubungan	Prioritas :
		1.Penerangan Jalan
		2. Kelengkapan Fasilitas Jalan di jalan berkeselamatan (raus jalan untuk di sampaikan)
		3. Penataan angkutan Umum (mulai dari kajian sampai tindak lanjut di kcic)
		- Rivi Rencana Induk Jaringan LLAJ
		- Rivi Jaringan Trayek
		- Rivi Rencana Intra dan Antra Moda (4dokumen)
		4. penyusunan Kajian untuk air sungai dan danau (asdp)
		- kajian penataan lalu lintas di perairan waduk saguling
		- Kajian perencanaan pelabuhan sungai dan danau
		5. Penataan Lahan Parkir (sarana Mobil Derek)
		- Rivi Rencana Induk Jaringan
		- Rivi Rencana Jaringan Trayek
		- Pengembangan Uji Multi Land

		- Bidang Lalu Lintas (CCTV u/ Monitoring)
		- Service Analitik
		- Perlengkapan Jalan
		- Natru, Lebaran, hari besar keagamaan, OP kendaraan
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	"Connecting KBB"
		a. Percepatan Impelentasi Smart City
		- Internet Kewilayahaan
		- Wifi Publik
		- Penambahan bandwith (Peningkatan di mainlink menjadi 600 mbps)
		- CCTV (Pemasangan di komplek pemda 200 Titik)
		- Peremajaan Device (ruter, switch hub, penambahan server, sertifikasi ruang Server dll di gedung pemda)
		- Monev Masterplan Smart City
		- Pengembangan Aplikasi dan pengelolaan Aplikasi
		- Peningkatan Kompetensi SDM (Teknologi Informasi) (berupa Pelatihan sesuai indikator SPBE)
		- Audit TIK (Aplikasi, Infrastruktur, dan Kemanan Informasi) (Internal dan External)
		- Sarpras Teknologi Informasi (Magic glass, Video wall, Mixer audio, Video tron (literasi digital) dll)
		b. pelaksanaan dan Peningkatan implementasi SPBE
		- FGD peningkatan SPBE (bimtek, sosialisasi dll)
		- Penyelenggaraan pengamanan Informasi pemda (pengamanan jaringan dan dan keamanan Informasi)
		- (Standarisasi kemanan Iso 27001, pemenuhan Indeks KAMI, Firewall dan ssl, Penetration test, penyelenggaraan TTE, CSIRT, SOC)
		- Tatakelola SPBE (perencanaan, Implementasi Evaluasi) (kebijakan, Pedoman, SOP dll)
		- PID (pengelola Informasi dan Dokumentasi)

		- (Pelayanan Informasi Publik, Pengelolaan Informasi dan dokumentasi, Pengolahan Informasi, Klasifikasi Informasi dan penyelesaian Sengketa Informasi, dan Laport SP4N (Pelaporan dan pengaduan Masyarakat))
		c. Metadata (KBB Secure)
		- Basis Data, makro ekonomi, Makro Sosial, EPSS, Pendampingan input data, Geospasial, analisis data , Big Data, data science.
		d. Internet Keliling
		- Mobil Operasional (peliputan dan Internet) "
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Prioritas Dinas
		1. Sertifikasi halal untuk 35 cpcl (untuk umkm berbasis makan nanti data menyusul)
		2. DED PLUT 150JT (sewa tempat Embrio plut (umkm development Center) dikota baru) (difokuskan untuk Sewa tempat dan sarpras)
		3. Bazar UMKM 5 kali (Hari jadi KBB, HUT RI, Hari Santri, Bazar Ramadhan, Musrenbang)
		4. Inakraf
		5. Basis Data UMKM (updating data dan digitalisasi UMKM)
		6. Kajian Tematik untuk Pengembangan Umkm di 3 Wilayah (Cipongkor, Cikalong, Lembang)
		1. SIGNAL (Koperasi Generasi Muda Milenial) (sosialisasi perkoperasi, duta koperasi) - SmartCity;
		2. Promosi, Pemasaran dan Penghargaan Koperasi (HARKOPNAS, HARKOP PROVINSI DAN HARKOP KBB);
		3. Kaderisasi dan Pemasyarakatan Koperasi (AKAMSI (pembentukan Kampung Koperasi - SmartCity):
		4. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
		7. Pemeringkatan Koperasi (IKU);

		8. Fasilitas Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha;
		9. Uji Kompetensi / Standarisasi Pengelola Koperasi
		10. Fasilitas Akses Pemasaran dan Pembiayaan, Akses Pembiayaan ;
		11. Fasilitas Pendirian (untuk yang baru) / Advokasi Koperasi (untuk yg sudah ada dan baru);
		Kemiskinan Extrime
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat berupa peralatan mesin UMKM makanan sebanyak 10 unit (rencana produknya moring) di wilayah kantong kemiskinan ekstrem, sasaran 1 kelompok bisa menyerap 200 orang berdasarkan data P3KE; (untuk Pendukung BBGRM, P2WKSS, Bsmss) dengan Pelatihan UMKM
		1. Dokumen Investasi (Dokumen IPRO (Invesment Project Ready to OFer) dengan target 2 dokumen IPRO
		2. promosi Investasi (melalui media Digital, Pameran , Bisnis <i>meeting</i> , <i>road show</i> , <i>West Bandung Investment Summit</i> dari pemetaan Investasi
		3. Peningkatan MPP (sarpras dan pelatihan petugas pelayanan) untuk Pelayanan Imigrasi, Samsat, Polres
		4. Pendampingan Pelayanan perizinan (dengan mobil keliling) Sakilat (termasuk pengadaan mobil layanan)
		5. Peningkatan Pengawasan Penanaman modal (memastikan bahwa pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, perkembangan usahanya, dan pelaksanaan kewajiban lainnya telah sesuai dengan prosedur kegiatan usaha)
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	Prioritas Dinas
		1. Lanjutan Pembangunan Gedung Olahraga Joging track kecamatan cipeundeuy

		2. Sarpras Olahraga (difokuskan ke Kelompok / Komunitas / Club Olahraga)
		• Spesifikasi : 1. Volly
		2. Sepak Bola / Futsal
		3. Badminton
		4. Senam
		3. Pemuda Pelopor (Termasuk Seleksi, Sosialisasi, pembinaan, Pemilihan) (5 orang Juara Pemuda Pelopor)
		4. Kewirausahaan Pemuda (Pembina, pemberian sarpras pendukung wirausaha pemuda, Untuk Kelompok Binaan dari Dispora,) (1 Kelompok Binaan)
		5. PPLPD (Pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar daerah) (Target anak SMP, Cabor : Gulat, angkat besi, Dayung) (Pembinaan dan Seleksi selama 3 bln) (Target 50 Orang)
		6. Sport Industri (Event olahraga : Color Run)
		7. Penyelenggaraan Event (Popda (target Juara 1), Forprov)
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Prioritas Dinas
		1. Pengembangan Perpustakaan Daerah (bersinggungan dengan program disdik)
		* Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah (tahun 2024 sudah ada DED) (Riveu Masterplan)
		*Akreditasi Perpustakaan (kepala / Pengelola Perpustakaan) (APBN untuk SD dan SMP)
		(-Peningkatan Sarpras Perpustakaan Sd, SMP, Paud dan Desa yang belum Terakreditasi
		-Sosialisasi akreditasi perpustakaan untuk 100 perpustakaan (50 sd, 50 SMP
		-Sosialisasi SNP (standar Nasional perpustakaan) 100 Perpustakaan
		-Pendampingan pra Akreditasi))

		2. pengelolaan dan Pengembangan Bahan perpustakaan (Buku tercetak dan tidak tercetak (e-book) Gurilem KBB) 3. Perhitungan Indeks (meingkatkan indeks pembangunan Literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca) Penyusunan SOP Arsip : Tenaga Kerja Arsip dan Perpustakaan Non ASN (Desa/Kecamatan) : Pembinaan arsip kecamatan :
20	Dinas Perikanan dan Peternakan	Prioritas Dinas Fokus pembangunan Peternakan Sapi Perah di Wilayah Selatan (5 kecamatan Rongga, Gunuhal, Cipongkor, Sindangkerta, cililin) 1. Gebrakan (gerakan membangun Peternakan) Sarpras (kandang sapi(sampai pengolahan Ipal)), Bibit Sapi, Pakan Sapi, Pengolahaan Susu Dilaksanakan di UPT 2. Santri Bertelur dilaksanakan di lokus desa stunting (Pengembangan Ayam Petelur (80 Pesantren Termasuk pembelian ayam, Pelatihan, kandang, Pakan) 3. Itik Padjajaran (batujajar, saguling) Pengembangan Itik Petelur (2 kelompok) 4. Revitalisasi UPT dan pasar hewan 5. Penyebaran Indukan ikan untuk UPR unit pembenihan Rakyat (5 UPR CIpeundeuy, Ngamprah, gunhal, Cipatat, Padalarang) Sarpras (airator dll) , Pakan 3 kelompok 6. Gemar Ikan dan Gerimis Bagus dilaksanakan di lokus stunting 7. Vaksin dan Obat Cacing 8. Peningkatan Untuk Sarpras Pengolahan Perikanan 1 unit UPI 9. Peningkatan Untuk Sarpras Pengolahan Peternakan 1unit KIP Stunting

		indikator Stunting : Keluarga risiko mendapat promosi makan ikan Target 50% dari Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Prioritas Dinas
		Ditahun 2025 di fokuskan di 2 Lokus (Curug malela dan gua pawon (dikelola pemda) Aksesibilitas dan Fasilitas
		Curug Malela
		- (Renovasi toilet, Pembuatan akses jalan setapak, Renovasi Tiket Box, Ampitheater Tembok Penahan Tanah (TPT)
		(akses ke Curug malela), Pembangunan Camping Ground
		Pembangunan Gerbang masuk Tiketing dan Tugu
		Pembangunan Mushola Pembangunan Kirmir, Pembangunan Galeri Seni dan Handycraft Berwawasan tradisional,
		Penataan Taman Penyedian dan Akses Air, Tempat Parkir, Jalur Evakuasi, Food Court, Pembangunan Shelter
		Area Bermain Anak (Playground))
		Gua Pawon
		- (Renovasi Mushola,Lanjutan Gedung Museum , Penataan Jalan setapak menuju meseum, Renovasi Toilet,
		Pembangunan Gapura, Penataan Taman di sekitar lahan parkir, Penyedian dan Akses Air, Food Court,Area
		Bermain Anak (Playground), Jalur Evakuasi Landmark Gua Pawon (Patung (miniatur)) dan area swafoto)
		Ekraf (Aktifitas dilaksanakan di Gua Pawon dan curug malela)
		-Pelatihan dasar dan kompetensi pelaku ekonomi kreatif (Fotografi, barista, Videografi, Digitalmarketing)
		Aktifasi zona ekraf yang baru (HKI)
		Kebudayaan (Aktifitas dilaksanakan di gua pawon dan curug malela) Proyeksi

		-Peningkatan pendataan dan pemeliharaan cagar budaya yang dilestarikan
		(Workshop, Tim Ahli Cagar budaya (benda dan tak benda))
		-Pemberian Penghargaan bagi para Pelaku Seni Budaya (Pewarisan Seni Budaya)
		Pemasaran Proyeksi Pelaksanaan
		- Festival Patorema, Nostalgila Festival, Cool-On Bandung Fest, drag race (perahu) disaguling dan Festival Bunga (CoE Kemenprekraf)
		- portal Visit KBB (berkolaborasi dengan 2 Startup (agoda,traveloka))
		Table Top
		Pameran Skala Nasional
		Promosi Media sosial
		Stunting (Gastronomi)
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Prioritas Dinas Pertumbuhan Ekonomi :
		1. Pengembangan sentra IKM (1 Central Wajit kec. cililin , Layang2 dan tusuk Sate kec. Cihampelas, Bambu, Pandai Besi Cipongkor, Kecipring lembang)
		• Sarpras
		• Legalitas
		• Pelatihan sesuai dari Sentra IKM
		2. P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri)
		3. Pengembangan Industri Kecil menengah KBB (untuk 200 IKM)
		• Sertifikasi Angka Kecukupan Gizi
		• Sosialisasi
		• mengikuti Pameran (Ethinc Food (Event Jabar), dekranasda, Inakraf, Apkasi, Hut KBB))
		4. Siinas dan TKDN (untuk 100 Pengusaha)
		• Sosialisasi untuk mendapatkan sertifikat TKDN

		5. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten
		Inflasi :
		1. Operasi Pasar (4 Kali Kegiatan) (16 kecamatan dan 8 pasar Pemda(subsidi pedagang))
		2 Pola Pengendalian (kegiatan dilaksanakan pada Nataru, Idul Fitri, Menjelang Ramadhan)
		1) Pemberian Subsidi bahan Kebutuhan Pokok
		2) Pemberian Reduksi (biaya Distribusi) bahan Kebutuhan Pokok
		2. Pengawasan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat (barang Beredar *cnt: barang subsidi, barang penting (pupuk), barang berbahaya, dll)
23	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Prioritas Dinas
		Penyusunan Dok. RPJMD 2025-2029 dan Penyusunan Dok. RKPD 2026
		-Pelaksanaan Musren RPJMD, Musren RKPD
		-FKP RPJMD, FKP RKPD
		Data Makro Ekonomi dan Sosial u/RPJMD
		Pengendalian dan Monev
		bimbingan teknis regsosek untuk semua PD dan Desa
		Rempug Stunting Tk. Kabupaten
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Server ATISISBADA, Server SIAP :
		KDN
25	Badan Pendapatan Daerah	Interior dan pendataan Potensi Pajak
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan ASN
		Pengadaan ASN
		Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance:
		1. Sistem Merit sudah di

		- Manajemen Talenta - Jabatan kritikal - Box Talent - Rencana Suksesi - Asesment Center (tempat Gedung Dilkat Lembang) - SMART Profile (Peremajaan data pegawai) - Penghargaan PNS berprestasi dengan kategori (inovatif, Inspiratif dan future leader)
		2. Pelatihan ASN dan pengembangan Kompetensi
		- Pelatihan ASN (diklat teknis Fungsional dan Manajerial) - Tugas Belajar (beasiswa ASN)
27	Inspektorat Daerah	Inspektorat Fungsi Pengawasan
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Partai Politik, FKUB, PASKIBRAKA Saberpungli Forkopimda Ketupat/Nataru
29	Kecamatan Batujajar	1. Rembug Stunting Tk. Kecamatan 2. kegiatan Gemas dari Prov jabar
30	Kecamatan Cipeundeuy	
31	Kecamatan Gununghalu	
32	Kecamatan Padalarang	
33	Kecamatan Lembang	
34	Kecamatan Sindangkerta	
35	Kecamatan Cisarua	
36	Kecamatan Ngamprah	



37	Kecamatan Cikalongwetan	
38	Kecamatan Cipongkor	
39	Kecamatan Saguling	
40	Kecamatan Cililin	
41	Kecamatan Parongpong	
42	Kecamatan Cipatat	
43	Kecamatan Cihampelas	
44	Kecamatan Rongga	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi indikator kinerja utama (IKU) daerah yang menggambarkan kinerja daerah, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah disertai target tahun 2024, meliputi:

1. Indikator makro pembangunan, disajikan pada Tabel 6.1
2. Indikator Kinerja Kunci tingkat kinerja dampak (*impact*), yang memuat:
 - a. IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, disajikan pada Tabel 6.2
 - b. IKU Perangkat Daerah, merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya, disajikan pada Tabel 6.3
3. Indikator Kinerja Kunci tingkat hasil (*outcome*) disajikan pada tabel 6.4

**Tabel 6.1 Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 - 2025**

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025**
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,33	70,45	70,62
2	Presentase Penduduk Miskin	Persen	10,52	10,40	9,05 - 9,99
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,11	6,40	7,49 - 8,16
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,00	5,66	4,87 - 5,37
5	Gini Rasio	Point	0,374	0,341	0,345 - 0,358
6	Penurunan Emisi GRK Kumulatif *	Ton Co2eq	-	-	256.969,37

Sumber: * Indikator baru

**Target Tahun 2025, diperbaiki berdasarkan hasil fasilitasi RKPD Kab/Kota oleh Bappeda Jabar

**Tabel 6.2 Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 - 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024**	Target 2025
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,33	70,45	70,62*
2	Prevalensi Stunting	% SSGI	25,10	17	17
		% EPPGBM	8,15	7,36	6,90
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,00	5,66	4,87 - 5,37*
4	Realisasi Nilai Investasi	Trilyun	2,731	6,5	6,8
5	Gini Rasio	Point	0,374	0,341	0,345 - 0,358*
6	Presentase Penduduk Miskin	Persen	10,52	10,40	9,05 - 9,99*
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,11	6,40	7,49 - 8,16*
8	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	Poin	25,93	25,55	25,11
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	55,79	63,10	63,20
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai / Kategori	72,27 BB	74,85 / BB	77,96 / BB
11	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,65	83,67	87,08
13	Indeks Demokrasi	Poin	-	70	75
14	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton Co2eq	-	-	256.969,37*

Sumber: * Target Tahun 2025, diperbaiki berdasarkan hasil fasilitasi RKPD Kab/Kota oleh Bappeda Jabar

**Tabel 6.3 Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023-2025**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024*	TARGET TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH
1	Angka Harapan Hidup	Poin	73,10	73,30	73,53	Dinkes
2	Prevalensi Stunting	% SSGI	25,10	17	17	Dinkes, DP2KBP3A, DKPP, DPUPR
		% EPPGBM	8,15	7,36	6,90	
3	Harapan Lama Sekolah	Poin	11,91	11,92	11,93	Disdik, Disarpus
4	Rata - Rata Lama Sekolah	Poin	8,23	8,23	8,27	
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,77	1,48	1,45	DP2KBP3A
6	Indeks Pembangunan Gender	Poin	80,37	80,89	81,79	Dispora
7	Presentase Layanan Kepemudaan	%	10,24	10,30	10,35	
8	Indeks Pembangunan Olahraga	Poin	0,44	0,45	0,46	DKPP, Dispernakan
9	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	12,73	12,88	12,89	
10	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	12,40	12,98	13,01	Disperindag
11	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	41,16	41,61	41,63	



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024*	TARGET TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH
12	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	-	3,00	3,91	Disparbud
13	Persentase budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung pariwisata	%	29,96	36,14	42,22	
14	Realisasi Nilai investasi	Trilyun	2,731	6,5	6,8	DPMPTSP
15	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	%	46,80	48,40	50,00	Diskop UMUM
16	Pertumbuhan Usaha Mikro	%	19,20	23,23	26,45	
17	Presentase Penduduk Miskin	%	10,52	10,40	9,05 - 9,99*	Dinkes, Disperkim, Dinsos
18	Persentase desa tahan pangan	%	72,73	75,76	78,79	DKPP
19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,11	9,20	7,49 - 8,16*	Disnaker
20	Persentase cakupan infrastruktur permukiman	%	-	66,72	79,69	PUPR, Disperkim
21	Indeks Akseibilitas / Transportasi	Poin	16,94	13,11	13,06	Dishub, PUPR
22	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	-	100	100	PUPR, Disperkim, DLH
23	Indeks Ketahanan Daerah	Poin/ Katagori	0,48 Sedang	0,49 Sedang	0,50 Sedang	BPBD, Disdamkar, PUTR, Kimrum, Dinsos
24	Persentase Desa mandiri	%	47,88	53,94	57,57	DPMD
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	55,79	63,1	63,2	DLH, PUPR
26	Nilai Sakip	Nilai/ Katagori	68,59 /B	71 /BB	72 / BB	Itda, Bappelitbangda, Setda, Semua PD
27	Opini BPK terhadap LKPD	Skore	WTP	WTP	WTP	BKAD, Bapenda, Itda
28	Indeks Merit	Skore	0,72	0,76	0,81	BKPSDM
29	Indeks SPBE	Poin	3,32	3,40	3,43	Diskominfo
30	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,65	83,67	87,08	Disduk, DPMPTSP, Setwan, Kecamatan
31	Indeks Kearsipan	Poin	-	57,94	60,59	Disarpus
32	Presentase penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat	%	84,60	92,64	96,75	Satpol PP, 16 Kecamatan
33	Presentase Konflik Sosial yang Ditangani	%	81,17	100	100	Bakesbangpol
34	Persentase Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat Dan Berpolitik Di Masyarakat	%	-	75	80	

** Target Tahun 2024, berdasarkan target RPD yang telah di perbaiki untuk target yang telah tercapai di tahun 2023

* Target Tahun 2025, diperbaiki berdasarkan hasil fasilitasi RKPD Kab/Kota oleh Bappeda Jabar

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak (impact) yang digunakan untuk menggambarkan aspek/indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah tingkat dampak/impact terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Laju Pertumbuhan PDRB	Persen	5,00	5,66	4,87 - 5,37
2	Tingkat Inflasi	Persen	0,63	1,66	1,14
3	Gini Rasio	Point	0,347	0,341	0,345 - 0,358
4	Presentase Penduduk Miskin	Persen	10,52	10,40	9,05 - 9,99
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,11	6,40	7,49 - 8,16
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	67,01	64,81	65,14
7	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,33	70,45	70,62
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Realisasi Nilai Investasi	Trilyun	2,731	6,5	6,8
2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Ribu	11,787	10.200	1,099
3	Persentase Desa Mandiri	%	47,88	53,94	57,57
4	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Poin	0,48	0,49	0,50
5	Rasio Ketergantungan	%	44,22	51,33	51,31

Sumber RPD 2024-2026, Bappelitbangda

Indikator Kinerja Kunci Tingkat Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil (outcome) merupakan indikator kinerja program yang terdiri dari Program Perangkat Daerah dan Program Prioritas atau Program Pembangunan Daerah terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 6.5 Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat *Outcome*
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2025**

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR				
1	URUSAN PENDIDIKAN				
1	APK SD	%	101,78	101,64	101,19
2	APM SD	%	97,87	99,07	99,53
3	APS (7-12)	%	99,33	100,85	100,43
4	Ruang Kelas SD dalam kondisi baik	%	35,28	35,32	35,49
5	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	52,54	52,7	52,78
6	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	39,24	40,02	40,41
7	Indeks Iklim Keamanan SD	Indeks	2,22	2,22	2,23
8	Indeks Iklim Kebinekaan SD	Indeks	2,12	2,12	2,13
9	Indeks Inklusivitas SD	Indeks	1,95	1,95	1,96
10	APK SMP	%	96,32	96,15	97,74
11	APM SMP	%	88,6	77,49	77,8
12	APS (13-15)	%	96,85	96,79	98,02
13	Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik	%	38,91	38,96	39,15
14	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	63,21	63,53	63,69
15	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	54,07	54,19	54,25
16	Indeks Iklim Keamanan SMP	Indeks	2,31	2,31	2,32
17	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Indeks	2,18	2,18	2,19
18	Indeks Inklusivitas SMP	Indeks	1,91	1,91	1,92
19	Ruang Kelas PAUD dalam kondisi baik	%	66,69	66,77	67,09
20	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	48,55	51,61	53,14
21	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	%	57,02	57,4	57,59
22	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	anak	6,47	6,71	6,83
23	Jumlah Lembaga PKBM, Kursus, dan Pelatihan yang berizin	Lembaga	48	49	49
24	Persentase pemenuhan kurikulum	%	100	100	100
25	Rasio Guru/Murid SD	Rasio	1:25,68	1 : 22,67	1 : 22,94
26	Rasio Pengawas SD	Rasio	1 : 12	1 : 12	1 : 12
27	Rasio Guru/Murid SMP	Rasio	1:21,17	1 : 18,52	1 : 19,16
28	Rasio Pengawas SMP	Rasio	1 : 13	1 : 13	1 : 13
29	Rasio Guru/Murid PAUD	Rasio	1 : 33,15	1 : 15,02	1 : 15,73
30	Rasio Penilik PAUD	Rasio	1 : 60	1 : 60	1 : 61
31	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD, Pendidikan Non Formal yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	16,01	16,03	16,11
32	Peningkatan proporsi Jumlah satuan pendidikan dasar yang mendapatkan minimal akreditasi A	%	26,83	26,86	26,99
33	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	%	100	100	100

2	URUSAN KESEHATAN				
1	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	86	100%	100%
2	Persentase Penduduk Miskin yang menerima bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat	%	99	100%	100%
3	Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	90	90	92
4	Persentase Desa Siaga Aktif	%	55	57,50	60
5	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	70	72	74
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	persentase sambungan rumah tangga yang terlayani akses air minum	%	82,92	83,42	83,92
2	persentase KK yang terlayani sistem air limbah domestik	%	66,00	66,26	66,76
3	Persentase capaian pengelolaan sumber daya air secara optimal	%	60,00	60,51	60,77
4	Persentase panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	%	80	58,42	60,04
5	Persentase perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	%	100	100	100
6	Persentase pengembangan jasa konstruksi sesuai standar	%	98,06	100	100
7	Persentase penataan bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik	%	100	100	100
8	Persentase capaian penataan bangunan dan lingkungannya	%	100	0	100
9	Persentase sarana prasarana permukiman yang dibangun kawasan strategis kabupaten (Berbasis Kawasan)	%	100	100	100
10	Persentase kenaikan panjang drainase yang terbangun	%	65,53	66,89	68,76
11	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	%	100	100	100
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di luar kawasan kumuh	%	-	25	35
2	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di kawasan kumuh di bawah 10 Ha	%	-	25	35
3	Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha	%	-	33,49	66,98
4	Persentase perumahan formal yang melakukan proses serahterima PSU kepada Pemerintah daerah	%	33,33	66,67	83,33
5	Persentase penanganan rumah korban bencana	%	0	33,33	66,67
5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Kategori Indeks	Sedang (0,48)	Sedang (0,49)	Sedang (0,50)
2	Persentase Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	%	79,69	82	84
3	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
4	Persentase peningkatan kapasitas SDM satpol PP dan Satlinmas	%	38,67	77,92	90,24
5	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100	100	100
6	URUSAN SOSIAL				
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	72	100	100
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan program rehabilitasi di Luar Panti Sosial	%	5	33	66

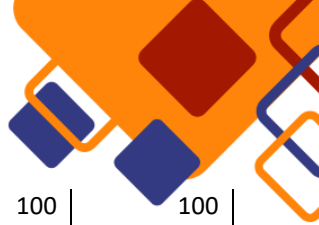
3	Tingkat fasilitasi pendataan fakir miskin untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	37	100	100
4	Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional Yang Mendapatkan Pemeliharaan	%	100	100	100
5	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	%	100	100	100
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1 URUSAN TENAGA KERJA					
1	Tingkat rata-rata capaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tenaga kerja	%	100	-	-
2	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	30,37	30,67	31,52
3	Produktivitas Tenaga kerja	Juta rupiah	45,09	46,76	47,17
4	Presentase pencari kerja yang ditempatkan	%	16,03	16,43	16,81
5	Persentase terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan ke Disnaker	%	100	100	100
2 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Persentase Keluarga yang memiliki kesadaran dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	%	40,50	40,51	40,52
2	Persentase data dan profil gender dan anak	%	78	79	79,8
3	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	%	100	100	100
4	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	%	85	87,5	90
5	Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	%	78	80	82
6	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap anak	%	100	100	100
3 URUSAN PANGAN					
1	Persentase Pangan yang tersertifikasi	%	22,22	27,78	33,33
2	Persentase Desa Tahan Pangan	%	72,73	75,76	78,79
3	Persentase sarana dan prasarana pangan yang terbangun	%	100	100	100
4	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	ton	10	30	39
5	Pencapaian Skore Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	poin	77,3	85,64	88,14
6	Score Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	poin	92,9	77,2	77,6
4 URUSAN PERTANAHAN					
1	Persentase capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan	%	100	100	100
2	Persentase capaian dokumen penetapan daftar masyarakat penerima santunan	%	100	100	0
3	Persentase capaian inventarisasi berupa data subjek, Objek redistribusi tanah dan terkoordinasikan, ter-sinkronisasikan untuk penataan aset dan akses reforma agraria	%	100	100	100
4	Persentase Capaian inventarisasi, kajian Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kosong	%	-	100	100
5	Persentase capaian Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	%	-	100	100
5 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					
1	Presentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	100	42,86	71,43

2	Persentase sampel kualitas air sungai dengan status mutu air baik	%	0	6	6
3	Persentase sampel kualitas udara dengan status mutu udara baik	%	70	70	70
4	Presentase RTH Taman yang terawat	%	86,10	100	100
5	Presentase usaha/industri yang mengelola limbah LB3 sesuai peraturan	%	31,78	37	42
6	Presentase ketaatan industri dan/atau usaha dalam pelaporan pelaksanaan PPLH	%	58,70	62	65
7	Presentase Desa yang telah menerapkan aksi peduli lingkungan	%	100	100	100
8	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH	Entitas	15	15	15
9	Presentase pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	-	100	100
10	Persentase cakupan pengelolaan sampah domestik	%	12	12	12
6	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Persentase Penduduk Memiliki KTP-EI	%	98,7	98,90	99
2	Persentase Identitas Kependudukan Digital	%	0	10	15
3	Persentase Anak Ber KIA	%	25,8	26	28
4	Persentase penerbitan Akta kematian	%	100	50	55
5	Persentase penduduk ber akta kelahiran 0-18 tahun	%	89,43	90	92
6	Persentase Lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	%	57	50	60
7	Profil Kependudukan yang terselesaikan	Dokumen	1	1	1
7	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Presentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	%	0	33,33	66,67
2	Persentase Kerjasama Desa yg Terfasilitasi	%	32,31	33,33	66,67
3	Percentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Tertib	%	0	33,33	66,67
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%	100	100	100
8	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	100	100	100
2	TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2,24	2,23	2,22
3	Prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)	%	70,73	70,80	71,00
9	URUSAN PERHUBUNGAN				
1	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	%	67,44	97,92	98,42
2	Persentase armada angkutan ASDP yang terkelola	%	81,48	96,25	98,13
10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE	%	100	100	100
2	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Yang Terkelola	%	100	100	100
11	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
1	Persentase Koperasi aktif	%	66,90	67,02	68,07
2	Persentase Koperasi Sehat	%	1,50	48,40	50,00
3	Persentase SDM Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan	%	0,43	0,45	0,54
4	Persentase Koperasi yang mendapatkan fasilitasi penguatan kelembagaan	%	29,00	40,00	50,00
5	Presentase Usaha mikro yang diberdayakan	%	20	20	22,22

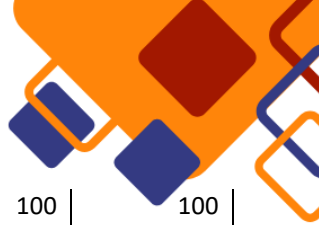
6	Presentase Usaha Mikro yang dikembangkan	%	16,6	20	21,43
12	URUSAN PENANAMAN MODAL				
1	Persentase ketersediaan dokumen pengembangan iklim penanaman modal	%	0	100	100
2	Persentase Promosi Penanaman Modal	%	100	100	100
3	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	KBLI	782	882	982
4	Persentase data dan informasi penanaman modal yang dimanfaatkan	%	100	100	100
5	Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai SOP	%	90,49	84	85
13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	Persentase Layanan Kepemudaan	%	10,24	10,30	10,35
2	Persentase Pemuda yang Aktif Pada Organisasi Kepramukaan	%	10	5	5
3	Indeks ketersediaan ruang terbuka dan sarana olahraga	poin	0,59	0,61	0,63
4	Indeks SDM Keolahragaan	poin	0,33	0,34	0,36
5	Indeks Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	poin	0,34	0,36	0,38
6	Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi	Jumlah	724	50	75
14	URUSAN STATISTIK				
1	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	poin	2	2	3
15	URUSAN PERSANDIAN				
1	Tingkat kematangan penerapan manajemen Keamanan Informasi Pemerintah	poin	2	2	3
16	URUSAN KEBUDAYAAN				
1	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang di lestarikan	%	29,96	36,14	42,22
2	Persentase Pelaku Kesenian Tradisional yang ditingkatkan kompetensinya	%	0	8,58	12,86
3	Persentase pembinaan sumber daya manusia/lembaga dan informasi sejarah	%	34	51	68
4	Persentase Objek Cagar Budaya yang dilestarikan	%	35	50	50
17	URUSAN PERPUSTAKAAN				
1	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	47,18	52	55
18	URUSAN KEARSIPAN				
1	Nilai pengawasan kearsipan eksternal	Nilai	60,49	63,24	66,67
2	Nilai pengawasan kearsipan internal	Nilai	33,39	50,21	51,49
3	Tingkat pemenuhan penyelamatan dan perlindungan arsip	Level	0	0	2
4	Fasilitasi perizinan penggunaan arsip	SOP	0	0	1
	URUSAN PILIHAN				
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Peningkatan Jumlah Nelayan Tangkap yang terdaftar	%	-	25	30
2	Peningkatan Jumlah Unit usaha budidaya dan pembenihan perikanan yang menerapkan CBIB/CPIB	Unit	20	30	30
3	Persentase Peningkatan Kesadaran Nelayan terhadap Penangkapan Ikan yang Baik	%	-	5	5
4	Persentase pengolahan ikan yang menerapkan SSOP	%	38,46	42,31	47,44
2	URUSAN PARIWISATA				
1	Persentase Desitinasi Wisata yang dikembangkan	%	16,67	33,33	50
2	Persentase Jumlah kunjungan Wisatawan	%	12,18	12,86	13,61
3	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan dan yang Akan Didaftarkan HAKI	%	5	9,09	18,18
4	Persentase sumber daya manusia pariwisata yang ditingkatkan kompetensinya	%	17,39	34,78	52,17

5	Persentase sumber daya manusia ekonomi kreatif yang ditingkatkan kompetensinya	%	21,14	29,27	37,40
6	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi sertifikasi profesi dan kompetensinya	%	8,13	24,39	43,90
3	URUSAN PERTANIAN				
1	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun	%	100	100	100
2	Persentase Prasarana Peternakan dalam kondisi Baik	%	100	100	100
3	Produksi pertanian tanaman pangan	ton	365.583	365.883	366.183
4	Produksi pertanian tanaman hortikultura (sayuran dan buah"an)	ton	82.394	82.894	83.394
5	Produksi pertanian tanaman hortikultura (tanaman hias)	tangkai	#####	#####	#####
6	Produksi pertanian tanaman perkebunan	ton	9.119	9.409	9.659
7	Persentase Kelahiran ternak	%	82,68	83	83,5
8	Presentase penanggulangan bencana pertanian	%	-	90	90
9	Presentase penanggulangan wabah penyakit ternak	%	100	100	100
10	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi perizinan usaha	%	-	75	75
11	Presentase usaha peternakan yang telah dibina dan diawasi	%	80	85	90
12	Persentase peningkatan SDM penyuluh pertanian	%	64,29	76,79	89,29
13	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	15,95	16,73	17,59
14	Persentase kelompok peternak yang naik kelas	%	15	16	17,50
15	Persentase Cakupan pelayanan kesehatan hewan	%	80,0	80	85
4	URUSAN PERDAGANGAN				
1	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	%	26	50	60
2	Nilai ekspor barang dan jasa	Milyar	2.260	2.500	2.700
3	Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan	%	2,39	10	10
4	Persentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan	%	31,79	33	33
5	Presentase pelaku usaha terfasilitas dalam pemasaran produk dalam negeri	%	100	100	100
6	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Nilai	-	10	10
5	URUSAN INDUSTRI				
1	Persentase Pengembangan IKM	%	27	45	50
2	Persentase industri yang berizin	%	58,26	63,36	68,46
3	Persentase industri yang terintegrasi ke dalam SIINAS	%	15,38	30,38	45,38
6	URUSAN TRANSMIGRASI				
1	Persentase calon transmigran yang di berangkatkan	%	0	16	32
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Persentase Laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	%	100	85	87
2	Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	%	85	87	90
3	Persentase Perda yang ditetapkan	%	100	85	88
4	Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	%	80	85	87
5	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	%	80	85	90
6	Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan policy brief	%	100	87	90

7	Center of excelent pengadaan barang jasa	%	100	85	90
8	Indeks Kepuasan Layanan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	indeks	81,98	84,75	85,25
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	UNSUR PERENCANAAN				
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD	%	100	100	100
2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD	%	100	100	100
2	UNSUR KEUANGAN				
1	Persentase dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun sesuai standar dan peraturan yang berlaku	%	100	100	100
2	Persentase pengelolaan aset daerah	%	85,17	87	88
3	Persentase peningkatan pajak daerah	%	29,64	3	5
3	UNSUR KEPEGAWAIAN				
1	Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai	103	106,5	110
2	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Nilai	25	27,5	30
3	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	Nilai	97,5	102,5	110
4	UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
1	Nilai Aspek Pengembangan Karir	Nilai	62,5	67,5	70
5	UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	39,07	53,6	53,8
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Nilai Maturitas SPIP Pemda	Level	2,4	3	3
2	Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai/ Katagori	B (68,59)	71 (BB)	72 (BB)
3	Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti	%	68	70	72
UNSUR KEWILAYAHAN					
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100
2	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100
3	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100
4	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100
5	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100
6	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100
7	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100
8	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100
9	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100
10	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100
11	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100



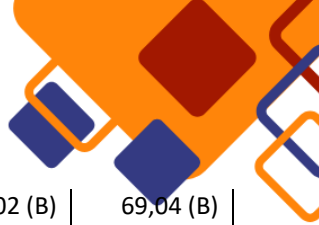
12	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100
13	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100
14	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100
15	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100
16	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100
17	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100
18	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100
19	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100
20	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100
21	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100
22	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100
23	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100
24	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100
25	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100
26	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100
27	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100
28	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100
29	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100
30	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100
31	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100
32	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100
33	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100
34	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100
35	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100
36	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100
37	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100



38	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100
39	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100
40	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100
41	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100
42	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100
43	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100
44	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100
45	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100
46	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100
47	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100
48	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100
49	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100
50	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100
51	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100
52	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100
53	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100
54	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100
55	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100
56	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100
57	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100
58	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100
59	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100
60	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100
61	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	%	100	100	100
62	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	%	100	100	100
63	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100

64	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	%	100	100	100
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
1	Persentase fasilitasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	-	75	80
2	Persentase fasilitasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	80,17	80	85
3	Persentase fasilitasi Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	-	65	75
4	Persentase Cakupan Sosialisasi dan Pembinaan Terhadap Organisasi Masyarakat	%	-	86	90
5	Persentase tingkat pemahaman politik di masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	%	77,46	60	70
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					
1	Nilai SAKIP BAPPELITBANGDA	Nilai/ Predikat	67,96 (B)	72 (BB)	72,50 (BB)
2	Nilai SAKIP ITDA	Nilai/ Predikat	70,06 (BB)	72 (BB)	75 (BB)
3	Nilai SAKIP DISKOMINFO	Nilai/ Predikat	BB (70.20)	70,50 (BB)	71 (BB)
4	Nilai SAKIP BKAD	Nilai/ Predikat	64,81 (B)	70,10 (BB)	70,20 (BB)
5	Nilai SAKIP BAPENDA	Nilai/ Predikat	68,51 (B)	68,55 (B)	68,61 (B)
6	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai/ Predikat	74,85 (BB)	75,00 (BB)	76,00 (BB)
7	Nilai SAKIP SETDA	Nilai/ Predikat	70,16 (BB)	70,50 (BB)	70,60 (BB)
8	Nilai SAKIP SETWAN	Nilai/ Predikat	70,50 (BB)	71,15 (BB)	71,55 (BB)
9	Persentase Layanan Keuangan, Kesejahteraan dan Administrasi DPRD	%	0	100	100
10	Nilai SAKIP DISARPUS	Nilai/ Predikat	61,21 (B)	67 (B)	68,87 (B)
11	Nilai SAKIP DISDUK	Nilai/ Predikat	74,26 (BB)	76 (BB)	78 (BB)
12	Nilai SAKIP SATPOL PP	Nilai/ Predikat	64,61 (B)	65,10 (B)	66,00 (B)
13	Nilai SAKIP DISDAMKAR	Nilai/ Predikat	63,21 (B)	65 (B)	67 (B)
14	Nilai SAKIP KESBANGPOL	Nilai/ Predikat	63,26 (B)	68 (B)	70 (BB)
15	Nilai SAKIP DISDIK	Nilai/ Predikat	69,16 (B)	69,40 (B)	69,60 (B)
16	Nilai SAKIP DINKES	Nilai/ Predikat	62, 11 (B)	62,20 (B)	62,30 (B)
17	Nilai SAKIP BPBD	Nilai/ Predikat	68,85 (B)	68,85 (B)	69,85 (B)

18	Nilai SAKIP DINSOS	Nilai/ Predikat	62,11 (B)	62,30 (B)	62,35 (B)
19	Nilai SAKIP DISPORA	Nilai/ Predikat	72,76 (BB)	78,01 (BB)	78,05 (BB)
20	Nilai SAKIP DISNAKER	Nilai/ Predikat	70,65 (BB)	75,35 (BB)	77,65 (BB)
21	Nilai SAKIP DP2KBP3A	Nilai/ Predikat	71,86 (BB)	74 (BB)	76 (BB)
22	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai/ Predikat	70,41 (BB)	70,45 (BB)	70,50 (BB)
23	Nilai SAKIP DISPARBUD	Nilai/ Predikat	60,16 (B)	61 (B)	62 (B)
24	Nilai SAKIP DPUPR	Nilai/ Predikat	70,5 (BB)	70,8 (B)	71 (B)
25	Nilai SAKIP DISPERKIM	Nilai/ Predikat	66,6 (B)	68,61 (B)	70 (B)
26	Nilai SAKIP DISHUB	Nilai/ Predikat	61,21 (B)	71 (BB)	75 (BB)
27	Nilai SAKIP DLH	Nilai/ Predikat	66,81 (B)	70 (B)	71 (BB)
28	Nilai SAKIP KEC. LEMBANG	Nilai/ Predikat	61,21 (B)	67,26 (B)	69,28 (B)
29	Nilai SAKIP KEC. PARONGPONG	Nilai/ Predikat	57,21(CC)	62 (B)	65 (B)
30	Nilai SAKIP KEC. CISARUA	Nilai/ Predikat	59,41 (CC)	65 (B)	67,25 (B)
31	Nilai SAKIP KEC. CIKALONGWETAN	Nilai/ Predikat	60,91 (B)	62 (B)	63,5 (B)
32	Nilai SAKIP KEC CIPEUNDEUY	Nilai/ Predikat	69,16 (B)	70,00 (B)	72,00 (BB)
33	Nilai SAKIP KEC NGAMPRAH	Nilai/ Predikat	65,26 (B)	67,26 (B)	69,26 (B)
34	Nilai SAKIP KEC. CIPATAT	Nilai/ Predikat	59,85 (CC)	61 (B)	62,22 (B)
35	Nilai SAKIP KEC. PADALARANG	Nilai/ Predikat	67,80 (B)	68 (B)	68,5 (B)
36	Nilai SAKIP KEC BATUJAJAR	Nilai/ Predikat	58,51 (CC)	62,76 (B)	67,01 (B)
37	Nilai SAKIP KEC. CIHAMPELAS	Nilai/ Predikat	58,66 (CC)	60,00 (CC)	61,00 (B)
38	Nilai SAKIP KEC. CILILIN	Nilai/ Predikat	59,40 (CC)	59,60 (CC)	59,80 (CC)
39	Nilai SAKIP KEC. CIPONGKOR	Nilai/ Predikat	52,50 (CC)	63,50 (B)	65,70 (B)
40	Nilai SAKIP KEC. RONGGA	Nilai/ Predikat	60,31 (B)	60,32 (B)	60,33 (B)
41	Nilai SAKIP KEC GUNUNGHALU	Nilai/ Predikat	58,71 (CC)	62,45 (B)	64,50 (B)
42	Nilai SAKIP KEC SINDANGKERTA	Nilai/ Predikat	54,41 (CC)	62 (B)	63 (B)
43	Nilai SAKIP KEC SAGULING	Nilai/ Predikat	54,31 (CC)	60,5 (B)	61 (B)



44	Nilai SAKIP DPMD	Nilai/ Predikat	67,01 (B)	68,02 (B)	69,04 (B)
45	Nilai SAKIP DISKOPUKM	Nilai/ Predikat	60,01 (B)	64,50 (B)	66,50 (B)
46	Nilai SAKIP DISPERINDAG	Nilai/ Predikat	60,46 (B)	63 (B)	66 (B)
47	Nilai SAKIP DKPP	Nilai/ Predikat	73,51/ BB	76,01/ BB	78,51/ BB
48	Nilai SAKIP DISPERNAKAN	Nilai/ Predikat	69,16 (B)	70 (B)	72 (BB)

Sumber RPD 2024-2026, Bappelitbangda

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026, dan RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 - 2029. Bagian yang sangat penting dalam suatu penyusunan rencana pembangunan daerah adalah prioritas pembangunan. Prioritas Pembangunan Tahun 2025 merupakan hasil dari pengejawantahan dari sasaran Misi RPD Tahun 2025 yang selanjutnya dipengaruhi oleh Isu Strategi Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut disusunlah sasaran, indikator dan target pembangunan. Untuk mencapai target pembangunan maka disusunlah strategi dan kebijakan yang jitu serta inovasi-inovasi yang mendukung kemajuan dan kemudahan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya dari kebijakan-kebijakan dalam operasionalnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan prioritas serta unggulan yang dalam implementasinya tetap memperhatikan RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 dan sesuai dengan tema pembangunan di pusat dan daerah yakni dalam ranah peningkatan ekonomi yang inklusif. Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah maka disusunlah program pembangunan daerah beserta kegiatan-kegiatan dan inovasi inovasi yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program prioritas dan kegiatan prioritas serta unggulan Tahun 2025.

Sebagai penutup, dokumen RKPD ini pada akhirnya akan menjadi pedoman dasar penyusunan rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) serta rancangan APBD kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025, agar setiap Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.

Bandung Barat, 9 Juli 2024
BUPATI BANDUNG BARAT,
